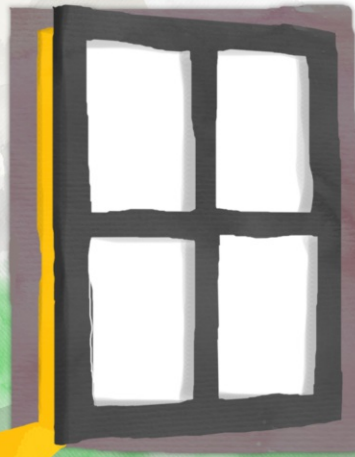


Dr. H. Abdul Karim, M.Pd



PARADIGMA PERUBAHAN

*Menuju Revitalisasi Pendidikan &
Sosial Keagamaan*

Sunnatullah kehidupan yang ajeg adalah perubahan. Karena itu, jika seseorang, suatu bangsa, atau negara ingin tetap eksis, maka tidak ada pilihan lain, kecuali ia harus memiliki kompetensi dan keunggulan kompetitif untuk mampu memanej perubahan. Dan buku ini mencoba menawarkan gagasan paradigma perubahan itu sendiri.

Prof. H. Ahmad Rofiq, MA.
(MUI Jawa Tengah dan Direktur Pasca UIN Walisongo Samarang)

PARADIGMA PERUBAHAN

Menuju Revitalisasi Pendidikan & Sosial Keagamaan

Dr. H. Abdul Karim, M.Pd

PARADIGMA PERUBAHAN, *Menuju Revitalisasi Pendidikan & Sosial Keagamaan*

Penulis: Dr. H. Abdul Karim, M.Pd

Editor: Andi Syarqowi

Tata Bahasa: Aam

Tata Letak: Dany Dwia

Sampul: Dany Dwia

Diterbitkan Oleh:

Kataba Group

Jl. Lapangan Olah Raga Ds. Waturoyo Margoyoso Pati

Rt: 01/04 Depan Masjid Baitul Izzah

Telp: 082276951949/082313222876 (WA)

E-mail: katabakreatif16@gmail.com

Fb. Kataba.

Cetakan 1, Septembaer 2017

Pati,

viii + ; 16 x 23 cm

ISBN: 978-602-50213-0-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	5
MENJAWAB PERUBAHAN DENGAN REVITALISASI PENDIDIKAN - AHMAD ROFIQ	7
BAB I	
AGAMA, NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN	9
Bela Negara dalam Perspektif Keberagamaan di Indonesia	
Islam dan Wacana Kebangsaan	
Membangun Kesadaran Berzakat	
Membangun Tradisi Agama Berbasis Transformasi Budaya	
Peran Agama dalam Pembinaan Mental & Menangkal Radikalisme	
BAB II	
GELIAT NAHDLATUL ULAMA	33
Kepemimpinan dalam Ormas NU	
Metode Pengembangan Bahtsul Masail Diniyah	
Revitalisasi Peran Kawula Muda Nu dalam Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Aswaja	
BAB III	
POLITIK SEBAGAI ETIKA SOSIAL	46
Ambiguitas Kebijakan Otonomi Daerah dan MBS	
Membangun Partisipasi Politik Warga	
Menuju Pilkada Demokratis	
Optimalisasi Peran Politik Masyarakat	
BAB IV	
PENGEMBANGAN SDM DALAM PERSPEKTIF ISLAM	79
Konsep Remaja Ideal	
Pengembangan sumber daya Manusia di Era Global	
Peran Ormas Islam dalam Meningkatkan SDM	
Problematika dan Strategi Dakwah Islam	
Upaya Meningkatkan SDM Melalui Otonomi Pendidikan	

BAB V	
MEMBANGUN BUDAYA LITERASI DAN BERFIKIR KRITIS	108
Format Berfikir Kritis	
Membangkitkan Potensi Kreatif & Menulis Produktif	
Mengembangkan Berfikir Kreatif Melalui Membaca dengan Model <i>Mind Map</i>	
BAB VI	
REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PESANTREN	130
Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan	
Konsistensi Pendidikan Pesantren	
Menakar Keberhasilan Manajemen Pendidikan Pesantren	
Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam	
Pendidikan Islam Menuju Insan kamil	
Perilaku Soliter dalam Proses Pembelajaran	
Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB VII	
GENDER DAN KONSEP KELUARGA BAHAGIA	182
Gender dalam Perspektif Islam	
Konsep Keluarga Sakinah	
Partisipasi Perempuan dalam Mengembangkan Pendidikan Non Formal	
DAFTAR PUSTAKA	195
BIODATA PENULIS	199

Pengantar Penulis

Berawal dari dorongan teman-teman, baik teman seorganisasi maupun teman-teman dari luar struktur organisasi dan sama-sama seideologi, adik-adik dari alumni kegiatan pelatihan keorganisasian yang kebetulan penulis menjadi salah satu nara sumbernya, serta dari kalangan yang simpati, mereka sama-sama serujuk untuk mendorong penulis agar mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang pernah tersampaikan di forum kajian keilmuan. Forum tersebut bisa dari kegiatan seminar, diskusi pengembangan organisasi, pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang bertujuan untuk memotivasi peserta melakukan perubahan berfikir, bersikap dan berkarya yang bermanfaat untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*human development and empowerment*).

Tersusunlah buku yang ada di tangan pembaca ini dalam bentuk bungai rampai dengan harapan ada manfaat: *pertama*, dapat memberikan pengetahuan dasar terkait pengembangan masyarakat dengan berbagai tipologinya. *Kedua*, membantu mengembangkan paradigma berfikir dari mana harus melakukan pengembangan masyarakat yang bertujuan membantu dalam mengungkap berbagai potensi yang ada pada mereka. *Ketiga*, membantu dalam menelaah berbagai permasalahan sosial berikut faktor-faktor pemicu sekaligus dapat merumuskan berbagai alternatif pemecahan serta melakukan analisis tindak lanjut. Dari sini setidaknya dapat memberikan gambaran para pembaca bagaimana sesungguhnya melakukan proses perubahan di masyarakat.

Dengan penuh harap, buku ini dapat bermanfaat bagi para aktivis atau penggerak organisasi, pekerja lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pembaca lain untuk menggali konsep dan mengembangkannya terkait dengan upaya perubahan masyarakat. Berbekal dengan fakta dan konsep yang ada serta teori secukupnya, dapat kiranya menjadi dasar menyusun pendekatan untuk mengenali problem masyarakat dan menemukan solusinya. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan masyarakat (*human empowering*) dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kondisi masing-masing.

Dalam buku ini sudah tentu terdapat kekurangan, mengingat masing-masing tulisan yang terkumpul memiliki latar belakang momentum yang berbeda dan terpisah-pisah, namun tetap memerhatikan kesesuaian isi dan konteks, sehingga nyaman dibaca dan dipahami. Untuk penyempurnaan, sudilah para pembaca memberikan kritik dan saran agar selanjutnya kekurangan yang ada dapat diperkecil sehingga memberikan kesempurnaan dan nilai manfaat buku kian bertambah.

Atas tersusunnya buku ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah, semoga membawa manfaat bagi diri pribadi dan para pembaca. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua anggota keluarga dan teman-teman, yang telah memberi motivasi untuk berkarya. Terlebih ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

Mas Niam, Mas Andi yang telah mengorbankan banyak waktu untuk mendesain beberapa tulisan penulis, sehingga menjadi sebuah rangkaian dalam bentuk buku. Semoga budi baik mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amal baik yang memberikan manfaat untuk semua, amin.

Pati, Agustus 2017
Penulis

Menjawab Perubahan Dengan Revitalisasi Pendidikan

Ahmad Rofiq

MUI Jawa Tengah dan Direktur Pasca UIN Walisongo Semarang

Hukum alam (sunnatullah) kehidupan ini yang ajeg adalah perubahan. Karena itu, jika seseorang, suatu bangsa, atau negara ingin tetap eksis, maka tidak ada pilihan lain, kecuali ia harus memiliki kompetensi dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) untuk mampu memenej perubahan itu sendiri. Karena itu, pendidikan sebagai bagian dari ikhtiar manusia menampung dan memahami ilmu Allah, tentu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, harus selalu direvitalisasi. Revitalisasi secara terus menerus dan berkelanjutan (sustainable) terhadap lembaga pendidikan, agar tujuan dan keluaran pendidikan (learning output dan learning outcome) dapat memenuhi harapan, yakni terbentuknya insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan, dan keunggulan kompetitif, dan siap berkompetisi di pentas global.

Buku yang berjudul “Paradigma Perubahan : Menuju Revitalisasi Pendidikan dan Sosial Keagamaan” yang ditulis oleh kolega dan kawan saya Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. ini, mencoba menawarkan gagasan itu. Tampaknya, perubahan menurut penulis buku ini, sangat terkait dengan paradigma dan kerangka pemikiran seseorang, di dalam menjawab berbagai perubahan. Buku yang tampaknya, lebih tepat disebut “bunga rampai”, karena lebih merupakan kompilasi dari berbagai tulisan yang berasal dari makalah-makalah yang dibahas dalam seminar, diskusi, dan lain-lain, maka tentu sistematisasinya berbeda dengan buku dasar untuk para mahasiswa. Coverage isi dan isu yang diusung dalam buku ini pun mencakup berbagai hal, mulai dari isu agama, nasionalisme dan kebudayaan, geliat Nahdlatul Ulama, politik sebagai etika sosial, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif Islam, membangun budaya literasi dan berfikir kritis, gender dan konsep keluarga bahagia, dan revitalisasi pendidikan dan pesantren.

Para Ulama merumuskan kaidah yang sangat terkenal “*al-Islamu shalihun li kulli al-zaman wa al-makan*” artinya “Islam itu senantiasa serasi dengan setiap waktu dan tempat”. Tentu ini membutuhkan kerja dan kinerja intelektual yang selalu responsif dan paradigmatis, agar masyarakat tidak kehilangan atau mengalami kekosongan panduan hukum. Perubahan yang merupakan sunnatullah, dan akan terus terjadi seiring dengan keberadaan dunia ini, maka para Ulama pun memberikan guideline, dengan kaidah “*al-Muhafadhatu ala al-Qadimil al-Sholih Wa al-Akhdzu bi al-Jadidi al-ashlah*”

artinya “memelihara (nilai-nilai) lama yang baik dan mengambil (nilai-nilai) baru yang lebih baik”. Selamat membaca buku ini, semoga Anda mendapatkan tambahan “amunisi” atau “vitamin” dalam menjalani, memenej perubahan, dan

sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, agar setiap perubahan yang terjadi di dunia ini, masih terus berada dalam “genggaman” dan “kendali” Anda, dan tidak menjadi jebakan yang dapat “merobohkan” mimpi dan obsesi Anda sebagai pemikir dan pembaharu di negeri ini, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi Anda masing-masing. Allah a’lam bi al-shawab.

BAB I

AGAMA, NASIONALISME DAN KEBUDAYAAN

BELA NEGARA DAN SIKAP KEBERAGAMAAN DI INDONESIA

Berawal dari pemahaman kebebasan berkehendak, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan apa pun dengan dalih sesuai hak asasi dan demokrasi, termasuk di dalamnya menjalankan agama, baik secara individu maupun sosial. Siapa pun, termasuk negara tidak memiliki hak untuk membatasi, apa lagi memaksa warganya dalam menjalankan syariat agama, sejauh syariat itu sesuai kaidah dan sumber yang dipedomani.

Jika pemahaman seperti itu yang terjadi, maka masyarakat tidak pernah merasakan hidup dalam kedamaian, karena masing-masing umat beragama berlomba-lomba mengekspresikan syariat berdasarkan keyakinan tanpa batas, sekalipun mengganggu umat beragama lain. Masing-masing beralasan, bahwa perilaku beragama harus ditingkatkan kualitasnya dengan dalih untuk merealisasikan sebagai manusia yang “*Pancasilais*” yang pada akhirnya dapat membantu mempertahankan kesatuan negara sebagai realisasi dari bentuk “bela negara.”

Permasalahan yang sesungguhnya perlu disadari adalah tidak adanya indikator yang jelas terkait dengan aksi bela negara dalam beragama. Pengamalan agama mengacu pada sejauh mana pemaknaan terhadap ajaran agama yang diyakini, sehingga dalam mengekspresikannya sering ke dalam bentuk amalan nyata sejauh mungkin dapat dilakukan namun melahirkan benturan sosial. Dan benturan itu akan semakin kuat, manakala dipicu hal-hal berikut:

Pertama, lahir suatu kebijakan pemerintah yang dalam rumusannya kurang memperhatikan nilai-nilai agama, dalam kenyataan sering hanya melihat dari aspek yang menguntungkan (*profit oriented*). Di sisi lain, jika muncul permasalahan, masyarakat langsung mempertanyakan mana peran agama (umat). Hal ini mengisyaratkan bahwa agama seolah-olah menjadi yang paling bertanggung jawab untuk mengembalikan setiap terjadi kekacauan (*chaos*). Dari sini, terlihat pentingnya memahami setiap tindakan (kebijakan) secara holistik, termasuk kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari tahapan persiapan dan perencanaan, implementasi proses kegiatan di lapangan, hingga pengawasan serta semua bidang lain yang terkait.

Kedua, umat (berkeinginan) memposisikan agama sebagai ideologi politik (kekuasaan). Jika ini yang terjadi, maka negara tidak pernah memperoleh kenyamanan, karena agama akan senantiasa berhadapan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dampaknya fanatisme beragama akan bersinggungan dengan pemahaman Pancasila yang kerap kali menimbulkan sensitivitas yang negatif. Konflik selalu muncul oleh kekuatan yang menginginkan agama sebagai ideologi negara. Seharusnya menempatkan agama sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuasaan.

Ketiga, sikap dominasi berlebihan atas kekuatan kelompok mayoritas yang mengabaikan pluralitas. Sehingga yang terjadi adalah peniadaan peran kelompok minoritas dan di sisi lain terjadi penguatan sepihak oleh kekuatan besar. Konflik muncul karena tindakan tidak mencerminkan bagaimana memperlakukan pihak lain disaat tidak dalam kesepakatan. Ini merupakan hal mendasar dalam memahami pluralisme.

Tiga hal tersebut menjadi sangat bermakna untuk menciptakan negara ini memiliki warga yang cinta tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi dasar terbentuknya sikap bela negara. Permasalahannya adalah bagaimana agar hal yang pertama dapat menjadi tugas pemerintah yang berkuasa untuk mengimplementasikan dengan baik, dan yang kedua dapat menjadi tanggung jawab umat untuk mengendalikan, sedangkan yang ketiga merupakan tugas bagi keduanya untuk menjaga keharmonisan hubungan bagi semua golongan.

Kecenderungan Sikap Beragama

Salah satu aspek paling fundamental yang dimiliki warga adalah kebebasan beragama. Dalam realisasinya, beragama terbagi menjadi empat aspek (Kholiludin, 2009), yakni kebebasan nurani (*liberty of conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*) dan kebebasan menginstitusikan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Dari keempat wilayah itu, aspek pertama memiliki sifat absolut, merupakan bagian dari aspek internal beragama yang paling asasi. Selebihnya merupakan aspek eksternal dalam prakteknya bersentuhan dengan ranah sosial.

Dikatakan paling asasi karena aspek internal menjadi penggerak setiap pribadi menurut keyakinan untuk mencapai keberadaan tertinggi dalam kehidupan (*ultimate meaning of life*). Untuk menunjukkan kualitas keberagamaan, aspek internal akan berupaya mempengaruhi setiap individu dalam membentuk aksi yang akan berinteraksi dengan semua bidang kehidupan sosial. Semakin tinggi keyakinan dan motivasi internal beragama, makin kuat dan beragam pengamalan seseorang dalam menjalankan agama, karena hal seperti itu (aspek pengamalan) merupakan bentuk ketaatan seseorang dalam melaksanakan syariat.

Terkait dengan kebebasan beragama, apa yang secara umum dipahami sebagai sebuah kebebasan akan dilakukan juga kebebasan dalam membentuk perilaku beragama. Karena wilayah cakupan sangat luas dan beragam. Maka kebebasan itu kerap kali menimbulkan benturan dengan formasi lain. Jika yang berbenturan sama-sama mengandung unsur fundamental dengan institusi kenegaraan, seperti keinginan “menginstitusionalisasikan” agama ke dalam kekuasaan, akan melahirkan konflik besar antar beberapa komponen negara yang sudah pasti mengganggu keutuhan bangsa.

Semangat kebebasan beragama tidak senantiasa harus mengikuti keinginan kuat (nurani) beragama, karenan beberapa alasan. *Pertama*, agama tidak

hanya menyangkut keyakinan individual, tetapi di dalamnya termasuk manifestasi dari keyakinan seperti hidup bersosial; *kedua*, agama tidak memaksakan harus menjadi sebuah kekuatan yang terlembagakan sebagai pengatur kekuasaan (dasar negara); dan *ketiga*, agama menghormati perbedaan dan keanekaragaman (pluralisme) serta dinamika perkembangannya.

Agama dalam aksinya senantiasa mencari kemaslahatan, walaupun yang terjadi adalah kekecewaan, ada di antara sistem dalam proses itu terdapat unsur yang tidak sejalan dengan anjuran agama. Pada akhirnya yang diperoleh adalah pengambilan manfaat secara sepihak yang justru akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di pihak lain.

Beragama dan Dinamika Perubahan

Kompleksitas persolan yang dihadapi umat manusia semakin banyak, hal ini menuntut strategi pemahaman tertentu agar agama dapat menjawab berbagai problem yang muncul. Bentuk pemahaman itu adalah menafsirkan agama (sumber-sumber hukumnya) berdasarkan konteksnya, bukan memahami semata mengacu pada teksnya. Dengan cara seperti itu, sifat universalitas teks akan senantiasa terjaga, selain itu juga dalam pemberlakuannya akan lebih menunjukkan sifat relevan dengan obyek dan situasi yang melingkupinya, sehingga terhindar dari konflik beragama.

Pemahaman yang hanya berdasarkan teks, akan lebih berpeluang memunculkan permasalahan yang dapat memicu konflik. Beberapa alasan yang mendasari antara lain, *pertama*, kelahiran teks dalam agama senantiasa berhubungan dengan sebab-sebab melandasinya terkait dengan aturan atau hukum yang dilahirkan; *kedua*, teks agama tersusun melalui bahasa di dalamnya selalu tersembunyi semacam motif serta bias-bias tertentu, di sisi lain terdapat keterbatasan pemahaman terhadap teks itu sendiri; *ketiga*, terdapat perubahan cepat pada obyek yang terkena aturan atau ketentuan hukum berdasarkan kajian teks agama.

Alasan itu mendorong untuk mencari pertautan esensi agama dengan berbagai variabel lain untuk menghasilkan aturan hukum yang lebih akomodatif sejauh tidak menyimpang dari ketentuan pokok. Hasil akhir yang didapat, agama akan mampu menjaga kesinambungan hubungan kemanusiaan berdasar sifat-sifat humanis serta jauh dari kekerasan. Untuk mewujudkannya, dapat ditempuh dengan menginterpretasi ulang teks-teks agama dengan konteksnya yang baru, memverifikasi secara mendasar terhadap mana ajaran yang pokok dan yang bersifat pengembangan dengan tidak mengingkari kesepakatan. Dan yang lebih penting untuk dipahami, menempatkan ajaran agama sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Cara berpikir seperti ini akan dapat menciptakan kondisi yang kondusif, tercipta hubungan yang baik antara umat dengan pemerintah, dan antar umat itu sendiri baik yang seagama maupun dengan lain agama.

Agama dan Pembelaan Negara

Sungguhpun agama tidak mengharuskan menjadi lembaga kekuasaan, tapi pada kenyataannya menjadi sandaran dalam pembentukan etika dan moral bangsa. Selain itu, agama juga menjadi pengendali hampir setiap terjadi permasalahan. Hal ini mengisyaratkan adanya keniscayaan untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, agama dijadikan sebagai telaah kritis terhadap gerak perkembangan dan dinamika sosial melalui fungsi agama sebagai kekuatan pembebas bagi kecenderungan berbagai praktik sosial yang bebas dari nilai.

Terkait dengan bela negara sejatinya dipahami sebagai kegiatan warga disemua aspek kehidupan sesuai dengan profesinya masing-masing, agama menurut sejarah bangsa ini sesungguhnya telah banyak membuktikan perannya dalam pembelaan negara melalui berbagai even. Berbagai kebijakan yang diambil oleh tokoh-tokoh agama terdahulu membuktikan tingginya kepedulian terhadap pembelaan negara untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Permasalahan muncul, seperti di era sebelum tahun 2000-an, karena agama sering ditempatkan penguasa dalam posisi yang tidak proporsional. Eksploitasi agama, intervensi, dan bahkan menjadikannya alat legitimasi politik dan kekuasaan telah memunculkan ketegangan antara penguasa dan masyarakat, sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan.

Dari apa yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa agama dapat menjadikan kehidupan bangsa nyaman dan damai, manakala agama dapat diperankan sesuai esensinya, negara memberikan perhatian serta pendampingan yang kondusif, dan umat menjalankannya sesuai batasan yang diserukan. Jika semua pihak menjalankan secara proporsional dan tanggung jawab, keutuhan bangsa akan tetap terjaga.

ISLAM DAN WACANA KEBANGSAAN

Sebagai produk, Islam dan kebangsaan memang tidak bisa dipertemukan, Islam ciptaan Allah sedangkan kebangsaan konsep hasil pemikiran manusia. Namun, secara substansial sebenarnya tidak perlu ada pemisahan antara Islam dan kehidupan berbangsa. Sebagai sumber ajaran dan pandangan hidup (*way of life*), Islam (al-Qur'an dan Sunnah) telah memberikan pedoman normatif dan teknis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara, tak terkecuali juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Teori dan konsep tata cara berperilaku dalam melakukan tindakan semua dapat dipenuhi dari kedua sumber tersebut, tergantung ketajaman analisis dalam memahami teks-teks agama dan *setting* sosial budaya yang mempengaruhinya. Jika rujukan dari semua tindakan itu dapat terpenuhi, Islam benar-benar akan memberi rahmat bagi umat manusia.

Fenomena Islam di Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan di wilayah Timur Tengah, meskipun penduduk muslim mayoritas bahkan terbesar di dunia, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan tidak didasarkan pada ajaran agama. Pandangan hidup dan ideologi negara mengacu pada Pancasila, sejumlah nilai dasar yang menurut para ahli sejarah digali dari bumi Indonesia sendiri yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya masyarakat yang hidup terdahulu. *Main stream* seperti ini menjadikan Islam tidak lagi memiliki "hegemoni kekuatan" dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Masyarakat muslim sendiri harus rela mengamalkan sebagian hukum-hukum ajaran agamanya (*syari'ah*) dan sebagian yang lain harus tunduk kepada hukum negara yang diadopsi dari Barat.

Kesenjangan antara keinginan ideal sebagai penganut ajaran agama dengan berbagai kenyataan kehidupan yang kadangkala sangat jauh dari harapan, menjadi sumber kemunculan berbagai permasalahan di semua jenjang struktur sosial. Satu sisi berkewajiban menegakkan moralitas agama, meredam kemunkaran untuk tegaknya keadilan dan kebenaran, pada sisi lain tindakan itu terkendala oleh perangkat birokrasi yang tidak mudah untuk dapat dilewati, sehingga lahir ketidakberdayaan sikap yang menimbulkan kesan ikut mendukung tindakan kurang bermoral itu.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebaiknya harus bersikap dan mengambil posisi sebagai kelompok sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai Islami, dan di pihak lain dapat berperan sebagai warga negara yang baik? Rumusan sikap yang jelas seharusnya dapat dimiliki dan dipahami, untuk menjadikannya sebagai media dakwah yang konstruktif bukan sebagai alat untuk membangun kelompok oposisi yang destruktif.

Permasalahan dalam Wacana Kebangsaan

Dalam konteks politik kekuasaan negara yang tidak berdasar agama, agama tidak dipandang sebagai unsur substansi yang dapat menentukan kebijakan, tapi kadang lebih diposisikan sebagai *legitimator* dalam sosialisasi program-program penguasa untuk mendapat kekuatan secara *massif* dari masyarakat luas. Akibatnya, simbolisasi seperti itu sering mengundang kekecewaan di kalangan pemuka agama bahkan tidak jarang terjadi tindakan kekerasan di kalangan kaum muda.

Penyisiran oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) bersama elemen lain terhadap tempat-tempat maksiat menjelang bulan ramadhan dapat menjadi bukti kekecewaan mereka, karena melihat kebebasan tindakan munkar dan tidak bermoral seolah mendapat konsesi dari birokrat dan pihak aparat keamanan. Penegakan norma agama tidak menjadi tanggung jawab langsung penguasa, tapi sekedar mendampingi dan membantu fasilitas untuk memberi kemudahan. Penyimpangan jabatan dan kekuasaan yang menyuburkan tindakan korupsi, kolusi dan yang sejenis, menunjukkan moralitas rendah sebagai perwujudan sikap yang tidak peduli terhadap kualitas keberagamaan.

Gambaran itu mengisyaratkan betapa pentingnya memunculkan sikap tegas dalam ikut serta mempengaruhi jalannya pemerintahan, apalagi dikaitkan dengan kewajiban menciptakan kesejahteraan menyeluruh dengan merujuk pada jargon, bahwa Islam sesungguhnya juga mencakup negara "*inna al-Islama dinun wa al-daulah*" (sesungguhnya Islam adalah agama dan negara sekaligus). Islam dipahami sebagai suatu totalitas dan apa saja ada di dalamnya. Di dalamnya tidak bisa dipisahkan antara kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Jika *spektrum* pemikiran ini dipahami sebagai kewajiban mengupayakan terwujudnya itu semua, berarti *formalisasi* Islam dalam kekuasaan menjadi sebuah keniscayaan. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, upaya ini telah menimbulkan ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahkan sempat memunculkan pertentangan dan kecurigaan yang berkepanjangan.

Pengalaman seperti di atas menjadikan pola pikir lain perlu ditempuh. Untuk mewujudkan keinginan yang dicita-citakan (berlakunya syariat Islam), tidak harus menjadikan Islam sebagai acuan yang terformalisasi dalam bentuk dasar negara. Konsep ini merujuk pada pemahaman, bahwa dalam konteks politik-kekuasaan, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang sistem politik ataupun teori kenegaraan yang harus dijalankan umat. Menurut pendapat Muhammad Imara yang ditulis kembali Bahtiar Effendi (2000:206), "Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi umat Islam, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang akan selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk berdasarkan kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan Islam."

Pola pikir kedua tersebut memberikan peluang cukup menjanjikan sebagai upaya untuk mencari format yang memungkinkan antara Islam dan pemerintahan membentuk hubungan fungsional. Strategi ini sudah berjalan, namun suatu saat harus diuji efektivitasnya dalam suatu tatanan politik yang relatif terbuka atau demokratis. Manakah yang memiliki validitas tinggi, sehingga layak dijadikan barometer kegiatan, meskipun hasil uji tersebut belum bisa dimanfaatkan sekarang. Apa yang sedang berkembang dewasa ini sesungguhnya masih merupakan reaksi pengalaman masa lalu, belum merupakan pilihan sadar tentang apa yang sebenarnya diinginkan untuk bumi Indonesia ini.

Alternatif Sikap

Dalam mencari bentuk ideal hubungan Islam dan negara tak lepas dari polemik yang berkepanjangan, seperti yang pernah terjadi di negara-negara Islam misalnya, Turki, Mesir, Maroko, Aljazair, Pakistan, dan Malaysia. Seperti diungkap oleh Umaruddin Masdar (1999: 135), bahwa di negara-negara itu hubungan Islam dan negara mengalami kesulitan mencari bentuk yang memuaskan, bahkan tidak jarang terjadi ketegangan politik yang seringkali berujung dengan permusuhan.

Menurut Masdar, salah satu alasan dasar yang menjadi permasalahan, karena kehadiran negara bangsa (*nation state*) dipahami sebagai sesuatu yang harus disubordinasikan di bawah Islam. Rumusan perilaku apa pun yang diambil penguasa, merujuk pada aturan Islam. Kondisi seperti ini pernah terjadi juga di Indonesia, namun akhirnya mengalami kegagalan karena beberapa alasan. *Pertama*, bentuk dasar negara yang sudah final, proses konsolidasi mencapai puncak dengan lahirnya ketentuan asas tunggal Pancasila yang berlaku untuk semua ormas di Indonesia. Akibat dari doktrin ini, disertai hegemoni kekuasaan yang didukung penuh oleh aparat keamanan yang kuat, kalangan yang bertindak kritis terhadap penguasa mengalami *pushing out* (keterlemparan) dari sistem yang ada. Beruntung, dasar hukum seperti itu saat ini sudah terhapuskan dengan dalih, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, justru mempersempit makna esensi dari Pancasila itu sendiri.

Alasan *kedua*, dari pandangan Islam sendiri terdapat kesulitan besar dalam mencari rumusan yang jelas hubungan Islam dan kebangsaan, karena pemahaman seolah-olah supra rasional. Persepsi seperti ini membawa asumsi adanya kewajiban bagi umat untuk mendirikan negara Islam lengkap dengan komponen-komponen di dalamnya, terdiri dari umat Islam, hukum Islam (*syari'ah*), dan *khalifah* yang dipahami sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, seperti yang diungkapkan Sayyid Quthb, al-Maududi, dan Hasan al-Banna (Nazih N. Ayubi dalam Masdar, 1999). Sikap ini pun tidak mungkin diwujudkan mengingat pluralitas bangsa tidak memberikan peluang agama manapun untuk menjadi dasar negara. Jika dipaksakan, akan sama nasibnya dengan pola pertama.

Dari berbagai pandangan dan pengalaman sejarah, beberapa tawaran sikap yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan membangun Islam dalam

konteks kebangsaan antara lain, *pertama*, strategi kooperatif-akomodatif, model ini mengandaikan proses islamisasi melalui jalur formal struktural (bagian dalam struktur kenegaraan). Artinya, menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan. Konsekuensi dari pendekatan ini, kesiapan melakukan akomodasi kepentingan negara supaya bisa masuk dalam peluang struktur yang ditawarkan.

Strategi *kedua*, melalui gerakan radikal frontal, artinya melakukan perlawanan langsung secara fisik terhadap kekuatan negara. Proses ini tergantung perhitungan kelengkapan sarana yang menjadi basis kekuatan, manakah yang memiliki kekuatan berlebih akan memenangkan perlawanan. Namun dalam sejarah, kekuatan penguasa lebih sering menang. Meskipun dari persiapan fisik masyarakat sudah layak, namun kesiapan kekuatan mental tidak dapat mengimbangi dalam menghadapi strategi yang ditawarkan negara yang lebih dahulu memiliki kesiapan dan kekuatan lebih mapan.

Strategi *ketiga*, dengan mengedepankan strategi kultural, pendekatan ini dijalankan secara non politik, yakni mengabaikan keinginan masuk dalam struktur kekuasaan. Sasaran utamanya adalah membuat cerdas dan mandiri rakyat. Jika rakyat cerdas dan mandiri dalam berpikir dan bertindak, kesewenangan negara akan dapat dipatahkan. Gerakan yang dilakukan berbasis kerakyatan, melalui pendampingan pendidikan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan dengan target selain mandiri secara keilmuan juga secara ekonomis. Sebagai contoh, penguatan pendidikan di lingkungan pesantren yang tidak saja diajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga beberapa keterampilan berbasis kekayaan.

Lain halnya dengan pendekatan yang ditawarkan Abdurrahman Wahid, yang mencoba menetralisasi ketegangan hubungan Islam dan negara dengan menyampaikan dua tawaran sekaligus, yakni menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Keduanya saling menunjang, secara sosiologis-politis menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio-kultural maupun perjalanan politik negara. Gagasan ini dianggap lebih mempunyai kemampuan untuk membangun basis kehidupan -yang menurut Masdar (1999)- adil, egaliter dan demokratis. Implementasinya lebih menitikberatkan pada substansi dari pada simbol atau bentuk-bentuk formal lainnya.

Dalam jabaran lebih lanjut, bentuk strategi terakhir menekankan hubungan fungsional antara Islam dan negara. Artinya, Islam harus diposisikan fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, tanpa melihat apapun bentuk dan ragam masyarakat itu. Dari sini akan terbangun proses pengembangan kepribadian yang pada akhirnya lahir pola hubungan antar manusia dalam bentuk pergaulan masyarakat atau interaksi sosial. Perilaku itu sebagai wujud kesadaran akan keterbatasan dan kelebihan yang berbeda satu sama lain, sehingga membutuhkan proses saling komunikasi dan interaksi, membentuk tradisi dan budaya yang memperhatikan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia.

Selanjutnya, untuk menentukan pilihan tergantung pada perspektif pemikiran yang sedang berkembang melalui forum-forum diskusi dan kajian. Sepanjang tidak bermuat kepentingan kasuistik, bersifat lokal dan sesaat, pilihan akan tetap jatuh pada pemikiran yang membawa kemaslahatan umum, ketimbang manfaat yang berspektrum sempit. Sikap itu sebagai bukti nyata memiliki rasa tanggung jawab mengembangkan teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Dari pemahaman seperti itu akan menjadikan proses kaderisasi berjalan sesuai harapan para pendahulu, dan meraih sukses seperti keinginan para pengelola organisasi.

MEMBANGUN KESADARAN BERZAKAT

Zakat merupakan salah satu ibadah rukun Islam; sebagaimana shalat, puasa dan haji. Kekhususan ibadah zakat terletak pada kepemilikan jenis harta benda tertentu yang dimiliki seorang muslim kemudian mengeluarkan sebagian harta tersebut setelah mencapai batas tertentu (*nishab*) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, tidak setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat, bahkan berhak menerima bagian dari zakat manakala kondisi kehidupannya serba kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*).

Dalam perspektif sosiologis, keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan tidak terlepas dari peran orang lain, seperti peran buruh, karyawan, penghasil bahan baku, tengkulak, jasa transportasi, dan lainnya. Kelebihan kepemilikan faktor-faktor produksi dengan kemampuan manajerial menjadikan penghasilan yang diperoleh jauh lebih besar dari pada orang lain yang hanya memiliki modal tenaga kerja dan atau terbatas bahan baku. Keterlibatan peran dari orang-orang tersebut menjadikan harta kepemilikan yang dikuasai seseorang terdapat hak-hak orang lain yang lemah yang tidak berkesempatan memperoleh penghasilan. Sesungguhnya dalam harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak bernasib baik (*QS. al-Dzaariyat, 19*).

Islam mewajibkan zakat mengikuti perintah setelah mendirikan shalat (*QS. al-Baqarah, 43*). Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas peribadatan seseorang tidak sempurna sebelum menunaikan kewajiban membayar zakat bagi yang mampu atas rizki yang telah diberikan oleh Allah. Distribusi rizki melalui zakat merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia. Harta tidak hanya mengumpul dan beredar di antara orang-orang kaya. Melalui zakat berarti ada upaya pembersihan dan mensucikan rizki dari amanat Allah sehingga memperoleh ketenangan hidup (*QS. at-Taubah, 103*), untuk selanjutnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak seperti fakir, miskin, para pengelola zakat, orang-orang muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah (*ghorim*), dan golongan orang-orang yang sedang dalam perjalanan menegakkan syariat agama.

Kejelasan sistem pendistribusian zakat serta kelompok sasaran (*mustahiq*), menjadi modal utama untuk menekan kesenjangan struktur sosial kelompok kaya-miskin. Dengan konsep pendistribusian sesuai ketentuan syariat secara berkesinambungan akan terjadi proses pengalihan kapital, keterampilan dan teknologi secara terarah (Syahri Muhammad, 1982: 30). Pada gilirannya sangat memungkinkan adanya pengalihan usaha dari seorang yang semula penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Dengan begitu, zakat dapat memainkan peran penting bagi problem pengentasan kemiskinan. Dengan

penduduk mayoritas muslim, melalui pengelolaan zakat berpeluang besar menekan jumlah kemiskinan tersebut.

Sesungguhnya jika dicermati lebih jauh, tingginya angka kemiskinan bukan disebabkan persoalan jumlah kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, melainkan lebih disebabkan karena persoalan produktivitas dan distribusi yang kurang baik, sehingga melahirkan struktur sosial kaya-miskin semakin melebar. Loekman Soetrisno (1997: 16) melihat beberapa teori yang mengungkapkan bahwa, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) karena faktor budaya, seperti rendahnya etos kerja. Kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja atau mengolah sumber alam yang tersedia; (2) adanya ketidakadilan dalam pemilihan faktor-faktor produksi; (3) kemiskinan yang disebabkan oleh model pembangunan suatu negara yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga menimbulkan kepincangan perkembangan sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional di mana sebagian besar penduduk menggantungkan kehidupan mereka.

Ketiga teori tersebut memiliki kelemahan, karena melihat sebab-sebab munculnya kemiskinan hanya melihat dari satu faktor saja. Teori pertama misalnya, tidak sesuai dengan kenyataan. Secara empirik membuktikan bahwa orang miskin justru orang yang bekerja paling rajin. Seperti dikatakan oleh Robert Chambers (1983), bahwa orang miskin tidak ada waktu untuk bermalas-malasan atau bersikap bodoh untuk hidup. Demikian juga faktor kepemilikan tanah, para transmigran di Indonesia masih cukup banyak yang miskin, meskipun mereka telah memiliki tanah. Karena faktor letak yang terisolasi, lahan tidak subur, atau kurang ada penyuluhan bagaimana meningkatkan potensi yang telah ada. Sedangkan model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, tidak selamanya negatif. Bisa jadi jika tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan justru semakin parah.

Ketimpangan sosial kaya-miskin seperti itu membutuhkan solusi antara lain dengan memberdayakan zakat yang memiliki dimensi spiritual dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, ibadah zakat membutuhkan kesungguhan sistem manajemen secara profesional, mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi sampai evaluasi yang menjadi kunci utama untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan zakat dalam mencapai target. Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana pengelolaan zakat benar-benar menjadi efektif, berdaya guna, tepat sasaran, sehingga keberadaannya menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang dapat membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan? Menurut asumsi yang berkembang di masyarakat, bahwa rendahnya keberhasilan pendayagunaan zakat lebih banyak diyakini profesionalitas pengelola maupun manajemen yang diterapkan kurang memenuhi harapan yang memuaskan, sehingga memunculkan kecurigaan antar kelompok masyarakat.

Merespon pernyataan tersebut, aksi konkretnya membutuhkan kesiapan banyak pihak, seperti keterlibatan pemerintah untuk mengangkat orang-orang yang memenuhi persyaratan menjadi amil zakat yang terwadahi dalam organisasi Badan

Amil Zakat (BAZ), pemantauan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), identifikasi calon *muzakki* dan pembinaannya, identifikasi *mustabiq* termasuk pengarahannya dan pembinaannya, desain administrasi dan manajemen yang dibutuhkan serta pola pendistribusian berikut alokasi pendayagunaan zakat.

Kendala lain yang mengganggu adalah tingkat kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dan ketidakpercayaan mereka terhadap keberadaan BAZ. Sebagaimana hasil penelitian Nor Syamsuddin di kota Bogor (2005), bahwa *muzakki* lebih berpihak pada pola penyampaian secara langsung daripada melalui lembaga, karena pengaruh tingkat kepuasan individu, selain itu pendistribusian langsung kepada para *mustabiq* prosesnya lebih cepat dan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Pada sisi lain pemahaman zakat lebih dikenal hanya terbatas memiliki makna sebagai kewajiban beragama, tanpa berpikir bahwa melalui pendayagunaan zakat yang berorientasi produktif disertai manajemen yang profesional akan bermanfaat lebih besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dirumuskan bagaimana pola memberdayakan zakat yang efektif, agar pemberdayaan masyarakat miskin bisa diwujudkan karena zakat memiliki obyek sasaran distribusi yang jelas dan terarah. Perlu dicari akar permasalahan ketidakberhasilan pengelolaan zakat melalui penelitian secara menyeluruh, bagaimana respon masyarakat calon *muzakki*, kesiapan pengurus badan pengelola berikut pola manajemen yang diterapkan serta respon para *mustabiq* terhadap pendistribusian zakat.

MEMBANGUN TRADISI AGAMA BERBASIS TRANSFORMASI BUDAYA

Sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas, apakah tradisi keikutsertaan menghormati salah satu anggota keluarga tetangga yang meninggal dunia hingga tujuh hari meskipun dari lain agama, itu berasal dari perintah agama atau keyakinan. Bahkanspekulasi jawaban, kemungkinan ihwal seperti itu lahir karena dorongan perasaan simpati sosial, ikut merasa kehilangan keluarga yang baru meninggal. Dorongan rasa iba, susah, dan sedih kemungkinan adalah yang menjadikan orang-orang berdatangan untuk menemani keluarga yang terkena musibah hingga kurang lebih tujuh hari. Butuh kajian mendalam atau penelitian tersendiri untuk dapat mengungkap jawaban berbagai pertanyaan seputar kegiatan tradisi sosial tersebut.

Tradisi seperti itu terjadi di beberapa desa antara lain di Desa Bakaran Wetan, Bakaran Kulon, Ketalit, Growong Lor, dan Growong Kidul, semuanya masuk wilayah Kecamatan Juwana. Beberapa waktu lalu, secara langsung saya melihat peristiwa tersebut, lantaran ikut melayat salah satu keluarga kerabat yang meninggal dunia. Dalam hati timbul pertanyaan, sampai kapan tradisi seperti itu bisa bertahan. Jika harus dipertahankan, strategi apa yang dapat menjadikan warga mampu bertahan, tertarik secara terus menerus dan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan pesan itu kepada mereka?

Untuk memberi gambaran itu semua, dibutuhkan cara pandang dengan memahami apa itu masyarakat, kebudayaan, dan mana itu agama serta berbagai manifestasinya (Irwan Abdullah, 2006), selanjutnya dibawa ke dalam kajian dakwah Islamiyah. Masyarakat, seperti masyarakat Desa Bakaran Wetan Juwana misalnya, merupakan *bounded system* dengan batas-batas yang jelas. *Pertama*, secara geografis menjadi penting untuk memberikan identitas wilayah tinggal masyarakat berikut karakteristiknya yang melekat kuat menjadi satu kesatuan dengan tradisi dan budaya. Jika seseorang mengatakan Juwana, maka pikirannya akan tertuju ke suatu tempat di wilayah pantura Kabupaten Pati Timur dengan segala tradisi dan keunikannya. Namun diakui batas-batas geografis itu kadang-kadang menjadi tidak jelas bagi orang-orang yang memiliki tingkat mobilitas yang demikian meluas dan intensif.

Kedua, faktor nilai yang menjadi pengikat kuat dalam membentuk kelompok masyarakat ke dalam suatu *bounded system*. Saking kuatnya sistem nilai ini direproduksi dalam setting sosial yang berbeda, seperti adanya Kampung Bakaran atau Kampung Juwana di tempat lain sebagaimana di Semarang terdapat Kampung Juwana sebagai kawasan penghasil Bandeng Presto, Kampung Arab di Malang dan sebagainya. Namun sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan yang meluas, batas-batas kampung tersebut menjadi tidak jelas.

Tradisi Agama

Menjawab pertanyaan bagaimana membangun tradisi agama, mengingatkan pada model dakwah yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Pendekatan pendampingan dalam mengisi muatan agama pada kegiatan ritual masyarakat awam pada saat itu, menjadi salah satu bentuk strategi dakwah yang dilakukan Kanjeng Sunan (nama panggilan yang biasa dipakai untuk menyebut Wali Sembilan). Kebiasaan upacara ritual masyarakat pada saat memulai tanam dan akan panen padi dengan jalan “mengheningkan cipta” seraya berdo’a, menjadi momentum Kanjeng Sunan untuk mengisi do’a-do’a yang bernuansa Islami. Masyarakat merasakan lebih nyaman dan sama sekali tidak mengurangi apa lagi menghilangkan tradisi yang telah mereka rintis sebelumnya. Secara antropologis, telah terjadi proses “meng-agamakan tradisi atas dasar perubahan orientasi selanjutnya menumbuh-kembangkan perubahan orientasi tradisi membentuk budaya baru.”

Sesungguhnya proses perubahan dalam pandangan antropologi, jika melibatkan unsur agama dan keyakinan, sulit untuk dilakukan bahkan tidak mungkin bisa dilakukan. Namun kenyataannya bisa terjadi, hal ini menunjukkan bahwa, *pertama*; proses internalisasi nilai-nilai spiritual tidak menimbulkan guncangan psikis, yang terjadi adalah proses pergeseran gerakan yang linier dari destinasi aqidah mereka ke dalam aqidah Islam. Inilah yang menjadikan mengapa dakwah Islamiyah para Kanjeng Sunan nyaris tidak menimbulkan konflik sosial.

Kedua, proses membangun budaya lebih menekankan sikap mengalir untuk mengikuti gerakan budaya warga yang ada. Hanya saja pada saat-saat tertentu, dimana terdapat ungkapan kata ataupun perasaan yang bernada pada orientasi ketuhanan, saat itu pula segera dialihkan pada perilaku ketauhidan yang benar menurut ajaran Islam.

Ketiga, dampak yang ditimbulkan menunjukkan pada sikap lebih menerima ketimbang perasaan yang telah dialami sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa puas yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku serta ketenangan jiwa melalui interaksi sosial serta curahan perasaan kepada teman lain. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam membawa kedamaian.

Menyinggung Islam berkembang di bumi Indonesia, tidak bisa terlepas dari kegiatan dakwah yang menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan tekstual, yang lebih menekankan pada pemahaman makna dari tafsir ayat-ayat al-Quran dan Hadits, berikut jabarannya ke dalam contoh-contoh yang mengambil dari fakta-fakta kehidupan. Cara ini dimaksudkan agar kemurnian ajaran al-Qur’an dan Hadits dapat dipertahankan, tidak gampang dibawa ke hal-hal yang berbau *keburafat, bid’ah*, atau lainnya. Mengada-ada dalam beribadah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Demikian, menurut sebagian umat Islam di Indonesia.

Kedua, pendekatan kontekstual, langkah ini dilakukan dengan memberikan makna dan pemahaman baik al-Qur’an maupun Hadits berikut hasil ijtihad para Sahabat, dengan menghubungkan persoalan nyata di masyarakat termasuk berbagai

tradisi masyarakat yang telah berkembang menurut keyakinan mereka. Langkah dakwah ini berjalan diantara dua sifat, sifat pasif dan aktif. Dikatakan pasif, karena masyarakat yang bersemangat memburu untuk mendapatkan pemahaman dari konsep-konsep agama yang belum dimengerti dari para da'i atau tokoh agama. Lain halnya dengan langkah aktif, cara ini dilakukan dengan mengunjungi komunitas masyarakat dengan berbagai karakteristiknya dilanjutkan dengan menyampaikan pesan-pesan agama oleh para da'i dengan menggunakan beragam media komunikasi sosial, termasuk menggunakan budaya sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan syari'ah.

Argumentasi pendekatan kontekstual dalam berdakwah, merujuk pada kenyataan bahwa wahyu (al-Qur'an atau Hadits) turun diawali dengan kejadian-kejadian tertentu yang lazim disebut sebagai *asbab al Nuzul* untuk al-Qur'an dan *asbab al Wurud* untuk mengawali turunnya Hadits Nabi. Ini dimaksudkan bahwa wahyu datang tidaklah berdiri sendiri tanpa tendensi nilai yang melingkupi. Artinya, keberadaan wahyu senantiasa memberi manfaat bagi kehidupan umat lantaran turunnya senantiasa ada konteks dengan kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pintu masuk untuk meng-agamakan tradisi dari yang bersifat sekuler tanpa mengenal nilai agama menjadi bernuansa agama, merupakan keberhasilan dakwah yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan umat ke depan.

Maqasid al Syari'ah

Keanekaragaman tradisi dan budaya yang belum Islami, sejatinya bukan sebuah tantangan dalam berdakwah, melainkan sebuah peluang untuk berkompetisi dalam menaklukkan semua itu ke dalam lingkup agama. Itu sebabnya Allah Swt, menjadikan makhluk dunia ini beraneka ragam tidak dijadikan satu jenis yang seragam, ini dimaksudkan untuk menguji manusia dengan maksud agar manusia berkompetisi guna mencapai yang terbaik (QS. al-Maidah: 48).

Melalui kajian sosial dalam perspektif antropologis peluang memasukkan keanekaragaman tradisi dan budaya ke dalam lingkup nuansa agama menjadi amat luas mengingat kehidupan dunia terus berkembang. Selain itu, melihat dari kontekstualisasi pemahaman agama itu sendiri meluas ke mana-mana, bahkan lebih jauh dari kemampuan pemeluknya dalam menginterpretasikan pesan agama.

Sesuai prinsip *maqasid al syaria'ah* (hakekat tujuan syari'ah) adalah membentuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam mengembangkan syariah guna mengakses berbagai persoalan baru berpedoman pada; *pertama*, mengupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteks-nya yang baru. Sudah tentu pendekatan kontekstual lebih dikedepankan dari pada hanya berkatut pada pemahaman agama yang bersifat tekstual. Ini merupakan salah satu bentuk peran aktif dalam mengembangkan ajaran agama, sehingga segala persoalan baru dapat terwadahi setidaknya memiliki nuansa yang bernilai agama.

Kedua, melakukan verifikasi mendasar terhadap ajaran, manakah yang termasuk masalah pokok (*ushul*) dan manakah yang termasuk masalah cabang (*furu'*). Ini dilakukan agar tidak terjebak pada perdebatan panjang terhadap masalah *khilafiyah*. Permasalahan yang jelas-jelas tidak masuk pada persoalan pokok (*ushul*) tidak terlalu perlu diperbincangkan lebih mendalam, karena akan mengganggu hubungan pertemanan dengan jama'ah lain, mengurangi rasa menghormati dan toleransi. Menemukan titik temu dan bersepakat dalam perbedaan pendapat adalah yang terbaik agar pertemanan dan persahabatan bisa lestari.

Ketiga, memahami bahwa ketetapan fikih (*syari'ah*) diposisikan sebagai media untuk membangun etika sosial, sama sekali tidak dijadikan sebagai hukum positif Negara. Jika fikih dijadikan hukum Negara, maka salah satu dampak yang akan muncul adalah sikap diskriminasi, ketidak-adilan dan fitnah. Sifat dasar hukum fikih *khilafiyah* (beda pendapat), akan sering memberi peluang terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, apa lagi jika masalah *khilafiyah* tersebut dibawa masuk dalam ranah politik kekuasaan.

Keempat, memahami metodologi pemikiran filosofis, terutama pada setiap permasalahan sosial budaya baru yang cenderung berkembang cepat. Latar belakang munculnya permasalahan serta kecenderungan orientasinya menjadi bahan pertimbangan utama untuk memberi ketetapan (*judgment*) dari aspek fikih. Langkah ini berhubungan dengan nomor dua di atas, kecenderungan sifat-sifat permasalahan perlu dibedakan manakah yang esensial (pokok) dan manakah yang tidak esensial (cabang), sehingga dalam mengkajinya akan menghasilkan telaah yang obyektif dan proporsional.

Penelitian Keberagamaan

Kata keberagamaan sengaja dipakai untuk memperjelas makna keberagamaan yang berasal dari kata beragama yang berarti menjalankan atau melaksanakan ajaran agama atas dasar hasil respon manusia terhadap wahyu Allah (Muslim A. Kadir, 2003). Kemudian mendapat awalan ke dan akhiran an untuk menunjukkan kata benda abstrak (dibendakan). Penelitian keberagamaan bukan dimaksud melakukan kajian agama yang bersifat transendental metafisis, akan tetapi kajian terhadap implementasi kebenaran ajaran agama dalam kehidupan empiris yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Sedangkan agama, materi kebenaran yang terkandung di dalamnya bukan substansi yang masih perlu dicari atau diuji kebenarannya melainkan cukup diterima atas dasar iman.

Secara metodologis, obyek kajian penelitian agama harus jelas tidak masuk pada makna ambigu. Di satu pihak penelitian agama merupakan cara untuk menemukan kebenaran agama, di lain pihak merupakan cara untuk menemukan kebenaran realitas empiris. *Pertama* menyangkut agama sebagai sesuatu yang diyakini dan dihayati. *Kedua* menyangkut agama sebagai *subject matter* penelitian (Muhamad Hisyam, 2005).

Dalam tradisi Islam, kedua makna penelitian itu sudah pernah dilakukan, misalnya; (1) Imam Bukhori, meneliti hadits untuk menemukan kebenaran hadits, sahih apa tidak, dengan metode sanad; (2) Imam Syafi'i meneliti sumber-sumber agama untuk menetapkan hukum; (3) Ibnu Taimiyah meneliti untuk menemukan ajaran yang benar; (4) Al-Ghazali meneliti untuk menemukan sikap hidup beragama yang benar; dan (5) Ibnu Khaldun meneliti agama untuk menemukan realitas yang sebenarnya dari umat beragama.

Dari contoh tradisi Islam seperti yang dilakukan Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Al-Ghazali adalah contoh usaha untuk mendapatkan pesan yg benar dari doktrin yang diyakini. Sedangkan yang dilakukan Ibnu Khaldun adalah contoh dari upaya memahami realitas sosial atau sejarah dari umat yang meyakini suatu doktrin agama.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perlu memahami agama kaitannya dengan fenomena riil yang memiliki tiga kategori. *Pertama*, agama sebagai doktrin, mengungkap apa substansi keyakinan religius itu, apakah yang diyakini sebagai kebenaran yang hakiki, apa makna ajaran bagi pemeluknya. Kajian materi itu disebut sebagai sejarah agama (*history of religion*), bisa dimanfaatkan menjadialat bantu untuk mengetahui secara mendalam esensi ajaran agama. *Kedua*, struktur dan dinamika masyarakat agama, dimana agama menjadi dasar terbentuknya komunitas kognitif, komunitas yang dibentuk oleh pengetahuan atau keyakinan yang sama. *Ketiga*, sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Dalam realitas keterikatan orang terhadap agamanya tidak sama. Ini dikarenakan kekuatan internal dan eksternal seseorang berbeda-beda, tergantung tinggi rendahnya motivasi dalam beragama.

Dari uraian di atas, menjadi keniscayaan bahwa sebelum orang melakukan penelitian agama, harus terlebih dahulu menetapkan *subject matter* atau materi (fakta, gejala) yang dikaji, dan *subject formal* atau aspek apanya (segi tertentu) yang akan dikaji dari objek itu. Apakah masuk kajian subyek material atau formal. Dalam penelitian agama yang masuk subjek material antara lain meliputi: pokok-pokok ajaran agama, sejarah perkembangan agama, dan tingkat religiusitas umatnya. Sedangkan subjek formal meliputi kegiatan mengkaji masalah di atas dari sudut pandang agama itu sendiri, bukan dari segi kemasyarakatan atau psikologi. Akan tetapi dari usaha penganut agama mempertahankan, mengamalkan, mengembangkan agama mereka di tengah peradaban yang terus berubah dan berkembang.

Jelaslah bahwa penelitian agama bukan penelitian sosiologi agama, bukan penelitian psikologi agama, bukan penelitian antropologi agama. Penelitian agama mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian agama tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak mengerti agama. Sebagai aktor sejarah dan juga aktor kebudayaan, umat beragama berjuang untuk mencapai cita-cita kehidupan sesuai amanat ajaran agama yang di anut. Untuk mencapai tujuan itu

tidak jarang menempuh berbagai cara, tradisi kegiatan dan kebudayaan yang secara sengaja atau tidak bersinggungan dengan ajaran agama.

Agama dan Transformasi Budaya

Agama (Islam) memberi peluang umatnya untuk mengembangkan berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan, baik jasmani ataupun rohani. Kegiatan harian itu kian lama melembaga menjadi kebiasaan hingga menjadi kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan itu terus berkembang sejalan dengan dinamika hubungan timbal balik kehidupan masyarakat itu-utamanya yang masuk dalam kategori tradisional- dengan dimensi ruang, waktu dan budaya (Hasan Muarif A., 2001). Pada kebanyakan perkampungan atau desa tradisional, keterkaitan dimensi-dimensi tersebut masih terlihat sangat jelas melalui berbagai cara, perilaku ataupun gaya hidup. Sebagai bentuk kuatnya ketergantungan pada ketiga unsur, masyarakat menciptakan berbagai mitos, yang berfungsi sebagai simbol legitimasi keseimbangan hubungan antar berbagai komponen.

Dari mitos tersebut, ketergantungan masyarakat cukup kuat, dalam banyak hal mempengaruhi secara kuat peri kehidupannya, termasuk prinsip-prinsip hidup dalam mengelola alam, mencapai harapan, memelihara keseimbangan dan masih banyak lagi kegiatan hidup lainnya. Lahirnya beragam tradisi dan budaya masyarakat lokal sesungguhnya menjadi pertanda bahwa masyarakat dengan segenap potensi dirinya berikut lingkungannya akan terus memunculkan kegiatan-kegiatan yang merupakan refleksi dari keinginan mencapai yang diharapkan (*das sollen*). Makin jauh dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada (*das sein*), bisa jadi akan semakin kuat mempertahankan mitos, karena sudah masuk dalam struktur keyakinan sehingga mitos seolah menjadi regulator dalam kehidupan.

Perkembangan segala bentuk kebudayaan atas dasar hasil refleksi atau renungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian untuk diadaptasi dan diakomodasi oleh agama. Dari sini pula kajian strategi dakwah senantiasa dituntut untuk dapat berjalan mengimbangi perubahan budaya yang terus berlari tiada henti, belum lagi derasnya intervensi teknologi. Dialog interaksi antara agama dan budaya menjadi topik yang senantiasa harus di *update*, agar agama tidak dikatakan tertinggal.

Kemampuan adaptasi dan akomodasi agama terhadap perkembangan budaya, bisa dilakukan dengan beberapa strategi: *pertama*, dengan membiarkan budaya terus berjalan dan berkembang sesuai karakternya, sejauh tidak menyimpang dari pedoman dasar ajaran syari'ah. Perlu pemahaman indikator secara menyeluruh agar ketetapan hukum yang diambil melalui sikap membiarkan tidak disama-artikan dengan memperbolehkan segala tindakan yang diberlakukan. *Kedua*, melalui modifikasi terhadap unsur-unsur budaya yang dinilai bertentangan dengan hukum pokok, selanjutnya perubahan bentuk-bentuk budaya berikut sistem nilai yang mendasari dimasukkan dalam wilayah ketentuan syariah. *Ketiga*,

dengan melakukan dekonstruksi sistem nilai maupun perilaku budaya, karena dirasa bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha preventif agar kerusakan moral manusia tidak semakin parah.

Arus transformasi budaya bukan menjadi hambatan kegiatan dakwah agama, akan tetapi menjadi 'mitra kerja', untuk membuktikan bahwa kebenaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits bersifat abadi. Jika kebenaran al-Qur'an dan Hadits bersifat abadi. Maka pemaknaan dan pemahamannya pun senantiasa harus berinovasi agar tidak tertinggal dengan budaya yang bervariasi.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hasil kajian ke depan, wajib hukumnya memperdalam lagi metodologi penelitian, menambah kajian teori untuk mempertajam pembahasan substansi serta meningkatkan kepekaan dalam merumuskan permasalahan. Dengan menguasai ketiganyadisertai semangat latihan yang efektif, yakinlah akan menghasilkan karya yang lebih baik.

PERAN AGAMA DALAM PEMBINAAN MENTAL DAN MENANGKAL RADIKALISME

Mencermati peristiwa di lapangan, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya radikalisme¹, bisa karena faktor sejarah, tekanan sosial, ekonomi, budaya, politik dan juga agama. Kompleksitas faktor yang memunculkan sikap radikal lebih pada beragamnya kepentingan dan kebutuhan seseorang yang dapat berkembang menjadi kolektivitas kelompok sosial sejalan dengan timbulnya rasa tidak puas yang menghantui sikap kelompok. Meskipun banyak variabel penyebab, namun jika dirunut lebih jauh sebenarnya hanya satu penyebab yaitu munculnya rasa ketidakpuasan dan sikap kecewa atas tertundanya atau gagalnya keinginan yang butuh direspon (*delayed responses*).

Perlu diwaspadai bahwa faktor penyebab itu tidak pernah berdiri sendiri. Kasus yang sedang menghangat di beberapa daerah, tidak dapat dibilang karena murni kriminal yang tanpa ada keterkaitan antara beberapa aspek maupun berbagai faktor. Rasa setia kawan karena teman lain teraniaya misalnya, dapat memunculkan radikalisme kelompok yang dapat meluas ke ranah lain seperti sektor ekonomi dan politik. Jika terjadi salah pengendalian secara beruntun tidak menutup kemungkinan membentuk “budaya baru” yang cenderung negatif. Dan begitu terus bergulir saling kait mengkait membentuk lingkaran setan yang sulit diidentifikasi mana yang menjadi sebab dan mana akibat, kekacauan (*chaos*) terus berlanjut karena kolektivitas akar permasalahan belum diketemukan secara pasti berikut solusi yang dapat ditawarkan.

Dari analisis tersebut menunjukkan sesungguhnya radikalisme dapat muncul kapan dan dimana saja sejauh situasi kondisi berpeluang untuk terjadi *chaos*. Ironisnya, sering terjadi agama menjadi salah satu sisi penguat atau simbol atas terjadinya kekacauan yang sejatinya bukan sebagai penyebab utama. Namun masyarakat mengklaim agar peristiwanya kelihatan lebih *serem*, mereka langsung melegitimasi dengan agama, sehingga seolah-olah benturan yang terjadi adalah karena faktor agama.

Contoh kasus, munculnya gerakan DI/TII bermula dari penolakan Kartosuwiryo bersama kelompoknya terhadap perjanjian Renville dengan pemerintah Belanda. Kekecewaan muncul karena diketahui Pemerintah Indonesia menyetujui dan menerima perjanjian tersebut. Bentuk luapan kekecewaan Kartosuwiryo dan kelompoknya berbalik melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia dengan menjadikan syariah sebagai dasar hukum bagi kelompoknya dan memproklamkan daerah yang telah berhasil dikuasai sebagai Negara Islam Indonesia (NII) dari beberapa wilayah di Jawa Barat. Saat ini kasus

¹Sebuah paham yang menekankan pada penyelesaian masalah dilakukan secara drastis untuk mengubah kondisi sosial tertentu. Pemahaman awam sering disebut sebagai kekerasan; sikap radikal berarti perilaku yang mencerminkan kekerasan.

serupa semakin beragam baik jenis maupun bentuknya, sejalan dengan keanekaragaman kepentingan yang memanfaatkan sensitifitas agama, di sisi lain agama juga dijadikan sebagai simbol fanatisme yang mengagungkan status kesucian yang amat tinggi.

Karakter Beragama

Agama seperti dijelaskan oleh beberapa referensi (Masdar, 1999), sesungguhnya memiliki dimensi arahan yang serba luas dan lengkap. Mulai dari pembinaan perilaku individu dan kelompok, sampai dengan persoalan semua kebutuhan dalam kehidupan sejak lahir hingga meninggal dunia. Dari totalitas dan kelengkapan peraturan agama membawa pengaruh kepada umat untuk berlomba mencapai yang terbaik di hadapan Tuhan, terkait adanya keyakinan bahwa keberhasilan kehidupan di akherat karena sukses mengelola kehidupan duniawi. Atas dasar ini setiap umat mengekspresikan cara beragama secara bebas sejauh pemahaman dan keyakinan yang dikuasai.

Dalam prediksi yang bersifat implementatif, kemungkinan dapat terjadi radikalisme beragama, karena agama mencakup semua dimensi kehidupan yang terkadang berbenturan karena perilaku umat itu sendiri yang berlebihan. Namun, perlu dilihat kemunculan sikap seperti itu dipicu oleh serangkaian peristiwa lain baik di awal maupun di akhir sebagai bentuk kekhawatiran yang mesti harus dicegah, sehingga solusi sikap radikal menjadi sebuah tindakan yang menurut berbagai pertimbangan perlu dilakukan.

Radikalisme beragama dapat pula muncul manakala dipicu hal-hal seperti berikut; *Pertama*, keluar suatu kebijakan dari pemerintah yang dalam rumusannya kurang memperhatikan nilai-nilai agama, dalam kenyataan sering hanya melihat dari aspek yang menguntungkan (*profit oriented*). Di sisi lain, jika muncul permasalahan, masyarakat langsung mempersoalkan peran agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama seolah-olah menjadi yang paling bertanggung jawab untuk mengembalikan setiap terjadi kekacauan (*chaos*). Dari kasus ini mengingatkan betapa pentingnya memahami setiap kebijakan secara holistik, termasuk kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

Kedua, munculnya kemauan umat untuk memosisikan agama sebagai kekuatan ideologi politik dan kekuasaan. Jika demikian, maka negara tidak pernah memperoleh kedamaian. Dalam konteks Indonesia, agama akan senantiasa berhadapan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dampaknya fanatisme beragama akan bersinggungan dengan pemahaman Pancasila yang kerap kali menimbulkan sensitivitas yang negatif. Konflik selalu muncul oleh kekuatan yang menginginkan agama sebagai ideologi negara. Yang seharusnya dilakukan adalah menempatkan agama sebagai kekuatan etika sosial yang bisa mempengaruhi kekuasaan.

Ketiga, sikap dominasi berlebihan atas kekuatan kelompok mayoritas yang mengabaikan pluralitas, sehingga yang terjadi adalah peniadaan peran kelompok

minoritas dan di sisi lain terjadi penguatan sepihak oleh kekuatan yang besar. Konflik muncul karena sikap dan tindakan tidak mencerminkan bagaimana memperlakukan pihak lain di saat tidak dalam kesepahaman. Ini merupakan hal yang mendasar dalam memahami pluralisme.

Ketiganya dapat menimbulkan kerawanan yang berakibat munculnya radikalisme kelompok sebagai bentuk kompensasi karena sikap kecewa. Bentuk ketidakpuasan sering juga dipoles dengan banyak faktor yang bersumber dari berbagai dimensi guna mendapatkan pembenaran dan penguatan bahwa radikalisme sudah sedemikian mengejala dan sangat mengkhawatirkan. Dapat dipahami bahwa apapun yang menyebabkan munculnya sikap radikal, agama sering menjadi solusi akhir untuk melerai. Meskipun sering tidak bersifat konsisten karena adanya unsur keterpaksaan spiritual yang bersifat simbolik, mengingat yang bersangkutan sendiri kurang memahami hakekat beragama.

Memosisikan Peran Agama

Agama dalam pandangan umatnya (Carl Brown, 2000), merupakan pandangan hidup mencakup segala sesuatu yang memandang dirinya sendiri sebagai pembawa kekuatan. Dari pemahaman ini menjadi motivasi kuat bagi sekelompok penganut aliran tertentu untuk menjadikan agama sebagai dasar negara secara legal formal, dengan maksud agar semua pengaturan tata kehidupan merujuk ajaran agama, sehingga kesejahteraan dapat segera diwujudkan.

Dalam konteks Indonesia, jika melihat kesejahteraan sebagai tujuan akhir penyelenggaraan negara, sebenarnya tidak menjadi keharusan (memaksakan) untuk memosisikan agama sebagai dasar negara. Karena untuk menciptakan kesejahteraan, sesungguhnya lebih melihat pada proses dan perilaku masyarakat. Pada sisi lain memperhatikan akar sejarah pluralisme masyarakat yang membentuk multi kultur, maka menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara hanya akan memperbesar konflik yang berkepanjangan. Legalisasi dasar hukum suatu agama dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen pada pluralisme, suatu hukum dari agama direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain merasa tidak terancam.

Penekanan pada pembentukan perilaku masyarakat menandakan bahwa tidak harus menjadikan agama sebagai dasar negara melainkan sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Dalam pandangan Gus Dur (Abdurrahman Wahid, 1999), “agama tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat, bahkan kebesarannya akan memancar karena mampu mengembangkan diri tanpa dukungan dari institusi negara.”

Hal tersebut menjadi motivasi untuk mencari pertautan esensi agama dalam kehidupan dengan berbagai variabel untuk menghasilkan aturan hukum yang lebih akomodatif sejauh tidak menyimpang dari ketentuan pokok. Hasil akhir

yang didapat, agama akan mampu menjaga kesinambungan hubungan kemanusiaan berdasar sifat-sifat humanis serta jauh dari kekerasan.

Akhirnya sampai pada sebuah pemikiran, bahwa untuk mencari peran agama dalam menekan radikalisme, perlu menelusuri rangkaian sebab yang melatari guna merumuskan pemecahannya. Peran agama lebih pada pemberian penguatan yang bersifat normatif spiritual berbasis keimanan (*mauidhoh basanah*), melalui peran *advokasi-edukatif* untuk memperkuat kesadaran.

Sedangkan untuk menghindari radikalisme agama dapat ditempuh dengan jalan; *pertama*, menginterpretasi ulang teks-teks agama dengan konteksnya yang baru; *kedua*, memverifikasi secara mendasar terhadap mana ajaran yang pokok dan yang bersifat pengembangan dengan tidak mengingkari kesepakatan. Dan *ketiga*, yang lebih penting, menempatkan ajaran agama sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Melalui cara berpikir seperti ini akan dapat menciptakan kehidupan yang kondusif, tercipta hubungan yang baik antara umat dengan pemerintah dan antar umat itu sendiri, sehingga terbangun kebahagiaan dan kesejahteraan.

BAB II

GELIAT NAHDLATUL ULAMA

KEPEMIMPINAN DALAM ORMAS NU

Bahaya besar akan mengancam manakala dalam kehidupan terjadi krisis kepemimpinan dan keteladanan. Lebih membahayakan dari pada krisis-krisis yang lain, seperti krisis pangan, energi maupun krisis lingkungan. Ketiadaan keteladanan melalui sikap kepemimpinan, umat akan kehilangan panutan. Bimbingan dan arahan terkait pemenuhan berbagai pilihan dalam beberapa aspek kehidupan tidak mereka dapatkan. Umat tidak memiliki sandaran yang kuat, akibatnya mereka menjatuhkan pilihan yang tidak tepat dalam memenuhi kebutuhan, sehingga akan menyengsarakan dirinya baik secara individu, keluarga dan masyarakat. Dampaknya, moralitas umat akan terbawa arus kekuatan yang tidak bersumber dari norma-norma agama sehingga dapat membawa kerusakan.

Umat tidak memiliki keterampilan cukup untuk merumuskan sikap yang baik dan benar guna menjawab berbagai pilihan, ada beberapa alasan. *Pertama*, karena terbatasnya pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidup beragama dan bermasyarakat; *Kedua*, rendahnya keterampilan untuk mengurai berbagai permasalahan sehingga memunculkan langkah-langkah penyelesaian yang memberikan manfaat secara moral. *Ketiga*, cepatnya arus perubahan lingkungan (*environmental change*) yang memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan budaya dan moralitas masyarakat akibat perkembangan teknologi.

Perubahan lingkungan organisasi – eksternal maupun internal – adalah suatu keniscayaan. Namun, sekarang kecepatan dan intensitas perubahan lingkungan tersebut pada umumnya berlangsung begitu tinggi, penuh dinamika dan *turbulensi*. Bahkan, seringkali bersifat diskontinyu sehingga bukan saja menyulitkan, tetapi dapat mengancam keberlangsungan hidup suatu organisasi. Perubahan lingkungan (*environmental change*) akan mengakibatkan tekanan pada organisasi untuk melakukan perubahan organisasional (*organizational change*). Di tengah kuatnya arus perubahan lingkungan, tanpa perubahan diri secara tepat dan signifikan organisasi tersebut niscaya akan terseok, bahkan akan mati. George dan Jones (2002) menyebutkan sejumlah faktor lingkungan eksternal yang mendorong perubahan, yakni kekuatan kompetisi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan globalisasi, kekuatan sosial-demografik, dan kekuatan yang bersifat etikal.

Agar tidak kehilangan jati diri, sebuah organisasi membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kekuatan (*power*) untuk mengelola lembaga dan anggotanya dalam merencanakan kegiatan, mengimplementasikan serta mengawasinya sesuai visi-misi dasar yang diemban. Kesalahan dalam memanaj organisasi hanya akan melahirkan kekecewaan yang tiada henti. Hal ini berakibat terputusnya jaringan kerja antar lembaga dan masyarakat, karena tidak lagi menaruh kepercayaan, serta warga bersikap apatis bahkan cenderung meninggalkan organisasi, karena tidak ada keteladanan yang lebih patut diikuti.

Kepemimpinan Dalam Ormas Keagamaan

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi keagamaan tidak saja dituntut kemampuan mempengaruhi orang lain dengan segala kemampuan dan sarana yang dimiliki, agar orang lain tersebut bersedia dan berkemauan untuk mengikuti segala kebijakan yang diambil guna mencapai tujuan. Namun, menuntut pula kemampuan memberikan kenyamanan kepada warga untuk bebas mengekspresikan ide dan gagasan dalam melaksanakan kegiatan tanpa harus melanggar aturan. Sudah tentu tujuan dimaksud adalah tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan garis dasar perjuangan yang ditulis dalam pedoman organisasi (AD/ART).

Penjabaran perencanaan organisasi merupakan sebuah tuntutan proses implementasi AD/ART yang dituangkan dalam program kerja melalui musyawarah anggota. Hal ini merupakan wujud nyata rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap lembaga dan warga, sehingga kesinambungan organisasi dapat terjaga. Jika terjadi permasalahan baik datang dari internal maupun eksternal, penyelesaian tetap dikembalikan kepada pedoman dasar organisasi, bukan merujuk pada keinginan apalagi kebutuhan orang-perorang atau pun kelompok.

Dari perspektif seperti itu, kepemimpinan bukan saja menampilkan seni memimpin dengan model otoriter, autokrasi, demokratis, pseudo demokratis ataupun model lainnya melainkan bagaimana meramu bentuk dan model-model kepemimpinan tersebut menjadi sebuah rhamuan yang sesuai dengan situasi kondisi organisasi. Pertimbangan yang dikedepankan adalah efektivitas warga serta kenyamanan dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan organisasi ataupun kegiatan bersifat pribadi tanpa ada perasaan terpaksa, apa lagi sampai harus menyiasati berbagai tindakan untuk mengejar kepentingan dan mengorbankan organisasi.

Ada beberapa pertimbangan agar kepemimpinan organisasi dapat terjaga netralitasnya dalam membawa warganya, *pertama*, memahami visi-misi dasar yang menjadi rujukan organisasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, memahami prinsip-prinsip dalam menggerakkan kegiatan organisasi serta orientasinya ke semua aspek kehidupan yang ada. *Ketiga*, memahami dinamika perkembangan lingkungan baik lokal, nasional dan global. *Keempat*, memiliki wawasan keilmuan dalam mengintegrasikan berbagai macam pengetahuan dan informasi sehingga menghasilkan strategi yang tetap kondusif dan memberikan layanan yang baik kepada semua pihak.

Kembalinya NU ke khittah 1926, memberikan pedoman sikap dalam memilih jarak sosial yang netral dengan kekuatan politik dan pemerintah. Artinya secara kelembagaan, NU tidak mengarahkan warganya untuk mendukung dan memilih salah satu partai politik. NU mempersilahkan warganya memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada parpol manapun atau profesi apapun yang penting mereka selalu sadar bahwa dirinya adalah warga nahdliyyin. Terkait sikap dengan pemerintah, NU dalam hal tertentu bersikap mendukung kebijakan

pemerintah, namun dalam hal lain NU tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan visi kebangsaan yang telah dirumuskan bersama.

Di lapangan sering terjadi kekeliruan pemahaman di kalangan para pemimpinNU, antara NU sebagai kekuatan politik dan NU sebagai lembaga politik. Sebagai warga negara apapun status dan posisinya, setiap individu apalagi organisasi memiliki kekuatan untuk ikut memberikan masukan agar penguasa melaksanakan pemerintahan yang bersih jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai bentuk kedhaliman yang lain, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga. Jika ini yang dilakukan, maka NU telah bertindak sebagai kekuatan politik.

Lain halnya jika NU secara kelembagaan ikut serta mendukung pencalonan seseorang untuk menjadi pimpinan pemerintahan, ataupun meminta sejumlah orang-orangnya untuk duduk di parlemen ataupun ikut berkampanye agar dapat mendudukkan jago-jagonya memperoleh sejumlah kursi di DPR atau DPRD, ini berarti NU telah memperlakukan diri sebagai lembaga politik yang tidak ubahnya dengan partai politik. Hal tersebut tidak boleh terjadi agar tidak ada *distorsi* yang berkepanjangan serta membingungkan umat. Untuk dapat keluar dari jeratan persolan tersebut sesungguhnya ada kiat-kiat tertentu yang dapat disepakati guna meluluskan semua keinginan tanpa harus melakukan tindakan tabrak-lari dalam menjalankan organisasi.

Sebagai ormas independen yang memiliki jumlah anggota yang relatif besar dalam proses perjalanannya sering muncul godaan yang bernuansa politik. Untuk tidak terseret ke dalam kancah konflik politik yang lebih dalam antar warga, jalan yang paling aman untuk menuju cita-cita organisasi adalah memahami secara benar dan bertanggung jawab garis perjuangan organisasi. Selanjutnya merumuskan sikap kepemimpinan yang mampu memberikan keteladanan dan manfaat bagi warga dan masyarakat.

Idealitas kepemimpinan yang dapat menimbulkan keteladanan adalah kepemimpinan yang mampu memberikan bimbingan kepada warga nalar sekuler ke arah spiritualitas (Antonio, 2007). Orientasi berpikir dan bersikap warga yang bersifat material dan sekuler diubah ke arah pola perilaku yang bersandar pada syariat agama serta bersedia mengembangkan. 'Kearifan pemimpin' menjadi salah satu bentuk pendekatan serta profil utama dalam menjalankan organisasi, yang merupakan wujud dari perpaduan kecerdasan berpikir dengan hati nurani berbasis ajaran agama.

Dalam menjalankan organisasi, ada baiknya model kepemimpinan situasional (Sondang, P, 2003) dipakai untuk menggerakkan ormas di lingkungan NU secara terintegrasi. Model kepemimpinan tersebut memiliki empat bentuk, masing-masing: (1) bentuk memberitahukan, jika pimpinan merumuskan berbagai peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh bawahan; (2) bentuk menjual, jika pemimpin merumuskan tugas-tugas secara tegas untuk mendapat dukungan yang jelas dari bawahan; (3) bentuk mengajak bawahan berperan serta, pimpinan

(bertindak sebagai fasilitator) mengajak para bawahan untuk berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) bentuk pendelegasian. Jika pimpinan membatasi aktivitasnya dengan menyerahkan sebagian tugas-tugasnya kepada bawahan.

Untuk mencapai keberhasilan organisasi, sesungguhnya tidak perlu pimpinan yang banyak menghafal tipe-tipe kepemimpinan, namun menciptakan situasi yang dapat mengantarkan anggota memahami tugas dan bersedia melaksanakan dengan tanggung jawab itu yang lebih penting. Oleh karena itu terus berlatih dan mencoba merupakan tindakan terpuji dalam berorganisasi dari pada terus ‘ngerumpi’ dan menyalahkan tanpa bersedia bertindak. Selamat berlatih !

METODE PENGEMBANGAN *BAHTSUL MASAIL DINIYAH*

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut para ahli hukum Islam (*fuqoha'*) untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam memenuhi tuntutan ketetapan hukum Islam atas permasalahan yang muncul. Permasalahan di masyarakat lebih sering muncul tidak linier dengan hukum-hukum yang telah ada. Artinya, perkembangan permasalahan tidak selalu dibarengi dengan ketersediaan ketentuan hukum yang siap dipedomani warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketentuan hukum yang diperlukan masih terkemas dalam sumber-sumber (kitab-kitab) rujukan yang siap dikeluarkan melalui sebuah forum kajian mendalam yang biasa dikenal "*bahtsul masail*."

Istilah *bahtsul masail* di kalangan warga NU menjadi salah satu media untuk menetapkan hukum (*itsbath al-ahkam*), tidak dimaksudkan sebagai bentuk menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits melalui proses *ijtihad*, melainkan dimaksudkan sebagai penetapan hukum dengan cara mencocokkan atau menerapkan (*tathbiq*) secara tepat dan dinamis dari *qaul* dan *'ibarah* dalam kitab-kitab yang mu'tabar di lingkungan madzhab tertentu (Syafi'i) terhadap permasalahan.

Forum *bahtsul masail* dimaksud memiliki tugas merumuskan keputusan tentang hukum-hukum Islam dari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan *masail fiqhiyyah*, ketauhidan maupun permasalahan tasawuf (*ithariqah*) (Sahal Mahfudh, 1990). Peserta forum *bahtsul masail* ini, sering diikuti oleh tokoh-tokoh dari unsur Syuriah NU serta para ulama yang berada di luar struktur NU, termasuk para pengasuh pesantren. Temuan jawaban dari permasalahan atau kejadian (*waqi'ah*) yang diajukan, kadang kurang sesuai dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan.

Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan; *pertama*: esensi permasalahan atau kejadian (*waqi'ah*) yang diajukan belum dikenali oleh peserta dengan benar sesuai disiplin ilmu yang diperlukan; *kedua*, keterbatasan sudut pandang dalam memahami kejadian yang diajukan, sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang masih parsial tidak menyeluruh; *ketiga*, keterbatasan peserta dalam menguasai pendekatan dan metode untuk mengungkap hukum-hukum dari sumber rujukan serta langkah-langkah aplikasinya, sehingga antara permasalahan dan jawaban terlihat kurang padu.

Untuk menjadikan forum *bahtsul masail* yang berkualitas, serta mampu menghasilkan produk hukum yang memiliki akuntabilitas tinggi, diperlukan peserta yang memiliki kompetensi. Peserta selain menguasai kitab-kitab rujukan sebagai sumber hukum, perlu juga menguasai pendekatan dan metodologi berikut aplikasi serta pengembangannya.

Desain Analisis Masalah

Pola kerja forum *bahtsul masail* membutuhkan kerangka dasar yang kuat secara metodologis, agar rumusan hukum yang dihasilkan memiliki *theoretical concept* yang kuat dan *aplicable*. Dalam memecahkan dan merespon masalah, forum *bahtsul masail* menggunakan langkah-langkah pembahasan seperti berikut (Hasil Mukhtamar NU 31, 2004):

Pertama, melakukan analisis masalah, mencari sebab-sebab mengapa dan bagaimana terjadinya masalah/kasus. Kegiatan ini membutuhkan tahapan-tahapan: (a) memahami dengan benar esensi dari masalah yang diajukan; (b) mendefinisikan dengan benar menurut disiplin ilmu yang bersangkutan; (c) memahami pola kerja (proses) masalah atau kasus yang diajukan; dan (d) memahami masalah atau kasus dari beberapa faktor: ekonomi, politik, budaya, sosial, dan faktor lain yang relevan.

Kedua, melakukan analisis dampak, langkah ini untuk memahami dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kejadian atau kasus yang dicari hukumnya, dilihat dari berbagai aspek, antara lain; aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan aspek lainnya yang mungkin ada peluang.

Ketiga, melakukan analisis hukum, setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari segala aspek terhadap kejadian atau kasus yang diajukan, forum *bahtsul masail* mempertimbangkan juga aspek yuridis formal ketentuan hukum yang akan dihasilkan, dengan melihat: (a) status hukum (al-ahkam al-khamsah); (b) dasar dari ajaran *al-hussunnah wal jama'ah*; dan (c) hukum positif.

Prosedur Pemecahan Masalah

Setelah didapatkan kerangka hasil analisis masalah, selanjutnya menetapkan prosedur pemecahan masalah untuk mendapatkan keputusan. Dalam mengambil keputusan *bahtsul masail* yang berlaku di lingkungan warga NU, dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati (Kacung Marijan, 1992). Dalam hal ini mengutamakan bermadzhab secara *qauliy* dari pada bermadzhab secara *manhajiy*. Oleh karena itu, prosedur pemecahan masalah yang dibahas dalam forum tersebut sederhana dan praktis dengan langkah sebagai berikut (Hasil Mukhtamar NU 31, 2004).

Pertama, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dari kitab-kitab madzhab empat dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah (pendapat), maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut. Secara operasional prosedur pertama ini dilakukan dengan mencocokkan kasus yang hendak dicari jawaban hukumnya dengan arti teks *fiqh* secara tekstual tanpa ada pertimbangan konteks situasi dan kondisi dimana teks itu muncul.

Kedua, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan *taqrīr jama'i* (penetapan secara kolektif) untuk memilih satu qaul/wajah yang dianggap lebih valid. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan

mengambil hukum yang lebih tinggi berdasarkan urutan secara hirarki sebagai berikut: (1) pendapat yang disepakati asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Rofi'i), (2) pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, (3) pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja, (4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, (5) pendapat ulama yang terpandai, (6) pendapat ulama yang paling *wara'*.

Ketiga, dalam kasus tidak ada qaul atau wajah sama sekali yang dapat memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masā'il bi naẓḥa'iriha* (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Prosedur yang ketiga ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode *al-qiyās*. Prosedur ini sering disebut sebagai metode *al-qiyās* khas Nahdlatul Ulama. Dalam prakteknya, metode ini belum bisa terlepas dari keterikatan dengan teks fiqh tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing masalah yang hendak dipersamakan hukumnya.

Keempat, dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāqul masā'il bi naẓḥa'iriha* (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (kolektif), maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* (menggali hukum dari sumbernya secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhajī* (metodologis) oleh para ahlinya. Metode ini secara operasional dilakukan dengan cara mengalisa masalah menggunakan perangkat metodologis teori-teori dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'idul fiqhīyyah*.

Tindak Lanjut Implementasi Keputusan Hukum

Langkah berikutnya menindaklanjuti hasil-hasil keputusan hukum-hukum produk *baḥtsul masail* untuk sosialisasi dan implementasi. Langkah ini perlu dilakukan agar produk hukum dari *baḥtsul masail* memiliki jangkaun tindakan nyata atau penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan sesuai obyek permasalahan. Analisis penegakan tindakan hukum seperti itu, membutuhkan peran dan pengawasan secara efektif dengan merumuskan: apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari *baḥtsul masail*, siapa yang akan melakukan, bagaimana melakukan, kapan dan dimana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana cara sosialisasi (diseminasi) dan pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan hasil keputusan.

Agar sosialisasi berjalan sesuai dengan keputusan hukum, maka perlu memperhatikan: (1) aspek politik, berusaha agar hasil *baḥtsul masail* dapat dijadikan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah; (2) aspek budaya, berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap hasil-hasil *baḥtsul masail* melalui berbagai media massa dan forum, misalnya *majlis ta'lim* atau lainnya; (3) aspek ekonomi, terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (4) aspek sosial, terkait upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan kondisi sosial lainnya.

Tradisi *bahtsul masail* yang selama ini berjalan sering dinilai sebagai produk hukum yang tidak memiliki landasan hukum kuat. Pasalnya, setiap ketentuan hukum hasil *bahtsul masail* kadang tidak mencantumkan ayat al-Qur'an maupun al-Hadits serta dalil-dalil syara' lainnya. Untuk memberi kekuatan dan kepastian hukum yang kuat, maka setiap produk hukum harus mencantumkan ayat al-Qur'an dan al-Hadits ataupun dalil-dalil syara' lainnya (Hasil Mukhtamar NU 32, 2010). Setiap hukum hakikatnya pasti berlandaskan dari salah satu dan atau perpaduan dari ketiga sumber tersebut.

Sesungguhnya pencantuman ketiga sumber hukum tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama (*mujtahid*) yang terdapat dalam *ketub al-mu'tabarah*, bukan dari pengambilan langsung dari sumber-sumber pokok hukum Islam oleh peserta *bahtsul masail*. Hal tersebut karena menyadari, bahwa yang mampu berijtihad langsung dari al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya adalah para mujtahid, yang menurut aturan berijtihad sudah memenuhi persyaratan untuk berijtihad.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di muka, dapat diambil pemahaman, bahwa *bahtsul masail* merupakan forum pengambilan hukum Islam atas berbagai persoalan atau kejadian yang belum memiliki ketentuan hukum. Agar memperoleh kepastian hukum yang padu, dalam penetapan hukum perlu melibatkan kajian dari berbagai disiplin ilmu, serta melihat proses dan dampak dari ketetapan hukum. Diperlukan proses pelatihan yang mendalam agar penguasaan metode pengembangan *bahtsul masail* serta aplikasinya dapat membuahkan hasil yang efektif.

Mengingat bahwa masyarakat terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan teknologi, permasalahanpun mengalami perubahan secara cepat. Menurut Badrun (2000), perumusan hukum fiqh membutuhkan pendekatan baru agar produk hukum tidak tertinggal dari dinamika perubahan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: (1) Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh guna mencari konteksnya yang baru; (2) Menggeser sikap dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qanly*) menjadi bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhajy*); (3) Melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); (4) Menempatkan hukum fiqh sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif; (5) Melakukan pemahaman metodologis dan filosofis terhadap masalah-masalah sosial budaya yang baru.

Melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan *bahtsul masail* secara terencana, kaderisasi keulamaan yakin akan dapat dipersiapkan dari masa ke masa, sehingga kelestarian agama besar kemungkinan dapat terpelihara.

REVITALISASI PERAN KAWULA MUDA NU DALAM MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI ASWAJA

Nyaris tidak terdengar kegiatan ataupun peran dari kawula muda NU dalam mengawal keberhasilan pilpres pada 8 Juli yang baru lalu terhadap salah satu pasangan capres yang konon didukung oleh kekuatan (meskipun tidak secara terang-terangan) struktural ormas NU dengan hasil yang mengecewakan. Kalaupun ada, peran itu larut dalam sebuah gerakan kelembagaan tertentu yang memang telah dipersiapkan sejak awal. Kegiatan dukung-mendukung dalam kegiatan pilpres memang tidak menjadi barometer untuk mengukur kesetiaan seseorang terhadap lembaga dimana ia berhidmah, apalagi kegiatan itu hanya sebagian fenomena politik praktis yang tidak harus dikait-kaitkan secara mendalam dengan garis perjuangan organisasi NU yang berbasis normareligius. Dasar, tujuan dan strategi telah terbakukan dalam AD-ART, yang lebih signifikan untuk melihat seberapa besar loyalitas warga dalam mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan.

Permasalahan mendasar bukan karena pilpresnya, akan tetapi lebih pada tindakan perselingkuhandi berbagai pihak terhadap kesepakatan yang telah dibangun bersama atas dasar kesepahaman melalui struktur kelembagaan organisasi. Dampak dari peristiwa itu, banyak pihak menilai bahwa kepemimpinan NU sudah tidak lagi efektif untuk menjadi panutan umat. Arahan dan bimbingan tidak lagi menjadi penyejuk dikala umat kehausan informasi, akan tetapi cenderung menjadi bahan perbincangan pemicu konflik di antara sesama warganya. Yang lebih menyakitkan adalah munculnya keinginan agar NU dieliminasi menjadi kekuatan politik saja atau berubah menjadi partai politik.

Terkait dengan pokok permasalahan dalam tema tulisan ini, muncul pertanyaan, ke arah mana peran orang-orang muda NU harus direvitalisasi dan nilai-nilai aswaja yang bagaimana harus dijunjung tinggi? Dua pertanyaan ini menjadi bahan renungan yang mesti harus dijawab melalui berbagai forum diskusi untuk memperoleh gambaran yang jelas agar idealisme kelompok orang muda NU mudah diposisikan yang selanjutnya bersedia mengabdikan kepada umat melalui organisasi.

Merumuskan Peran

Secara sosiologis, peran muncul jika seseorang memiliki status atau posisi dalam sebuah komunitas. Status tidak dimaknai harus memangku jabatan, minimal menjadi anggota dari perkumpulan atau organisasi sudah cukup untuk menyandang memiliki status. Lahirnya status yang berlanjut pada kemunculan peran terbangun atas dasar idealisme berbasis nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah yang menjadi pemberi semangat (motivator) dan tanggung jawab moral (*moral responsibility*) mengapa seseorang bersedia dan rela untuk berjuang melalui organisasi.

Seseorang dapat dikembangkan perannya, setidaknya memiliki beberapa persyaratan antara lain: *pertama*, lintasan hati yang kuat (*kehowathirul qulub*) atau kemauan kuat yang berujung pada realisasi keinginan menjadi tindakan nyata, tanpa ini sulit menjadikan seseorang untuk berperan. *Kedua*, sandaran nilai-nilai *religius* yang kuat sebagai tumpuan spiritual untuk menjadikannya akhir dari sebuah perbuatan yang bersandar pada kehendak Allah Swt. *Ketiga*, memahami lingkup pengetahuan dari aktivitas yang akan atau sedang dijalankan, setidaknya memiliki keterampilan dasar yang diperlukan. *Keempat*, sarana untuk melakukan kegiatan, sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tidak harus ada unsur pemaksaan diri dalam merealisasikan.

Dalam kenyataan banyak variasi strategi seseorang berpartisipasi dalam organisasi. Sifat dan karakter akan banyak mewarnai gaya seseorang melakukan kegiatan, untuk mengenalnya membutuhkan latihan bersosialisasi dan berinteraksi melalui berbagai aktivitas. Pemahaman terhadap variasi gaya hidup masyarakat menjadi dasar proses pendewasaan dan kematangan dalam diri seseorang yang mesti harus dilalui oleh seorang kader. Proses kaderisasi yang diambil Nahdlatul Ulama (NU), sesuai dengan tingkat kematangan dan kedewasaan berdasarkan kriteria usia kader. Dengan begitu, kualitas organisasi tidak saja terbangun atas dasar pengetahuan dan keterampilan, namun juga kewibawaan atas dasar usia.

IPNU dan IPPNU sebagai pintu awal melakukan pengabdian di lingkup organisasi berbasis Islam berdasar *Ahlussunnah Waljamaah*, menjadi lahan strategis untuk latihan berdakwah. Selain mendapatkan bekal pengetahuan atau keterampilan yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan yang lebih panjang, melalui organisasi diperoleh banyak hal terutama berlatih bagaimana harus merumuskan kebijakan atas persoalan yang muncul dengan melibatkan banyak orang, melaksanakan kebiakan, mengendalikan, dan mengevaluasinya, semua itu justru tidak didapatkan melalui pendidikan formal. Oleh karenanya, di masyarakat sering tampil beda, seorang pemimpin dengan latar belakang pengalaman organisasi dibanding dengan pimpinan yang lain. Dari sini akan dapat dibaca dari mana dan ke mana peran kawula muda NU harus memulai berlatih memerankan diri.

Rumusan Nilai-Nilai Aswaja

Secara semantik arti *Ahlussunnah wal jama'ah* adalah sebagai berikut. *Ahl* berarti pemeluk, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau pengikut madzhab (*ashab al-madzhab*). *Al-Sunnah* mempunyai arti jalan, di samping memiliki arti al-Hadist. Jika disambungkan dengan *ahl* keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in. *Al-Jamaah* berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, *Ahlussunnah wal Jama'ah* berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in.

Ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja adalah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam Qanun Asasi (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari juga tidak disebutkan definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam Qanun tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan dimana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam bidang fiqh menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (*madzhabul arba'ah* – Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf atau akhlak menganut Imam Abu Qosim Junaidy al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama sejak waktu berdirinya (1926). Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 (1994), muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab? Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut *Ahlussunnah wal Jama'ah* menggunakan produk hukum atau pandangan para Ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistemologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat madzhab di dalam madzhab?

Dua gugatan tersebut dan ditambah lagi kajian yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai *manhaj al-fiker* atau metode berpikir. Dari sini kita menempatkan bahwa *Ahlussunnah wal-jama'ah* adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai *manhaj al-fiker*.

Sebagai *manhaj al-fiker*, dalam amaliah keseharian Aswaja berpegang pada prinsip-prinsip *tawasuth* (moderat), *ta'adul* (netral), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum (*istinbath*) yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan nash. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan nash (al-Qur'an dan al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal (Mu'tazilah) dan golongan fatalis.

Sikap netral (*ta'adul*) berkaitan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau pemerintahan dari kriteria dan pra syarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap *ta'adul*, pandangan Aswaja tidak terkotak dalam kubu mendukung atau menolak sebuah rezim. Aswaja, tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama, namun tidak juga

berarti mendukung sebuah pemerintahan. Apa yang dikandung dalam sikap *ta'adul* tersebut adalah memperhatikan bagaimana sebuah kehidupan sosial-politik berjalan, apakah memenuhi kaidah atau tidak.

Keseimbangan (*tawazun*) dan toleran (*tasamuh*) terefleksikan dalam kehidupan sosial, cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul sebagai Muslim dengan golongan Muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural, dalam budaya, etnis, ideologi politik dan agama, dipandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Artinya bahwa Allah SWT memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali *tawazun* dan *tasamuh*.

Itulah rumusan nilai-nilai Aswaja yang perlu dipahami oleh semua pihak yang mengaku sebagai kader agar di kemudian hari bisa mengembangkan lebih luas dan diaplikasikan dalam kehidupan melalui pelatihan maupun bentuk pendalaman lainnya. Sebagai kader ada tanggung jawab moral yang besar untuk melanjutkan perjuangan para Ulama dalam mengembangkan Aswaja dalam realitas kehidupan agar tidak mengalami kepunahan.

BAB III

POLITIK SEBAGAI ETIKA SOSIAL

AMBIGUITAS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

Kebijakan otonomi dan desentralisasi merupakan respon positif dari pemerintah terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk di bidang pendidikan.

Kepedulian pemerintah dalam memberikan kewenangan daerah, selanjutnya digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi yang menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, membutuhkan kesiapan semua perangkat sekolah, meliputi kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan di tingkat bawah. Desain pendidikan yang dapat mengakomodasi seluruh elemen pokok diharapkan muncul dari pemerintah kabupaten dan kota, sebagai penerima wewenang otonomi. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralistik) diubah untuk mengikuti tuntutan yang sedang berkembang. Kebijakan otonomi daerah seperti itu akan memberikan pengaruh terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional dalam melaksanakan kegiatan kependidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah, sesungguhnya adalah pemberian otonomi kepada sekolah dalam pelaksanaan manajemen. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini diberikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, maka Diknas menamakan MBS sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Terkait dengan penerapan MBS, pertanyaan yang sering diajukan adalah tentang hasil yang didapat, bagaimanakah respon sekolah dan masyarakat setelah ada penerapan MBS? Benarkah penerapan MBS memang benar-benar dapat mendongkrak mutu pendidikan?

Kenyataan di lapangan menunjukkan hasil berbeda, seperti penelitian tahun 2001 oleh Smyth, dengan tegas mengkritik kebijakan penerapan MBS yang sering diawali dengan bujukan finansial kepada sekolah-sekolah untuk menerapkannya (ingat dengan kebijakan BOMM atau Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk sekolah-sekolah di Indonesia), kemudian ditarik atau dihapus secara tiba-tiba, sehingga sekolah harus (kebingungan) mencari sendiri dana penggantinya. Smyth juga menyimpulkan bahwa MBS lebih menguntungkan bagi sekolah yang lebih baik sumber dayanya (secara finansial dan tenaga pengajar)

daripada sekolah yang lemah. Dengan kata lain, sekolah bagus tetap bagus, tetapi yang buruk akan tetap buruk atau malah cenderung memburuk.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa dibalik manfaat teoritis MBS yang cenderung bersifat retorika tersembunyi kenyataan bahwa penerapan MBS di lapangan justru dapat membawa dampak sebaliknya. Ini karena kenyataan implementasi di lapangan sering jauh dari harapan yang diinginkan sebelumnya. Malah ada kecenderungan bahwa MBS secara relatif tidak berdampak jauh lebih positif dibandingkan dengan dari model manajemen sebelumnya.

Kenyataan di negara-negara maju ternyata juga terjadi di Indonesia. Tak lama setelah 'proyek coba-coba pemberlakuan MBS dengan dana yang tak sedikit di beberapa kota sejak tahun 1999, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Misalnya saja, retorika MBS akan membawa otonomi bagi sekolah, seperti amanat *Propenas* tahun 2000 bahwa, MBS di Indonesia dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas menyampaikan penjelasan bahwa, MBS akan diberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan semua sumber pendidikan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun yang terjadi adalah kewenangan ini diambil alih oleh banyak pemerintah daerah yang justru enggan mendelegasikan otoritas kepada sekolah (Nurkholis, 2003), bahkan ada daerah yang justru mengurangi kewenangan sekolah dari sebelumnya.

Indra Jati Sidi, kepala Direktorat Dikdasmen saat itu, percaya bahwa dengan MBS sekolah bisa mandiri dan memilih sendiri kepala sekolah masing-masing, pada kenyataannya praktek demokratis ini sangat jarang dan tidak terdengar lagi sejak proyek-proyek MBS dari pusat berakhir tahun 2003. Jika pada awal-awal proyek MBS, wewenang sekolah sangat besar misalnya dengan diberikan otoritas untuk menentukan sendiri kelulusan siswanya dengan adanya penghapusan *Ebtanas* (evaluasi tahap akhir nasional) dan pemberlakuan *UAS* (ujian akhir sekolah) di tahun 2001, namun sejak tahun 2003 kebijakan yang sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi sekolah tersebut ditarik kembali dan diganti dengan model ujian nasional baru (*UAN*) yang menegaskan kembali model kontrol sentralis terhadap sekolah-sekolah sama seperti di masa lalu. Dari contoh di atas, tak salah bila pesimisme masyarakat akan segera dirasakannya dampak positif MBS seperti diharapkan sebelumnya akan meningkat.

Permasalahannya sekarang adalah, dimanakah letak kesalahan atau kekurangannya, sehingga kebijakan yang baru dijalankan dan belum mendapat penilaian menyeluruh sudah ditarik kembali? Bagaimana dengan program otonomi dan desentralisasi daerah yang merupakan dasar munculnya penerapan MBS? Jawaban dari pertanyaan ini membutuhkan berbagai penelusuran, baik dari pelaksanaannya kebijakan itu sendiri di lapangan, maupun unsur-unsur dari sarana dan prasarana yang mendukung.

Kajian Konsep dan Teori

Lingkup kajian kebijakan -dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kebijakan publik- sangat luas, definisinya sama luasnya dengan aspek-aspek yang menjadi bidang kajian. Dari mana melihat dan dalam aspek apa yang menjadi kajian akan melahirkan definisi kebijakan yang berbeda. Beberapa definisi antara lain dikemukakan oleh Carl J. Friedrich (1963), "Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu." Pengertian sederhana yang cukup jelas seperti disampaikan Thomas R. Dye (1963), "kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan," Menurut George C. Edwards III & Ira Sharkansky (1978), "kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah."

Dengan mempelajari beberapa konsepsi dan definisi tentang kebijakan publik sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa kebijakan publik itu memiliki banyak dimensi, sehingga untuk memahaminya diperlukan langkah-langkah mengidentifikasi karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri. Beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*); *kedua*, adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan; *ketiga*, merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik; *keempat*, adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

Kebijakan publik dapat memberikan kepuasan manakala memperhatikan siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda (*two distinct functions of government*), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi (Joko Widodo, 2007). Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan (*public policy making*) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara (*has to do with policies or expression of the state will*). Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*has to do the execution of these policies*). Jadi, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (*political master*), dan melaksanakan kebijakan politik tersebut merupakan kekuasaan administrasi negara.

Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, hakekatnya memberi kewenangan dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (E. Mulyasa, 2007). Otonomi luas

secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Bentuk otonomi yang bertanggung jawab merupakan perwujudan dan pertanggung-jawaban terhadap pemberian hak dan wewenang kepada daerah. Bentuk tugas yang menjadi tanggung jawab daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dalam bidang pendidikan memiliki konsekuensi bahwa kebijakan nasional perlu direkonstruksi daerah untuk kepentingan upaya peningkatan mutu pendidikan, efisiensi, pengelolaan pendidikan, dan relevansi pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan. Sehubungan dengan tujuan itu, menurut Mulyasa (2007) terdapat empat kebijakan yang perlu dilakukan: *pertama*, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan semua lapisan masyarakat. Kemungkinan perbedaan standar kompetensi antar sekolah maupun antar daerah akan menjadi pertimbangan dalam menyusun standar kompetensi nasional dengan tingkatan standar minimal, normal, dan unggulan.

Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan merujuk pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. Strategi yang dilakukan adalah memberi kepercayaan yang luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. *Ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan mengacu pada pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Bentuk aksi yang dilakukan seperti peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level penyusunan kebijakan dan level operasional melalui komite sekolah. *Keempat*, pemerataan pelayanan pendidikan mengacu pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini dimaksudkan sebagai implementasi penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, pelaksanaan pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), terdapat beberapa tujuan yang menjadi sasaran utama (Azyumardi Azra, 2004): *pertama*, membantu pemerintah dalam mobilisasi SDM setempat dan dari luar serta meningkatkan peran masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. *Kedua*, mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima sosial budaya. *Ketiga*, mendukung inisiatif pemerintah dalam

meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan anggota masyarakat lainnya melalui kebijakan desentralisasi. *keempat*, mendukung peranan masyarakat mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran sekolah; dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi; pembukaan kesempatan lebih besar dalam memperoleh pendidikan; peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk wajib belajar pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Dari kajian otonomi pendidikan dapat dimengerti bahwa desentralisasi pendidikan tidak berarti penciptaan substansi pendidikan menjadi substansi yang sangat bersifat lokal dan sempit, dengan orientasi pendidikan yang bersifat *provinsialistik* dan dapat merangsang penguatan sentimen kedaerahan. Desentralisasi pendidikan dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri dalam bidang pendidikan, namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti itu, maka desentralisasi pendidikan akan mendorong terbentuknya rasa percaya diri di lingkungan masyarakat daerah menuju peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang lengkapnya merupakan pendekatan *School Base Quality Management* merupakan konsep yang menekankan kerja sama erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawab masing-masing. Menurut konsep ini, sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya. Kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikan ke dalam kebijakan mikro melalui bentuk-bentuk program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.

Pendekatan ini menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah. Sekolah menurut konsep ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya, berkaitan dengan masalah-masalah administrasi, keuangan dan fungsi personal setiap sekolah di dalam arah dan kebijakan yang telah dirumuskan. Strategi MBS dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan penyusunan basis data dan profil sekolah yang lebih representatif, akurat, valid dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif dan keuangan. Tahap selanjutnya melakukan evaluasi diri (*self assessment*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sumber daya sekolah dalam mencapai target kurikulum.

Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepala sekolah dan mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya MBS bertujuan untuk: *pertama*; meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;

kedua; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; *ketiga*; meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; *keempat*; meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Dalam mengimplementasikan MBS terdapat 4 (empat) prinsip yang harus difahami, yaitu berhubungan dengan kekuasaan, pengetahuan, sistem informasi, dan sistem penghargaan.

Kekuasaan Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru dan orangtua siswa.

Seberapa besar kekuasaan sekolah tergantung seberapa jauh MBS dapat diimplementasikan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana dalam teori MBS tidak mungkin dilaksanakan dalam seketika, melainkan ada proses transisi dari manajemen yang dikontrol pusat ke MBS. Kekuasaan yang lebih besar dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan: (1) melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orangtua siswa; (2) membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya; (3) menjalin kerjasama dengan organisasi di luar sekolah.

Pengetahuan Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat berbagai pelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf adalah: (1) pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah, (2) memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *quality assurance*, *quality control*, *self assessment*, *school review*, *benchmarking*, *SWOT*, dan lain-lain.

Sistem Informasi Sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki informasi yang jelas berkaitan dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat mengambil peran dan partisipasi. Disamping itu ketersediaan informasi sekolah akan memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitan dengan kemampuan guru dan Prestasi siswa

Sistem Penghargaan Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan siswa. Dengan sistem ini diharapkan akan muncul motivasi dan ethos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang dikembangkan harus bersifat adil dan merata.

Berdasarkan analisa tersebut, sekolah mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan visi, misi serta tujuan. Penyusunan program jangka panjang dan jangka pendek termasuk anggarannya merupakan langkah selanjutnya. Satu tahap diatas penyusunan prioritas yang seringkali tidak terealisasi dalam waktu satu tahun program sekolah, harus dibuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci dan prioritas kebijakan. Tahap yang juga penting adalah monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat terlaksana atau tidak.

Dalam pelaksanaan MBS, untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, semester, dan bulanan. Program mingguan atau program satuan pelajaran, dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Menurut Mulyasa (2007), terkait dengan penjabaran tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama; tujuan yang dikehendaki harus jelas, makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang di kembangkan untuk mencapai tujuan; *Kedua*; Program itu harus sederhana dan fleksibel, *Ketiga*; Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, *Keempat*; Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas penyampaianannya, *Kelima*; Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah.

Dalam pelaksanaan lebih lanjut perlu dipersiapkan berbagai alat dan kelengkapan seperti pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang diperlukan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, aturan penilaian dan norma kenaikan kelas termasuk norma kelulusan, pencatatan kemajuan belajar siswa, serta peningkatan perbaikan pembelajaran, dan pengisian waktu luang. Semua itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang membutuhkan kreativitas dan ketrampilan yang memadai dalam mengimplementasikan konsep-konsep kepemimpinan. Pendistribusian tugas dan tanggung jawab harus dibangun secara adil dan proporsional, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi semua anggota secara efektif.

Model-Model MBS

Untuk memahami konsep MBS lebih jauh, ada beberapa model MBS seperti dikemukakan Leithwood dan Menzies (1986), yang menemukan empat model MBS dari hasil penelitiannya, yaitu:

1. Kontrol administratif, kepala sekolah dominan sebagai representasi dari administrasi pendidikan;
2. Kontrol profesional, pendidik menerima otoritas;
3. Kontrol masyarakat, kelompok masyarakat dan orangtua peserta didik, melalui Komite Sekolah, terlibat dalam kegiatan sekolah;
4. Kontrol secara seimbang, orangtua siswa dan kelompok profesional (kepala sekolah dan pendidik) saling bekerja sama secara seimbang.

Keempat model MBS tersebut sebenarnya merupakan berbagai varian yang muncul dalam proses pemberian otonomi. Pada awal pemberian otonomi, model yang pertama (kepala sekolah dominan) telah lahir dengan sosok sebagai raja-raja kecil yang berkuasa di berbagai satuan organisasi, termasuk kabupaten atau kota sampai dengan satuan pendidikan sekolah. Model kedua, para guru telah dilibatkan dalam manajemen sekolah. Model ketiga, masyarakat dan orangtua siswa telah dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Model keempat adalah model ideal yang diharapkan. Model keempat ini merupakan model hubungan sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tahap model keempat, perlu sosialisasi konsep MBS ke semua perangkat lembaga pendidikan. Melalui pemahaman yang mendalam, serta kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan, manajemen sekolah dapat dijalankan sesuai harapan untuk mencapai tujuan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah beserta seluruh staf dan para guru. Tahapan model menunjukkan tingkat pelaksanaan MBS yang dapat dicapai, sekaligus menunjukkan kualitas keberhasilan manajemen yang dijalankan.

Implementasi Kebijakan

Untuk melihat seberapa jauh tingkat implementasi kebijakan otonomi daerah dan pelaksanaan MBS, perlu melihat dari parameter konsep. Menurut Bridgman dan Davis (2004), dalam sebuah kebijakan sedikitnya memiliki 3 (tiga) dimensi yang saling berkaitan, yakni kebijakan sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), kebijakan sebagai hipotesis (*hypothesis*), dan kebijakan sebagai tujuan (*objective*).

Kebijakan sebagai pilihan tindakan legal menunjukkan bahwa, rumusan kebijakan berawal dari proses identifikasi permasalahan yang muncul di masyarakat yang menjadi salah satu alternatif jawaban untuk memberikan solusi. Dalam konteks otonomi daerah dan implementasi MBS, tujuan cukup jelas yakni memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola pendidikan agar peningkatan

kualitas pendidikan dapat membawa hasil yang lebih baik. Karakteristik daerah dan potensi siswa dapat dilihat secara lebih cermat, sehingga segala kebutuhan dan persiapan yang berhubungan dengan proses pembelajaran dapat didesain. Berbagai perangkat yang diperlukan antara lain keputusan tentang standarisasi pendidikan telah dipersiapkan meskipun belum semua mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) mengenai petunjuk pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 2, bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian pendidikan. Kesemuanya menjadi standar mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan di daerah. Berbagai kewenangan menyangkut penyusunan perangkat pendidikan dan pembelajaran serta sarana lain menjadi tanggung jawab kepala sekolah bersama semua unsur tenaga kependidikan dan masyarakat di daerah.

Kebijakan sebagai hipotesis, didalamnya memberikan perkiraan-perkiraan (proyeksi) ke depan yang memberikan kemungkinan solusi atas permasalahan yang muncul. Tindakan yang dirumuskan berangkat dari berbagai asumsi yang mampu memberikan dorongan masyarakat untuk bertindak guna mencapai suatu keberhasilan, atau tidak untuk bertindak dan berikhtilaf langkah-langkah yang harus ditempuh. Hipotesis membutuhkan kalkulasi aspek ekonomi dan sosial dari para ahli maupun penyusunnya, termasuk berbagai kemungkinan pelajaran atau temuan yang dapat dihasilkan.

Pengalaman dan temuan baru perlu direspon untuk menjadi masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan. Seberapa jauh kesesuaian keinginan dan tujuan dari implementasi MBS dengan kenyataan hasil menjadi penentu keberhasilan rumusan hipotesis yang diprediksikan. Selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.

Kebijakan sebagai tujuan (*objective*), dimaksudkan selain sebagai alat kebijakan juga menjadi tujuan. Agar kebijakan tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan, harus dilandasi tahapan kebijakan yaitu perencanaan dan evaluasi. Beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan antara lain: (1) Apa maksud atau fungsi sebuah kebijakan? (2) Bagaimana kebijakan akan mempengaruhi agenda pemerintah secara keseluruhan, departemen-departemen pemerintahan, kelompok-kelompok klien, kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat banyak? (3) Apa dan bagaimana hubungan antara alat-alat implementasi dengan tujuan-tujuan kebijakan? (4) Apakah ada alat atau mekanisme implementasi yang lebih sederhana? (5) Bagaimanakah kebijakan itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain? dan (6) Dapatkah kebijakan baru itu menghasilkan perbedaan seperti yang diharapkan?

Berdasarkan kajian tiga komponen tersebut, menunjukkan bahwa melalui lingkaran pengambilan tindakan yang legal berdasarkan hipotesis yang dirumuskan semua tahapan itu untuk mencapai tujuan. Ketiga dimensi saling mempengaruhi satu sama lain dengan maksud agar menghasilkan kebijakan yang efektif, sekaligus siap menghadapi tantangan yang perlu dicari solusinya.

Kebijakan Standarisasi Pendidikan Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber daya manusia (*man*) menjadi faktor utama dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, namun dalam prakteknya banyak terjadi hal-hal yang ambigu (*rancu*), misalnya peran kepala sekolah dalam implementasi MBS menjadi pengendali utama dalam menggerakkan semua komponen sekolah. Pada kenyataannya bisa terjadi lain, seperti kualitas pendidikan lebih ditentukan oleh cara sekolah mengelola sumber daya daripada ketersediaan sumber dayanya sendiri. Sumber daya yang ada di sekolah boleh jadi akan menjadi mala petaka bagi semua pihak karena kepala sekolah tidak dapat mengelolanya secara transparan. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, kedua faktor tersebut (ketersediaan sumber daya dan proses belajar mengajar) harus dikelola secara profesional oleh pihak sekolah.

Ada beberapa alasan mengapa terjadi langkah seperti itu, *pertama*, kurangnya pemahaman fungsi dan peran kepala sekolah berkaitan dengan implementasi otonomi pendidikan, yang lebih menekankan manajemen partisipatif (*management of participation*). *Kedua*, akibat pengaruh kepemimpinan sebelumnya yang menempatkan kepala sekolah sebagai penguasa tunggal yang otoritatif, akibatnya pihak lain diposisikan sebatas sebagai pembantu pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan. *Ketiga*, sikap apatis unsur-unsur lembaga pendidikan yang lain, seperti guru dan tenaga kependidikan termasuk komite sekolah dalam memberikan masukan dan pengawasan kepada pihak kepala sekolah sebagai penanggung jawab manajemen tentang perkembangan mutu pendidikan. Akibatnya, terjadi kondisi yang cenderung stagnan, karena tidak ada motivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran.

Penerapan MBS di sekolah sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pihak penguasa lokal maupun dari masyarakat. Pemerintah daerah yang lemah tidak dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip manajemen modern (demokratis, transparan, dan akuntabel). Pelaksanaan MBS di sekolah, seperti dalam mengelola dana BOS dan DAK, pihak kepala sekolah dan Komite Sekolah masih juga memperoleh tekanan dari berbagai pihak. Campur tangan pemerintah daerah pada umumnya bukan dalam bentuk supervisi yang positif, tetapi justru berupa intervensi negatif. Itulah sebabnya penerapan MBS di sekolah pada sisi yang lain menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya KKN di level birokrasi yang paling bawah. Akibatnya, ada kepala sekolah yang kemudian tidak mau pekerjaan manajemen yang berat ini, karena alasan beban berat sebagai

pemimpin instruksional (*instructional leader*) atau pemimpin dalam bidang kependidikan (*pedagogical leader*) menjadi amburadul, lantaran disibukkan oleh pekerjaan teknis administratif dan manajerial yang harus dituntaskan setiap hari. Dengan beban pekerjaan yang berat ini, ada beberapa kepala sekolah di SD yang terpaksa harus belanja komputer, buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), karena SD tidak memiliki staf administrasi sebagaimana di SMP dan SMA. Akibatnya, pelaksanaan MBS di sekolah menjadi dilema (Dempster, 2000). Bahkan penerapan MBS boleh jadi menimbulkan stres berat bagi kepala sekolah.

Menurut Suparlan (2007), penerapan MBS ternyata juga sarat dengan masalah bias gender. Karena banyak kepala sekolah wanita yang merasakan keberatan untuk melaksanakan beban berat mengurus bidang administrasi dan manajemen tersebut. Seorang kepala sekolah di sebuah SMA menjelaskan bahwa, sekolahnya terpaksa menolak bantuan *block grant* dari pemerintah. Alasannya sudah jelas, karena urusan teknis edukatif di sekolahnya menurutnya menjadi tidak terurus dengan baik lagi.

Penerapan MBS juga mengalami masalah, khususnya di daerah yang pedesaan atau daerah yang terpencil (*remote areas*). Banyak orangtua siswa dan masyarakat di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan Komite Sekolah. Masalahnya ternyata bukan hanya karena masalah kapasitasnya yang rendah, tetapi lebih karena budaya yang hanya menyerahkan bulat-bulat urusan pendidikan kepada pihak sekolah. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerapan MBS lebih sebagai instrumen politik untuk membangun kekuasaan. Dengan MBS, seakan-akan pemerintah telah memberikan otonomi kepada sekolah, padahal sesungguhnya sekolah dan masyarakat belum siap untuk menerima semua itu. Hal yang sama pun terjadi di negara maju seperti di negara bagian Australia. Representasi dari masyarakat kelompok minoritas dinilai kecil dalam komposisi pengurusan Komite Sekolah (Suparlan, 2007).

Dalam hal pengelolaan kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Kerancuan terjadi manakala penentuan penilaian akhir hanya didasarkan pada hasil ujian yang menggunakan standar kelulusan dari pusat. Pada sisi lain proses pembelajaran dan pelaksanaan dikelola oleh sekolah, sehingga akan membingungkan makna otonomi pendidikan yang sebenarnya sudah menjadi wilayah pengelolaan daerah dalam hal ini adalah pihak sekolah.

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia

di sekolah. Secara umum, strategi, metode, teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa. Proses pembelajaran dilaksanakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Dalam konteks pengelolaan ketenagagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (*reward and punishment*), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya) dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan atau imbal jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Menyangkut tenaga kependidikan telah diatur dalam pasal 28, bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikutnya kualifikasi akademik ditunjukkan dengan ijazah minimal diploma IV atau sarjana (Ps. 29 ayat 1-3). Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Ps. 28 ayat 3).

Untuk mengejar standar pendidik dan tenaga kependidikan dibutuhkan kemampuan sekolah untuk menyediakan SDM melalui dua kegiatan, yaitu rekrutmen tenaga baru sesuai kualifikasi yang ditetapkan atau dengan menyekolahkan tenaga yang telah ada ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan standar. Namun, hal ini jelas menjadi beban berat sekolah terutama dalam pendanaan. Sedangkan menunggu bantuan tenaga guru negeri hasil rekrutmen dari Pemerintah, merupakan hal yang sangat sulit diwujudkan, mengingat masih terdapat beberapa sekolah negeri yang kekurangan tenaga yang mesti arus diprioritaskan. Di sisi lain tuntutan standarisasi tenaga kependidikan, proses pembelajaran dan terlebih lagi standar penilaian melalui ujian nasional harus segera diwujudkan.

Pengelolaan Keuangan (*Money*)

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian dan penggunaan uang sudah sepatutnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian dan penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (*income generating activities*) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Merujuk pada pasal 62 tentang standar pembiayaan, bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya, biaya investasi dimaksudkan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan untuk biaya operasi meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan pendidikan habis dipakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

Melihat berbagai pembiayaan untuk memenuhi standar, tentunya cukup berat apabila tidak ada dana subsidi terutama untuk sekolah-sekolah swasta, khususnya dari pemerintah. Kerancuan yang terjadi dalam hal subsidi dana pendidikan antara lain ketidak-adilan dalam besarnya subsidi yang diberikan pemerintah kepada sekolah negeri dengan sekolah swasta. Padahal secara makro kontribusi sekolah swasta dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa jumlahnya sekolah swasta lebih besar dari pada sekolah negeri, hal ini terjadi baik pada sekolah umum maupun madrasah.

Secara kuantitatif menurut Ki Supriyoko dengan merujuk data Balitbang Depdiknas (2000), jika diperbandingkan bagaimana dengan keberadaan sekolah negeri dan swasta di negara kita, dapat diuraikan bahwa secara kuantitatif jumlah sekolah swasta di Indonesia sangat signifikan di dalam sistem pendidikan nasional. Kalau ditampilkan detail angka-angka perbandingan di antara sekolah umum negeri dengan swasta, adalah sebagai berikut: dari 150.197 SD, 10.306 lembaga, atau 7 persen di antaranya merupakan SD swasta; dari 20.866 SLTP, 10.371 lembaga atau 50 persen di antaranya merupakan SLTP swasta; dan dari 15.647 Sekolah Menengah, 11.435 atau 73 persen di antaranya merupakan Sekolah Menengah swasta.

Sementara itu untuk sekolah keagamaan bisa dijelaskan sebagai berikut: dari sebanyak 21.454 MI, 20.000 lembaga, atau 93 persen di antaranya merupakan MI swasta; dari sebanyak 9.850 MTs, 8.672 lembaga atau 88 persen di antaranya merupakan MTs swasta; dan dari 3.578 MA, 2.977 lembaga, atau 83 persen di antaranya berupa MA swasta.

Dari angka-angka perbandingan tersebut jelas sekali bahwa keberadaan sekolah swasta, baik umum maupun keagamaan, sangat signifikan. Di satuan sekolah menengah dan perguruan tinggi, bahkan lembaga swasta yang notabene diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan lebih dominan dibandingkan dengan lembaga negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian dalam konsep kesetaraan antara pendidikan negeri dan swasta sudah tidak menjadi masalah bila dilihat dari kaca mata kuantitas.

Dalam konsep kesetaraan kualitas harus diakui sejujurnya bahwa meski secara kasus per kasus banyak sekolah swasta yang lebih berkualitas daripada sekolah negeri, tetapi secara umum kualitas sekolah-sekolah negeri memang lebih memadai daripada sekolah swasta. Apabila kita berbicara secara kasus per kasus, saat ini memang banyak sekolah swasta yang bermutu karena pengelola sekolah yang bersangkutan mengambil *benchmark* dengan sekolah-sekolah serupa di luar negeri yang kualitasnya sudah diakui oleh masyarakat internasional.

Untuk Sekolah Menengah Umum (SMU), misalnya di Jakarta ada SMU swasta menetapkan *benchmark* dengan SMU di Victoria, Australia hingga para lulusan SMU swasta ini diakui oleh *Victorian Board of Education* (VBE). Implikasinya lulusan SMU swasta kita ini bisa langsung masuk ke berbagai perguruan tinggi di Australia tanpa matrikulasi atau *foundation*. SMU swasta lain di Jakarta juga ada yang menetapkan *benchmark* dengan SMU-SMU serupa di negara-negara Eropa hingga para lulusan SMU swasta ini diakui oleh *International Baccalaureate Organization* (IBO). Implikasinya lulusan SMU swasta kita ini dapat langsung masuk ke berbagai perguruan tinggi di Eropa tanpa matrikulasi atau *foundation*. Contoh di lingkungan pendidikan keagamaan, lulusan pendidikan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo misalnya, dapat langsung diterima perguruan tinggi Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Pakistan, Arab Saudi, Yaman, Malaysia, dan bahkan di Negara Barat. Hal seperti ini belum dilakukan oleh SMU/MA negeri mana pun di Indonesia.

Kalau misalnya kita memilih sepuluh SD, SLTP, SMU, dan SMK di negeri ini bukan tidak mungkin semuanya akan didapatkan nama-nama sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Demikian pula kalau kita ingin memilih sepuluh MI, MTs, dan MA. Namun, keadaan yang demikian itu hanya terjadi pada sedikit sekolah swasta. Kebanyakan sekolah swasta di negara kita belum mempunyai kualitas yang pantas diandalkan. Kebanyakan sekolah swasta tidak memiliki sarana pendidikan dan fasilitas belajar yang memadai serta belum memiliki persediaan guru profesional secara memadai. Mayoritas sekolah swasta tidak memiliki sarana pendidikan dan fasilitas belajar yang memadai serta belum mempunyai persediaan guru yang profesional secara memadai pula. Keadaan seperti ini lebih dirasakan pada sekolah-sekolah keagamaan.

Dengan keadaan seperti itu, lulusan sekolah swasta pada umumnya belum setara kualitasnya dengan lulusan sekolah negeri. Realitas ini memperkuat fenomena belum setaranya pendidikan negeri dengan pendidikan swasta bila dilihat dari kaca mata kualitas. Salah satu faktor penyebab itu semua adalah belum adilnya sikap dan perlakuan pemerintah terhadap sekolah swasta. Di dalam banyak hal kebijakan pemerintah cenderung lebih menguntungkan sekolah negeri daripada swasta. Ini merupakan realitas yang tak terbantahkan.

Dalam soal anggaran, misalnya hasil penelitian *Central Independent Monitoring Unit* (CIMU) mengenai bantuan DBO dan OPF menyatakan bahwa banyak sekolah-sekolah negeri yang semestinya tidak mendapatkan bantuan, tetapi

memperoleh bantuan; sebaliknya banyak sekolah-sekolah swasta yang mestinya mendapatkan bantuan, tetapi tidak memperoleh bantuan. Laporan *Asian Development Bank* (ADB) juga menyebutkan hal yang senada. Setiap siswa SLTP negeri rata-rata mendapat bantuan 376 ribu rupiah dalam satu tahun dan setiap siswa MTs negeri 296 ribu rupiah. Sementara itu siswa SLTP dan MTs swasta hanya 21 ribu rupiah setiap anak per tahun. Untuk siswa SD, MI, SMU, MA, SMK kondisinya serupa.

Jadi, kalau kita ingin merealisasi konsep kesetaraan kualitas antara pendidikan negeri dan swasta, sikap dan perlakuan pemerintah harus diubah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus dijunjung tinggi sehingga pemerintah benar-benar dapat bersikap dan berlaku transparan, akuntabel, serta adil baik terhadap lembaga pendidikan negeri maupun swasta dalam kerangka pengembangan pendidikan nasional.

Jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa, Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat (3): Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pernyataan dalam Undang-Undang tersebut mengisyaratkan, tidak ada perbedaan dalam memberikan fasilitas kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama yakni madrasah memiliki hak sama memperoleh pembinaan dengan lembaga pendidikan di bawah Departemen Pendidikan, baik untuk pendidikan umum maupun keagamaan. Apa lagi jika dianalisis berdasarkan kuantitatif jumlah lembaga pendidikan swasta cukup signifikan dalam keikutsertaannya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung untuk menyelenggarakan proses pendidikan disamping faktor lain seperti sumber daya manusia dan dana sebagaimana diuraikan di depan. Kelengkapan sarana penunjang akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan, seperti media pembelajaran akan membantu peserta didik mengurangi verbalisme pemahaman, sehingga mempermudah untuk mencapai kompetensi.

Merujuk pada pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, setiap satuan pendidikan juga wajib memiliki prasarana yang meliputi

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan masih perlu ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Tuntutan pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas begitu besar, tidak saja pengadaan untuk pemeliharaan yang sudah ada membutuhkan dana yang tidak sedikit, di sisi lain upaya pembinaan kearah penyempurnaan pemenuhan kebutuhan sarana dirasa belum mencapai maksimal, karena berbagai keterbatasan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pada umumnya lembaga pendidikan melakukan penyederhanaan dengan melakukan skala prioritas manakah yang paling mendesak untuk dipenuhi menurut strata kebutuhan yang diperlukan proses pembelajaran.

Berdasarkan kondisi riil di lapangan, masih cukup besar lembaga pendidikan yang jauh memenuhi kriteria. Seperti dilaporkan oleh beberapa media, bahwa selama ini kebutuhan sarana dan prasaran pendidikan untuk jenjang SLTA bisa dikatakan cukup dan memadai. Tetapi pada jenjang SLTP dan terlebih pada jenjang SD kondisi sarana masih sangat jauh dari memadai baik fisik gedung dan perabotannya, perpustakaan, maupun laboratorium. Belum lagi berbicara sekolah swasta pada umumnya kondisinya lebih jauh dari cukup memadai, kecuali sekolah tertentu yang memang kondisi sejak awal berdirinya menempatkan kelengkapan sarana menjadi motivasi mendirikan lembaga pendidikan.

Rendahnya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di lingkungan sekolah swasta disebabkan beberapa kondisi antara lain: *pertama*, motivasi awal mendirikan sekolah tidak berangkat dari kemampuan menyediakan sarana dan prasaran, melainkan karena panggilan sikap peduli untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan *bonafide* dan lebih baik yang umumnya berada di perkotaan. *Kedua*, keterbatasan dana menjadi faktor dominan untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana pendidikan, sehingga kebutuhan yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran lebih diutamakan. *Ketiga*, masyarakat khususnya orang tua siswa memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan (kelompok pendiri sekolah/madrasah), mereka hanya memberikan tanggung jawab sebatas yang diperlukan untuk memenuhi dana pendidikan putra-putrinya yang wajib dibayarkan kepada lembaga pendidikan, seperti SPP dan uang sumbangan lain yang diperlukan langsung untuk kepentingan pembelajaran.

Akibat keterbatasan sarana pendidikan akan berdampak pada pembinaan, karena strata kelengkapan sarana yang dimiliki lembaga pendidikan sangat bervariasi. Melalui program akreditasi, pemerintah selain mendapatkan berbagai informasi tentang kondisi sekolah, juga dapat merumuskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan rencana penataan dan pembinaan yang akan diambil.

Ambiguisitas Kebijakan

Untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan MBS dalam konteks otonomi daerah perlu diukur melalui parameter atau kriteria tertentu. Peter W. House dan Roger D. Shull (1989) melihat bahwa, efektivitas sebuah kebijakan diukur dari kepentingan politik yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, besarnya biaya yang dikorbankan dan beberapa manfaat lain. Untuk melihat lebih jelas salah satu parameter atau kriteria yang dapat digunakan menurut Joko Widodo (2007) adalah (1) *technical feasibility*, (2) *economic and financial viability*, (3) *political viability*, dan (4) *administrative operability*.

Technical feasibility, merupakan kriteria penilaian untuk melihat sejauh mana efektivitas sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pelaksanaan MBS, sebagaimana disebutkan di depan, MBS sebagai bentuk kebijakan di bidang pendidikan memiliki target sasaran agar sekolah dapat mandiri dalam mengelola segala kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran. Mulai penyiapan kurikulum dan pengembangannya, tenaga kependidikan, pengaturan sarana dan prasarana, sampai pada pengaturan pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui tingkat kualitas lulusan, semua diserahkan kepada sekolah bersama masyarakat untuk menjalankan program kependidikan.

Efektivitas kebijakan UN (Ujian Nasional) banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua, masyarakat, sampai guru juga menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah ada kerancuan (ambiguisitas) pada aspek kebijakan. *Pertama*, dalam konteks evaluasi, sekolah seharusnya memiliki tanggung jawab penuh mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil akhir termasuk penentuan tingkat keberhasilan atau kelulusan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, pusat yang menentukan kelulusan melalui standar yang dipatok.

Kedua, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 68 bahwa, ujian nasional digunakan untuk pemetaan mutu program satuan pendidikan; menjadi dasar seleksi masuk jenjang berikutnya; untuk penentuan kelulusan peserta didik; dan untuk pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk peningkatan mutu. Namun dalam prakteknya hasil ujian nasional menjadi penentu kelulusan peserta.

Ketiga, Jumlah mata pelajaran yang di UN kan sangat terbatas, tapi menjadi penentu kelulusan, sehingga mengabaikan sejumlah besar mata pelajaran di sekolah yang tidak di UN kan. *Keempat*, penentuan kelulusan berdasarkan hasil UN mengabaikan keanekaragaman karakteristik peserta didik dan potensi daerah, hal ini bertentangan dengan prinsip pelaksanaan MBS. *Kelima*, ada kerancuan pada pelaksanaan proses pembelajaran, satu sisi pelaksanaan KTSP menuntut pendekatan yang menekankan proses untuk mencapai standar kompetensi, disisi lain untuk mencapai target lulusan UN, pembelajaran masih mengejar pencapaian penguasaan materi, siswa dan sekolah hanya berorientasi belajar untuk ujian

nasioal. *Keenam*, terdapat beban psikologis yang cukup besar bagi siswa, orang tua atau masyarakat dan pendidik karena kekhawatiran manakala putra-putrinya tidak berhasil dalam UN, mengingat standar kelulusan terus naik (rata-rata 5,25 dan tidak ada nilai 4,25) pada UN 2008. Pada sisi lain proses pembelajaran belum menunjukkan peningkatan kualitas secara merata.

Dari kriteria *economic and financial viability*, yang menekankan pada aspek ekonomi dan keuangan menunjukkan bahwa, pemenuhan kebutuhan dana untuk pelaksanaan MBS relatif cukup memadai, sehubungan dengan adanya berbagai bantuan dari pemerintah mulai dari bentuk *block grant*, BOM (Bantuan Operasional Manajemen), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), pemberian insentif bagi guru-guru swasta, sampai dengan subsidi penyelenggaraan UN. Meskipun demikian untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya untuk sekolah swasta masih belum seluruhnya memadai. Jika dilihat lebih jauh lagi dengan menggunakan strategi teknis *cost and benefit analysis*, belum dapat dipastikan apakah besarnya biaya yang dikeluarkan peserta didik selama mengikuti pendidikan dapat dipenuhi dan memperoleh manfaat dalam jangka waktu tertentu setelah menyelesaikan studi, butuh penelitian rinci untuk dapat menjawab persoalan tersebut.

Kriteria *political viability* lebih melihat pada dampak politik dari kebijakan yang telah diambil, ini dapat dilihat dari tingkat akseibilitas (*acceptability*), kecocokan dengan nilai-nilai di masyarakat (*appropriateness*), responsivitas (*responsiveness*), kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (*legal suitability*), dan aspek pemerataan (*equity*). Sebenarnya inti dari kriteria ini adalah untuk memperoleh dukungan politik. Itu sebabnya tema-tema yang berhubungan dengan pendidikan sering dijadikan isu aktual oleh beberapa pihak untuk kepentingan mensukseskan proses pemilihan kepala daerah. Sebab, pendidikan merupakan modal utama untuk membangun kualitas hidup masyarakat, disamping itu setiap individu berkeinginan meningkat kualitas pribadinya melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi aset provokasi dalam memobilisasi masa untuk bersedia mendukung calon kepala daerah, atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan posisi tertentu dalam jabatan birokrasi atau jabatan puncak lainnya, seperti kepala Negara atau di tingkat kementerian. Hal tersebut menjadikan visi-misi pendidikan yang disusun secara makro ataupun di tingkat mikro, tidak dapat berjalan secara berkesinambungan. Pendidikan akhirnya menjadi korban kepentingan politik, yang akan menghancurkan kualitas hidup masyarakat dan peradaban.

Kriteria *administrative operability*, melihat seberapa jauh keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Kriteria ini dapat dilihat dari dimensi otoritas instansi pelaksana, komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana, serta dukungan organisasi. Banyak kerancuan terjadi bila pelaksanaan MBS dalam otonomi daerah dianalisis dari kriteria ini. Kesalahan

pemahaman baik disengaja atau pura-pura tidak tahu, telah menjadikan raja-raja kecil di daerah atau di instansi tempat bekerja.

Otonomi yang sebenarnya membantu kebijakan dari pusat, telah dipahami sebagai penyerahan kekuasaan penuh pemerintahan pusat kepada daerah, sehingga menjadikan kepala daerah dan para pimpinan di jajarannya seakan menjadi penguasa baru yang berhak menentukan segalanya. Termasuk kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semestinya menjadi wewenang sekolah, diintervensi oleh pejabat daerah. Lahirlah berbagai penyimpangan mulai dari intervensi pengelolaan dana pendidikan sampai penempatan jabatan di instansi kependidikan dilakukan tanpa menggunakan acuan yang sesungguhnya, yakni kualitas kependidikan, tetapi mengacu pada sikap *like and dislike*. Akhirnya, lagi-lagi pendidikan menjadi korban KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam hal ini dari birokrasi.

Rekomendasi

Kebijakan pelaksanaan MBS dalam hubungannya otonomi daerah, sebenarnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon berbagai keprihatinan berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Pelimpahan beberapa tugas dan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah sebenarnya harus dipahami: *pertama*, sebagai proses pembelajaran oleh semua kelompok, pimpinan daerah, lembaga pendidikan, dan semua lapisan masyarakat akan pentingnya membangun mutu sumber daya manusia untuk mempersiapkan menghadapi tuntutan zaman dengan bercermin pada pengalaman yang telah lalu. *Kedua*, sebagai proses membentuk kemandirian dalam mengelola berbagai potensi daerah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan bersama sesuai dengan karakteristik daerah serta nilai-nilai budaya.

Harapan seperti itu ternyata belum sepenuhnya direspon oleh semua kalangan secara baik terbukti dengan masih seringnya muncul permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ada, sehingga menimbulkan berbagai tekanan dan konflik yang tidak mendukung pada pencapaian tujuan semula. Tidak berlebihan manakala pemerintah pusat masih terlihat ikut campur dalam menjalankan berbagai peraturan meskipun sudah ada batasan pelimpahan tugas kepada daerah. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan terlihat rancu (ambigu), karena tarik ulur dalam melaksanakan tugas, antara pemerintah pusat dan daerah.

Keterbatasan sumber daya manusia serta daya dukung potensi yang tidak merata menjadi salah satu alasan belum sepenuhnya kebijakan MBS dan otonomi daerah berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan secara maksimal, perlu dilakukan beberapa tindakan, antara lain:

1. Strategi perumusan kebijakan di semua tingkatan, dilakukan dengan mengacu hasil kajian mendalam dari berbagai aspek, terutama penggalian data-data riil yang berhubungan dengan implementasi kebijakan;

2. Dalam menjalankan sosialisasi kebijakan, tidak saja mengembangkan pendekatan pemahaman konsep, akan tetapi perlu dikembangkan dengan pendekatan skill (*logical skill*) melalui studi kasus yang nyata terjadi di masyarakat, sehingga dapat menekan pemahaman yang bias;
3. Sudah saatnya untuk dikembangkan manajemen kepemimpinan berbasis nilai-nilai budaya yang mengacu pada pengembangan *self leadership*, sehingga dapat membentuk kesadaran berperilaku santun. Tidak hanya dikembangkan manajemen kepemimpinan berbasis politik dan kekuasaan murni.

Memperhatikan kandungan isi rekomendasi tersebut, semua pihak utamanya masyarakat, hanya bisa berharap pelaksanaan kebijakan MBS dan otonomi daerah bahkan kebijakan-kebijakan lain yang sedang dan akan menyusul dapat terlaksana sesuai semangat hati nurani para perumus kebijakan, pelaksana dan akhirnya masyarakat. Itu semua akan terwujud manakala konsep kepemimpinan berbasis hati nurani (*self leadership*) dilaksanakan.

MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK WARGA

Sungguh memprihatinkan, jika ancaman sekitar 8000 warga Desa atau Kecamatan Trangkil, Pati benar-benar berkeinginan mewujudkan kemauannya untuk tidak memberikan suara dalam proses pilgub 22 Juni mendatang. Di tengah gencarnya pelaksanaan pembangunan otonomi daerah, partisipasimenjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pembangunan. Tidak saja terbatas untuk permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan, tetapi untuk kepentingan jangka panjang dalam berbagai aspek program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, kita semua khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, dalam melihat kasus Trangkil perlu melihat dan memosisikan sebagai permasalahan yang dapat membuka pendidikan partisipasi politik yang bermanfaat untuk semua.

Dalam mencari solusi, sebenarnya tidak harus pemerintah dan KPU hanya mengedepankan pendekatan formal, seperti mengumpulkan Desk Pilkada, menyediakan TPS dan petugasnya dari PNS, serta mengadakan pengamanan khusus di TPS-TPS (*Suara Merdeka/11 Juni 2008*) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana proses pilgub. Langkah itu belum menyentuh apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan, sehingga upaya membangkitkan partisipasi warga belum dapat terungkap. Ada kesan, bahwa masing-masing pihak yang penting sudah melakukan tugas sesuai kewajiban, tanpa peduli direspon atau tidak oleh warga. Akibatnya, ketegangan warga semakin menjadi seolah dipicu, karena mereka merasa diabaikan, padahal sesungguhnya mereka adalah subyek permasalahan, yang dapat diajak untuk mencari dan menemukan pemecahannya.

Keengganan warga untuk ikut pilgub cukup beralasan, menurutnya melalui sikap itu semua pihak tahu bahwa mereka memiliki “posisi tawar” dalam memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, sikap tersebut dapat menjadi pengganti kekecewaan karena tuntutan mereka belum terpenuhi. Selama belum terealisasi, keinginan tersebut akan dijadikan alat penekan atau menolak terhadap setiap kebijakan pemerintah. Jika hal ini tidak segera mendapat pemecahan, akan berdampak pada pembangunan khususnya untuk desa yang bersangkutan, tindakan masyarakat akan sulit dikontrol serta sulit membangkitkan partisipasi masyarakat karena rendahnya loyalitas.

Pentingnya Membangun Partisipasi

Ada beberapa alasan dimana peran dan partisipasi masyarakat harus mendapat tempat yang signifikan: *pertama*, kebutuhan masyarakat belum semua dapat terpenuhi secara optimal meskipun pemerintah telah berupaya membuat kebijakan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk mengisi dan mengatasi berbagai permasalahan politik. Melalui partisipasi yang aktif, warga dapat mengekspresikan kepeduliannya maupun melakukan

kontrol sosial. Tujuannya untuk mendapatkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya.

Kedua, pemerintah memerlukan kontrol dari warga untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerja yang optimal. Warga yang makin sadar dan dewasa dapat memahami kompleksitas dari berbagai isu pembangunan, sehingga relatif mudah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang sehat. Partisipasi warga dapat membuat gerakan moral, karena itu ada kontribusi nyata yang diberikan warga terhadap proses pembangunan tertentu. Warga yang aktif diharapkan dapat memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah mereka rencanakan.

Ketiga, peran dan partisipasi warga dapat memperkokoh solidaritas sosial dan memperkecil jurang pemisah antara berbagai kelompok di masyarakat, seperti kelompok kaya dan miskin, sehingga memperkecil gerakan-gerakan separatis dari kelompok yang kecewa maupun pengaruh dari luar yang dapat merusak solidaritas sosial. Warga adalah pihak yang sangat tepat untuk mengartikulasikan kebutuhannya sendiri dan menciptakan solusi yang tepat untuk mereka terkait permasalahan yang dihadapi.

Keempat, peran dan partisipasi mendorong *civil society* untuk menciptakan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah. Jika ini dapat tercipta, biaya sosial, politik dan ekonomi untuk perubahan masyarakat menuju suatu harapan menjadi sangat murah. Hal tersebut dapat terlihat bahwa, partisipasi warga sebenarnya membawa serta prinsip hak asasi manusia, untuk mendapatkan kesempatan dalam melakukan ekspresi diri membangun daerah.

Tawaran Solusi

Sebenarnya jika dirunut lebih jauh, momentum pilgub kali ini dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) buat semua persoalan yang sedang melandawarga Trangkil guna mencari penyelesaian, asalkan semua pihak yang terkait bersedia membuka diri melakukan dialog sebagai wahana untuk membangun partisipasi warga. Mulai dari Kepala Desa, anggota dan tokoh masyarakat, serta Pemerintah Kabupaten melakukan rembug bersama melalui utusan perwakilan yang menguasai persoalan dengan mediator yang mumpuni dalam mengatur pembicaraan. Untuk merealisasikan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui: *pertama*, mencari akar permasalahan mengapa warga Trangkil tidak setuju diterbitkannya SK Bupati Nomor 141/1643/2005 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kades Trangkil. Jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi acuan untuk melakukan *deal* dan pembicaraan kontrak politik dengan prinsip *win-win solution*. Sebagai misal, andaikata akar persoalan menyangkut aspek manajemen kepemimpinan Kades, maka jawaban itulah yang menjadi dasar untuk mengadakan kontrak politik berikut sanksi yang diinginkan misalnya mengundurkan diri, jika dalam perjalanan tidak memenuhi kontrak tersebut. Warga tidak terlalu bernafsu untuk meminta pencabutan SK Bupati tersebut, karena untuk melakukan hal itu

butuh proses. Bukankah kepemimpinan itu terletak pada manajemen pelayanan dan siapapun yang menjadi pimpinan belum tentu dapat memuaskan semua pihak.

Kedua, Menjadikan hasil kontrak sebagai bahan untuk membangun partisipasi dalam proses politik termasuk pilgub yang kini tahapannya tengah berlangsung, dengan maksud memberikan kesetaraan keterlibatan kepada semua warga bahwa kepuasan politik tergantung pada pilihan warga itu sendiri. *Ketiga*, sebagai media membangun partisipasi, dalam merumuskan kebijakan sudah saatnya menempatkan warga berposisi setara dengan pengambil kebijakan dalam hal memperoleh pelayanan. Anggota masyarakat ditempatkan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan warga tidak lagi dipandang sebagai akumulasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan mereka dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Hal tersebut menunjukkan proses partisipasi politik warga mulai terbangun.

Untuk mewujudkannya sudah tentu butuh pengorbanan, setidaknya kesediaan semua pihak untuk melihat kekurangan dan kelebihan, selanjutnya menindak lanjuti nilai kelebihan dan menekan kekurangan guna mencapai yang terbaik.

MENUJU PILKADA DEMOKRATIS

Pengalaman panjang dari rezim kepemimpinan lama yang menjadikan warga terpasung pada sebuah pemahaman hanya ada satu model kekuasaan (demokrasi semu), membuat semua lapisan masyarakat bergerak ingin menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang memiliki potensi dan hak untuk mengatur, menentukan pilihan setiap yang berhubungan dengan kepentingan hidup mereka. Kesadaran ini tumbuh sebagai dampak terbatasnya ruang gerak dalam berkreasi. Segala bentuk kegiatan harus mengikuti rambu-rambu yang sudah *disunnahkan* oleh penguasa, meskipun bertentangan dengan keinginan yang sejatinya menjadi harapan semua pihak.

Dampaknya, masyarakat melakukan perlawanan untuk keluar dari keterbelengguan hidup dengan berbagai cara diambil, tujuannya segera dapat mengatur pola hidup sendiri sesuai dengan potensi yang ada, terhindar dari segala macam paksaan dan pembatasan. Kata “demokrasi” menjadi sebuah ucapan yang dielukan oleh warga –meski masih terbatas memahami makna kandungannya– dengan tujuan untuk menohok para penguasa yang memimpin secara otoriter dan tidak memberikan ruang kebebasan. Perilaku penguasa seperti itu salah satunya dipicu oleh faktor terbentuknya kekuasaan tidak dibangun atas dasar keinginan rakyat melalui pemungutan suara langsung, bebas, rahasia, dan bertanggung jawab, melainkan ditetapkan dari penguasa atasan (*top down*) atau dengan cara lain yang kelihatan akomodatif, tetapi sesungguhnya pemilihan penguasa hanya menjadi keinginan sekelompok orang.

Kerinduan untuk memilih pimpinan sesuai selera akan mulai dapat diwujudkan setelah turun ketentuan otonomi daerah termasuk peraturan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Rakyat secara leluasa dapat merumuskan calon kepala daerah yang menurut penilaian mereka dapat menjanjikan berbagai peluang kemudahan yang berujung pada terbangunnya kesejahteraan secara merata, adil dan makmur. Permasalahannya adalah belum ada jaminan, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung akan berjalan secara demokratis yang pada gilirannya mampu menumbuhkan sistem pemerintahan yang melindungi rakyat, sehingga terbebas dari segala bentuk pemaksaan kehendak. Disinilah pentingnya memahami demokrasi berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah, tidak saja melihat kelengkapan berbagai perangkat pemilihan, tetapi juga melihat berlangsungnya proses pemilihan dan manajemen kepemimpinan yang ditampilkan oleh penguasa terpilih. Kalimat sukses pilkada belum menjamin sukses pemerintahan, seyogyanya menjadi pegangan sekaligus kontrol agar tidak ikut larut dalam “kelalaian yang direncanakan” setelah kekuasaan berada di tangan.

Demokrasi dan Proses Pilkada

Sampai saat ini, demokrasi masih diakui sebagai satu-satunya sistem politik yang banyak diminati oleh hampir semua kelompok masyarakat di dunia. Tidak

saja karena telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, demokrasi secara faktual juga telah menunjukkan kemampuannya mendorong tumbuhnya masyarakat yang adil, egaliter dan manusiawi. Merujuk pengertian bahwa, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*), mengindikasikan segala sistem yang diberlakukan mengarah pada pembentukan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintahan juga berbasis kerakyatan.

Pemahaman demokrasi yang memiliki tiga karakter seperti di atas seharusnya dipahami secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan sikap berlebihan, segala-galanya rakyat mutlak berkuasa. *Pertama*, pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian bahwa dimata rakyat terdapat pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegitimate government*). Pemerintahan yang sah dan diakui berarti pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan rakyat. Hal ini dapat terwujud manakala pemerintah berkuasa diperoleh melalui pemilihan langsung dari rakyat, bukan pemberian. Diharapkan ada kesadaran mendalam bagi pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan program-programnya bahwa posisi yang diterimanya merupakan amanat dari rakyat. Menurut pengertian ini, pemerintah berkuasa yang tidak diperoleh melalui pemilihan langsung dari rakyat dianggap tidak sah dan tidak mendapat pengakuan.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki makna bahwa dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah atas nama rakyat bukan atas dorongan keinginan sendiri. Selain itu pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (*social control*), baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui dewan perwakilan (DPRD). Adanya sistem seperti ini akan menghilangkan ambisi sikap otoriter dari para penyelenggara negara dalam menjalankan gerak pemerintahan.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah, dijalankan semata untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Itu sebabnya mendengar dan mengakomodasi aspirasi rakyat ketika merumuskan dan menjalankan kebijakan maupun program-program oleh pemerintah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Saluran dan ruang yang menjamin kebebasan harus dibuka seluas-luasnya kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi melalui media yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsep di atas, proses pilkada langsung merupakan pintu awal memasuki pengamalan demokrasi yang sesungguhnya, yakni pelaksanaan pemerintahan oleh penguasa terpilih. Salah pilih tidak boleh terjadi menurut kriteria yang dipahami sebagai barometer untuk mengukur sikap dan perilaku bakal calon. Kegagalan dalam mengantarkan proses awal ini menjadi kendala besar untuk

melakukan pengawasan lebih lanjut disaat penguasa telah memasuki atau menjalankan pemerintahan. Keterbatasan rakyat dalam melakukan kontrol sikap dan perilaku bakal calon dalam proses pemilihan, maka rakyat dibantu beberapa perangkat, seperti Panitia Pengawas (Panwas), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan perangkat lain semisal tata peraturan maupun perundang-undangan yang telah ditetapkan berikut perangkat keamanan yang dipersiapkan untuk mengawal semua tahapan pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menjalankan semua tahapan proses pilkada sampai menghasilkan penguasa terpilih. Sementara Panitia Pengawas (Panwas) melakukan pengawasan kepada semua komponen pilkada, dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Panwas melihat ada tidaknya penyimpangan, manakala ditemukan segera diproses sesuai tata peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi acuan disusun atas dasar pertimbangan membela kepentingan rakyat bukan individu maupun kelompok. Semua mekanisme pemilihan yang dijalankan dalam rangka mewujudkan kepuasan yang berakhir dengan terciptanya kesejahteraan rakyat. Jika semua berjalan sesuai irama aturan, sesungguhnya demokrasi telah mulai berjalan.

Faktor Kendala

Beberapa faktor yang menjadi tantangan berlakunya sistem demokrasi dalam proses pilkada di Pati, antara lain dipengaruhi oleh faktor budaya dan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Faktor budaya menyangkut etos kerja masyarakat yang relatif kurang mendukung dalam berkompetisi untuk meraih peluang kerja yang produktif, justru sebaliknya cenderung berlaku konsumtif. Sikap tersebut berdampak pada munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial secara signifikan (Litbang Pati, 2005). Hal ini dapat dilihat tingginya jumlah keluarga pra sejahtera (miskin) yang mencapai 34,34 persen, sementara jumlah keluarga pra sejahtera pada usia produktif mencapai 29,19 persen (Dinas BK/KS Pati, 2006). Kondisi tersebut akan berpengaruh pada tahapan proses pilkada yang diinginkan berlangsung secara demokratis. Mental menerabas, seperti keinginan mendapatkan sejumlah uang dengan hanya berjanji sanggup mendukung ikut mensukseskan salah satu bakal calon menjadi komoditas yang sangat subur diperjual belikan. Ujung-ujungnya kegiatan *money politic* sulit dihindarkan, karena antara bakal calon dan pemilih sama-sama memiliki peluang kepentingan yang sama (saling membutuhkan).

Di sisi lain, konspirasi kekuatan beberapa kelompok yang ingin menggolkan jagonya, berpotensi kuat untuk tidak mengindahkan peraturan dan berpeluang besar menimbulkan konflik sosial. Potensi tersebut perlu diwaspadai, karena kesadaran membangun tatanan yang menghargai pluralitas yang menjadi salah satu ciri demokrasi sama sekali tidak diperhatikan. Doktrin menghalalkan segala cara, menjadi acuan mereka dalam setiap melangkah dengan tujuan memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Jika hal itu terjadi semua komponen yang

terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada seharusnya mengambil sikap sama, menginformasikan kepada masyarakat pemilih, bahwa telah terjadi penyimpangan pada pasangan bakal calon tertentu dengan melakukan tindakan tidak terpuji dan melanggar kesepakatan. Disamping itu, pemberian sanksi sesuai peraturan tetap dilakukan, sehingga pemilih memahami dan dapat menilai karakter para kandidat.

Permasalahan lain seperti konflik internal partai yang tidak berkesudahan berpeluang memicu munculnya sikap spekulasi yang dapat mengganggu hasil kesepakatan bersama antar semua pihak yang terlibat. Akibatnya, kondidi itu merugikan banyak pihak, tidak saja dialami oleh bakal calon itu sendiri, partai politik pengusung bakal calon juga akan kehilangan dukungan dari warga. Kekecewaan yang dialami para pendukung partai maupun terhadap bakal calon akan terlampaikan dengan mencari kompensasi tindakan yang rawan menimbulkan gangguan, sehingga dapat mengancam efektivitas proses pilkada.

Menyikapi beberapa kendala seperti di atas, ada baiknya memahami beberapa unsur yang mempengaruhi tegaknya demokrasi, sekaligus menjadikan pertimbangan untuk mendapatkan rambu-rambu acuan, dengan maksud agar demokrasi dapat ditegakkan dalam pilkada. Unsur-unsur penegak demokrasi tersebut meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan benar-benar menjadi acuan dan pengendali semua kegiatan proses pilkada, berikut sanksi tegas yang menjadi bagian dari peraturan tersebut. *Kedua*, memanfaatkan kelompok masyarakat berpengetahuan (*civil society*), yang dicirikan dengan partisipasi aktif, melalui analisis pikirannya secara positif akan mampu mengendalikan segala kegiatan secara efektif, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Ketiga, membangun infrastruktur politik yang kondusif, artinya ada upaya menjadikan partai politik (*political party*), kelompok gerakan atau organisasi masyarakat (*movment group*), dan kelompok kepentingan (*interest group*) sebagai basis gerakan yang dapat memberikan dampak positif untuk pengumpulan suara, mengingat masing-masing kelompok memiliki orientasi pemberdayaan terhadap anggotanya, sehingga penyimpangan akan dapat dihindari untuk menjaga identitas dan norma yang dianut sesuai dasar etika masing-masing kelompok. *Keempat*, adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, artinya membangun kemitraan semua pihak bersama pers memiliki dampak positif sebagai media kontrol, sehingga dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan.

Pada akhirnya, sukses pilkada tergantung pada kesiapan semua pihak yang terkait, termasuk keinginan untuk membuat berlangsungnya memenuhi standar demokratis tidaknya pilkada. Kesadaran kuat yang diikuti tindakan konkret dari semua pihak untuk menjadikan pilkada berlangsung demokratis menjadi faktor penentu untuk memperoleh sukses. Pendidikan politik warga melalui forum-forum seminar dan diskusi memiliki dampak positif bagi peningkatan pengetahuan warga tentang dunia politik, sehingga terbebas dari pemaksaan kehendak.

OPTIMALISASI PERAN POLITIK MASYARAKAT

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan adalah dengan melihat efektivitas peran masyarakat dalam bentuk partisipasi nyata, melalui berbagai kegiatan untuk meraih tujuan yang telah dicanangkan. Efektivitas berarti merujuk pada tingkat ketercapaian dari suatu program yang diukur dari parameter tertentu menurut sifat dan karakter kegiatan. Pembangunan gedung lembaga pendidikan misalnya, dapat dikatakan efektif berhasil, manakala keberadaan gedung dapat dipakai untuk menjalankan proses pembelajaran peserta didik dengan nyaman dan lancar dalam menghasilkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan.

Berbeda dengan proses pemilihan umum untuk menghasilkan kepala daerah ataupun kepala negara, dikatakan efektif apabila keikutsertaan para calon pemilih yang memiliki hak dalam memberikan suara mencapai tingkat prosentase yang tinggi, dan menghasilkan calon terpilih secara legal. Setidaknya, dapat melampaui batas (prosentase) minimal untuk menghasilkan calon terpilih. Jika batas tersebut tidak dapat tercapai, maka kegiatan pemilu dapat dikatakan tidak sukses atau gagal. Permasalahannya adalah mengapa peran politik masyarakat dalam pemilu atau bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan suara rendah? Jawaban inilah yang semestinya menjadi bahan kajian, agar upaya membangun peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan lebih lanjut dapat dicari solusinya yang tepat.

Ada beberapa sebab yang menjadikan masyarakat enggan memberikan suara dalam proses pemilihan umum atau pilkada: *pertama*, mereka tidak memahami apa itu pemilu, dan apa tujuannya. Tipe seperti ini masyarakat tidak peduli apa itu program pembangunan, yang ada pada mereka adalah bagaimana mempertahankan hidup. *Kedua*, masyarakat mengetahui ada kegiatan pemilu, tetapi mereka menilai tak ada manfaat baginya, ada atau tidak ada pemilu status kehidupannya tidak mengalami perubahan. *Ketiga*, masyarakat memahami pemilu namun hasilnya tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan kelompoknya, tidak memberikan suara karena tidak ada kontestan yang menurutnya dapat mewakili.

Membangun Peran

Ketiga model di atas sesungguhnya merujuk pada satu pemahaman yakni partisipasi, untuk menumbuhkan membutuhkan tingkatan teknik yang berbeda dalam bentuk derajat partisipasi (*ladder of participation*) agar peran dapat dimunculkan. Partisipasi didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi (Griesgraber & Gutter, 1996). Dalam implementasi meskipun masyarakat tidak secara langsung dapat diajak bicara karena rendahnya pengetahuan, bukan berarti mereka hanya layak dijadikan obyek kajian dalam merumuskan kebijakan, tetapi menjadikan mereka seolah aktif berbicara dihadapan

para penguasa ketika merumuskan kebijakan. Perlakuan seperti itu merupakan salah satu langkah positif untuk menumbuhkan peran dan partisipasi.

Dalam konteks otonomi daerah ada beberapa alasan utama dimana peran dan partisipasi masyarakat harus mendapat tempat yang signifikan: *pertama*, kebutuhan masyarakat belum semua dapat terpenuhi secara optimal meskipun pemerintah telah berupaya membuat kebijakan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk mengisi dan mengatasi berbagai permasalahan politik. Bentuk-bentuk partisipasi bisa mulai dari spektrum yang paling ekstrim sampai pada bentuk kemitraan. Melalui partisipasi yang aktif, warga dapat mengekspresikan kepeduliannya maupun melakukan kontrol sosial. Tujuannya untuk mendapatkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya.

Kedua, pemerintah memerlukan adanya *check and balances* dari warga untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerja yang optimal. Warga tidak dapat memberikan peran ini hanya pada politisi belaka. Warga yang makin sadar dan dewasa dapat memahami kompleksitas dari berbagai isu pembangunan, sehingga relatif mudah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang sehat. Partisipasi warga dapat membuat gerakan moral, karena itu ada kontribusi nyata yang diberikan warga terhadap proses pembangunan tertentu. Warga yang aktif akan dapat memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah mereka rencanakan sendiri.

Ketiga, peran dan partisipasi warga dapat memperkokoh solidaritas sosial dan memperkecil jurang pemisah antara berbagai kelompok di masyarakat, seperti kelompok kaya dan miskin, sehingga memperkecil gerakan-gerakan separatis dari kelompok yang kecewa maupun pengaruh dari luar yang dapat merusak solidaritas sosial. Warga adalah pihak yang sangat tepat untuk mengartikulasikan kebutuhannya sendiri dan menciptakan solusi yang tepat untuk mereka terkait permasalahan yang dihadapi.

Keempat, peran dan partisipasi mendorong *civil society* untuk menciptakan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah. Jika ini dapat tercipta, biaya sosial, politik dan ekonomi untuk perubahan masyarakat menuju suatu harapan menjadi sangat murah. Hal tersebut dapat terlihat bahwa, partisipasi warga sebenarnya membawa serta prinsip hak asasi manusia, untuk mendapatkan kesempatan dalam melakukan ekspresi diri membangun daerah. Terkait dengan otonomi daerah, hal yang sangat penting yang dapat dikemukakan sebagai salah satu argumen adalah jalan menuju kesejahteraan sosial, karena setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab secara seimbang, tanpa membedakan lingkungan tempat tinggal. Mereka dapat mengekspresikan hak dan aspirasinya dan memperoleh kesempatan untuk memperkuat diri dalam mengakses potensi dan sumber-sumber di daerah.

Partisipasi tidak saja diposisikan sebagai variabel terikat atau variabel dampak, akan tetapi diposisikan setara dengan variabel lain seperti strategi penyusunan kebijakan untuk secara bersama dan seimbang mewujudkan variabel

dampak yakni kesejahteraan. Hal ini menunjukkan ada peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemetaan permasalahan mereka sendiri berikut penyusunan perencanaan, implementasi program, dan proses evaluasi untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh tingkat keberhasilan dan manfaat yang didapat. Tingkat manfaat ini menjadi kata kunci awal (*starting point*) untuk membangun dan menumbuhkan peran atau partisipasi politik masyarakat termasuk dalam berbagai program pembangunan. Pada gilirannya, kesadaran peran dan partisipasi politik akan berkembang dan menguat sejalan dengan proses pembangunan dalam membentuk kemandirian.

Selama ini yang terjadi di lapangan, masyarakat masih dipandang sebagai pihak yang berada di luar sistem, mereka hanya menjadi obyek atau pelanggan (*user*) dari kebijakan yang dikenal dengan konsep *government is us*, pemerintahan hanya untuk kita (penguasa). Padahal yang sesungguhnya untuk mengembangkan peran perlu kerja kolaboratif dengan melibatkan *active citizenship* dan *active administration* secara proporsional untuk membentuk demokratisasi. Dampak dari ketidakseimbangan kolaboratif tersebut, muncul kekecewaan warga yang berujung pada sikap melawan, menolak, dan acuh terhadap kegiatan pemerintahan, termasuk rendahnya keikutsertaan dalam memberikan hak suara dalam pemilu.

Pembelajaran Politik

Peran politik masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi, tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses sistemik agar bentuk peran politik dapat memberikan manfaat baik secara individu maupun dalam bentuk kolektivitas kelompok. Mengawali dari proses tersebut dapat dimulai dengan mengedepankan model baru dalam sistem penyelenggaraan administrasi publik (*new public service*). Anggota masyarakat diposisikan setara dengan pengambil kebijakan dalam hal memperoleh pelayanan. Anggota masyarakat ditempatkan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini, kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Hal tersebut menunjukkan proses pembelajaran politik warga mulai terbangun.

Pembelajaran politik warga dapat berawal dari proses perumusan kebijakan yang berangkat dari upaya melibatkan masyarakat tidak saja terbatas dalam proses perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Parameter untuk melihat keberhasilan menjadi jelas. Diantaranya, dampak terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan sebelumnya, kepuasan dalam memperoleh pelayanan birokrasi, dan perubahan bentuk partisipasi politik itu sendiri. Pada akhirnya berkembangnya kesadaran masyarakat untuk bersedia terlibat dalam

berbagai kegiatan politik maupun program pembangunan yang lain menjadi indikator keberhasilan pembelajaran politik warga.

Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, akan berpengaruh positif terhadap pemahaman tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan semua aktivitas, pada saat yang sama peran politik masyarakat akan bergerak menuju perubahan yang positif. Untuk mencapai optimalisasi peran politik masyarakat akan menghadapi banyak kendala seperti, perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri baik faktor internal maupun eksternal akan mempengaruhi fluktuasi peran politik. Di sisi lain *political will* dari pemerintah terkadang menunjukkan tingkat konsistensi yang tidak selamanya memberikan peluang yang menggembirakan.

Oleh karena itu, untuk melihat peran politik masyarakat tidak bisa digeneralisasi dalam tingkatan yang sama. Ada tiga derajat untuk melihat tingkat peran atau partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan, yang masing-masing derajat dibagi ke dalam beberapa anak tangga (Burn, dkk., 1994). *Pertama*, derajat terendah adalah non partisipasi warga, yang sering ditandai dengan adanya manipulasi informasi, sehingga masyarakat tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan sama sekali tidak dapat dilakukan. Derajat partisipasi *kedua*, dikenal dengan tingkat partisipasi warga (*citizen participation*), ditandai dengan adanya partisipasi yang telah terjadi, karena masyarakat memiliki kuasa untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan partisipasi semakin baik dengan adanya proses komunikasi dua arah.

Derajat keterlibatan *ketiga*, dikenal sebagai bentuk partisipasi tertinggi masyarakat adalah bentuk kendali warga (*citizen control*). Dalam derajat ini masyarakat memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu program pada lembaga tertentu dengan derajat kemandirian yang kurang lebih sama dengan kemandirian pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat mendelegasikan kekuasaan pada urusan tertentu kepada organisasi atas dasar kontrak hukum.

Partisipasi model terakhir merupakan bentuk yang paling ideal. Partisipasi terbentuk atas dasar sikap saling percaya antara pihak pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Dalam operasionalisasi kegiatan organisasi kemasyarakat lebih dekat dengan masyarakat. Pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang berarti, masyarakat memiliki kebebasan untuk berinovasi, mengembangkan kebijakan sendiri dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jika tahap ini terjadi dalam praktek kehidupan, dapat dikatakan bahwa proses optimalisasi peran politik masyarakat telah terbangun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa mengembangkan peran politik masyarakat sebenarnya tidak dapat hanya melihat salah satu dari dua entitas yang saling berhadapan. Masyarakat dan pemerintah, keduanya secara proaktif memiliki kemauan untuk saling memberi dan menerima masukan (*take and give*), guna menciptakan kondisi yang lebih baik. Masyarakat,

melalui kajian kritisnya melakukan analisis berbagai kebijakan pemerintah, yang sebenarnya adalah keinginan kuat mengatur dirinya sendiri, merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan peran politik sebagai warga. Pada pihak lain, pemerintah membuka diri bahwa masyarakat, ditempatkan sebagai pemilik berbagai kegiatan layanan dan tidak dipandang sebagai pihak yang hanya menerima kebijakan.

Salah satu faktor kuat yang dapat mempengaruhi untuk mengembangkan peran politik masyarakat adalah pendidikan dan pengalaman. Pengalaman panjang melalui berbagai peristiwa yang berhubungan dengan peran politik warga, baik yang positif maupun yang negatif dinilai cukup menjadi pelajaran berharga untuk memilih dan menentukan manakah rumusan yang paling bermanfaat selanjutnya diambil hikmahnya guna mengembangkan peran politik untuk menuju harapan akhir. Selain itu, proses sosialisasi peran politik melalui berbagai kegiatan pendidikan di masyarakat akan berpengaruh positif terhadap peningkatan sadar berpolitik. Akhir dari proses berkembangnya peran politik warga adalah terciptanya kesejahteraan bukan kesengsaraan.

Harapan seperti itu dapat tercipta, manakala semua pihak, masyarakat dan pemerintah sesuai tugas dan tanggung jawab posisi masing-masing mampu dan mau berbuat yang terbaik dari belajar pengalaman yang pernah terjadi.

BAB IV

PENGEMBANGAN SDM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP REMAJA IDEAL

Telaah dalam Perspektif Agama

Ketika Rasulullah Saw. wafat, berkumpul para pembesar Islam saat itu di kediaman Bani Sai'dah untuk membicarakan siapa sosok yang ideal pengganti Nabi Muhammad. Muncul beberapa gagasan dari peserta musyawarah dengan menawarkan tokoh-tokoh, yang menurut mereka sangat layak menjadi pengganti Nabi. Diidentifikasi tokoh-tokoh yang ada, mulai tingkat senioritas dalam hal wawasan keilmuan, kewibawaan, kepemimpinan, manajemen, dan tidak ketinggalan faktor usia. Nama Ali Bin Abi Tholib sempat dimunculkan mengingat dari sisi keilmuan dialah yang paling diakui oleh masyarakat, karena mendapat pengakuan langsung dari Nabi, bahwa Nabi adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintu masuknya. Ali dianggap sebagai calon yang ideal menggantikan Nabi, bukan hanya karena keilmuannya dan keberaniannya, namun juga karena Ali berkedudukan sebagai menantu Nabi yang dipastikan kelak akan menurunkan keturunannya.

Ali tidak berhasil terpilih menjadi khalifah menggantikan Nabi. Hasil musyawarah menyepakati Abu Bakar Al-shiddiq yang lebih pantas menjadi khalifah pertama menggantikan Nabi, karena faktor senioritas lebih berpihak kepada Abu Bakar dari pada Ali. Ali sendiri baru mendapat giliran menjadi khalifah keempat setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Dengan kata lain, Ali baru mendapat kategori ideal dalam memimpin ummat setelah periode Utsman, meski pun pada akhirnya Ali terbunuh menyusul peristiwa Utsman oleh pengikut setianya (*kelompok khawarij*) yang menganggap Ali telah keluar dari garis ideal yang dipahami oleh pengikutnya.

Para kaum muda pengikut setia Abu Bakar Ba'asyir baru-baru ini beramai-ramai ke Jakarta mengepung Rutan Salemba, untuk melakukan pembelaan terhadap gurunya agar dibebaskan dari tuduhan terlibat kasus pengeboman di beberapa tempat di Indonesia, setelah sekian lama ditahan karena tuduhan makar. Para pengikut menganggap bahwa Ba'asyir adalah sosok ustadz yang memenuhi tipe ideal dalam mengembangkan agama (Islam) menginginkan tegaknya negara Islam. Menurutnyanya hanya melalui pemerintahan berasas Islam yang mampu membawa perubahan, terciptanya kesejahteraan umat. Tidak seperti kelompok lain, Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, juga memiliki misi mengembangkan ajaran Islam, namun dalam berdakwah tidak harus melalui kekerasan, bahkan lebih mengedepankan sikap *tasamuh*, *ta'adul*, *tawasuth*, dan *tawazun* dengan tetap menunjukkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ini pun oleh kelompok NU disebut sebagai sikap ideal dalam beragama.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut menurut penafsiran masing-masing kelompok, dalam lingkup beragama termasuk dikategorikan ideal. Permasalahannya adalah bagaimana memahami dan merumuskan sesuatu yang memiliki sifat ideal dalam konteks ruang dan waktu seperti sekarang ini, apakah akan merujuk pada semangat disertai kegiatan nyata

sama seperti pada era Rosul dan *khulafaur rosyidin* serta para sahabat. Akankah remaja sekarang merujuk pada sikap dan perilaku Ali dalam melakukan dakwah agama. Bagaimana merumuskan sikap sebagai generasi Islam kedepan dan implementasinya? Beberapa persoalan tersebut layak kiranya dijadikan bahan renungan, agar sosok ideal sebagai remaja dapat terpikirkan guna memudahkan kita dalam mengambil peran di masyarakat terkait dengan kegiatan keagamaan.

Remaja Ideal

Definisi baku mengenai batasan remaja, masih diperdebatkan ada yang melihat dari sisi perkembangan fisik (biologis), mental (psikologis), dan usia, namun pada dasarnya berbagai kalangan sependapat bahwa usia remaja adalah fase transisi antara usia anak-anak ke usia dewasa yang dimulai sejak umur 13/14 tahun yang biasa disebut sebagai usia pubertas. Dalam Islam usia seperti ini sudah mulai masuk kategori *baligh* (usia 15 tahun dan mimpi basah) yang berarti, jika ada kemampuan dan peluang wajib bagi dia melaksanakan semua syariat Islam yang disebut sebagai *mukallaf*.

Dalam konteks Islam perilaku ideal merujuk pada dua unsur utama yang saling menunjang dan melengkapi. Unsur pertama bersumber dari *al-Qur'an* dan unsur kedua bersumber dari kehidupan Nabi, yang disebut *sunnah*. Ditambah unsur penuntun tambahan yakni kehidupan para sahabat Nabi. Dari kedua unsur utama tersebut – *al-Qur'an* dan kehidupan Nabi – mengarahkan, memberi semangat, dan mempengaruhi kehidupan orang muslim dari lahir sampai meninggal dunia. Hassan Al-Banna pernah menyatakan di Mesir; “Kami mengajak kalian dengan *al-Qur'an* di tangan kanan dan *sunnah* di tangan kiri” (Akbar S. Ahmad, 1990:5). Keduanya memberi penuntun menyangkut perilaku yang seharusnya dimiliki (ideal) oleh seorang muslim.

Kalimat yang disampaikan Akbar nampak jelas bahwa dalam bertinadak di semua aspek kehidupan – ekonomi, politik, sosial, dan budaya – siapapun yang mengaku muslim harus menjadikan *Alquran* dan *sunnah* sebagai acuan merumuskan dan melakukan segala perbuatannya. Perilaku ini sesuai anjuran Nabi bahwa jika kita melakukan sesuatu berpegang teguhlah dengan *al-Qur'an* dan *sunnahnya*. Hadits tersebut menjadi acuan dalam merumuskan model perilaku ideal.

Berdasarkan beberapa kasus yang terurai di depan, jika dihubungkan dengan kondisi sekarang, ada perbedaan makna kata ideal. *Pertama*, secara substansi konseptual ideal berarti sesuai dengan sesuatu yang diharapkan, artinya perilaku seorang muslim seharusnya sesuai dengan perilaku yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya baik bentuk, isi, maupun gaya dalam bertindak dalam hal beribadah maupun bermuamalah. Unsur waktu, tempat dan struktur budaya masyarakat tidak berhak memberikan pengaruh terhadap pemahaman substansi agama tersebut. Termasuk memberikan makna analogi pada aspek pemahaman simbol-simbol keagamaan, kurang mendapat respon bagi kelompok ini. Muncul kelompok-kelompok gerakan Islam yang berambisi (aliansi islam garis keras),

untuk menegakkan agama Islam sama seperti yang pernah dilakukan Nabi. Termasuk dalam contoh kasus ini adalah sebagai remaja harus mampu menampilkan kembali perilaku Nabi ketika usia muda, paling tidak mengikuti jejak Ali dalam mengembangkan dan membela kebenaran Islam.

Kedua, makna substansi kontekstual, ideal berarti sesuai dengan yang diharapkan, artinya acuan perilaku muslim tetap merujuk pada sunnah Nabi dan sahabatnya, namun ada peluang untuk memberikan pemahaman makna secara analogis dengan memperhatikan dimensi waktu, ruang maupun kondisi struktur budaya masyarakat terhadap konsep agama. Sesuatu yang ideal dalam Islam memang harus mengacu al-Qur'an dan sunnah Nabi, namun implementasi ajaran dalam kehidupan praktis di masa sekarang, tidak harus dimaknai sama persis seperti tindakan yang berlangsung ketika pada era Nabi dan para sahabat. *Setting* kehidupan sosial dan unsur budaya merupakan dua hal yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan mengapa kegiatan keagamaan sekarang tidak harus sama seperti saat kelahiran Islam, namun substansi agama haruslah tetap sama.

Ideal dan Implikasinya

Al-Qur'an dan al-sunnah adalah dua sumber utama yang mengatur perilaku umat manusia. Keduanya merupakan *grand theory* yang masih abstrak sifatnya, untuk dapat menjabarkannya diperlukan keterampilan menerjemahkan konsep dan proposisi yang diturunkan dari dalil-dalil al-Qur'an maupun al-Hadits, menjadi kalimat-kalimat yang operasional, dapat dipahami dan diwujudkan ke dalam bentuk perilaku nyata. Hal seperti ini hanyalah ada pada pribadi Rosul, al-Qur'an adalah konsep dasarnya dan perilaku Nabi adalah gambaran nyata. Jika kata ideal mengacu pada gambaran seperti ini, maka menurut Sulaiman Nadwi saat sekarang ini jelas tidak akan ada kehidupan yang ideal (Sulaiman Nadwi, 2002:50), yang layak untuk diikuti oleh orang-orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengikuti suatu contoh pemberi petunjuk, jika petunjuk itu sendiri tidak pernah digambarkan secara nyata. Sulaiman mensyaratkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah kehidupan yang ideal harus memenuhi syarat-syarat dalam aspek: *historisitas*, *kekomprensifan*, *kesempurnaan*, dan *praktikalitas*.

Mensikapi persoalan tersebut, kita sangat terpenggil untuk dapat berlomba menggapai makna kata ideal agar tetap terkendali dari pemahaman yang bias. Harapan ini mengandung konsekuensi adanya tuntutan untuk menguasai ilmu-ilmu bantu yang dibutuhkan dalam mengkaji kandungan al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dapat memberikan eksplanasi dan deskripsi gejala keagamaan secara jelas dan kongkret terhadap konsep-konsep dari kedua sumber tersebut, yang pada gilirannya akan terpenuhi sosok tampilan yang sesuai dengan kriteria ideal, paling tidak dapat dikatakan ideal pada era kehidupan dalam rentang waktu tertentu.

Berkaitan dengan sikap ideal, subyektifitas pemahaman terhadap konsep agama tak dapat dihindari, namun subyektifitas yang dapat dipertanggungjawabkan

secara keilmuan akan melahirkan sebuah obyektifitas. Subyektifitas untuk menjadi remaja ideal tetap saja mengacu pada persyaratan empat unsur tersebut di atas, sesuai dengan kualitas masing-masing penafsir, selanjutnya akan diperoleh hasil tentu saja sangat berbeda dan bervariasi. Tuntutan mempersiapkan remaja ideal seperti itu akan terpenuhi dengan syarat: *pertama*, menguasai ilmu-ilmu sumber keagamaan baik secara tekstual maupun kontekstual. Penguasaan teks-teks sumber agama tanpa mengkorelasikan dengan tuntutan perkembangan budaya masyarakat hanya akan mempersempit ruang gerak agama itu sendiri.

Kedua, menguasai keterampilan kognitif dalam menerjemahkan secara operasional proposisi dan konsep-konsep sumber agama ke dalam bentuk kalimat empiris, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diikuti dengan tindakan nyata oleh anggota masyarakat. Suatu himbauan yang terbatas hanya *billisan* dan tidak tergambar dengan perilaku nyata, sudah tentu masyarakat akan cepat berpaling. Untuk memenuhi sikap seperti itu sudah pasti kebutuhan penguasaan ilmu-ilmu yang mendukung tidak dapat diabaikan begitu saja. *Ketiga*, penguasaan terhadap peralatan teknologi komunikasi adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar, melalui media tersebut ilmu pengetahuan dapat dikembangkan sesuai irama perkembangan.

Walhasil, untuk menghasilkan remaja yang ideal, syaratnya harus pintar. Memiliki peluang waktu untuk mengembangkan diri dan berkhidmah kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memiliki sifat integritas tinggi dalam mewujudkan kebenaran. Itu semua berpulang kepada pribadi kita. Inginkah kita memiliki kepribadian yang bermakna? jawabnya hanya anda dan saudara yang tahu. Yang jelas masyarakat menunggu kiprah anda dalam merumuskan sebuah pembaharuan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA GLOBAL

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi utamanya di bidang telekomunikasi telah banyak merubah sikap dan perilaku manusia. Kemampuan berhubungan dengan lebih banyak orang pada lebih banyak tempat dengan waktu yang lebih singkat dari pada dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjadi bukti kecanggihan teknologi telah banyak membawa perubahan besar peradaban manusia. Dua orang yang tinggal di belahan bumi berbeda dapat bernegosiasi dalam penjualan sebuah produk, mengembangkan usaha bersama atau pun kegiatan lain, baik positif maupun negatif.

Akibat kondisi seperti ini bangsa-bangsa secara ekonomis, sosial dan kultural menjadi interdependen. Apa yang terjadi di sebuah pasar di Amerika mempengaruhi para pedagang di pasar Johar. Mode baru yang diperkenalkan hari ini di Paris keesokan hari sudah dipakai seorang wanita di *Citra Mall* Semarang. Gaya demonstrasi besar-besaran di Philipina di suatu hari, pagi harinya muncul di Jakarta dengan model dan latar yang sama. Ini merupakan gambaran era global yang telah menjadi *trend* dalam perilaku manusia saat ini.

Pertukaran informasi di antara penduduk dunia berlangsung dengan cepat dalam jumlah yang besar. Manusia bereaksi dengan cepat akan tetapi kemampuan beradaptasi terbatas mengingat alternatif yang tersedia tidak seimbang dengan keinginan yang diharapkan. Namun, karena luasnya perubahan yang terjadi, berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan- keluarga, pekerjaan, pendidikan, politik maupun kehidupan sosial lainnya. Untuk itu, manusia harus terus menerus melakukan penyesuaian baru agar tidak tertinggal dalam upaya menyesuaikan tuntutan globalisasi.

Tuntutan Global membutuhkan penyediaan sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kerangka kebijaksanaan, pengembangan sistem pengelolaan dan pelaksanaannya (Rozy Munir, 1991). Persoalannya adalah manakah yang menjadi pokok pengembangan sumber daya manusia dalam era global agar usaha yang kita lakukan mengenai sasaran, setidaknya membawa hasil bermanfaat. Persoalan ini menjadi penting kita kaji mengingat kehidupan tidak dapat terlepas dari tuntutan tersebut. Agar tidak terlalu luas pembahasan ini difokuskan pada aspek pendidikan kaitannya pengembangan sumber daya manusia di era global.

Pengembangan SDM dan Globalisasi

Ada beberapa alasan mengapa sumber daya manusia perlu dikembangkan (LAKPESDAM, 1994) dalam menyikapi tuntutan di era globalisasi ini, yaitu: (a) meningkatnya investasi untuk membangun sumber daya manusia; (b) makin banyaknya penemuan baru mengenai sistem manajemen pengembangan SDM yang lebih efektif; (c) kebutuhan spiritual dan motivasi keagamaan yang semakin meningkat; (d) makin terbukanya kesempatan untuk mengejar terhadap iptek,

informasi dan bahasa asing; (e) luasnya kesepakatan pemanfaatan tenaga kerja di berbagai bidang.

Besarnya peluang seperti uraian di atas menuntut strategi pengembangan yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap manusia dalam berperan aktif membangun diri, keluarga maupun masyarakatnya untuk mengejar kekurangan yang selama ini dirasakan. Mereka diharapkan mampu melakukan adaptasi dengan realitas dunia yang serba modern melalui percepatan perkembangan memiliki akses yang cukup tinggi untuk memperoleh fasilitas, sehingga dapat menikmati hasil modernisasi. Jika ini tidak dapat diraih justru manusia akan mengalami keterlemparan diri (*Pushing out*) dari putaran arus globalisasi (Al-Zastrouw, 1998 : 22), karena keterbatasan akses mereka mencari tempat berlindung.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia seperti di atas, diperlukan suatu rumusan kebijaksanaan yang mengacu pada paradigma berfikir bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya cukup didekati dengan satu atau dua disiplin ilmu, namun butuh berbagai macam pendekatan dan beragam konsep. Pola seperti ini lebih menekankan pada pendekatan interdisipliner bukan multi disipliner. Analisis interdisipliner dimaksudkan upaya memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh hasil optimal, sehingga mampu menekan kemungkinan munculnya permasalahan baru. Sumbangan konsep dari berbagai macam disiplin ilmu disuborganisasikan pada penyelesaian masalah yang diasumsikan sebagai masalah bersama. Sedangkan analisis multi disipliner terbatas pada kajian permasalahan dari sudut pandang disiplinnya secara terpisah, sehingga tidak menggambarkan pemecahan yang diharapkan.

Gambaran ini dapat kita lihat permintaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh pekerja rendahan sementara untuk kategori tenaga kerja menengah ke atas masih kalah bersaing dengan negara lain yang sederajat. Rendahnya kualitas tenaga kerja tidak dapat dibebankan pada tingkat ekonomi masyarakat, tapi menyangkut juga tersedianya sarana prasarana pendidikan, kurikulum yang berlaku, kebijakan pemerintah, kriteria yang dibutuhkan dunia usaha dan sebagainya. Semuanya diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep penyelesaian yang relevan dan bermanfaat.

Dari aspek kependidikan penyediaan sumber daya manusia terus mengalami jumlah peningkatan pada jenjang SLA ke atas, sebagai akibat adanya kebijaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dari proyeksi Pusat Informasi Balitbang Diknas dalam Pelita VII, pertambahan angkatan kerja lulusan SLA mencapai 8,2 juta orang dari 2,4 juta pada Pelita V, demikian juga lulusan pendidikan tinggi dari 1,1 juta pada Pelita V meningkat hampir tiga kali lipatnya pada Pelita VII, 3.04 juta (Ace Suryadi, 1991). Data pertambahan jumlah tenaga kerja di satu sisi menggembirakan karena tersedianya SDM yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Di sisi lain justru akan menjadi beban karena tersedianya

SDM tidak dapat mengimbangi permintaan pasar ataupun peluang yang ada, yang berakibat munculnya pengangguran terdidik.

Ketidak sesuaian antara SDM dengan peluang kerja akan dapat memperburuk kondisi perekonomian yang dapat berimbas pada stabilitas masyarakat secara makro. Untuk itu perlu upaya-upaya yang dapat mengangkat kualitas SDM menjadi berdaya guna, mengingat dunia kerja akan selalu berubah dan meningkat persyaratannya dalam menerima lulusan pendidikan. Upaya dimaksud adalah diberlakukannya pengelolaan sistem pelatihan kerja sebagai program komplementer terhadap pendidikan formal untuk memperoleh lulusan yang dapat dipekerjakan. Program ini bukan hanya berlaku bagi lulusan SLA umum tetapi juga bagi SLA kejuruan bahkan lulusan perguruan tinggi, dengan memperhatikan derajat jenjang masing-masing. Agar hasilnya baik, penyelenggaraan sistem pelatihan kerja perlu direncanakan dengan memperhatikan konsep penyelenggaraan, program, pembiayaan dan mekanisme kerjanya. Penataan seperti ini dimaksudkan agar penyediaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif bagi para pencari tenaga kerja yang sewaktu-waktu membutuhkan.

Dalam hal pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia diperlukan kerjasama lintas sektoral dalam perencanaan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan IPTEK. Sistem pendidikan mempunyai fungsi dalam penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Agar fungsi ini terlihat jelas harus diperhatikan kaitan fungsional antar sistem pendidikan dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kenyataannya pengelolaan sistem pendidikan, penanganan ketenagakerjaan, dan pengembangan IPTEK dilaksanakan oleh departemen yang berbeda-beda. Akibatnya, sering muncul ketidak kompak, utamanya dalam menangani masalah-masalah teknis. Untuk menghindari kesimpangsiuran penanganan masalah, kerja sama antar departemen dalam studi kebijakan dan perencanaan harus senantiasa diupayakan dapat terwujud setiap saat dibutuhkan.

Era globalisasi membutuhkan kecepatan mengejar peluang bukan sebaliknya pasif menunggu datangnya peluang. Sikap ini menjadi tanggung jawab moral sebagai beban keberhasilan membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia. Ketertinggalan mendapatkan peluang sama halnya suatu usaha yang tanpa makna dalam mengembangkan SDM. Terserapnya tenaga kerja di dunia usaha menjadi salah satu indikator kuat, bahwa pengembangan SDM telah memiliki fungsi dan makna yang berarti di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa era globalisasi berkembang sepadan dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Percepatan memperoleh informasi dari semua penjuru dunia telah merubah struktur dan budaya masyarakat. Keinginan memperoleh fasilitas di era modern menuntut penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas melalui tahapan-tahapan, merumuskan strategi peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan

yang terencana dan menetapkan pola pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.

Strategi pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan pendekatan *interdisipliner* bukan *multidisipliner* dalam mencari pemecahan masalah yang muncul. Dalam pengelolaannya menerapkan sistem pelatihan kerja yang diberlakukan pada lulusan SLA baik umum maupun kejuruan dan lulusan perguruan tinggi untuk memenuhi tuntutan lulusan yang dapat dipekerjakan. Sedangkan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan kerjasama lintas sektoral yang berfokus di bidang perencanaan pendidikan, perluasan kesempatan kerja maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PERAN ORMAS ISLAM DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Setiap organisasi kemasyarakatan dibentuk bermula dari sejarah panjang sebagai latar belakang kemunculannya. Kristalisasi dari semangat nilai-nilai yang muncul menjadi acuan dalam membentuk dan mewarnai gerak langkah suatu ormas. Itu sebabnya keberadaan setiap ormas memiliki visi dan misi berbeda, utamanya dalam hal menawarkan program-programnya maupun dalam hal memberdayakan sumber daya yang dimiliki guna mencapai sasaran yang diinginkan.

Untuk menilai apakah ormas Islam memiliki peran dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu melihat dari pihak mana yang menilai. Pengaruh subyektif menimbulkan keberagaman penilaian. Misalnya, orang yang terlibat langsung dalam kegiatan akan berbeda apa yang dilihat dan dirasakan dengan orang yang tidak terlibat. Begitu pula antara anggota dengan yang bukan anggota.

Terlepas dari hal tersebut, ada ukuran umum untuk melihat ada tidaknya suatu peran. Bagaimanakah suatu ormas mengambil langkah-langkah kongkret di bidang pemeliharaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia. Adakah proses transformasi nilai-nilai sebagai dampak dari langkah yang telah diambil.

Untuk itu, perlu ada kejelasan format sumber daya manusia yang diinginkan, sehingga berdampak positif untuk perkembangan kehidupan ormas itu sendiri, *survive* terhadap tuntutan perubahan, namun tetap mengacu pada sendi-sendi dasar organisasi.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Permasalahannya

Sumber daya manusia (SDM) bisa dijadikan sebagai "*Human capital*" yang secara ekonomi akan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi sosial. Pemberdayaan SDM adalah suatu proses untuk memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan (ekonomi dan politik) suatu negara. (Bappenas, 1990).

Namun, terkadang pembahasan sumber daya manusia masih memfokuskan kepada pendekatan individu dengan mengambil kasus masyarakat tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh kurang memberikan manfaat yang luas karena terbatas pada kelompok individu dan sektor tertentu. Di sisi lain, kebermaknaan pemberdayaan SDM ditandai dengan adanya hubungan antar individu dan kelompok yang bersifat mono dualistik, saling terkait antara satu dengan yang lain. Keterkaitan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas anggota masyarakat yang pada akhirnya muncul sikap mandiri. Kemandirian akan mampu menumbuhkan prakarsa, kreatifitas dan inovasi yang dapat melakukan proses transformasi nilai-nilai sosial dan budaya.

Keberhasilan melakukan proses transformasi dicirikan dengan adanya pembaruan struktur dan budaya antara lain ditandai dengan: (a) adanya proses regenerasi; (b) munculnya golongan menengah baru dalam komposisi penduduk; (c) makin canggihnya stratifikasi dan spesialisasi keahlian; dan (d) makin banyaknya kelompok strategis yang muncul dan berkembang sebagai kekuatan baru. Sedangkan pembaruan budaya terjadi apabila masyarakat cenderung senang terhadap budaya demokrasi dan keterbukaan, diversifikasi informasi dan meningkatnya upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Lakpesdam, 1994)

Target sebagaimana rumusan di atas bagi suatu ormas (Islam) adalah suatu upaya yang berat. Beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat masih banyak menjadi faktor yang kurang mendukung. Mulai dari tingkat disiplin individu dan kelompok yang dirasa masih sangat rendah. Ini bisa terlihat dalam cara menghargai dan menepati waktu, menghormati tata tertib maupun norma-norma lainnya. Semangat berkreasi, semangat bersaing dan etos kerja selama ini kualitasnya masih juga rendah dan belum tumbuh merata di kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan tingkat produktifitas masyarakat menjadi rendah.

Permasalahan lain yang dirasa masih menjadi kendala adalah menyangkut segi struktur maupun kultur berorganisasi. Segi struktur organisasi biasanya memiliki banyak perangkat organisasi baik vertikal maupun horizontal, namun belum cukup didukung oleh sistem pengendalian organisasi yang baik karena belum berorientasi pada manajemen profesional.

Dari segi kultur, organisasi terkadang diwarnai budaya paternalistik yang cenderung tidak proporsional. Pembagian peran sering dilakukan bukan karena dasar keahlian. Adanya pemusatan dan pelibatan kelompok-kelompok tertentu dengan alasan yang tidak rasional. Selain itu, dirasa masih ada dalam kepemimpinan dijumpai personal yang kurang memiliki kemampuan kepemimpinan.

Masih banyak lagi persoalan lain yang belum dapat terungkap. Kondisi ini berdampak pada kualitas kelembagaan suatu organisasi. Persoalannya sekarang akan menjadi adakah peran dari organisasi Islam dalam meningkatkan sumber daya manusia manakala organisasi itu terdapat beberapa kekurangan sebagaimana terurai di muka.

Ormas Islam dan Perannya

Setuju bahwa ormas Islam memiliki peran dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini merujuk pada tujuan organisasi yang biasa ditulis dalam anggaran dasarnya. Untuk mencapainya disusunlah seperangkat program kerja serta langkah-langkah pelaksanaannya. Perannya terlihat mulai dari tingkat yang sederhana, semisal kegiatan koordinasi dan mobilisasi hingga ke peran yang lebih tinggi, misalnya bagaimana membikin teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Seperti telah disebutkan di awal tulisan ini bahwa peran ormas Islam dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat dilihat dari bagaimana ormas tersebut mengambil langkah-langkah dalam bidang pemeliharaan, pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia serta adakah proses transformasi nilai baik secara individu maupun kelompok.

Langkah pemeliharaan dimaksudkan sebagai upaya membentuk masyarakat memiliki sikap tertentu misal sikap *taawasuth dan i'tidal, ta'awun dan amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap baku tersebut akan melahirkan perilaku sosial yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya manusia perlu dilakukan secara proporsional dengan melihat potensi yang ada serta memperhatikan unsur tempat dan waktu. Pemanfaatan secara optimal akan menghasilkan proses perubahan tata nilai, pola pikir dan orientasi baik antar pribadi maupun kelompok. Pada gilirannya akan melahirkan manusia berkembang yang memiliki kecenderungan hidup dengan berdiferensiasi, berspesialisasi, ada regenerasi, responsif dan berupaya melakukan adaptasi dengan lingkungan.

Agar tidak terjadi terputusnya proses regenerasi, suatu ormas dituntut mampu menyediakan stok calon-calon penerus pengelola organisasi. Langkah ini ditempuh karena tidak ada satu pun organisasi menerima dikatakan sebagai organisasi papan nama.

Banyak bidang garapan sebagai wahana untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik. Antara lain melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal seperti yang dilakukan di pondok-pondok pesantren, *majelis ta'lim* maupun bentuk-bentuk kursus untuk menggali dan mengembangkan potensi baru.

Untuk pengembangan keterampilan dalam hal manajemen organisasi bisa dilakukan melalui sistem pendidikan dan latihan (diklat) misal latihan kepemimpinan. Begitu pula untuk kepentingan penyediaan yang berkaitan dengan sektor tertentu yang menuntut profesionalisasi dan keahlian maka dilakukan dengan penggabungan sistem diklat dan pendidikan formal.

Arah dari sekian upaya pemberdayaan SDM melalui peran-peran yang dilakukan oleh ormas diharapkan ada proses perubahan nilai secara mendasar baik struktural maupun kultural yang mengarah pada peningkatan kualitas organisasi. Pada akhirnya masyarakat menilai bahwa ormas telah berjasa dalam membawa anggotanya ke dunia yang serba maju.

Kemajuan suatu ormas sebenarnya sangat tergantung pada seberapa besar peran manusianya (pengurus/penggota) dalam mengelolanya. Kesungguhan dalam memanej akan berdampak pada tingkat kualitas organisasi yang pada gilirannya akan dapat berperan membesarkan SDM-nya.

Oleh karena upaya meningkatkan sumber daya manusia hendaknya selalu mempertimbangkan aspek-aspek kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang

yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan partisipatoris serta berangkat dari suatu kunci belajar dari pengalaman.

Sebagai harapan, tulisan sederhana ini dapat memberikan nuansa baru dalam menggali potensi yang sementara ini masih jauh terpendam dalam jiwa keanggotaan organisasi.

PROBLEMATIKA DAN STRATEGI DAKWAH ISLAM

Sebenarnya melakukan kegiatan dakwah tidaklah terlalu sulit. Seseorang dengan bekal seadanya disertai kemampuan menyerukan hal-hal yang baik kepada kelompok sasaran jadilah kegiatan dakwah. Pemahaman tersebut berpijak pada pengertian, bahwa dakwah adalah mengajak atau mendorong kelompok sasaran untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejelekan. (Sahal Mahfudh, 1992). Namun, persoalannya tidaklah sesederhana yang tertulis dalam pengertian. Karena kegiatan dakwah tidak sekedar mengajak ataupun mendorong pihak lain untuk berbuat sesuai seruan agama. Adanya perubahan pengetahuan tentang sikap dan perilaku dari kelompok sasaran sesuai dengan kerangka nilai yang diharapkan adalah yang lebih utama. Karenanya menjadi acuan keberhasilan dakwah. (Jalaludin Rahmat, 1989).

Kita mengenal dua metode dakwah, *billisan* dan *bilhal*. Keduanya memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan keduanya seharusnya dilakukan sehingga dapat saling melengkapi. Akan tetapi, dakwah *billisan* dirasa yang lebih dominan dilaksanakan baik di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan instansi. Di tempat kedua akhir-akhir ini kegiatan dakwah (*billisan*) terlihat semakin semarak dengan dilengkapinya sarana ibadah di tiap-tiap instansi baik pemerintah maupun swasta.

Semaraknya kegiatan dakwah yang ada boleh dikata belum memenuhi yang kita harapkan. Sekalipun acuan secara pasti untuk menilai keberhasilannya terlalu sulit untuk membakukannya. Namun, dari pengamatan secara umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terlihat adanya ketidakseimbangan antara kecenderungan untuk mengamalkan moral agama dengan kecenderungan untuk berperilaku yang tidak bermuatan moral agama.

Apabila sinyalemen tersebut disepakati, dapatlah dikatakan bahwa dalam kegiatan dakwah terdapat *disqualification*, sehingga menimbulkan permasalahan. Karena dakwah adalah suatu proses yang melibatkan banyak unsur seperti da'i, kelompok sasaran, materi, sarana, dan metodologi, maka untuk menentukan sumber permasalahan dirasa sulit. Dengan kata lain permasalahan dakwah sangatlah kompleks.

Problem Dakwah

Luasnya permasalahan dakwah tidaklah memungkinkan untuk semuanya dapat dibahas secara rinci dalam tulisan ini, setidaknya unsur-unsur pokok - subyek, obyek dan materi dakwah – dapat diungkap pada dialog saat ini untuk selanjutnya dicarikan alternatif pemecahan yang dapat mendukung tumbuhnya semangat baru dalam menekuni bidang dakwah.

Kegiatan dakwah sangat terkait dengan situasi waktu. Pergeseran waktu seirama dengan perkembangan ilmu dan teknologi memberikan dampak yang sangat besar terhadap perilaku sosial, yang pada gilirannya berakibat pada

peningkatan harapan dan kebutuhan hidup. Sebagai gambaran futurolog terkenal, Alvin Tofler mengisyaratkan bahwa saat sekarang ini merupakan era gelombang ketiga yang ditandai dengan era informasi global. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain dapat kita tangkap dalam waktu yang sama melalui pesawat TV berparabola. Dampaknya, proses *transformasi sosial* berkembang sangat cepat meluas ke masyarakat kita seakan tidak terkendali. Perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam semakin sempit posisinya terdesak oleh budaya baru. Disinilah pentingnya pengemasan materi dakwah seiring tuntutan perkembangan.

Memang kita mengakui adanya nilai manfaat yang ditimbulkan. Meningkatnya wawasan pengetahuan sehingga menambah referensi bagi seorang da'i akan sangat berpengaruh terhadap kaulitas dakwah. Namun, yang kita rasakan adalah adanya sikap ketidakmampuan manusia (da'i) memahami dan menguasai lingkungan, sehingga terjadi kesenjangan. Yakni, tidak adanya kesesuaian antara harapan masyarakat yang butuh dakwah dengan kenyataan yang diperoleh. Hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap keberadaan dakwah itu sendiri. Islam yang didakwahkan menurut mereka tidak mampu mengadaptasi dengan kebutuhan umat. Padahal, yang terjadi adalah ketidakberdayaan da'i dalam mengemas perkembangan lingkungan menjadi santapan dakwah yang memiliki muatan nilai-nilai Islam.

Lain halnya dengan persoalan masyarakat modern, mereka terbiasa dengan adaptasi rutinitas kegiatannya sehari-hari, seakan tidak ada permasalahan. Tetapi sebenarnya beban psikologis yang dideritanya sangatlah besar sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Manusia bergerak secara monoton, tanpa emosi, tanpa nilai, dan tanpa makna. Sehingga manusia seakan sebagai individu yang menjadi otomatis-otomatis yang kehilangan spontanitas, kreatifitas dan individualitas. Oleh Psikolog disebutkan sebagai penyakit adaptasi yang dikenal dengan *alienasi* yakni manusia yang terpisahkan dari pengalaman manusiawinya (Jalaludin Rahmat, 1991).

Masyarakat yang terkesan ibarat robot tersebut sangat membutuhkan pesan-pesan dakwah, untuk mengembalikan pemahaman terhadap jati dirinya, yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk meningkatkan kepribadiannya.

Mencari Format Pendekatan

Ibarat seorang dokter, agar dapat mengobati penyakit pasiennya dia harus mampu mendiagnosa dengan cermat sehingga dapat menentukan jenis penyakit serta penyebabnya, pada akhirnya dapat menentukan jenis obat yang sesuai.

Memang permasalahannya berbeda dengan seorang juru dakwah, karena yang dihadapi adalah umat yang senantiasa mempunyai kecenderungan berubah. Untuk dapat merumuskan penyakitnya, perlu mencari titik temu antara kecenderungan perilaku sosial dengan situasi waktu dan kondisinya, sehingga dapat dirumuskan pola pendekatan dakwah sesuai dengan harapan.

Perlu disadari, bahwa dakwah bukan saja memberikan wawasan keislaman yang lebih luas (bersifat kognitif), bukan hanya memberikan hiburan untuk melupakan persoalan dan meredakan tekanan psikologis, lebih dari itu dakwah harus dapat membantu orang-orang modern korban kemajuan IPTEK dalam memahami dirinya, serta dapat membimbing umat untuk memahami realitas sosial. Maka, dakwah yang dilakukan hendaknya bermodel *therapeutic* (bersifat menyembuhkan).

Perumusan pendekatan dakwah tidaklah asal mengambil alih dari pihak lain yang terlihat lebih modern, tetapi didalamnya justru sulit diketemukan korelasi positif antara langkah yang diambil dengan nilai-nilai Islaminya. Sehingga yang diperoleh bukan pemecahan tapi justru pelecehan terhadap agama. Disinilah pentingnya mengembalikan nilai-nilai ke tradisi kita yang telah membudaya di masyarakat untuk dikembalikan dengan memodifikasi sesuai kepentingan dan kebutuhan.

Pendidikan Dakwah Sebagai Alternatif

Dari bukti sejarah lembaga pendidikan Islam yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan modifikasi sistem pendidikan di lingkungan pesantren pola lama, yakni yang dikenal dengan sistem *halaqoh* (lingkaran) dalam bentuk pengajian *weton* maupun *sorogan*. Ciri utamanya adalah pengajarannya ditekankan pada penangkapan secara harfiah (*letterlek*) dengan pendekatan penyelesaian pembacaan kitab (teks) kemudian dilanjutkan ke kitab lainnya. (Abdurrahman Wahid, 1975).

Sistem tersebut secara bertahap dibenahi seiring dengan tuntutan keinginan masyarakat untuk maju. Dari non klasikal menjadi berjenjang dalam bentuk kelas-kelas, dari tujuan pendidikan yang hanya mengutamakan kepentingan beribadah meningkat ke pencapaian terbentuknya perubahan pola pikir, sikap dan perilaku yang materinya dipaket melalui program-program pengajaran yang dibakukan dalam bentuk kurikulum.

Perubahan yang terjadi sebenarnya adalah karena pengaruh timbal balik antara tuntutan perkembangan dari waktu ke waktu dengan keinginan lembaga pendidikan itu untuk tetap eksis dan diminati masyarakat.

Kita sepakat bahwa pendidikan Islam dimaksud merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Sebab, dakwah juga mempunyai tujuan sama dengan tujuan pendidikan yakni terbentuknya perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dari kelompok sasaran dakwah sesuai dengan seruan ajaran Islam.

Dengan demikian, pendidikan disini dimaksudkan sebagai upaya kaderisasi agar tetap terjadi kesinambungan kegiatan dakwah Islamiyah. Sebagai lembaga pendidikan dakwah ada dua bentuk kegiatan yang menghasilkan *out put* yang diharapkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Bentuk kegiatan dimaksud adalah pendidikan formal semisal sekolah atau bentuk lain yang setingkat. Penyelenggaraannya membutuhkan waktu relatif lama (± 3 tahun untuk setingkat Aliyah) dengan tujuan untuk mempersiapkan kematangan sikap dan mental para

peserta didik. Sasaran tersebut berbeda dengan bentuk kegiatan yang relatif lebih singkat waktu yang diperlukan. Tujuannya pun terbatas untuk menambah pengetahuan atau keterampilan tertentu guna melengkapi kualitas *out put* dari bentuk pendidikan yang pertama. Sebagai misal kegiatan yang kita laksanakan saat ini, Penataran Baca Tulis al-Qur'an Metode Modern. Kegiatan ini dilakukan antara lain karena adanya kekhawatiran terputusnya kader-kader pembina baca tulis al-Qur'an di masa mendatang.

Kedua bentuk kegiatan pendidikan di atas sangat besar manfaatnya sebagai referensi pengembangan dakwah. Namun perlu diingat, suatu kegiatan dapat dinyatakan berhasil apabila ada kesejahteraan antara harapan dengan kenyataan yang dihasilkan. Sehingga perlu ada evaluasi yang berkelanjutan agar dapat ditemukan manakah titik lemahnya dan daya dukungnya. Untuk selanjutnya kita persiapkan bentuk alternatif kegiatan lain yang lebih relevan.

Pada intinya, Problem dakwah sangat luas. Karena, dakwah melibatkan banyak unsur. Problem muncul karena tidak adanya keharmonisan proses dakwah, sehingga permasalahannya dapat timbul dari pihak juru dakwah karena kemampuannya kurang memadai, dari segi materi karena tidak relevan, dan dapat dari kelompok sasaran (obyek dakwah) karena adanya sikap ketidakpedulian.

Untuk mencari model dakwah yang berdaya guna perlu pendekatan analisa psikososial dan kultural, sehingga dapat diketemukan pemecahan strategi dakwah yang tepat. Disini pendidikan dakwah dirasa dapat membantu memberikan sumbangan memecahkan sebagian problem dakwah.

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI OTONOMI PENDIDIKAN

Telaah dari Perspektif Wawasan Kebangsaan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah mendorong semua elemen bangsa untuk membangun proses demokratisasi baru dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan mendasar tengah terjadi pada semua bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam bidang pemerintahan telah terjadi pergeseran strategi dari sentralistik ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi pengelolaan daerah yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga akan memberikan peluang yang luas kepada daerah dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri.

Dalam bidang pembangunan terjadi perubahan wawasan, dari wawasan yang menganut konsep atas-bawah (*top-down*) ke perubahan konsep bawah-atas (*bottom-up*). Ketergantungan kebijakan pembangunan dari pemerintahan pusat beralih kepada kemandirian dalam mencari dan merumuskan kebijakan yang bersumber dari realitas kondisi daerah. Keterlibatan semua elemen masyarakat dituntut memacu diri untuk dapat memenuhi kebutuhan agar tidak menjadi masyarakat tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu keharusan, karena sumber daya manusia yang bermutu sangat menentukan kemajuan masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa bukan ditentukan oleh melimpah tidaknya sumber daya alam, tetapi oleh kelangkaan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi alam lingkungannya menjadi berdaya untuk kemakmuran masyarakat.

Secara umum, otonomi daerah menghendaki diserahkannya kewenangan bagi daerah untuk mengelola rumah tangga sendiri terlepas dari campur tangan pemerintah pusat. Keinginan untuk mengelola sendiri itu diilhami oleh asumsi bahwa: (1) Kebebasan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri akan menghasilkan proses pembangunan yang lebih baik, (2) Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya (kekayaan) daerah akan menghasilkan sumbangan untuk mendukung proses pembangunan.

Dua asumsi tersebut mensyaratkan perlunya masing-masing daerah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan berfungsi sebagai pelaksana proses pembangunan dan pengolahan sumber daya (kekayaan) daerah. Hal ini sangat dapat dimaklumi karena pelaksanaan otonomi daerah menuntut kepada setiap untuk memiliki kekuatan guna memenangkan persaingan dengan daerah lain. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, maka pemerintah daerah sudah selayaknya memiliki perhatian yang serius terhadap pembangunan pendidikan di daerahnya. Pendidikan akan membawa individu untuk berubah dan meningkatkan produktifitas serta efesiensi kerja. Dua hal ini menjadi dasar

kekuatan ekonomi daerah karena produktifitas perkapita penduduk akan menjadi lebih besar, sementara kekuatan ekonomi adalah jantungnya otonomi daerah.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar dalam merubah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Lawrence J. Saha dalam J. Widodo (2001) memerlukan dua persyaratan utama yaitu: (1) Harus dapat kemajuan dan efisiensi yang tinggi atas pembangunan teknologi, sebab teknologi yang tinggi akan menghasilkan produksi yang besar; (2) Kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya pendidikan akan memperngaruhi nilai kepercayaan dan perilaku seseorang ke arah perubahan yang diinginkan oleh proses pembangunan. Pendidikan merupakan bagian dari proses transformasi internal yang mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan berlangsungnya pembangunan.

Tuntutan akan kemampuan manusia untuk dapat mengelola potensi lingkungan daerah menjadi suatu keniscayaan. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjawab permasalahan, bagaimana meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dengan bertumpu pada kondisi daerah namun tetap mengkait pada bagaimana membangun wawasan kebangsaan menjadi lebih dewasa, sehingga akan memperkuat rasa persatuan. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi pendidikan tidak saja mempersiapkan sumber daya manusia terbatas untuk kepentingan daerah, tapi juga kepentingan nasional, melalui kerja sama antar daerah guna mengembangkan keterbatasan potensi masing-masing daerah dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Keterbatasan potensi daerah baik lingkungan fisik, sosial dan budaya dijadikan sebagai acuan dalam membangun wawasan kebangsaan baru sebagai wujud rasa persaudaraan antar warga sebagai bangsa.

Perubahan Paradigma Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik (Umar Tirtarahardja, 1995:36). Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi, meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sasaran pembentukan pribadi mengarah pada pribadi yang belum dewasa menjadi dewasa dan yang sudah dewasa mampu mewujudkan kreatifitas dalam bentuk kegiatan usaha yang mandiri. Usaha yang dapat membangun dan mengembangkan potensi masyarakat sesuai tuntutan perubahan yang sedang berjalan, yaitu reformasi kehidupan termasuk reformasi bidang pendidikan.

Reformasi pendidikan di abad 21 akan berdampak pada perubahan paradigma (Mungin, 2001) yaitu: (1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, (2) dari belajar yang berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, (3) dari citra hubungan guru dan murid yang bersifat konfrontatif ke citra

hubungan kemitraan, (4) dari pengajaran yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buta teknologi, budaya dan komputer, (6) dari penampilan guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja, (7) dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama.

Reformasi pendidikan merupakan respons terhadap perkembangan dan tuntutan global sebagai satu upaya mengadaptasi sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan yang berkembang. Reformasi pendidikan merupakan satu kecenderungan global dalam arti terjadi di seluruh kawasan dunia sejalan dengan tuntutan perkembangan global di berbagai aspek kehidupan. Reformasi pendidikan menuntut terjadinya pergeseran paradigma pendidikan dalam berbagai aspek dan dimensi. Reformasi pendidikan tidak hanya sebagai upaya mempertahankan kelestarian bangsa dalam suasana kompetitif akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kondisi bangsa yang sakit. Pendidikan harus memiliki keseimbangan antara orientasi demi kepentingan kelestarian bangsa dalam persaingan dengan orientasi demi kelestarian perkembangan anak.

Menghadapi era global abad 21, pendidikan akan mengalami pergeseran yang harus mampu mengembangkan wawasan pembebasan; bermakna sebagai suatu wujud pendidikan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasi secara optimal.

Otonomi pendidikan sebagai konsekuensi otonomi daerah penyelenggaraannya harus didasarkan pada paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang demokratis. Masyarakat demikian adalah masyarakat yang terbuka, dimana anggota-anggotanya sadar akan hakekat kemanusiaannya, yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan bukan berdasarkan paksaan dari sekelompok penguasa yang hanya untuk kepentingan sendiri. Otonomi Pendidikan akan mengubah sistem pendidikan sentralistik menjadi sistem pendidikan desentralistik. Bentuk penyelenggaraan sentralistik yang menghilangkan inisiatif baik pribadi maupun masyarakat, kini telah menggunakan paradigma baru yang menghidupkan atau mengkondisikan kehidupan demokrasi. Kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan serta manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan output pendidikan manusia tanpa inisiatif. Kebebasan berfikir, kebebasan merumuskan, dan menyatakan pendapat apalagi pendapat yang berbeda tidak mendapat tempat.

Oleh karena itu, hasil dari pendidikan kita selama ini adalah manusia-manusia sekedar menjadi pengikut-pengikut setia terhadap suatu struktur kekuasaan. Sehingga menghasilkan kebudayaan cenderung mematikan kebudayaan daerah yang justru merupakan tempat dikelolanya praktek pendidikan.

Format Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penentu kegagalan pendidikan di Indonesia menurut para ahli pendidikan adalah penerapan asas sentralistik, yang merupakan produk kebijakan politis yang diterapkan di bidang pendidikan. Pemusatan komando telah mengakibatkan para guru dan pengelola sekolah mengikuti petunjuk yang telah dibakukan. Akibatnya, kreativitas guru dan pengelola sekolah negeri sangat rendah karena dibatasi oleh rambu-rambu seperti kurikulum, juklak, juknis, dan lainnya (Amelia Rahmi, 2001). Artinya, segala sesuatunya telah ditentukan secara sentral, dan sekolah tinggal melaksanakan. Dalam proses belajar mengajar yang terpusat pada seorang guru telah terbukti memasung kebebasan berfikir dan berekspresi siswa. Cara seperti ini mengakibatkan kreatifitas siswa menjadi rendah yang berakibat menurunnya kualitas output pendidikan yang berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia.

Teori Progresivisme dalam mengkaji tentang sumber daya manusia lebih mengutamakan bagaimana mengembangkan kualitas manusia ke masa depan melalui proses pendidikan dengan mengambil hikmah perjalanan pendidikan di masa lalu. Artinya, sesuatu yang baik dapat dijadikan modal lanjutan, sedangkan yang kurang baik digunakan sebagai dasar untuk mencegah agar tidak terulang di kemudian hari (Imam Barnadib, 1996 : 19). Untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengantarkan masyarakat Indonesia ke posisi terdepan, atau paling tidak sejajar dengan negara-negara lain baik dalam pengembangan ekonomi, politik, teknologi maupun sosial-budaya, menurut Utami Munandar pada hakekatnya menuntut komitmen dalam dua hal, yaitu:

- (1) Identifikasi dan pengembangan bakat-bakat unggul dalam berbagai bidang.
- (2) Pemupukan dan pengembangan kreativitas yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang, tetapi perlu ditemukeni dan dirangsang sejak usia dini. (Munandar dalam Amelia Rahmi, 2001).

Selama ini pelaksanaan pendidikan formal di Indonesia telah memasung pengembangan kreativitas siswa sebagai peserta didik di satu pihak, dan guru sebagai pelaksana didik di lain pihak. Sedangkan pengembangan potensi individu secara utuh adalah sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta seni dan budaya.

Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia sesuai harapan melalui proses pendidikan dapat dilakukan banyak hal. *Pertama*, menyediakan ruang gerak ekspresi siswa. Hal ini sangat penting untuk mengenali siswa berbakat dan kreatif. *Kedua*, mendukung dan sekaligus memberi motivasi siswa berbakat. Selama ini sering terjadi penekanan oleh pendidikan dan norma budaya masyarakat, sehingga banyak orang memiliki benih kreativitas tetapi lingkungan telah gagal untuk menjadikan wahana yang dapat menumbuhkan suburkannya. *Ketiga*, menyediakan kurikulum yang berdiferensiasi. Sebenarnya kurikulum 1994 memiliki struktur gradasi yang rapi dan jelas yang relevan dengan kaidah didaktik. Materi-materi dasar disajikan lebih awal, kemudian semakin lama meningkat

kompleksitasnya. Bagi guru, ini akan sangat membantu dan memudahkan dalam mengorganisasi materi pelajaran. Yang sudah pasti struktur kurikulum yang sentralistik menjadi kaku, sehingga dalam implementasinya proses pembelajaran terkesan dangkal dan tidak mendalam. Sedangkan bagi siswa yang telah teridentifikasi memiliki bakat semestinya diterapkan kurikulum berdiferensiasi (Hasil Penelitian Nugroho, 2000).

Otonomi pendidikan menuntut para pengelola daerah untuk melakukan identifikasi adanya faktor kelebihan dan kekurangan sehingga dapat melihat peluang dan tantangan yang dihadapi. Kegagalan dalam hal melakukan identifikasi tersebut akan menyebabkan otonomi hanya berarti kemandekan. Oleh sebab itu diperlukan kreativitas dan kemandirian sebagai kata kunci untuk maju.

Dalam otonomi, ketergantungan vertikal (pusat–daerah) menjadi sangat berkurang. Ketergantungan yang tercipta adalah ketergantungan horizontal. Ketergantungan antar mereka didasarkan pada saling membutuhkan dan diukur dari signifikansinya, apakah suatu pihak dapat menghasilkan berkah produk yang berguna atau menguntungkan bagi pihak lain atau tidak. Dalam konteks inilah, mutlak dipenuhi tiga tuntutan, yaitu kreatif, mandiri, dan profesional.

Untuk mencapai keberhasilan otonomi pendidikan, sekurang-kurangnya terdapat lima komponen yang saling terkait dan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya proses pendidikan tersebut. Kelima komponen itu adalah:

- (1) Tujuan atau visi pendidikan nasional di daerah.
- (2) Organisasi dan manajemen yang efisien.
- (3) Kurikulum yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat lokal.
- (4) Kemampuan para pelaku (guru, administrator, siswa).
- (5) Para *stakeholder* (orang tua dan masyarakat). (Amelia Rahmi, 2001).

Pertama, mengenai pendidikan nasional di daerah, harus dibuat rumusan yang jelas visinya, yaitu memberdayakan manusia Indonesia. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar anggota masyarakat dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakatnya, dalam lingkungan kebudayaan lokalnya serta lingkup masyarakat Indonesia yang besar.

Kedua, untuk mencapai visi pendidikan nasional di daerah diperlukan organisasi dan manajemen yang efisien. Organisasi tersebut harus tumbuh dari dan oleh masyarakat daerah yang memilikinya. Bukan seperti pada masa lalu, yang segalanya telah dibuat dan ditentukan oleh pusat. Barangkali perlu dikembangkan *school based management* dan *community based education*.

Ketiga, untuk menumbuhkan masyarakat yang demokratis serta para cendekia di daerah mutlak diberi kesempatan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dan dibutuhkan oleh daerah tersebut (muatan lokal). Oleh sebab itu, kurikulum nasional tidak perlu dirinci sedemikian detail dan kaku, dengan maksud untuk menumbuhkan kreativitas para guru dan pengelola pendidikan lainnya. Namun demikian, tetap diperlukan rambu-rambu kurikulum yang mampu menggaling kesatuan dan persatuan bangsa serta pemasyarakatan demokrasi.

Keempat, untuk dapat melaksanakan otonomi pendidikan diperlukan guru-guru yang profesional, para administrator handal serta penciptaan proses belajar yang mengembangkan sikap dan kemampuan aktif para siswa.

Kelima, para *stakeholder* yang terdiri dari para orang tua murid serta masyarakat sekitar belum dilibatkan dalam pengembangan sekolah, oleh karenanya pertumbuhan sekolah terpisah sama sekali dengan masyarakat. Sekarang saatnya melatih dan membekali siswa mengenai kepekaan diri dan lingkungan sekitar. Melalui cara ini, diharapkan muncul kepedulian siswa terhadap problem yang terjadi di masyarakat.

Fungsi pendidikan dalam otonomi daerah tidak akan dapat tercapai apabila sekolah terlepas sama sekali dengan lingkungannya. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan tersebut hanya dapat dijamin melalui organisasi dan manajemen yang baik.

Pola Pembangunan Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan tidak berarti karakteristik pelaksanaan pendidikan daerah boleh menyimpang dari sistem pendidikan nasional. Bahkan keberadaan otonomi daerah yang berimplikasi pada otonomi pendidikan harus memperkuat pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan pengaturan sistem manajemen untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan.

Membangun berarti merubah suatu situasi menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Terdapat paling tidak tiga makna yang terkandung yaitu: (1) merubah dalam arti merubah dari situasi yang ada menjadi situasi lain yang diharapkan; (2) perbaikan, artinya hasil perubahan yang ditimbulkan dari aktifitas pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua pihak atas dasar kesamaan hak dan keadilan; (3) tuntutan masyarakat, artinya perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan merupakan wujud dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan berikut kecenderungannya ke depan.

Pembangunan di bidang pendidikan sebagai akibat lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah, menuntut pemerintah daerah mulai merancang sebuah pola pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini sangat beralasan, karena: (1) Pendidikan merupakan bagian dari *public service* yang kewenangannya diserahkan kepada daerah; (2) Begitu urusan pendidikan diserahkan kepada daerah berarti sebagian besar pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab daerah. Masalah ini menjadi masalah besar apabila pemerintah daerah tidak menaruh perhatian yang proporsional terhadap pendidikan; (3) Pendidikan adalah investasi daerah yang pada masa mendatang akan menghasilkan *return* bagi suksesnya pembangunan ekonomi daerah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, persoalan mendasar dalam desentralisasi pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, serta mengapa demikian. Apabila penguasaan ini jelas, maka pengurusan pendidikan yang desentralistis tersebut memungkinkan pelaksanaan

peran pendidikan secara benar dan optimal, bermanfaat bagi daerah dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, (Sumarna dalam Joko Widodo, 2001). Menurut Sumarna, desentralisasi pendidikan sulit dijalankan jika persoalan terkait seperti berikut ini belum dibenahi: (1) Penataan dan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, iklim, proses pendidikan yang demokratis dan memperhatikan mutu; (2) Pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kemampuan, semangat dan kepedulian penuh terhadap pendidikan; (3) Peningkatan mutu dan relevansi, mengingat pendidikan tidak hanya berorientasi lokal daerah, tetapi juga kepentingan nasional dan dalam perspektif global; (4) Peningkatan akuntabilitas pendidikan dan lembaga pendidikan.

Selain empat hal di atas, pembangunan pendidikan dalam kerangka desentralisasi (otonomi) daerah hanya akan berhasil apabila didasarkan pada : (1) Visi dan misi pendidikan nasional yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan keberhasilan nilai-nilai universal, (2) Memperhatikan aspek ideologis yakni mencakup konsep filosofis dan tata nilai yang telah menjadi pandangan hidup sebagai bangsa yang terus berkembang; (3) Memperhatikan aspek empiris yakni kondisi pendidikan daerah sebelum otonomi daerah dilaksanakan, potensi daerah dan kebutuhan daerah dalam suatu lingkungan nasional maupun global; (4) Karakteristik daerah yakni mencakup budaya, nilai-nilai yang berkembang di daerah berikut kemampuan masyarakat daerah.

Menurut Joko Widodo (2001), perubahan yang dihasilkan oleh reformasi di negara kita saat ini tergolong ke dalam “perspektif sistem terbuka.” Dalam sistem terbuka seperti itu terdapat lima kategori variabel yang satu sama lain saling mempengaruhi.

Pertama, past history variable yakni sejarah masa lampau yang mendorong perlunya melakukan perubahan. Didalamnya mencakup pengalaman, target perubahan, masalah kunci yang menyebabkan perlunya perubahan dan situasi umum yang ada. Termasuk dalam variabel ini misalnya : Kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak menghasilkan perubahan ke arah perbaikan, ketidakadilan, situasi sosial, ekonomi dan sebagainya.

Kedua, environment variable yakni variabel-variabel lingkungan yang memberikan dukungan terhadap terjadinya perubahan. Variabel ini sangat kuat mempengaruhi terjadinya reformasi. Kompleksitas dan kedinamisan lingkungan telah memberikan bantuan tersendiri bagi terjadinya suatu perubahan. Termasuk dalam variabel ini adalah budaya masyarakat, norma atau nilai, misalnya demokrasi dan kebebasan sebagai dampak dari globalisasi.

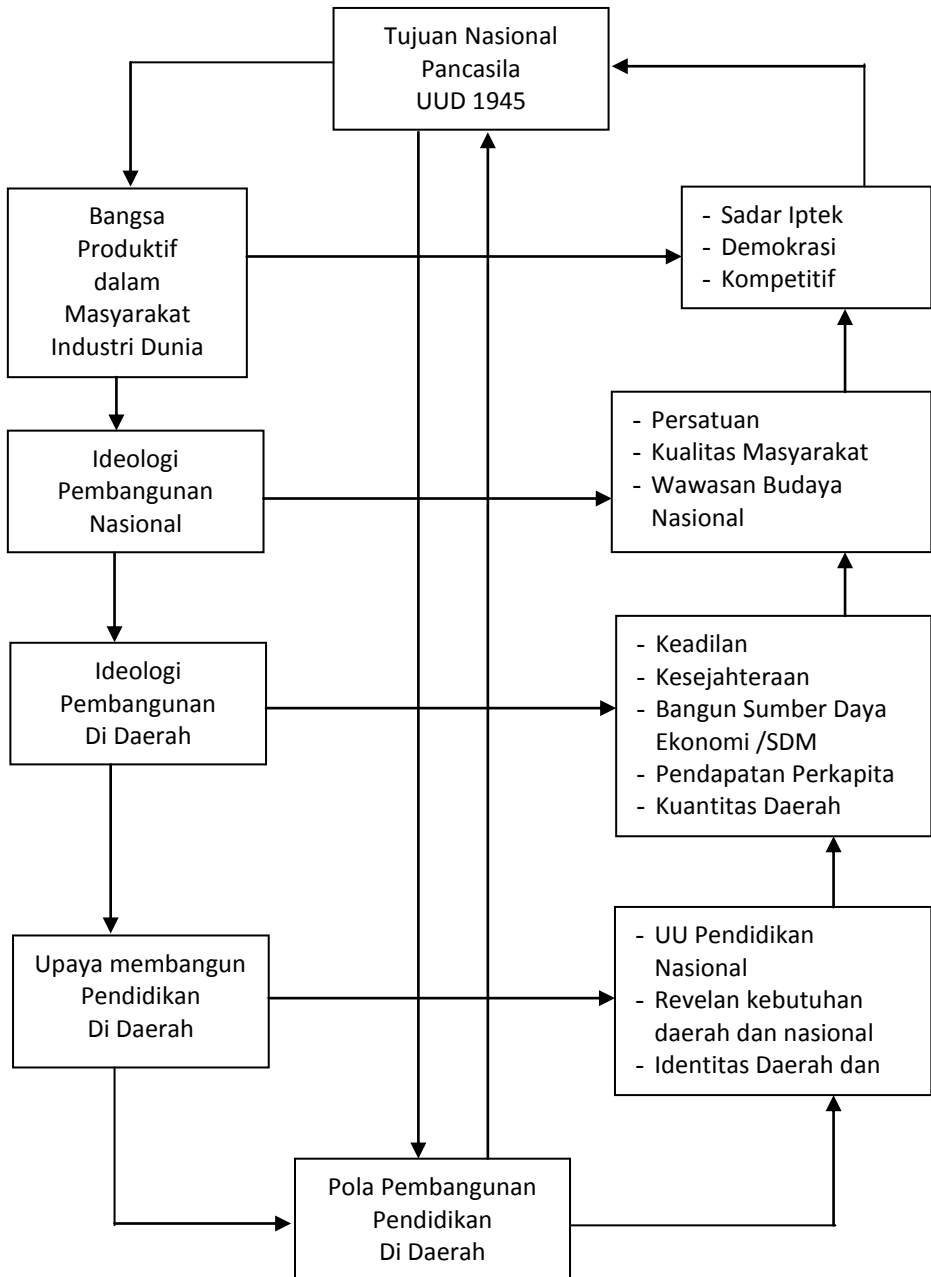
Ketiga, organization structure variable yakni struktur keorganisasian yang dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dilakukan perubahan. Variabel ini mencakup pola kewenangan antara pusat dan daerah, bentuk-bentuk peraturan dan prosedurnya, serta sentralisasi pengambilan keputusan.

Keempat, organizational process variable yakni proses-proses keorganisasian yang diharapkan dapat memperkuat hasil pembangunan, dipandang telah menyimpang dari apa yang telah diharapkan oleh daerah. Hal ini biasanya merupakan dampak dari struktur organisasi yang sentralistik sehingga menghasilkan pola komunikasi yang tidak baik, pengambilan keputusan yang tidak fair, kegiatan koordinasi yang terlalu mengekang, serta distribusi kekuasaan yang tidak adil.

Kelima, individual characteristic variable yaitu sifat-sifat individual baik perorangan maupun organisasi yang memberikan dukungan terhadap semua hasil reformasi. Dukungan individu tersebut dapat dilihat dari seberapa besar kepuasan yang dirasakan, keterbukaan dalam menerima perubahan, cara pandang individu dan komitmen.

Perubahan dalam suatu sistem yang terbuka seperti di atas mengandung banyak resiko. Artinya, banyak menimbulkan masalah baru yang tidak boleh dianggap sepele. Semua masalah yang mungkin akan muncul harus segera diantisipasi agar tidak semakin parah. Kecenderungan seperti ini biasanya muncul dari keinginan-keinginan individual yang tidak terkontrol, yang akhirnya membentuk karakteristik individu yang kurang baik. Perasaan tidak pernah puas, tidak memiliki komitmen positif, cara pandang terhadap otonomi yang berlebihan, arogansi kedaerahan dan sebagainya.

Kecenderungan munculnya karakteristik individu seperti di atas akan kita dapat pula dalam pola pembangunan pendidikan di daerah. Bisa saja penyelenggaraan pendidikan di daerah lepas sama sekali dari sistem pendidikan nasional karena isu-isu kurikulum lokal, biaya lokal, kebutuhan sumber daya manusia di daerah dan sebagainya. Menyikapi hal seperti ini perlu dirumuskan pola pembangunan pendidikan di daerah yang dibangun guna mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Jika dilukiskan akan tampak seperti gambar berikut :



Gambar : Pola Pembangunan Pendidikan di daerah dalam rangka Otonomi Daerah

Pola pembangunan pendidikan di daerah harus tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak diperlukan karena dari tujuan nasional tersebut akan mengilhami bagaimana upaya pembentukan masyarakat yang produktif, sehingga mempengaruhi ideologi pelaksanaan pembangunan secara nasional maupun daerah. Dari sinilah kemudian perlu upaya riil dari masing-masing daerah untuk membangun pendidikan yang sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Nasional, kebutuhan daerah, identitas daerah yang dikelola secara profesional dan mandiri. Diharapkan secara serentak upaya riil tersebut mampu membentuk pribadi-pribadi yang sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan demokrasi sebagai syarat bagi terbentuknya masyarakat (bangsa) yang produktif.

Meningkatkan Rasa Persatuan dan Wawasan Kebangsaan

Orientasi pembangunan otonomi pendidikan pengembangannya mengacu pada potensi daerah, meliputi sumber daya manusia, lingkungan alam, sosial dan budaya. *Out put* pendidikan diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik bagi peningkatan prestasi daerah untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakatnya. Hal ini berarti karakteristik potensi daerah dapat digali dan dikembangkan secara efektif. Kekhasan potensi alam yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain harus dikelola secara lebih produktif, sehingga layak menjadi andalan produksi daerah.

Menyadari bahwa antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kemampuan alam yang berbeda. Demikian juga sumber daya manusia yang dimilikinya. Rendahnya tingkat produksi daerah disertai kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung untuk pengembangan, akan sangat mempengaruhi laju pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu ada upaya lain yang dapat mengangkat keterbatasan tersebut menjadi peluang pemberdayaan.

Untuk memenuhi harapan tersebut upaya mengembangkan potensi khusus suatu daerah menjadi bahan masukan yang sangat penting untuk memunculkan spesialisasi produk andalan. Produk andalan akan banyak memberikan sumbangan berarti bagi perolehan pendapatan asli daerah yang gilirannya akan membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Disisi lain tidak produksinya aneka barang kebutuhan karena keterbatasan daya dukung baik bahan baku, permodalan maupun keterampilan sumber daya manusianya akan mendorong daerah berkompetisi dengan daerah lain dalam menjamin hubungan kerja sama dan kemitraan kerja yang saling menguntungkan dengan daerah-daerah yang dapat memberikan sokongan berarti bagi pembangunan.

Ada beberapa alasan, suatu daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain : *Pertama*, sumber alam yang dimiliki sangat terbatas, jenis maupun jumlahnya kurang dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, tidak memiliki tenaga ahli yang mumpuni bagi kepentingan pengelolaan sumber daya daerah yang ada, sehingga untuk mengerjakannya membutuhkan tenaga dari luar

daerahnya. *Ketiga*, sarana teknologi tidak banyak dimiliki, untuk mengolah potensi alam yang ada menjadi bermanfaat membutuhkan peralatan teknologi dari daerah lain.

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki daerah seperti di atas, suatu daerah untuk dapat membangun daerahnya perlu membentuk kerja sama dengan daerah lain. Kerja sama tersebut dapat berupa tukar menukar barang dalam bentuk perdagangan untuk kepentingan industri maupun kebutuhan rumah tangga, pengiriman atau pengambilan tenaga trampil baik dalam bentuk magang kerja maupun sekolah atau latih kerja, dan dapat berupa kerja sama penanaman modal dan dapat pula berbentuk kerja sama lain di sektor jasa.

Kecenderungan berkompetensi dalam membentuk jaringan kerja sama dengan daerah lain menjadi wacana baru di era otonomi daerah. Program pendidikan sebagai penopang utama penyediaan sumber daya manusia harus dapat mengimbangi antara tuntutan perubahan dengan program pengajaran, sehingga kesenjangan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat dihindari. Pendidikan sebagai "*agent of development*" benar-benar akan teruji keberhasilannya pada era otonomi pendidikan.

Wacana baru yang harus dapat dikembangkan adalah, kuatnya hubungan kerja sama antar daerah dalam menjamin kepentingan pembangunan tidak dapat meninggalkan ikatan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kedekatan antar daerah dan kelompok masyarakat harus dijadikan sebagai media pemersatu umat, bukan sebaliknya membentuk kelompok sektarian yang dapat menimbulkan kerenggangan antar daerah maupun kelompok masyarakat lain yang masih sama-sama dalam lingkup sebagai bangsa Indonesia. Faham ini menuntut, bahwa pengembangan otonomi pendidikan akan tetap mengacu pada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Berbeda-beda dalam merumuskan kebijakan pendidikan sesuai ciri khas daerah, tetapi sasaran akhir akan membangun peningkatan pola wawasan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterkaitan antara daerah dalam mengembangkan konsep otonomi pendidikan akan dapat menjadi bahan ajar dalam program pendidikan untuk mencari dan menemukan konsep baru yang dapat dikembangkan menjadi bahan untuk membangun kesadaran, bahwa kemandirian otonomi daerah atau otonomi pendidikan bukan berarti membangun keterlepasan ikatan dengan pemerintah pusat, akan tetapi kemandirian otonomi daerah dibangun atas dasar prakarsa masyarakat dari bawah dalam membentuk kualitas daerah dan sumber dayanya guna memperkuat ikatan antara satu daerah dengan daerah lain dalam lingkup kesatuan wilayah Indonesia. Sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat akan tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan yang keras, tidak atas dasar paksaan atau kehendak dari orang lain. Inilah yang harus dipersiapkan oleh semua lembaga yang terkait di daerah dalam menyongsong penerapan otonomi pendidikan.

Dalam praktiknya, tidak semudah yang dikemukakan melalui konsep maupun teori, beberapa kendala yang akan muncul perlu diantisipasi. Misalnya,

munculnya sikap arogansi massa sebagai imbas transisi demokratisasi yang baru dirasakan kebebasannya oleh sebagian masyarakat, demikian juga sikap mental menerabas, ingin cepat memperoleh hasil tanpa harus banyak mengeluarkan tenaga dan biaya. Semua ini sangat mungkin akan menghiasi setiap pelaksanaan kebijakan baru di daerah sebagai bentuk pelampiasan sikap yang selama ini belum pernah dapat diperolehnya.

Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi pendidikan merupakan respon positif dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah. Otonomi pendidikan akan dapat menjadi media untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan kebangsaan, apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya meliputi, visi dan misi yang akan dicapai, perangkat kebijakan penyelenggaraan otonomi pendidikan, sumber daya yang mendukung, serta orientasi pengembangan yang mengacu pada spesialisasi produk andalan daerah.

Wawasan kebangsaan akan terbangun atas dasar tumbuhnya kesadaran baru dari masyarakat karena keterlibatannya dalam membangun daerahnya yang memiliki keterbatasan potensi lingkungan alam, sosial dan budaya. Keterbatasan yang dialami dapat disiasati dengan membangun kerja sama kemitraan dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan bagi kepentingan masyarakatnya.

BAB V

MEMBANGUN BUDAYA LITERASI DAN BERFIKIR KRITIS

FORMAT BERFIKIR KRITIS

Manusia dikenal sebagai makhluk paling terhormat karena dikaruniai akal fikiran oleh Allah Swt. Dengan akal, manusia mampu mengembangkan diri serta menundukkan lingkungan, termasuk berupaya mencari pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi melalui pengamatan serta ketajaman berfikir untuk menemukan hubungan-hubungan hal-hal baru guna mendapatkan jawaban maupun cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah untuk disikapi lebih lanjut. Membiasakan berfikir demikian oleh kalangan akademisi dikenal sebagai *berfikir kritis*.

Istilah berfikir kritis secara sederhana dimaknakan berfikir tajam dengan mampu menguraikan rincian muatan konsep dalam suatu permasalahan serta mengaitkan dengan hal-hal lain, sehingga muncul suatu gagasan yang mungkin dapat dikembangkan. Gambaran seperti ini merupakan perwujudan pola berfikir kreatif. Dalam tulisan ini akan lebih menajamkan pada pembahasan berfikir kreatif dalam memecahkan masalah, karena kreatifitas baru akan dapat berkembang manakala ada tantangan, sedangkan tantangan itu sendiri penyelesaiannya akan menuntut kreatifitas.

Kreatifitas dan Pengembangannya

Sebenarnya setiap orang memiliki potensi kreatif yang dapat dikembangkan baik melalui pendidikan maupun pengalaman. Untuk dapat mengetahui potensi kreatifitas berfikir seseorang dapat dilihat dari segi ciri-ciri intelektual dan ciri-ciri non intelektual. Ciri-ciri intelektual antara lain kepekaan dalam pengamatan, kelancaran, fleksibilitas dan originalitas dalam berfikir. Sedangkan ciri-ciri non intelektual yang dapat mencerminkan kepribadian yang kreatif antara lain, independensi dalam berfikir, memberi pertimbangan dalam bertindak, mempunyai minat luas, ingin mencari pengalaman baru, lebih merasa tertantang terhadap masalah-masalah yang kompleks ketimbang yang rutin dan seterusnya. Kedua ciri tersebut dapat dikembangkan sehingga kreatifitas seseorang dapat meningkat yang berarti :

Pertama, dapat memberikan ide-ide dengan lancar. *Kedua*, dapat melihat suatu masalah dari bermacam sudut tinjauan (fleksibel pemikirannya). *Ketiga*, dapat memberikan ide-ide unik dan original.

Pengembangan kreatifitas dapat ditempuh dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung dilakukan dengan merangsang dan mempertajam keterampilan observasi, dengan menambah pengetahuan dan pengalaman dengan melatih dan menggunakan teknik berfikir kreatif ataupun dengan cara-cara lainnya. Cara tidak langsung dapat dilakukan dengan mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan dalam diri kita antara lain kurang percaya diri, terlalu cepat memberikan kritik terhadap ide-ide baru, kurang berani mencoba cara-cara baru, takut mendapat celaan dan seterusnya. Dari lingkungan kita antara lain atasan yang

tidak terbuka terhadap ide-ide bawahan, kurangnya kerja sama, saling tidak percaya antar teman, dan tekanan pada kerja rutin.

Pengembangan kreatifitas dimaksudkan agar muncul prakarsa dan inisiatif yang merupakan kesadaran untuk mengerjakan sesuatu yang diyakini sebagai tindakan terbaik tanpa disuruh orang lain. Oleh karena itu, prakarsa merupakan benih kreatifitas yang senantiasa dibutuhkan. Itu sebabnya perlu sekali melatih berfikir kreatif dalam upaya mencari penyelesaian suatu permasalahan.

Melatih Berfikir Kreatif

Kadangkala seseorang merasa canggung apabila dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut penyelesaian segera. Meskipun dilihat dari segi pendidikan formalnya memadai, tetapi karena kurang terlatih mencari penyelesaian suatu masalah maka hasil akhirnya kurang dapat memenuhi harapan. Oleh sebab itu, sangat perlu memahami tahap-tahap pemecahan masalah secara kreatif.

Ada lima tahap pemecahan masalah secara kreatif, masing-masing tahapan dapat diperluas dengan proses divergen dan konvergen.

Tahap 1. *Fact Finding* (menemukan fakta)

Tahap pertama ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta apa yang diperlukan. Pengembangannya dengan langkah-langkah :

Divergen :

- 1) tulis semua pertanyaan faktual yang diinginkan;
- 2) catat semua sumber yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan.

Konvergen :

- 1) Pilih pertanyaan faktual yang dianggap penting/berarti;
- 2) Pilih sumber yang dianggap penting. (pertanyaan faktual menanyakan fakta-fakta yang berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi pada masa lalu)

Tahap 2. *Problem Finding* (menemukan masalah)

Tahap kedua ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sejelas mungkin tentang suatu masalah. Untuk ini perlu dirumuskan macam-macam masalah agar dapat melihat masalah dengan cara-cara yang berbeda. Langkah pengembangannya :

Divergen :

- 1) catat semua pertanyaan kreatif sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan fakta-fakta yang ada;
- 2) perluas masalah dengan cara menanyakan "mengapa" terhadap masalah yang dirumuskan di atas;
- 3) catatlah masalah-masalah lain yang berhubungan dengan aspek-aspek yang lain pula.

Konvergen :

- 1) pilihlah masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan sekarang atau kemudian.
(pertanyaan kreatif : berorientasi ke masa depan, memancing banyak alternatif).

Tahap 3. *Idea Finding* (menemukan gagasan)

Tahap ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah agar dapat mencapai tujuan. Langkah pengembangannya :

Divergen :

- 1) catat semua gagasan yang muncul;
- 2) gunakan teknik-teknik kreatif antara lain :
 - teknik sumbang saran
 - teknik mendaftar sifat
 - hubungan yang dipaksakan
 - matrik
 - analisa nilai.

Konvergen :

- 1) pilih gagasan-gagasan yang dianggap baik;
- 2) sebagai kriteria umum dapat digunakan drajat kemudahan gagasan untuk diimplementasikan, misalnya mudah, agak sulit, sulit.

Tahap 4. *Solution Finding* (menemukan jawaban)

Tahap ini untuk memilih kriteria yang paling tepat untuk menilai alternatif jawaban sehingga memperoleh jawaban yang tepat. Langkah-langkah pengembangannya :

Divergen :

- 1) usahakan mengantisipasi semua pengaruh dan akibat;
- 2) catat semua hal yang dapat dipakai sebagai kriteria, dengan menggunakan fakta-fakta yang telah dimiliki melalui tahap *fact finding*.

Konvergen :

- 1) pilih kriteria yang dianggap tepat;
- 2) nilailah setiap alternatif jawaban yang telah tersaring pada tahap *idea finding*.
Penilaian dapat menggunakan dasar kata sifat (baik, cukup, dan sebagainya), angka (1, 2, 3, dst.)

Tahap 5. *Acceptance Finding* (menemukan penerimaan)

Tahap ke lima ini dimaksudkan untuk membuat suatu rencana pelaksanaan dari setiap gagasan yang telah diputuskan untuk digunakan. Pengembangannya dilakukan dengan :

Divergen :

- 1) catat semua tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan 4 W + 1 H;

- 2) kembangkan rencana untuk menyalurkan gagasan, misalnya kepada siapa gagasan disalurkan, apa yang harus dilakukan terhadap gagasan itu, apa keuntungannya dan bagaimana mengatasi keberatan tersebut.

Konvergen :

- 1) pilih tindakan/langkah-langkah yang dianggap tepat;
- 2) pilih rencana menyalurkan gagasan yang dianggap baik.

Telaah praktis tentang berfikir kreatif dalam menyikapi permasalahan seperti uraian di atas masih merupakan pembahasan teoritis. Untuk melihat hasilnya dibutuhkan latihan dan pembiasaan. Sehingga tidak mengecewakan dalam mencari pemecahan masalah, utamanya yang berkait dengan keorganisasian yang terkadang banyak menemukan jalan buntu hanya karena salah persepsi antar para anggota.

Dengan tulisan singkat ini semoga dapat memberikan manfaat dalam mempertebal bekal para pembaca, serta memberikan semangat baru dalam membangun dan mengembangkan organisasi untuk *izzul Islam wal muslimin*.

MEMBANGKITKAN POTENSI BERPIKIR KREATIF DAN MENULIS PRODUKTIF

Banyak gagasan cemerlang muncul pada pikiran seseorang yang hilang percuma tanpa memberikan manfaat nyata. Temuan permasalahan berikut berbagai pendekatan dan rancangan pemecahannya tidak dapat ditindaklanjuti lantaran konsep alur pikir tersebut belum terekam dalam tulisan yang dapat dijadikan pegangan untuk berbuat nyata (*making action*). Apapun bentuk tulisan sangat bermanfaat setidaknya sebagai media untuk mengingatkan kembali di saat dibutuhkan atau membangun kreativitas lanjutan dikala proses formasi konsep memerlukan.

Berbuat dalam bentuk kegiatan membutuhkan rumusan konsep yang jelas dan sistematis, dengan maksud *pertama*, sebagai acuan dasar dalam berpikir lebih lanjut, sehingga diperoleh beragam alternatif pemecahan dari permasalahan yang ditemukan. *Kedua*, agar dapat dimanfaatkan orang lain atau bahkan dikembangkan, rumusan konsep tersebut semestinya tertuang dalam bentuk tulisan. Namun, kemauan menuangkan ide-ide ke dalam tulisan seringkali terkendala oleh berbagai hal, seperti rendahnya keinginan mengembangkan kreativitas berpikir karena faktor kemalasan dan kurang percaya diri atau tidak ada sumber pustaka, muncul anggapan bahwa menulis sebagai pekerjaan yang sangat sulit, sudah banyak tulisan lain yang senada sehingga tidak perlu lagi menulis dan lain sebagainya.

Apabila dirunut lebih lanjut sesungguhnya yang terjadi adalah kurang adanya keberanian menumbuhkan kreativitas budaya menulis. Dalam konteks pendidikan yang memiliki sifat dinamis, siapapun yang berkecimpung di dalamnya, keterampilan menulis menjadi sebuah keniscayaan untuk dimiliki, guna memenuhi jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penulisan laporan hasil analisis pembelajaran atau yang sejenis sehingga kegiatan itu dapat divisualisasikan. Orang lain dapat memanfaatkan untuk kajian lanjutan dengan atau tanpa konsep ataupun teori yang dipersiapkan. Setidaknya dapat dijadikan bahan informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi.

Tulisan adalah pengikat, pikiran adalah pengurai dan berpikir kreatif merupakan proses menuju keberhasilan. Berpikir kreatif berarti menggerakkan unsur-unsur otak dalam merespon masalah. Jika bekerja secara harmonis antara otak kiri dan otak kanan akan menghasilkan perpaduan hasil pemikiran secara *original*, selanjutnya menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimna harus memulai menulis, sistematika tulisan manakah yang harus diikuti dan bentuk tulisan bagaimana yang layak disebut sebagai karya ilmiah. Keberanian menjawab semua pertanyaan itu diposisikan menjadi kebutuhan, agar dapat membuka potensi dalam menumbuhkan kreativitas untuk menghasilkan ketrampilan menulis.

Menumbuhkan Kreativitas

Berpikir kreatif, seperti didefinisikan James C. Coleman (1974), yang ditulis kembali oleh Agus Nggermanto (2003), adalah “*thinking which produces new methods, new concepts, new understandings, new inventions, new work of art*”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa, sesuatu yang baru sebagai produk berpikir dalam bertindak, menjadi karakter berpikir kreatif. Untuk memenuhi kriteria seperti itu, tradisi belajar dari pengalaman dan ketajaman dalam mencermati fokus permasalahan menjadi media kunci.

Dalam praktiknya berpikir kreatif itu sendiri membutuhkan tiga syarat. *Pertama*, kreativitas membutuhkan respon atau gagasan baru yang *aplicable*. Selain menemukan ide baru, gagasan itu dapat direalisasikan. *Kedua*, memecahkan persoalan secara realistis. Rumusan konsep yang dihasilkan tidak terlalu abstrak, sehingga mudah diterjemahkan menjadi langkah-langkah teknis. *Ketiga*, merupakan usaha untuk mempertahankan *in-sight*, yang diikuti dengan keberanian melakukan penilaian dan mengembangkan lebih lanjut.

Secara teknis berpikir kreatif dapat memanfaatkan konsep yang digagas oleh Tony Buzan (1970), teori pemetaan pikiran (*mind mapping theory*) atau dengan metode mengalirkan bayangan (*image streaming*) dari Win Wenger (2003). Buzan menekankan pentingnya memadukan potensi otak kiri dan kanan dalam menggali ragam permasalahan dan alternatif pemecahannya. Otak kiri memiliki karakter berpikir secara urut, bagian per bagian, dan logis, sedangkan otak kanan berpikir secara acak, holistik, dan kreatif.

Berbeda dengan model mengalirkan bayangan (*image streaming*), metode ini menekankan untuk mendeskripsikan semua temuan bayangan yang kebetulan tertangkap oleh ‘mata pikiran’ kepada pihak lain (eksternal) baik berupa alat perekam termasuk tulisan ataupun kepada pendengar (pengguna). Dengan cara ini menurut pengagasnya, mampu meningkatkan kekuatan berpikir kreatif yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi intelektual. Namun untuk mencapai tujuan, kebiasaan berlatih sangat mempengaruhi efektivitas hasil yang diinginkan.

Untuk mendapatkan hasil efektif, dapat berlatih mengikuti lima tahap cara berpikir kreatif, masing-masing tahapan dapat diperluas dengan pola divergen dan konvergen:

Tahap 1, *Fact Finding* (menemukan fakta), tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta apa saja yang ingin diperlukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut,

Proses Divergen:

1. Tulis semua pertanyaan faktual yang anda inginkan;
2. Jangan persalahkan apakah data dapat diperoleh atau tidak;
3. Catat semua sumber yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan faktual.

Proses Konvergen:

1. Pilih pertanyaan faktual yang anda anggap penting, dan
2. Pilih sumber yang anda anggap relevan.

Perlu dipahami bahwa, pertanyaan faktual menanyakan fakta-fakta yang berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi pada masa lalu. Dari sini akan diperoleh gambaran sejelas mungkin fokus permasalahan yang dibidik.

Tahap 2. *Problem Finding* (menemukan masalah), tahap ini ingin memperoleh gambaran yang sejelas tentang suatu masalah. Untuk ini perlu dirumuskan macam-macam masalah agar dapat melihatnya dengan cara-cara yang berbeda.

Proses Divergen:

1. Catat semua pertanyaan kreatif sehubungan dengan masalah yang dihadapi dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada;
2. Perluas masalah dengan cara menanyakan “mengapa (*why*)” atau “bagaimana (*how*)” terhadap masalah yang dirumuskan;
3. Catat permasalahan lain yang berhubungan dengan memperhatikan aspek yang lain pula.

Proses Konvergen:

1. Pilihlah masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan sekarang atau kemudian. Yang perlu diingat, bentuk pertanyaan kreatif bersifat prediktif serta memancing banyak alternatif.

Tahap 3. *Idea Finding* (menemukan gagasan), tahap ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah agar dapat mencapai tujuan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Proses Divergen:

1. Catat semua gagasan yang timbul;
2. Gunakan teknik-teknik kreatif seperti teknik sumbang saran, teknik mendaftar sifat, hubungan yang dipaksakan, matrik, dan analisis nilai.

Proses Konvergen:

1. Pilih gagasan-gagasan yang dianggap baik;
2. Sebagai kriteria umum dapat digunakan derajat kemudahan gagasan untuk diimplementasikan misal, mudah, sedang, dan sukar.

Tahap 4. *Solution Finding* (menemukan jawaban), tahap ini untuk memilih kriteria yang paling tepat untuk menilai alternatif jawaban, sehingga diperoleh jawaban yang tepat.

Proses Divergen:

1. Usahakan mengantisipasi semua pengaruh dan akibat;
2. Catat semua hal yang dapat dipakai sebagai kriteria, dengan menggunakan fakta-fakta yang telah ada (tahap *Fact Finding*).

Proses Konvergen:

1. Pilih kriteria yang dianggap tepat;
2. Nilailah setiap alternatif jawaban yang telah tersaring pada tahap *Idea Finding*. Penilaian dapat menggunakan acuan kata sifat (baik, cukup, dan sebagainya), dan angka (1, 2, 3, dst.).

Tahap 5. *Acceptance Finding* (menemukan penerimaan), tahap kelima ini dimaksudkan untuk membuat suatu rencana pelaksanaan dari setiap gagasan yang telah diputuskan untuk digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

Proses Divergen:

1. Catat semua tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan 4W + 1H;
2. Kembangkan rencana untuk menyalurkan gagasan misalnya, kepada siapa gagasan disalurkan, apa yang harus dilakukan terhadap gagasan itu, apa keuntungannya, apa keberatannya, dan bagaimana mengatasi keberatan tersebut.

Proses Konvergen:

1. Pilih tindakan yang dianggap tepat;
2. Pilih rencana menyalurkan gagasan yang dinilai baik.

Tahapan berpikir seperti uraian di atas merupakan bahan utama untuk menulis karya tulis ilmiah. Sebuah tulisan yang tidak memiliki rujukan berpikir ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah seperti pembahasan lebih lanjut.

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

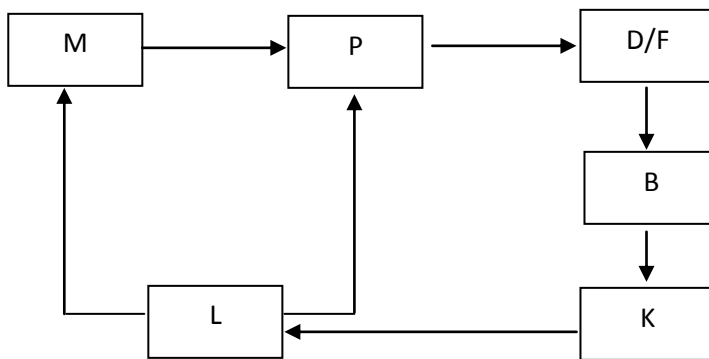
Setelah ditemukan permasalahan, langkah berikutnya menuangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah apabila memenuhi persyaratan: (1) isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah; (2) langkah pengerjaannya menggunakan metode berpikir ilmiah; dan (3) tampilan tulisannya memenuhi persyaratan sebagai tulisan keilmuan. Jika dilihat dari komposisi dari ketiga persyaratan tersebut, menurut Jujun S. (1999), tulisan ilmiah memuat unsur-unsur, *ontologi* yang membahas mengenai hakekat sesuatu, *epistemologi* memuat bagaimana sesuatu itu diperoleh dan *aksiologi* membicarakan untuk apa pengetahuan tersebut disusun.

Ketiga landasan tersebut saling berkaitan dalam membahas ilmu, yang dalam kajian keilmuan dikenal sebagai metode ilmiah. Hasil kajian memunculkan apa yang disebut sebagai kebenaran ilmu, jika dalam bentuk tulisan disebut tulisan ilmiah. Ada beberapa model karya tulis ilmiah, seperti laporan hasil penelitian, makalah, tulisan ilmiah populer, dan buku.

Dalam tulisan ini menekankan pada bentuk penulisan laporan kegiatan ilmiah, bisa menjadi acuan untuk penulisan makalah maupun dari hasil penelitian sederhana. Secara teknis penulisan karya tulis ilmiah seperti yang dimaksud, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut,

1. Menganalisis dan merumuskan permasalahan;
2. Penyusunan kriteria rancangan berdasar logika deduksi yang merujuk pada studi pustaka (teori);
3. Pengumpulan fakta empiris sesuai dengan kriteria rancangan kajian yang telah diajukan;
4. Mengkaji kesesuaian hasil kajian terhadap kriteria dengan menggunakan logika induktif;
5. Analisis, diskusi atau embahasan dan penarikan kesimpulan;
6. Penulisan laporan.

Jika digambar tahapan langkah di atas membentuk skema seperti berikut:



Keterangan:

- M = Perumusan Masalah
- P = Kajian Pustaka
- D/F = Data/Fakta
- B = Pembuktian
- K = Penarikan Kesimpulan
- L = Penyusunan Laporan

Strategi menemukan masalah sudah terurai secara luas seperti di muka dalam tahapan berpikir kreatif. Masalah itu sendiri merupakan perbedaan antara yang seharusnya berdasar konsep atau pun teori dengan kenyataan yang terjadi, kemunculannya menghambat pencapaian tujuan, sehingga perlu dicari penyelesaiannya. Identifikasi permasalahan dilakukan untuk mengenali manakah yang layak diangkat sebagai materi kajian, selanjutnya dirumuskan menjadi fokus kajian dari kegiatan ilmiah. Sumber masalah dapat ditemukan dari pengalaman pribadi, bacaan, pengamatan, pertemuan ilmiah, atau pun dari perasaan intuitif.

Untuk memperoleh akurasi permasalahan secara teoritis, perlu mendapat rujukan dari buku-buku maupun dari sumber acuan khusus yang dikenal sebagai

studi pustaka. Dari sumber buku dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep dasar. Sedangkan dari sumber acuan khusus dapat diketemukan hasil-hasil kajian, seperti dari penelitian yang pernah dilaksanakan. Temuan teori menjadi acuan kerangka berpikir sekaligus sebagai pembatas jangkauan formasi fakta-fakta yang diketemukan. Selain itu, dengan teori dapat memahami perkembangan gejala fokus yang sedang dikaji.

Obyek dari kajian adalah data yang merupakan hasil pencatatan dari kegiatan ilmiah, baik berupa fakta atau pun angka. Data menjadi bahan untuk menyusun suatu informasi, dan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu kepentingan. Sebagai sumber informasi, identifikasi data perlu dilakukan menurut karakter masalah yang diangkat dengan landasan pustaka untuk mengupas sejauh mungkin informasi yang bisa dungkap dari data tersebut. Selanjutnya, melakukan formasi data dengan merelevansikan beberapa informasi yang didapat untuk membentuk proposisi-proposisi atau teori substantif.

Setelah diperoleh informasi berbentuk proposisi atau pun teori substantif, selanjutnya dilakukan verifikasi dengan pustaka acuan. Dalam proses ini dipakai pendekatan logika induktif untuk mengetahui kesesuaian atau koherensi perolehan informasi dari obyek kajian dengan teori yang telah dibangun. Sudah barang pasti kegiatan ini dilakukan sesudah atau bersamaan dilakukan kajian secara mendalam.

Tahapan berikutnya menarik kesimpulan, setelah analisis dan pembahasan terhadap semua hasil temuan dilakukan sebagaimana dalam tahapan verifikasi, dengan memperhatikan lingkup rumusan permasalahan. Pada hakekatnya, kesimpulan merupakan jawaban dari sekian permasalahan yang telah diajukan. Akurasi kesimpulan akhir dengan rumusan masalah menjadi ukuran validitas sebuah karya ilmiah.

Kerja terakhir dari kegiatan ilmiah adalah penulisan laporan. Bentuk laporan memperhatikan kepada siapa akan disajikan, bentuk makalah, artikel dalam jurnal atau koran harian, laporan penelitian dan sebagainya.

Satu hal yang penting dan mendasar adalah kegiatan penulisan membutuhkan latihan dan pembiasaan secara terus-menerus. Selain itu, untuk menambah pengetahuan tulis-menulis, perlu pemahaman model-model dan gaya tulisan dari para penulis senior. Intelektual tinggi akan menjadi lebih bermakna manakala dibarengi dengan kemampuan menulis, bukankah wahyu pertama menyuruh kita untuk membaca, menguasai ilmu dan menulisnya. Selamat berlatih!

MENGEMBANGKAN BERFIKIR KREATIF MELALUI MEMBACA DENGAN MODEL *MIND MAP*

Manusia dikenal sebagai makhluk paling terhormat karena dikaruniai akal fikiran oleh Allah Swt. Dengan akal manusia mampu mengembangkan diri serta menundukkan lingkungan, termasuk berupaya mencari pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi melalui pengamatan serta ketajaman berfikir untuk menemukan hubungan-hubungan hal-hal baru guna mendapatkan jawaban maupun cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah untuk disikapi lebih lanjut. Membiasakan berfikir demikian oleh kalangan akademisi dikenal sebagai berfikir kritis, yang pada pelaksanaannya membutuhkan kreativitas.

Istilah berfikir kritis secara sederhana dimaknai sebagai berfikir tajam dengan mampu menguraikan rincian muatan konsep dalam suatu permasalahan serta mengaitkan dengan hal-hal lain sehingga muncul suatu gagasan yang mungkin dapat dikembangkan. Gambaran seperti ini merupakan perwujudan pola berfikir kreatif. Dalam tulisan ini akan lebih menajamkan pada pembahasan berfikir kreatif dalam memecahkan masalah, karena kreativitas baru akan dapat berkembang manakala ada tantangan, sedangkan tantangan itu sendiri penyelesaiannya akan menuntut kreativitas.

Untuk memulai berfikir dari mana harus memulai sering seseorang mengalami kebuntuan. Hal ini antara lain disebabkan: *pertama*, belum diketemukan persoalan inti (*core problem*) yang menjadi penyebab berkembangnya permasalahan menjadi meluas. *Kedua*, belum diketemukan dampak permasalahan yang ditimbulkan sekalipun masalah inti sudah ada, namun karena pertautan antara masalah inti yang menjadi penyebab (*cause problem*) dengan akibat yang ditimbulkan belum dapat dirumuskan, maka temuan peta pemikiran (*mind Map*) belum tergambar secara baik. *Ketiga*, terbatasnya wawasan yang berhubungan dengan permasalahan penyebab dengan aspek-aspek lain yang memiliki korelasi sebab-akibat.

Penguasaan konsep yang membentuk wawasan, kadang belum menjamin seseorang bisa mengembangkan kreativitas dalam berfikir. Untuk itu, selain memahami dan menguasai konsep-konsep yang sering muncul dalam perbincangan sehari-hari perlu membiasakan berdiskusi baik dengan kawan seprofesi secara langsung maupun melalui media jejaring sosial. Ini dimaksudkan untuk lebih memahami tingkat keluasan dan kedalaman sebuah konsep ataupun teori berkaitan dengan aktivitas kehidupan. Untuk menambah bekal konsep, membaca menjadi sangat perlu karena menjadi sumber utama memperluas perbendaharaan ilmu.

Membaca adalah media menambah ilmu, tulisan adalah pengikat, pikiran adalah pengurai dan berpikir kreatif merupakan proses menuju keberhasilan. Berpikir kreatif berarti menggerakkan unsur-unsur otak dalam merespon masalah. Jika bekerja secara harmonis antara otak kiri dan otak kanan akan menghasilkan

perpaduan hasil pemikiran secara *original*. Dari membaca, selanjutnya menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau bentuk orasi, sebagai wujud nyata telah mengembangkan kreativitas.

Membaca yang dapat mempercepat pemahaman diperlukan guna mengimbangi kebutuhan penguasaan konsep atau teori, dengan kebutuhan mengembangkan kreativitas. Salah satu model adalah membaca dengan memanfaatkan peta pemikiran (*mind map*) yang dapat membantu dengan cepat menguasai isi bacaan kemudian mengembangkan secara lebih luas sesuai kebutuhan.

Kreativitas dan Pengembangannya

Kata kreatif yang berasal dari bahasa Inggris "*create*" berarti menciptakan, *creation* artinya ciptaan. Kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kreatif, yang berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, proses kreatif disebut kreatifitas. Definisi lengkapnya disebutkan, bahwa kreativitas merupakan suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, apakah suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru (Hurlock, 1978). Konsep lain kreativitas adalah suatu proses upaya manusia atau bangsa untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupannya. Pembangunan diri itu dimaksudkan sebagai tindakan untuk menikmati kualitas kehidupan yang semakin baik (Alvian, 1983).

Hasil kreativitas akan tercermin dalam kelancaran, kelenturan (fleksibilitas) dan originalitas dalam berfikir (Utami Munandar, 1977). Oleh karenanya, orang kreatif cenderung mampu menguasai situasi dan kondisi serta menunjukkan lebih percaya diri dalam bertindak. Dia mampu menunjukkan kemampuan melihat segala permasalahan dengan berbagai sudut pandang, strategi dan teknik untuk mempersiapkan langkah-langkah nyata dalam merumuskan alternatif pemecahan masalah.

Berpikir kreatif, seperti didefinisikan James C. Coleman (1974), yang ditulis kembali oleh Agus Nggermanto (2003), adalah "*thinking which produces new methods, new concepts, new understandings, new inventions, new work of art*". Definisi tersebut menunjukkan, bahwa sesuatu yang baru sebagai produk berpikir dalam bertindak, menjadi karakter berpikir kreatif. Untuk memenuhi kriteria seperti itu, tradisi belajar dan membaca dari pengalaman disertai ketajaman dalam mencermati fokus permasalahan menjadi media kunci.

Dalam prakteknya, berpikir kreatif itu sendiri membutuhkan tiga syarat. *Pertama*, kreativitas membutuhkan respon atau gagasan baru yang *aplicable*. Selain menemukan ide baru, gagasan itu dapat direalisasikan. *Kedua*, memecahkan persoalan secara realistis. Rumusan konsep yang dihasilkan tidak terlalu abstrak, sehingga mudah diterjemahkan menjadi langkah-langkah teknis. *Ketiga*, merupakan usaha untuk mempertahankan *in-sight*, yang diikuti dengan keberanian melakukan penilaian dan mengembangkan lebih lanjut.

Sebenarnya setiap orang memiliki potensi kreatif yang dapat dikembangkan baik melalui pendidikan maupun pengalaman. Untuk dapat mengetahui potensi kreativitas berfikir seseorang dapat dilihat dari segi ciri-ciri intelektual dan ciri-ciri non intelektual. Ciri-ciri intelektual antara lain kepekaan dalam pengamatan, kelancaran, fleksibilitas dan originalitas dalam berfikir. Sedangkan ciri-ciri non intelektual yang dapat mencerminkan kepribadian yang kreatif antara lain, independensi dalam berfikir, memberi pertimbangan dalam bertindak, mempunyai minat luas, ingin mencari pengalaman baru, lebih merasa tertantang terhadap masalah-masalah yang kompleks ketimbang yang rutin dan seterusnya.

Kedua ciri tersebut dapat dikembangkan sehingga kreativitas seseorang dapat meningkat yang berarti :

1. dapat memberikan ide-ide dengan lancar;
2. dapat melihat suatu masalah dari bermacam sudut tinjauan (fleksibel pemikirannya);
3. dapat memberikan ide-ide unik dan original.

Pada sisi lain, pengembangan kreativitas dapat ditempuh juga dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung dilakukan dengan merangsang dan mempertajam keterampilan observasi, dengan menambah pengetahuan dan pengalaman dengan melatih dan menggunakan teknik berfikir kreatif atau pun dengan cara-cara lainnya. Cara tidak langsung dapat dilakukan dengan mengurangi dan meniadakan hambatan-hambatan dalam diri kita antara lain kurang percaya diri, terlalu cepat memberikan kritik terhadap ide-ide baru, kurang berani mencoba cara-cara baru, takut mendapat celaan dan seterusnya. Dari lingkungan kita antara lain atasan yang tidak terbuka terhadap ide-ide bawahan, kurangnya kerja sama, saling tidak percaya antar teman, dan tekanan pada kerja rutin.

Pengembangan kreativitas dimaksudkan agar muncul prakarsa (inisiatif) yang merupakan kesadaran untuk mengerjakan sesuatu yang diyakini sebagai tindakan terbaik tanpa disuruh orang lain. Oleh karena itu prakarsa merupakan benih kreativitas yang senantiasa dibutuhkan. Itu sebabnya perlu sekali melatih berfikir kreatif dalam upaya mencari penyelesaian suatu permasalahan.

Berfikir itu sendiri merupakan keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan (Ngalim Purwanto, 2006). Guilford (1986) menekankan perbedaan berfikir divergen dan berfikir konvergen. Berfikir Divergen merupakan bentuk pemikiran terbuka, yang menjajagi macam-macam kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan/masalah. Sedangkan berfikir Konvergen: sebaliknya berfokus pada tercapainya satu jawaban yang paling tepat terhadap suatu persoalan atau masalah. Dalam pendidikan formal pada umumnya menekankan berfikir konvergen dan kurang memikirkan berfikir divergen.

Melatih Berfikir Kreatif

Kadangkala seseorang merasa canggung apabila dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut penyelesaian segera. Meskipun dilihat dari segi pendidikan formalnya memadai, tetapi karena kurang terlatih mencari penyelesaian suatu masalah maka hasil akhirnya kurang dapat memenuhi harapan. Oleh sebab itu sangat perlu memahami tahap-tahap pemecahan masalah secara kreatif. Pola pikir divergen dan konvergen sebagaimana dikembangkan oleh Guilford (1986) di muka, dapat dikembangkan lebih lanjut.

Ada lima tahap pemecahan masalah secara kreatif, masing-masing tahapan dapat diperluas dengan proses divergen dan konvergen, seperti berikut.

Tahap 1, *Fact Finding* (menemukan fakta)

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta apa saja yang ingin diperlukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut,

Proses Divergen:

4. Tulis semua pertanyaan faktual yang anda inginkan;
5. Jangan persoalkan apakah data dapat diperoleh atau tidak;
6. Catat semua sumber yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan faktual.

Proses Konvergen:

3. Pilih pertanyaan faktual yang anda anggap penting, dan
4. Pilih sumber yang anda anggap relevan.

Perlu dipahami bahwa, pertanyaan faktual menanyakan fakta-fakta yang berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi pada masa lalu. Dari sini akan diperoleh gambaran sejelas mungkin fokus permasalahan yang dibidik.

Tahap 2. *Problem Finding* (menemukan masalah)

Tahap ini ingin memperoleh gambaran yang sejelas tentang suatu masalah. Untuk ini perlu dirumuskan macam-macam masalah agar dapat melihatnya dengan cara-cara yang berbeda.

Proses Divergen:

4. Catat semua pertanyaan kreatif sehubungan dengan masalah yang dihadapi dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada;
5. Perluas masalah dengan cara menanyakan “mengapa (*why*)” atau “bagaimana (*how*)” terhadap masalah yang dirumuskan;
6. Catat permasalahan lain yang berhubungan dengan memperhatikan aspek yang lain pula.

Proses Konvergen:

2. Pilihlah masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan sekarang atau kemudian. Yang perlu diingat, bentuk pertanyaan kreatif bersifat prediktif serta memancing banyak alternatif.

Tahap 3. *Idea Finding* (menemukan gagasan)

Tahap ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah agar dapat mencapai tujuan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Proses Divergen:

3. Catat semua gagasan yang timbul;
4. Gunakan teknik-teknik kreatif seperti teknik sumbang saran, teknik mendaftar sifat, hubungan yang dipaksakan, matrik, dan analisis nilai.

Proses Konvergen:

3. Pilih gagasan-gagasan yang dianggap baik;
4. Sebagai kriteria umum dapat digunakan derajat kemudahan gagasan untuk diimplementasikan misal, mudah, sedang, dan sukar.

Tahap 4. *Solution Finding* (menemukan jawaban)

Tahap ini untuk memilih kriteria yang paling tepat untuk menilai alternatif jawaban, sehingga diperoleh jawaban yang tepat.

Proses Divergen:

3. Usahakan mengantisipasi semua pengaruh dan akibat;
4. Catat semua hal yang dapat dipakai sebagai kriteria, dengan menggunakan fakta-fakta yang telah ada (tahap *Fact Finding*).

Proses Konvergen:

3. Pilih kriteria yang dianggap tepat;
4. Nilailah setiap alternatif jawaban yang telah tersaring pada tahap *Idea Finding*. Penilaian dapat menggunakan acuan kata sifat (baik, cukup, dan sebagainya), dan angka (1, 2, 3, dst.).

Tahap 5. *Acceptance Finding* (menemukan penerimaan)

Tahap kelima ini dimaksudkan untuk membuat suatu rencana pelaksanaan dari setiap gagasan yang telah diputuskan untuk digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

Proses Divergen:

3. Catat semua tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan 4W + 1H;
4. Kembangkan rencana untuk menyalurkan gagasan misalnya, kepada siapa gagasan disalurkan, apa yang harus dilakukan terhadap gagasan itu, apa keuntungannya, apa keberatannya, dan bagaimana mengatasi keberatan tersebut.

Proses Konvergen:

3. Pilih tindakan yang dianggap tepat;
4. Pilih rencana menyalurkan gagasan yang dinilai baik.

Telaah praktis tentang berfikir kreatif dalam menyikapi permasalahan seperti uraian di atas masih merupakan pembahasan teoritis. Untuk melihat hasilnya dibutuhkan latihan dan pembiasaan. Sehingga tidak mengecewakan dalam mencari pemecahan

masalah, utamanya yang berkait dengan keorganisasian yang terkadang banyak menemukan jalan buntu hanya karena salah persepsi antar para anggota.

Membaca Sebagai Sumber Membentuk Kreativitas

Membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik atau yang disebut proses psikologis berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi (Syafi'i, 1999). Farris (1993) mendefinisikan membaca sebagai pemrosesan kata-kata konsep, informasi, dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pengarang yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman awal pembaca. Dengan demikian, pemahaman diperoleh bila pembaca mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dengan apa yang terdapat di dalam bacaan (konteks bacaan).

Konsep lain seperti dikemukakan Frendrick Me Donald (Burn, 1996), bahwa membaca merupakan rangkaian respon yang kompleks, di antaranya mencakup respon kognitif sikap dan manipulatif. Membaca tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub keterampilan, yang meliputi: sensori, persepsi, sekuensi, pengalaman, berpikir, belajar, asosiasi, afektif, dan konstruktif. Menurutnya, aktivitas membaca dapat terjadi jika beberapa sub ketrampilan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa membaca merupakan suatu proses untuk pemahaman atau penikmatan terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan peta pemikiran yang dimiliki oleh pembaca, sesuai irama, potensi serta karakteristiknya untuk mencapai tujuan membaca kala itu, yang pada akhirnya mampu menumbuhkan kreativitas sehingga lahir sesuatu yang baru.

Membaca merupakan suatu aktivitas yang memiliki berbagai macam manfaat. Ketika membaca sedikitnya terdapat delapan manfaat yang dapat diuraikan seperti berikut. *Pertama*, melatih kemampuan berfikir, Otak yang kita miliki ibarat sebuah pedang, semakin diasah akan semakin tajam. Sebaliknya jika tidak diasah, juga akan tumpul. Alat yang efektif untuk mengasah otak adalah membaca. Salah satu cara efektif untuk mengasah otak melalui membaca menurut Astri Novia (2010), pilihlah satu jenis buku yang anda sukai, apakah literatur klasik, fiksi ilmiah, atau buku pengembangan diri. Dengan cara ini otak akan bertambah kuat. Bacalah buku sebanyak mungkin. Menurut para ahli, keuntungan dari membaca buku dapat memberikan dampak yang menyenangkan bagi otak kita. Karena dapat membantu dalam meningkatkan keahlian kognitif dan meningkatkan perbendaharaan kosakata.

Kedua, meningkatkan pemahaman. Contoh nyata dari manfaat ini banyak dirasakan oleh siswa maupun mahasiswa. Melalui membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori, yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Logika sederhana saja, tidak mungkin siswa atau mahasiswa memahami materi pelajaran/kuliah kalau mereka tidak membaca. Dari sini jelas

bahwa membaca sangat berperan dalam membantu seseorang untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu bahan atau materi yang dipelajari.

Ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar semenjak masih kecil. Kita pasti ingat berapa kali guru-guru kita mengingatkan bahwa membaca adalah satu sarana untuk membuka cakrawala dunia. Dengan memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, kita akan lebih percaya diri dalam menatap dunia. Mampu menyesuaikan diri dalam berbagai pergaulan dan tetap bisa bertahan dalam menghadapi perubahan zaman.

Keempat, mengasah kemampuan menulis. Selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis. Selain karena wawasan untuk bahan menulis semakin luas, kita juga bisa mempelajari gaya-gaya menulis orang lain dengan membaca tulisannya. Lewat membaca kita akan senantiasa bisa mendapatkan kekayaan ide yang melimpah untuk menulis.

Kelima, mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Membaca merupakan aktivitas yang akan membuka cakrawala dan pengetahuan anda terhadap dunia. Keterbatasan jangkauan diri kita terhadap peristiwa-peristiwa di dunia, hanya bisa dijangkau melalui membaca. Selain mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa, membaca juga mampu meningkatkan pola pikir, kreativitas dan kemampuan verbal, karena membaca akan memperkaya kosa kata dan kekuatan kata-kata. Meningkatnya pola pikir, kreativitas dan kemampuan verbal akan sangat mendukung dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum.

Keenam, meningkatkan konsentrasi. Orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Dengan konsentrasi dan fokus, pembaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini berarti mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan.

Ketujuh, menjauhkan risiko penyakit *Alzheimer*. Membaca benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan stimulasi (rangsangan) secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak termasuk penyakit *Alzheimer*. Dari hasil penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah, bermain teka-teki silang, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh.

Kedelapan, sarana refleksi dan pengembangan diri. Kita dapat mengetahui pemikiran seorang pengusaha atau seorang *trainer* tanpa harus menjadi pengusaha atau trainer. Artinya kita bisa mempelajari bagaimana cara orang lain dalam mengembangkan diri. Ini penting bagi kita sebagai bahan pertimbangan atau pembandingan sebelum kita melakukan suatu hal.

Mengembangkan Berfikir Model Mind Map

Secara harfiah *mind map* merupakan pemetaan informasi yang disimpan dalam pikiran melalui proses membaca (Wiliana, 2012). Metode *Mind map* atau peta pikiran merupakan salah satu teknik mengembangkan pemikiran yang dikemukakan oleh Tony Buzan sekitar tahun 1970-an dengan mendasarkan risetnya mengenai cara kerja otak, dengan menulis atau mencatat topik utama di tengah dan menulis sub topik dan rincian diletakkan mengitari topik utama. Teknik mencatat peta pikiran ini dirancang berdasarkan cara kerja otak dalam memproses informasi (Retno Hermawati, 2009).

Dalam praktiknya, otak mengambil informasi dari berbagai tanda, baik itu berupa gambar, bunyi, pikiran, maupun perasaan. Saat mengingat informasi otak biasanya melakukannya dalam bentuk gambar warna-warni, simbol, bunyi, perasaan dan lain-lain. Oleh karena itu, catatan dalam bentuk peta pikiran memungkinkan otak memahami ulang gagasan dalam wacana secara utuh dan menyeluruh.

Pembentukan *mind map* selalu dimulai dengan konsep utama atau tunggal, kemudian dikaitkan dengan beberapa cabang sebagai sub bagian dan konsep utama dengan menggunakan garis melengkung. Cabang-cabang tersebut kemudian dikorelasikan dengan kata kunci atau simbol untuk memudahkan peserta didik menghafalnya. Garis melengkung yang dijadikan sebagai penghubung tersebut kemudian diberi warna-warni yang menarik sehingga terlihat seperti sebuah lukisan yang menarik dan tidak membosankan.

Sesungguhnya asumsi dasar dan metode *mind map* di sini adalah pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas berbasis kemampuan otak (*brain based learning*). Eric Jensen (2008) menjelaskan bahwa, pendekatan ini adalah proses pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Pendekatan ini bermula dari pertanyaan yang fundamental terkait apa saja yang baik untuk otak.

Jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab dengan pendekatan tidak hanya berdasar dari satu disiplin ilmu tersendiri, juga bukan menawarkan sebuah format yang sudah mapan dan sudah ditentukan atau dogma. Akan tetapi merupakan hasil korelasi ataupun integrasi konsep dari beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan dukungan proses *interelasi* dari berfikir otak yang membentuk peta pemikiran (*mind map*).

Meskipun pendekatan berbasis kemampuan otak tidak menyuguhkan resep praktis namun desain pemikiran tersebut bisa dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan berdasarkan sifat alamiah otak (Eric Jansen, 2008). Tentunya dengan harapan keputusan hasil pemikiran itu dapat memberi dampak yang lebih baik dan dapat menjangkau lebih banyak ruang lingkup konsep atau pengetahuan yang diserap serta meminimalisir kemungkinan kesalahan menjadi lebih kecil.

Karakteristik Metode Mind Map

Kemampuan otak sesungguhnya manusia sangat besar (Agus Nggermanto, 2003). Cara kerja pikiran manusia ini secara alamiah adalah memancar dari satu titik pikiran ke berbagai asosiasi pemikiran yang lain, dan selalu menyebar kembali dengan tidak terbatas yang kemudian diistilahkan oleh Tony Buzan dengan sebutan *Radiant Thinking* (Caroline, 2009). Cara kerja otak ini kemudian dijadikan oleh Buzan sebagai penyusunan konsep *mind map*. Oleh karena itu cara kerja *mind map* mirip dengan cara kerja otak.

Selain itu menurut pengakuan Harnowo (2005), metode ini mampu mengoptimalkan keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri secara sinergis dan komplementer. Hal ini terlihat dari penggunaan gambar, warna, serta imajinasi yang bersamaan dengan penggunaan kata, angka, serta penggunaan logika.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa otak mengambil informasi tidak secara linear melainkan dengan cara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran dan perasaan (AM. Nasih, 2009). Terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada karakteristik dan unsur – unsur *mind map* yang meliputi hal-hal seperti berikut:

a. Central Idea

Central idea ini merupakan fokus pusat yang berisi citra atau lambang masalah atau informasi yang akan dipetakan (Buzan, 2002). Selanjutnya ide pokok yang akan dipetakan ditentukan terlebih dahulu, biasanya ide pokok berdasarkan judul buku atau sub judul buku, setelah ditentukan kemudian di letakkan di tengah-tengah sebagai *central idea*.

b. Gagasan

Setelah gagasan utama ditentukan kemudian gagasan tersebut dibiarkan mengalir bebas tanpa penilaian.

c. Kata Kunci

Setelah gagasan utama ditentukan kemudian dikasih satu kata kunci untuk memudahkan mengingat gagasan yang telah dipetakan.

d. Warna

Warna tersebut digunakan untuk menerangi dan menekankan pentingnya sebuah gagasan.

e. Gambar dan Simbol

Gambar tersebut digunakan untuk menyoroti gagasan dan merangsang otak untuk membentuk asosiasi dan dikaitkan dengan yang lain.

Dalam implementasinya, metode *mind map* memiliki karakteristik unsur-unsur sebagai berikut (Wiliana, 2013): (1) Subyek yang menjadi perhatian mengalami kristalisasi dalam citra sentral; (2) Tema utama dan subyek memancar dan citra sentral sebagai cabang-cabang; (3) Cabang-cabang terdiri dari citra kunci atau kata kunci, kemudian dituliskan di garis yang berasosiasi. Topik-topik dengan tingkat kepentingan yang lebih kecil juga digambarkan sebagai cabang-cabang yang

melekat pada cabang dan tingkat yang lebih tinggi; (4) Cabang-cabang ini membentuk strukturodus yang berhubungan.

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan *mind map*, bisa memilih diantara empat macam model, yaitu: pohon jaringan (*network tree*), rantai kejadian (*events chain*), peta konsep siklus (*cycle concept map*), dan peta konsep laba-laba (*spider concept map*).

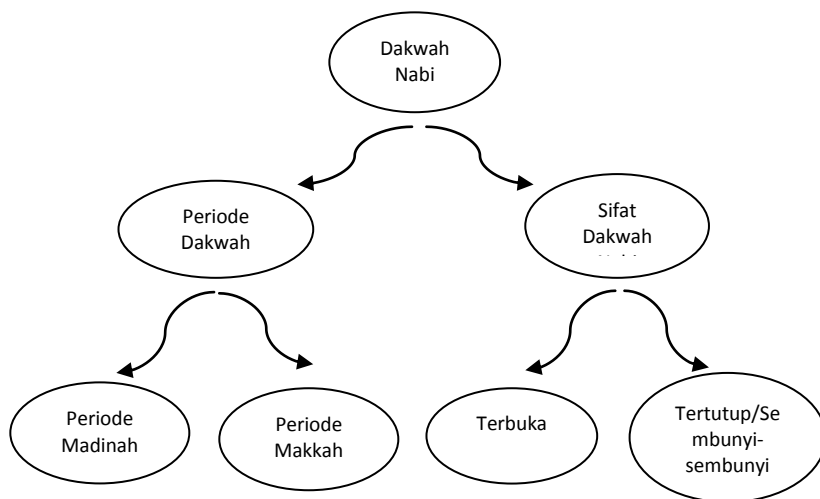
Model pohon jaringan (*network tree*) memiliki langkah-langkahnya, yaitu ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata lain dihubungkan oleh garis penghubung. Kata-kata pada garis penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik itu. Daftar dan mulai dengan menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itu dan konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis itu. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal yang menunjukkan informasi sebab akibat, suatu hirarki, dan informasi prosedural yang bercabang.

Model rantai kejadian (*events chain*) dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur atau tahap-tahap dalam suatu proses. Misalnya dalam melakukan eksperimen, model *mind map* ini cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal seperti: memberikan tahap-tahap suatu proses, langkah-langkah dalam suatu prosedur ataupun suatu urutan kejadian.

Berbeda dengan model peta konsep siklus (*cycle concept map*), model ini menggambarkan rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil akhir. Kejadian akhir pada rantai itu menghubungkan kembali kejadian awal siklus itu berulang dengan sendirinya dan tidak ada akhirnya. Peta konsep siklus ini cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkain kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang.

Sedangkan peta konsep laba-laba (*spider concept map*), dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah ide yang bercampur aduk. Dari beberapa ide tersebut ada yang berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Kita dapat memulainya dengan memisahkan dan mengelompokan istilah-istilah menurut kaitan tertentu, sehingga istilah menjadi lebih berguna dengan menuliskannya sebagai konsep utama. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan: hal-hal yang tidak menurut hirarki, kecuali berada dalam satu kategori, informasi dengan kategori yang tidak paralel, dan perihal hasil curah pendapat.

Berikut adalah contoh salah satu dari beberapa model *mind map* hasil kreativitas membaca materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).



Gambar: Model *Mind Map*

Dengan tulisan singkat ini semoga dapat memberikan manfaat dalam mempertebal bekal para pembaca, serta memberikan semangat baru dalam membangun dan mengembangkan organisasi untuk izzul islam wal muslimin.

BAB VI
REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PESANTREN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Rendahnya tingkat keberhasilan hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2005/2006 yang dialami oleh berbagai satuan pendidikan, patut menjadi pelajaran berharga untuk menilai ulang penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang lembaga pendidikan. Model pembelajaran yang selama ini telah membudaya dan dikembangkan di lembaga pendidikan tertentu harus dilihat kembali validitasnya, karena hasil lulusan menunjukkan daya serap rendah akibat metode pembelajaran yang menjadikan angka kelulusan pun persentasenya menjadi rendah.

Berbagai spekulasi disampaikan oleh para praktisi pendidikan dengan melempar pertanyaan, rendahnya tingkat kelulusan apakah disebabkan peserta didik memiliki IQ rendah dan kualitas belajar rendah sehingga kurang dapat menguasai mata pelajaran dengan baik, atau karena materi yang diujikan terlalu tinggi, atau sebab metode pembelajaran yang tidak mencapai standar minimal yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi permasalahan yang menjadi kambing hitam.

Terlepas dari itu semua, ujian adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kepada orang tua murid dan masyarakat. Dari hasil ujian dapat diketahui tinggi rendahnya standar mutu sekolah sebagai bentuk dari keberhasilan pendidikan yang ditempuh. Pada sisi lain kualitas hasil ujian sekolah menjadi barometer mutu pendidikan di suatu daerah dan menjadi indikator tingkat keberhasilan pendidikan suatu negara. Dari permasalahan itu, terdorong untuk dirumuskan suatu patokan yang dapat dijadikan pedoman yang terstandar guna mengukur kualitas pendidikan secara merata di Indonesia, agar dapat dihindari kesenjangan hasil lulusan yang terlalu jauh antar satuan lembaga pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, utamanya pasal 35 (tentang standar nasional pendidikan), pasal 36 (Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan), pasal 37 (isi kurikulum pendidikan dasar dan menengah), pasal 42 (pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar), pasal 43 (promosi dan penghargaan bagi pendidik/sertifikasi pendidik), pasal 59 (evaluasi pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat atau organisasi profesi), pasal 60 (akreditasi program dan satuan pendidikan), dan pasal 61 (tentang sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi), maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri 17 Bab dan 97 pasal. Dalam operasionalnya dilaksanakan oleh sebuah Badan disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan antara lain:

1. Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
2. Bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
3. Dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kajian isi standar nasional pendidikan meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan, merupakan standar nasional pendidikan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar kompetensi lulusan selanjutnya digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
2. Standar isi, mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang:
 - a. Kompetensi tamatan
 - b. Kompetensi mata pelajaran
 - c. Kerangka dasar dan struktur kurikulum
 - d. Beban belajar
 - e. Kurikulum tingkat satuan pendidikan
 - f. Kalender pendidikan/akademik
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan kejelasan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
4. Standar proses, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran menunjukkan proses interaktif, inspiratif, menyenangkan menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan minat.
5. Standar sarana dan prasarana, persyaratan minimal yang diperlukan,
 - a. Sarana: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya.

- b. Prasarana: ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, dan tempat berekreasi.
- 6. Standar pembiayaan, persyaratan minimal yang diperlukan:
 - a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
 - b. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
 - c. Biaya operasional meliputi:
 - 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - 3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 7. Standar pengelolaan, dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah:
 - a. DIKDASMAN: menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - b. DIKTI: menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.
- 8. Standar penilaian pendidikan, merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Untuk mewujudkan tujuan standarisasi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Badan ini merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Keanggotaan BSNP terdiri dari para pakar berbagai bidang keilmuan, yang antara lain, para ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan bidang lainnya yang relevan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk:

- 1. Mengembangkan standar nasional pendidikan.
- 2. Menyelenggarakan ujian nasional.

3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
4. Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran.

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.

Kualifikasi Tenaga Pendidik

Dalam menunjang keberhasilan standarisasi pendidikan secara nasional, pemenuhan unsur-unsur pokok pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu unsur pokok adalah tenaga pendidik sebagai pendesain model pelaksanaan pendidikan perlu mendapat perhatian agar proses pembelajaran dapat segera menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Untuk menjawab tuntutan seperti itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen.

Seseorang yang menginginkan menjadi profesi guru, seperti yang disyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8).
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, (pasal 9).
3. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10 ayat 1).
4. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 2).

Jika telah memenuhi persyaratan, seseorang memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu, dengan memperoleh berbagai macam hak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1). Diantara hak tersebut adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (pasal 15 ayat 3). Selain itu, akan mendapatkan berbagai tunjangan dari pemerintah antara lain:

1. Tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (pasal 16 ayat 1).
2. Tunjangan tersebut diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (pasal 16 ayat 2).
3. Subsidi tunjangan fungsional, yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 17 ayat 2).

Ada beberapa kewajiban bagi penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dari masyarakat pada satuan pendidikan anak usia dini (*TK/Play group*), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yakni:

1. Memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan (pasal 24 ayat 4).
2. Mengangkat dan menempatkan guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (pasal 25 ayat 3).
3. Membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru (pasal 34 ayat 2).
4. Memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas (pasal 39 ayat 1), meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Guru diberi hak untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen, yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu organisasi profesi guru diharapkan membentuk kode etik dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Rencana ini penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

Tujuan utama penyusunan RPS, untuk menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Oleh karena itu, RPS disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Memperbaiki prestasi belajar siswa;

2. Membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan dan pengembangan);
3. *Demand driven* (berdasarkan kebutuhan);
4. Partisipasi dan keterwakilan;
5. realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT;
6. Mendasarkan pada hasil *review* dan evaluasi;
7. Keterpaduan, holistic dan tersistem, transparan, dan keterkaitan serta kesepadanan.

Tahap-tahap penyusunan RPS meliputi beberapa langkah antara lain:

1. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah;
2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini;
3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang;
4. Mencari kesenjangan antara butir 2 & 3;
5. Menyusun rencana strategis (renstra);
6. Menyusun rencana tahunan;
7. Melaksanakan rencana tahunan;
8. Memonitir dan mengevaluasi.

Pada akhirnya, untuk mencapai keberhasilan pendidikan, selain pemahaman beberapa kebijakan yang telah terurai seperti di atas perlu kemauan yang tinggi untuk merealisasikan tahap demi tahap sehingga pada gilirannya akan dapat mencapai model lembaga atau satuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan adalah sukses masyarakat dalam mengemban misi investasi kemanusiaan yang menghasilkan kader-kader handal yang siap menggantikan para tokoh pendahulu. Selamat berjuang untuk pendidikan !

KONSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN

Antara Mengikuti Perubahan dan Mempertahankan Tradisi

Sebagai lembaga pendidikan yang keberadaannya sering menjadi barometer untuk menilai lembaga pendidikan lain di Indonesia, dalam perjalanannya pesantren terus mengalami dinamika terkait dengan perubahan model kepemimpinan dan manajemen serta sistem pendidikan yang dianut. Menjadi barometer, karena lembaga pesantren selain memiliki kekhasan tersendiri terbukti telah mampu melahirkan tokoh-tokoh baik lokal, nasional bahkan level global yang sangat diperhitungkan karya-karyanya. Banyak ahli melakukan kajian sekitar pesantren seperti Alois Moosmuller, seorang sarjana Jerman yang mengkaji pesantren dari pendekatan historis dalam karyanya *Die Pesantren auf Java* (Frankfurt, 1989). Martin van Bruinessen, sarjana Belanda yang melakukan kajian pesantren melalui *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* ditulis pada tahun 1995, merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi kajian perkembangan pesantren di Indonesia.

Dari dalam negeri ada Zamahsari Dhofier, yang telah banyak mengupas perkembangan pesantren berdasar pendekatan antropologis pada tahun 1980. Dawam Rahardjo mengkaji pesantren melalui tulisannya, *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta, 1985). Dari kajian semua ahli, hampir tidak dapat meninggalkan tiga unsur utama yang menjadi karakteristik pesantren. Ketiga komponen itu adalah model pendidikan atau biasa dikenal sebagai sistem pendidikan dan pembelajaran, struktur materi kajian atau kurikulum, dan manajemen kepemimpinan yang diperankan oleh para pengasuh dalam melakukan pembinaan para santri.

Dari ketiga komponen lahir berbagai corak dan ragam, berkembang menjadi beberapa model: ada pesantren tradisional, semi modern, dan pesantren modern. Masing-masing memiliki komunitas binaan (santri) serta pengaruh kuat di masyarakat dalam mengembangkan misi dakwahnya. Kekuatan pengaruh menjadi salah satu alat ukur bahwa pesantren mendapatkan pengakuan dari para alumni, karena manfaat nyata (*benefit*) dari ilmu dan keterampilan yang telah mengantarkan diri 'dapat hidup' di masyarakat. Dari sini, antara lembaga pesantren dan masyarakat binaan sebagai hasil *output*-nya senantiasa menjalin ikatan sebagai media komunikasi sekaligus saluran promosi lembaga dalam melakukan rekrutmen calon santri.

Dalam perjalanannya pola pembinaan melalui proses pendidikan dan pembelajaran, struktur materi ajar, dan manajemen kepemimpinan yang di berlakukan menjadi simbol masyarakat untuk memberikan identitas lembaga pesantren. Selanjutnya, kemampuan *implementatif* para santri dari ilmu yang didapat menjadi acuan masyarakat dalam memberi penilaian terhadap kualitas lembaga pesantren. Dari penilaian ini sesungguhnya kesinambungan hidup (*continuity of life*) pesantren di 'pertaruhkan'. Jika masyarakat menilai bahwa pesantren dengan model dan cirikhasnya, berhasil memenuhi 'harapan' mereka,

maka pesantren itu dipastikan akan mendapat *simpati* yang berpengaruh kuat terhadap mengalirnya jumlah calon santri yang akan belajar.

Pesantren dengan karakteristiknya yang telah berhasil membangun suatu *tradisi religius*, dan mampu menjadikan masyarakat berkembang dinamis sejalan dengan tuntutan dan perubahan, membutuhkan peran bagaimana mempertahankan keberadaannya melalui strategi dan pendekatan penyelamatan unsur pokok (esensi) dan dipihak lain bagaimana mengembangkan unsur lain (aksidensi) –*care for essential and change the accidental unsure*– dalam ranah pengembangan pendidikan di pesantren. Jika keduanya tidak ada pembedaan, dalam perkembangannya sebuah lembaga pesantren akan mudah larut dalam hiruk pikuk perubahan dan perkembangan zaman, pada saatnya akan menghilangkan akar sejarah berdirinya lembaga, yang pada hakekatnya menjadi “ruh” perjuangan dalam mengembangkan pesantren dan dakwah Islamiyah.

Lembaga pesantren dengan *desain dasar* yang “dibakukan” menjadi acuan sekaligus pengendali dalam laju perkembangannya. Desain dasar merupakan ‘kristalisasi nilai-nilai historis’ yang menjadi latar belakang mengapa pesantren didirikan. Didalamnya memuat alasan-alasan filosofis, tujuan dan orientasi serta nilai-nilai ‘sakral’ lainnya, semuanya menjadi dokumen bersejarah yang sewaktu-waktu bisa menjadi pengendali kemana sebuah pesantren harus diperbarui. Inilah penulis mengistilahkan sebagai unsur *esensial*, yang tidak mudah menerima perubahan, sebab jika digeser akan merubah identitas pesantren secara keseluruhan yang berarti pesantren itu telah dikembangkan dengan menyalahi visi-misi dari *founding father*-nya.

Beda pendapat akan terus mengalir di antara para pendiri maupun pengasuh, jika sejak awal desain baku pesantren belum disepakati. Bisa jadi hal tersebut menjadi pemicu konflik yang tidak berkesudahan, karena masing-masing pihak berkeinginan mendapatkan pengaruh dalam menjalankan pesantren guna mencapai tujuan sesuai harapan yang dipersiapkan, setidaknya menurut versi masing-masing kelompok.

Tuntutan perubahan dari masyarakat sebagai respon terhadap era kemajuan, telah banyak menggeser dari tujuan dan orientasi awal berdirinya pesantren. Proses transformasi sosial kehidupan beragama telah banyak merubah para pemuka agama dalam mengembangkan pendidikan yang berdampak pada strategi pengelolaan (*management*) lembaga pesantren. Atas dasar pikiran seperti itu, pesantren dituntut dapat memberikan materi pendidikan yang berkesesuaian (*link and mach*) dengan tuntutan hidup, utamanya aspek strategi dan metodologi pembelajaran guna membantu para santri mampu mengembangkan ‘kompetensi’ serta melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Unsur ini menjadi bagian yang dapat menerima perubahan sesuai kebutuhan, dikenal sebagai unsur aksidensi. Pengelolaan terhadap dua unsur tersebut, lahir beberapa kategori misal pesantren tradisional dan modern.

Pelabelan seperti kategori itu ditentang oleh para pemerhati pesantren, karena pesantren sesungguhnya telah menerapkan praktek pendidikan modern jauh melampaui zamannya. Meskipun saat lahir pesantren belum mengenal kurikulum berbasis kompetensi, alumninya rata-rata memiliki kemampuan yang dibutuhkan masyarakat, berkat pola pembelajaran yang dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan di pesantren berikut manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan oleh para pengasuh.

Kajian ini bermaksud memberikan gambaran strategi mempertahankan nilai-nilai pendidikan pesantren tradisional sebagai unsur *esensial*, namun tetap memberikan peluang adaptasi hal-hal baru dan perubahan selama memperkuat sistem yang telah ada sebagai unsur *aksidental*. Menjadi maju dan berkembang bukan semata karena direncanakan, namun karena tuntutan adaptasi pesantren secara alamiah (*naturahy*) terhadap keinginan para santri agar mampu merespon perubahan lingkungan.

Mempertahankan Unsur Esensi

Menjadikan lembaga pendidikan pesantren berikut cirikhasnya sebagai kesatuan unit kultur (*cultural unit*) yang unik membutuhkan konsistensi analisis berbagai komponen pesantren. Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren setidaknya memiliki lima elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, pembelajaran kitab-kitab klasik, dan kyai. Ada pandangan lain yang mengatakan, bahwa kelima unsur itu meliputi: kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran ilmu-ilmu agama.

Kelima unsur pesantren itu menjadi simbol yang seharusnya menjadi kriteria utama kemana lembaga pesantren akan dikembangkan. Apakah akan mempertahankan model tradisional dengan memberikan peluang pengembangan

dengan menambah unsur materi kajian serta menyesuaikan metodologi pembelajaran, menjadi tradisional yang modernis. Atau menyesuaikan struktur materi kajian dengan kurikulum dari pemerintah sebagaimana yang dikembangkan di lembaga pendidikan formal keagamaan (madrasah), berikut kebijakan yang diambil untuk alasan melakukan pembinaan. Dalam kajian ini akan diuraikan kelima unsur itu yang disederhanakan menjadi tiga yakni: sistem pendidikan dan pembelajaran, struktur materi kajian atau kurikulum, dan manajemen kepemimpinan.

Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Pendidikan dan pembelajaran merupakan bagian penting yang mengantarkan para santri mampu menguasai 'kompetensi pesantren' yang telah dipersiapkan. Meskipun pesantren secara tegas tidak mencantumkan visi-misi ataupun kompetensi akhir yang menjadi tujuan, namun sesungguhnya setiap

pesantren telah memiliki tujuan². Umumnya para pengasuh tidak menunjukkan visi-misi dan tujuan pesantren secara demonstratif, karena hal semacam itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat *riya'* atau menunjukkan sebuah 'kelebihan' kepada orang lain yang mesti dihindari karena mengarah sikap kesombongan. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa, visi pesantren yang belum terumuskan secara konkret tetap terserap dalam kebijakan-kebijakan pesantren walaupun masih bersifat sesaat³. Meski demikian kebijakan yang diambil menjadi kuat melekat dalam kehidupan santri karena sikap kepatuhan.

Sistem pendidikan dan pembelajaran pesantren memiliki kekhususan dalam membentuk struktur kognisi, sikap dan keterampilan. Sistem belajar seperti *sorogan*, *wetonan*, dan *bandongan* yang menjadi cirikhas sistem pembelajaran pesantren sesungguhnya memiliki manfaat yang dapat dilihat dari hasil nyata setelah santri hidup sebagai anggota masyarakat. Kreativitas, kemandirian serta sikap tanggung jawab yang telah terbukti menjadi bagian hidup dari para alumni pesantren merupakan salah satu nilai lebih yang ditunjukkan oleh lembaga pesantren dalam mengawal perubahan masyarakat (*social transformation*).

Model pembelajaran tersebut menjadi salah satu bentuk esensial, yang perlu dipertahankan sebagai cirikhas tradisional. Dalam implementasinya tidak diartikan menutup model pendidikan dan pembelajaran yang dinilai sudah maju, namun membuat desain perpaduan bentuk pendidikan lama dengan memberikan peluang masuknya unsur modern untuk memberikan kemampuan adaptasi para santri agar melahirkan kompetensi keilmuan yang diharapkan melengkapi hasil capaian yang telah ada.

Aspek kognisi, afeksi dan psikomotor sesungguhnya sejak dulu dilakukan, ketiganya menjadi tujuan akhir pembelajaran para santri. Penekanan dari seorang pengasuh (kyai) adalah membangun sikap dan perilaku (*moral building*) melalui keteladanan (*uswah hasanah*), seperti menghormati kepada yang lebih senior dan menghargai kepada sesama teman sebaya dan santri yunior, melalui berbagai kegiatan rutin di pesantren seperti salat berjamaah, berzikir sesudah salat, bersalaman (*mushafahah*) sehabis salat dengan kyai dan para pengasuh pesantren maupun setelah mengaji bersama. Hasil dari ini semua adalah bentukan karakter dengan sikap dan moralitas santri yang mengakar dalam kehidupan, sehingga sikap itu tidak terlepas meskipun suatu saat menjadi seorang cendekiawan, ekonom yang sukses atau lainnya.

Panduan sikap seperti itu menjadi hal yang harus ada karena menjadi bagian yang esensial. Akan tetapi bersamaan penanaman sikap yang menjadi tradisi pesantren tersebut, di buka peluang juga bagaimana berhubungan dengan

² Hal itu tergambar melalui pernyataan dari pribadi pengasuh ketika awal akan mendirikan pesantren. Umumnya karena menghindari sikap *riya'* maka penulisan visi-misi dan tujuan pesantren secara demonstratif tidak dilakukan.

³ Lihat Abd A'la dalam "Pembinaan Pesantren", Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara, 2006: h.: 21.

komunitas di luar pesantren. Mengembangkan sikap dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial beragam menjadi bagian penting untuk membuka cakrawala santri melihat berbagai fenomena lingkungan sosial. Sudah tentu sikap yang ditampilkan tidak harus ‘terbelenggu’ oleh tradisi sikap dan perilaku di pesantren dengan hanya mengedepankan sikap *tawadhu* yang mendorong sikap *taqlid*, sehingga membatasi kegiatan berpikir dalam pengembangan intelektual. Dalam hal ini yang penting adalah mengedepankan ‘sikap arif’ (kearifan) ketika berhubungan dan berkomunikasi. Integrasi antara olah pikir dengan perasaan dan hati nurani (*alqolbu*) memiliki peran utama, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan lebih baik dan bermanfaat.

Keberadaan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren sesungguhnya merupakan kelanjutan pola pendidikan yang sebelumnya. Tidak menjadi lembaga terpisah dari visi-misi yang telah terbentuk melalui sistem pendidikan yang telah ditempuh. Keniscayaan visi-misi pendidikan tidak dipersiapkan hanya melihat dari tujuan peserta didik mulai belajar di lembaga pendidikan tinggi, akan tetapi lebih pada respon terhadap kebutuhan santri tingkat lanjutan dalam mempersiapkan diri sebagai pembawa perubahan (*social changer*), dengan memperhatikan kesinambungan kompetensi sebelumnya berikut seperangkat sistem nilai (*values system*) yang telah terbangun.

Peran pendidikan tinggi di lingkungan pesantren menjadi salah satu lembaga legitimasi, bahwa pesantren mampu menciptakan kader yang siap melayani tuntutan perubahan masyarakat yakni adaptasi kebutuhan dunia modern. Dalam proses sosialisasinya, pesantren tetap memperhatikan manakah yang menjadi unsur *esensial*. Mempertahankan sistem nilai (*values system*) yang telah terbukti mampu membentuk karakter para alumninya menjadi manusia berakhlak mulia, menjadi panutan dalam semua aspek kehidupan masyarakat merupakan acuan utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sehingga keberadaannya tidak larut dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi seperti pada umumnya yang lebih melihat hanya pada peluang kerja setelah selesai belajar. Meski diakui kebutuhan itu tidak dapat dihindari.

Harapan seperti itu hanya dapat diwujudkan apabila: *Pertama*, visi-misi pendidikan tinggi merujuk pada muatan sistem nilai yang telah terbangun sejak jenjang sebelumnya; *Kedua*, kompetensi tingkat jurusan maupun prodi menjadi realisasi program visi-misi pendidikan tinggi, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam mengembangkan pendekatan dan metode pembelajaran setiap mata kuliah di masing-masing jurusan dan prodi; *Ketiga*, ada kesinambungan program pendidikan dan pembelajaran masyarakat yang terpadu dengan unit kegiatan perguruan tinggi, sebagai wujud integrasi bahwa pesantren tumbuh dan berkembang tidak terlepas dengan kehidupan mereka.

Dalam kehidupan sosial, efektivitas pesantren sebagai pusat perubahan (*agent of change*) sebenarnya terbentuk karena sejak awal keberadaan pesantren juga menempatkan diri sebagai pusat belajar masyarakat (*Community learning centre*.)

seperti di contohkan pada Pesantren Denanyar Jombang yg selama 50 tahun tak pernah surut memberikan pengajian dan pemecahan permasalahan (*problem solving*) secara gratis pada ibu-ibu rumah tangga di desa-desa lingkungan pesantren dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan ada variabel yang sifatnya dapat berubah dan berkembang. Bentuk pendidikan pendampingan dengan masyarakat bisa saja mengambil pola lain, namun hubungan timbal balik antara pesantren dan masyarakat sebagai dua *entitas* yang tidak dapat dipisahkan menjadi sebuah esensi pola kehidupan yang telah dibangun selama ini merupakan karakteristik model pembelajaran di masyarakat.

Struktur Materi atau Kurikulum

Unsur lain yang menjadi acuan utama membentuk santri yang memenuhi harapan masyarakat adalah materi belajar yang diajarkan di pesantren. Ada beberapa jenis dan ragam struktur materi pembelajarn mulai rumpun ilmu fiqih, tauhid, ilmu-ilmu alat (*nahwu dan shorf*), sampai dengan ilmu-ilmu yang bersifat pengembangan diri dalam berkiprah di masyarakat seperti untuk keperluan pengembangan ekonomi, kesehatan, dan ilmu untuk kekebalan diri. Semua bisa ditemukan dalam pembelajaran di pesantren. Masing-masing lembaga memiliki cirikhas materi yang dikembangkan merujuk pada filosofi dan sejarah awal berdirinya sebuah pesantren. Demikian juga tujuan akhir dari pesantren disesuaikan dengan latar belakang tersebut sekaligus menjadi symbol dan cirikhas pesantren.

Karakter pesantren merujuk pada sepesialisasi ilmu yang menjadi fokus kajian. Para pendiri pesantren cenderung mempertahankan rumpun keilmuan yang telah menjadi ikon di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Abdurrahman Mas'ud bahwa, ahli teologi akan mempertahankan teologi yang merupakan *the most excellent science*, karena keesaan Tuhan ditetapkan dengan bantuan ilmu ini. Para ahli hukum menyatakan juga bahwa kemuliaan fikih tidak diragukan karena kenyataannya praktik-praktik ibadah fikih, halal, haram dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam telah ditegaskan secara benar. Selanjutnya para *mufasssir* juga memandang bahwa supremasi ilmu al-Qur'an berada pada posisi sentral, karena semua ilmu merujuk kepadanya.

Atas dasar pengelompokan itu, menempatkan para pendiri pesantren (*founding father*) menjadi salah satu faktor penentu karakter pesantren, sekaligus sebagai acuan dalam merumuskan struktur materi yang diajarkan di pesantren. Karakteristik keilmuan ini selanjutnya ditetapkan menjadi rumpun ilmu yang *esensial*. Kajian mendalam ilmu tersebut menjadi kewajiban setiap santri yang belajar, dan siap menjadi kader penerus untuk mengembangkannya. Oleh karenanya, penguasaan ilmu yang dibakukan menjadi sebuah ikon pesantren, dalam sistem pembelajarannya sebagai kurikulum wajib yang harus diikuti setiap santri.

Masyarakat menjadi memiliki beberapa alternatif pilihan dalam mengantarkan putra-putrinya untuk menentukan pesantren tempat belajar sesuai

keinginan, minat, dan bakat dari anggota keluarga. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menentukan jenis pesantren karena beberapa alasan. *Pertama*, santri bakal memiliki keilmuan yang memadai seperti yang diharapkan orang tua karena spesialisasi ilmu yang dipelajari. *Kedua*, masyarakat lebih mudah menentukan pesantren yang menjadi pilihan, berikut penguasaan kompetensi yang diinginkan. *Ketiga*, antar para santri bisa berkompetisi lebih nyaman dalam penguasaan ilmu secara mendalam tanpa harus merasa takut tersaingi, karena diantara mereka terdapat perbedaan kajian serta kompetensi yang diperoleh.

Keterpanggilan santri untuk menjadi anggota masyarakat guna beradaptasi dengan kebutuhan, seperti mendapatkan pekerjaan, menjadikan pesantren perlu materi kajian yang bersifat tambahan. Materi tambahan tersebut menjadi bagian yang bersifat *aksidensi*, tidak termasuk materi utama yang menjadi ikon atau symbol dari pesantren. Pertimbangan dalam menentukan muatan tambahan tergantung kondisi peluang serta kemampuan pesantren dalam mengadakan sarana yang diperlukan.

Hasil akhir dari pendidikan pesantren, para santri menjadi ahli (*a'lim*) di bidang keilmuan yang menjadi pilihan, selain menguasai ilmu-ilmu agama seperti pada umumnya yang telah menyelesaikan studi dari lembaga pesantren, santri menguasai juga keterampilan berbasis keccakapan hidup (*life skill*) yang merupakan hasil adaptasi tambahan materi untuk hidup di masyarakat.

Sebagai indikator keberhasilan belajar di pesantren, para lulusan dapat menunjukkan beberapa kriteria antara lain: *Pertama*, secara akademik santri dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; *Kedua*, secara moral santri lulusan dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar; *Ketiga*, secara individual lulusan santri semakin meningkat ketakwaannya, yaitu menjadi manusia yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya; *Keempat*, secara sosial lulusan santri dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan *Kelima*, secara kultural, santri mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan sosialnya.

Indikator keberhasilan dari pendidikan pesantren seperti di atas, menampilkan sosok manusia yang setidaknya mampu memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan materi *esensial* yang telah dipersiapkan mengantarkan santri berguna bagi agama dan masyarakat, sementara tambahan struktur materi memberikan bekal untuk kepentingan kemandirian hidup. Ini berbeda dengan pembelajaran di lembaga pendidikan formal yang telah menetapkan perangkat mulai rumusan tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran, strategi atau metode serta sistem evaluasi yang dipakai untuk mengetahui hasil. Namun hasilnya kurang memberikan kesan keilmuan bagi para pembelajarnya, utamanya dari aspek implementasi yang bersifat praksis.

Pesantren tidak menyediakan semua perangkat seperti itu secara ketat, capaian kompetensi santri tidak dilihat dari berapa banyak isi kitab harus dikuasainya, tetapi lebih melihat dari sudut pandang kitab yang khatamkan atau

dituntaskan. Hal ini karena di pesantren tidak ada penjenjangan berdasarkan kelas maupun kecerdasan, apalagi pemberian *ranking* yang dapat memberi dampak beban psikologis. Namun pada kenyataannya keluaran pesantren bisa menunjukkan sosok alumni yang berwawasan dan berakhlak berlandaskan agama.

Manajemen dan Kepemimpinan

Sampai saat ini banyak pihak utamanya para pengelola pendidikan tidak henti-hentinya mempelajari keberhasilan pola pendidikan pesantren. Mereka tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang pesantren terlepas dari kekurangannya yang dipahami sebagai hal yang menjadi keniscayaan selain nilai kelebihan yang ada. Secara bertahap mereka mulai mengikuti jejak pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk sistem manajemen dan kepemimpinan yang diberlakukan di pesantren mulai diadopsi pada pendidikan formal. Salah satunya keinginan menerapkan sistem manajemen model *boarding school* yang telah lama berjalan pada pendidikan pesantren, dengan mengambil nama berbeda seperti 'asrama'.

Model *boarding school* telah terbukti menjadi media yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas sesuai harapan. Mulai aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor para santri yang dapat terbentuk melalui model manajemen yang diterapkan oleh kyai dan para pengasuh. Pimpinan pesantren tidak memberlakukan sistem manajemen yang disebut sebagai manajemen ilmiah, sebuah manajemen dengan pendekatan yang sistematis untuk memaksimalkan usaha dan hasil. Akan tetapi, lebih memanfaatkan model manajemen dengan mengubah daya potensi santri menjadi kekuatan santri untuk menjadi manusia yang memiliki manfaat bagi semua masyarakat.

Upaya mengubah potensi santri menjadi keterampilan nyata dilakukan dengan banyak cara oleh para pengasuh. Salah satunya, dengan sistem pemberian wewenang secara berjenjang. Santri senior diposisikan sebagai pembantu dekat kyai, selanjutnya santri senior menempatkan santri yunior yang berpotensi sebagai pembantu dalam menjalankan kegiatan operasional pesantren. Masing-masing jenjang struktur memperoleh tugas dan wewenang yang berbeda serta tanggung jawab yang berlapis. Santri senior memiliki tanggung jawab lebih tinggi karena mereka menjadi wakil (*badal*) langsung dari kyai dalam melaksanakan tugas pengasuhan kepada semua santri yang berada pada strata di bawahnya. Termasuk membantu kyai memberikan pengajaran kitab-kitab kajian tingkatan awal kepada santri yunior. Sedangkan kelompok santri senior pada kesempatan tertentu mendapatkan kajian langsung dari kyai atau pengasuh pembantu kyai. Di saat tertentu pula kyai memberikan kajian kitab yang sifatnya *general* bisa diikuti oleh semua santri, tanpa melihat strata santri. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab pembinaan pengasuh pesantren terhadap karakter semua santri, melalui interaksi edukatif secara kolektif. Tujuannya untuk menanamkan sikap pematangan mentalitas sebagai santri.

Unsur kyai ataupun pengasuh merupakan tokoh sentral, menjadi faktor determinan untuk menjalankan pesantren. Dari sini bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat berkembang tidaknya sebuah lembaga pesantren. Selain itu ragam, bentuk serta karakter para alumni menjadi cerminan pola pembinaan yang diberlakukan dari model manajemen di pesantren. Di pesantren, meski tidak semua selama ini masih dikelola dengan kesan menonjol pada penanganan individual dan bernuansa kharismatik. Kritik pada manajemen seperti ini, ke depan orientasinya menjadi kurang jelas dan terbebani persoalan-persoalan praktis keseharian. Terkesan pesantren tidak memiliki visi yang terumuskan secara konkret, sehingga kebijakan yang diambil lebih bersifat sesaat.

Kepemimpinan model *kharismatik* telah membawa pengaruh kuat pada alumni pesantren, terlebih dalam menumbuhkan sikap ketaatan dan kepatuhan sebagai bentuk sistem *patron* yang ditanamkan di pesantren. Dampaknya di masyarakat menjadi symbol keteladanan yang patut dicontoh dan diikuti (*uswah hasanah*). Pendekatan manajemen berbasis *kharismatik* menjadi suatu model yang *esensial*, merupakan bentuk cirikhas tradisi pesantren dalam menumbuhkembangkan santri sebagai kader yang militan. Seperti kebiasaan KH. Asnawi membuat *ijazah* telah meningkatkan otoritasnya sebagai seorang pimpinan yang berpengaruh. Masyarakat muslim sekitar yang pada umumnya dikenal sebagai masyarakat *patron-client* merasa memperoleh perlindungan dari pemimpin kyai dari pada pemerintah, yang saat itu dipegang kaum kolonial. Pemberian *ijazah* dari KH. Asnawi tersebut menunjukkan ketinggian derajat spiritualitas di atas para muridnya serta pemerintah kolonial. Hal ini menambah keyakinan di kalangan masyarakat bahwa dia adalah pimpinan yang sesungguhnya dengan kapabilitas intelektual dan spiritualitasnya.

Namun disadari pula bahwa tuntutan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadikan kepemimpinan dan manajemen berbasis *kharisma* membutuhkan kombinasi dengan yang lain semisal konsep kepemimpinan yang dikembangkan oleh Stephen Covey yang dikenal dengan tiga fungsi kepemimpinan (*three roles of leadership*). Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tiga fungsi, yakni sebagai perintis (*pathfinding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*), dari ketiga fungsi ini dikembangkan lagi menjadi fungsi keempat yakni pemimpin sebagai panutan (*modeling*).

Fungsi perintis (*pathfinding*) menguraikan bagaimana upaya pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para anggotanya, menjabarkan misi dan nilai-nilai yang dianut, serta berkaitan dengan visi dan strategi yaitu ke mana sebuah lembaga dalam hal ini pesantren akan dibawa dan bagaimana agar sampai ke tujuan. Fungsi ini menjadi kebutuhan pengasuh pesantren dalam mengelolanya berhubungan dengan penyusunan desain rencana untuk menuju tujuan yang diharapkan.

Fungsi penyelaras (*aligning*), berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam sebuah organisasi pesantren agar mampu

bekerja dan saling melengkapi. Pemimpin saatnya memahami apa saja bagian-bagian yang dibutuhkan dalam organisasi. Kemudian menyelaraskan atau mensinergikan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Fungsi pemberdayaan (*empowering*) ini berhubungan dengan upaya pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi pesantren mampu melakukan terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat. Pemimpin pesantren harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya. Selanjutnya dia memahami dalam mendelegasikan tugas seberapa besar tanggung jawab dan otoritas yang harus dimiliki oleh setiap pengurus yang ada di bawahnya. Siapa mengerjakan apa, untuk alasan apa mereka mengerjakan pekerjaan tersebut serta bagaimana caranya, dukungan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan tersebut dan terakhir harus dipahami bagaimana akuntabilitasnya.

Kemampuan praksis manajerial seperti di muka membutuhkan kesiapan dan pembelajaran secara berkesinambungan untuk melahirkan sikap kepemimpinan yang integralistik untuk membangun dan memajukan pesantren. Perpaduan dari ketiga fungsi dalam pribadi seorang pemimpin dalam implementasinya melahirkan fungsi panutan (*modeling*).

Fungsi panutan (*modeling*) ini mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi santri. Bagaimana bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Pada akhirnya menjawab sejauh mana dia melakukan apa yang dikatakannya. Kesesuaian dalam bersikap antara lisan, sikap dan tindakan sesungguhnya merupakan awal terbentuknya kepemimpinan yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun terkadang para pengikut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut itu dikagumi yang pada akhirnya disebutnya sebagai pemimpin kharismatik.

Tradisi manajemen dan kepemimpinan di pesantren selama ini sulit untuk diuraikan dari sisi keilmiahannya. Masyarakat hanya melihat dari pengaruh yang dirasakan dalam kehidupan keseharian bahwa pimpinan itu dihormati semua pihak, sehingga masyarakat mengikuti apa yang difatwakan. Kepemimpinan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat tanpa melihat strata mereka, sesungguhnya merupakan bentuk *esensi* kepemimpinan di pesantren.

Jika dirunut lebih jauh *esensi kepemimpinan* itu salah satunya adalah keberanian untuk mewujudkan konsep dan pengetahuan ke dalam bentuk nyata (*actual performance*). Keberanian seperti itu tidak datang hanya dengan berharap, tetapi terjadi sebagai konsekuensi tingkat kesadaran (*consciousness*) dari seorang pimpinan. Lebih jauh model kepemimpinan yang dikembangkan di pesantren sesungguhnya terefleksikan dalam bentuk kemampuan memimpin diri sendiri (*self leadership*), yang intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga oleh Syafii Antonio mengibaratkan ada dua pilihan dalam

memimpin, “anda yang memimpin nafsu anda sendiri, atau nafsu itu yang akan memimpin keseluruhan diri anda”?.

Dinamika perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan variasi kepemimpinan yang lebih bersifat terbuka, hal ini menjadi indikator dari variable *aksidensi*, sebagai tambahan model kepemimpinan yang melengkapi model tradisi yang telah ada. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai tawaran dari masyarakat, membuat kepemimpinan pesantren tidak kaku, tetapi lebih fleksibel namun tidak mengabaikan nilai-nilai syariat. Dari sini pengambilalihan ilmu, pengalaman dan keterampilan yang dapat membuat pesantren mengayomi berbagai kebutuhan santri menjadi lebih diperhatikan. Fleksibilitas model kepemimpinan menjadi diutamakan, sehingga masyarakat merasa nyaman karena ada keterbukaan dan dialog dengan pesantren saat terjadi permasalahan untuk menemukan solusi bersama.

Pesantren Sebagai Pendidikan Alternatif

Dalam kajian realitas menunjukkan bahwa, setidaknya ada gambaran di mana posisi pendidika pesantren dalam konteks pendidikan nasional. Meskipun menurut regulasi pendidikan nasional sampai saat ini memosisikan pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional. Ini artinya, pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, karenanya harus tetap mengikuti sistem pendidikan induknya. Jika seperti itu, pendidikan pesantren akan mengikuti paradigma sistem pendidikan nasional yang akan mereduksi esensi fungsi pendidikan pesantren yang telah selama ini mengakar di masyarakat.

Pendidikan pesantren selama ini dikenal memiliki pilar-pilar fungsi, antara lain memiliki fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi dakwah. Semua fungsi itu menyatu dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren. Nilai lebih yang telah mengantarkan keberhasilan alumni menjadi tokoh-tokoh masyarakat baik lokal, nasional maupun global akan menjadi hilang dan tidak terakomodasi jika mengikuti pernyataan PP Nomor 55 Tahun 2007, pada salah satu butir pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama Islam (*mutafaqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

Namun patut disyukuri, setidaknya pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan di Indonesia memiliki payung hukum. Namun kita tidak harus terjebak dalam menafsirkan serta mengembangkannya hanya terikat oleh pernyataan yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Persoalannya, jika melihat aspek teks peraturan, pesantren bisa jadi hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan agama. Padahal kenyataannya, pesantren perannya cukup luas yang menjangkau ke segala aspek. Hal ini yang mengharuskan agar mempertimbangkan pesantren mampu

menawarkan sistem tersendiri atau memiliki subsistem yang tidak harus melebur dengan sistem yang sedang berjalan.

Mempertimbangkan berbagai kelebihan tanpa mengabaikan kekurangan yang terjadi, ada baiknya jika kita memperkut kembali sistem pendidikan pesantren sebagai alternatif pilihan. *Pertama*, melihat aspek tujuan atau *output* pesantren yang diakui telah mengantarkan pribadi-pribadi yang paripurna, baik aspek kognitif, afeksi, dan psikomotor para santri. Untuk tujuan yang lebih jelas, rumusan visi-misi lembaga pesantren menjadi penting untuk diperhatikan sebagai acuan mendesain rencana kegiatan dan pengembangan, sambil melihat pertimbangan lain yang memiliki makna fungsional.

Sungguhpun visi-misi pesantren tidak secara demonstratif terlihat oleh umum, seperti layaknya di lembaga pendidikan formal, namun bukan berarti tujuan pesantren terabaikan oleh pengasuh. Melalui kegiatan rutin seperti mengaji, salat, dzikir bersama dan kegiatan lainnya, mereka senantiasa mengakhiri dengan memanjatkan do'a agar para santri kelak menjadi orang berguna untuk masyarakat. Di sini sangat terlihat kepedulian dari pengasuh terhadap perilaku santri yang sedang belajar agar semuanya memperoleh ilmu dan keterampilan yang diridloi oleh Allah. Hal seperti ini jarang terjadi pada pendidikan formal lainnya.

Kedua, dari sisi materi, pesantren mempertahankan kelompok materi *esensial* yang menjadi bahan inti (*core*) pembelajaran, sebagai pembentuk sikap dan perilaku tradisi santri yang telah membudaya di masyarakat. Ikon tradisional melekat pada santri, tetapi memiliki sikap kesantunan di masyarakat merupakan nilai lebih di tengah-tengah keinginan masyarakat membentuk karakter anak muda melalui jalur pendidikan formal yang dirasa semakain sulit untuk mewujudkan. Keberadaan materi tambahan *non esensial*, bersifat menguatkan nilai-nilai dasar yang membentuk tradisi sehingga santri menjadi maju dan berkembang, tanpa kehilangan karakteristik tradisional pesantren.

Terkait pengembangan struktur materi, pendekatan yang diberlakukan salah satunya mempertahankan nilai-nilai lama yang memiliki manfaat nyata dengan mengambil juga hal-hal baru, namun memiliki nilai fungsional yang lebih besar. Termasuk dalam kaitan ini, materi kajian di level pendidikan tinggi menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai *esensial*, sehingga santri memiliki peluang yang besar untuk tumbuh dan berkembang untuk menggerakkan potensi santri, di tengah hiruk-pikuk masyarakat mencari sosok orang yang memiliki integritas tinggi dalam mengisi berbagai peluang yang sedang menanti.

Sikap moderat dalam mengembangkan materi bisa jadi menjadi sebuah pilihan. Melalui sikap seperti ini akan mampu membentuk sikap pro aktif untuk mencari penyelesaian beragam permasalahan guna melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dan orisinil. Konsep ini memperkuat istilah pesantren tradisional tetapi lebih modernis, dari pada yang maju tetapi tidak ada keterbukaan dalam merumuskan hukum dan kebijakan. Dalam hal ini pendapat para ulama terdahulu

tetap ditempatkan dalam kerangka *lintas-komparatif*, namun tidak sampai harus menjadi belenggu pemikiran yang dapat mematikan atau membatasi kreativitas.

Sistem moderasi menjadi strategi pesantren dalam mengembangkan materi utamanya kajian hukum, paling tidak memiliki lima ciri yang perlu menjadi pedoman: (1) Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh guna mencari konteksnya yang baru; (2) Makna bermadzhab yang selama ini dipahami, diubah dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qanly*) menjadi bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhajy*); (3) Melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); (4) Fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif; dan (5) Melakukan pemahaman metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah-masalah sosial dan budaya.

Ketiga, strategi pembelajaran yang diambil pesantren adalah model-model yang dapat membantu pembinaan ahlak, membangun kecerdasan dan menumbuhkan kreativitas serta dapat membangun demokratisasi yang santun. Cara ini pula yang dikembangkan oleh para pendahulu dalam mendidik santri. Kelebihannya terletak pada pola pendekatannya yang didasarkan pada segala sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat serta perpaduan antara aspek teoritis dan praksis.

Selain itu faktor kepemimpinan di lingkungan pesantren dinilai memiliki tingkatan *uswah hasanan* yang ideal sehingga layak dan seharusnya diikuti oleh masyarakat. Kepemimpinan pengasuh pesantren diyakini sebagai tindak lanjut dan penerus dari ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah, sehingga masyarakat tidak meragukan terhadap pemimpin pesantren sebagai tokoh panutan yang memiliki pengaruh kuat pada jiwa masyarakat. Pengaruh kuat dari sikap kepemimpinan muncul bukan saja karena ada faktor keturunan, melainkan ada kekuatan akademik keilmuan yang dikuasai oleh para pengasuh.

Setidaknya konsep pendekatan seperti itu telah dipraktekkan oleh para Wali Sanga, misalnya Sunan Giri menggunakan pendekatan permainan untuk mengajarkan Islam kepada anak-anak; Sunan Kudus menggunakan dongeng, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam melalui wayang kulit, dan Sunan Derajat mengenalkan Islam melalui keterlibatan langsung dalam rangka menangani permasalahan yang dialami masyarakat. Ternyata pola ini telah mengantarkan pesantren pada sistem pendidikan yang luwes dan memiliki dimensi luas, bahkan melampaui batas-batas pesantren itu sendiri. Pesantren telah berhasil menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembelajar dan menjadikan belajar sebagai proses yang berjalan terus menerus, tanpa terjebak pada rutinitas kegiatan pendidikan layaknya di sekolah formal.

Keempat, system evaluasi pesantren menyertakan masyarakat untuk melihat signifikansi sikap dan perilaku para santri. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan yang ikut menentukan dalam membuat rumusan kebijakan yang diambil untuk penyusunan program serta perbaikan

kegiatan lanjutan. Model pendidikan dengan tradisi keilmuan yang integral di pesantren menekankan sikap kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan merupakan bentuk acuan dalam melihat keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di pesantren.

Implementasinya, nilai-nilai dasar tersebut dikemas dalam sebuah strategi yang menekankan pada apresiasi terhadap segala tradisi yang baik sekaligus akaomodatif terhadap bentuk-bentuk pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebenarnya yang menjadi keberhasilan pendidikan pesantren, prinsipnya realisasi nilai-nilai keagamaan yang melekat kuat dalam kehidupan dengan belajar dari kesejarahan umat dan bentuk normativitas Islam yang sesungguhnya.

Rekomendasi

Pendidikan pesantren telah berhasil mengantarkan umat menjadi masyarakat yang mampu melihat perubahan dengan tidak menjadikannya gap terhadap hasil-hasil ilmu dan teknologi (masyarakat madani), membutuhkan komitmen sikap para pengasuh dalam mengembangkan lembaga pesantren. Masyarakat tradisional memiliki sikap terbuka menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam mengelola kesinambungan pesantren. Perencanaan pendidikan merujuk pada sebuah visi yang merupakan representasi dari latar belakang didirikannya sebuah pesantren.

Esensi pengelolaan pesantren sesungguhnya telah melekat sejak lama pada para pengasuh, esensi keilmuan, strategi dan metodologi yang telah terbukti menjadikan alumni santri berkualitas, tanpa harus terkooptasi dengan berbagai konsep maupun teori-teori baru dalam melaksanakan manajemen perlu dipertahankan. Konsep dan teori didatangkan untuk memberikan nilai tambah kompetensi santri menurut kebutuhan berdasarkan peluang dan potensi lembaga. Unsur *aksidensi* menjadi bersifat komplementer bukan yang utama, sehingga karakteristik pesantren tetap dapat bertahan dan tidak larut dengan perubahan yang menjadikan pesantren kehilangan esensi tradisionalnya.

Nilai-nilai dasar yang menjadi esensi pesantren disosialisasikan kepada semua pengasuh sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dan kegiatan ke semua unit-unit yang ada. Dalam prakteknya mereka perlu mendapatkan sosialisasi unsur baru sebagai tambahan untuk melengkapi tuntutan kebutuhan kompetensi santri yang diperlukan. Hasil yang diharapkan, alumni mampu mengembangkan ilmu dan keterampilan tidak saja pada lingkup keluarga namun meluas ke masyarakat sekitar tempat mereka bertempat tinggal.

MENAKAR KEBERHASILAN MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN

Pendidikan di lingkungan pesantren sesungguhnya menjadi bagian yang tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Pesantren yang selama ini dikelola oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki kesamaan dalam mengemban tugas untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berikut lulusannya memiliki kekhasan tersendiri. Selain memiliki pengetahuan setingkat dengan sekolah lain yang sederajat, juga memiliki keterampilan keagamaan sebagai tambahan, sehingga nyaris tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Walaupun ada perbedaan itupun berada pada muatan kurikulum khusus yang terjadi di pesantren terutama materi agama lebih banyak, karena memang perbedaan itu menjadi ciri utama, dengan tetap memperhatikan muatan materi umum yang dibakukan sesuai tingkatan satuan pendidikan.

Realitas dukungan di masyarakat menunjukkan bahwa mereka masih menjadikan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran formal sebagai alternatif pilihan bagi putra-putrinya. Selain bisa menerima ilmu agama, juga bisa mendapatkan pelajaran sama dengan di sekolah umum. Namun, kecenderungan masyarakat menomorduakan pendidikan madrasah di lingkungan pesantren. Beberapa alasan yang mendasari antara lain: *pertama*, sebagian besar warga masyarakat menyekolahkan anaknya ke madrasah pesantren karena tidak diterima di sekolah lain. Asumsi yang menjadikan kekhawatiran mereka adalah karena alumni madrasah pesantren kurang mampu bersaing dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja (Abuddin Nata, 2003).

Kedua, Masyarakat kadang masih menilai bahwa pesantren kurang bisa mengelola komponen-komponen pendidikan dengan baik untuk meraih kualitas yang diharapkan. Lulusan pesantren dinilai hanya berpeluang sebagai pengawal moral bangsa. Alasan seperti itu tidaklah berlebihan, banyaknya pesantren yang masih belum memperhatikan kelengkapan sistem administrasi serta manajemen untuk menciptakan tata kelola lembaga yang efektif dan efisien memperkuat asumsi mereka terhadap pendidikan pesantren yang dinilai belum sesuai harapan.

Ketiga, keinginan warga dalam mendukung pendidikan pesantren belum sebanding dengan kebutuhan pesantren itu sendiri untuk meningkatkan kualitas manajemen yang sesungguhnya menjadi kunci utama untuk membangun mutu. Yang penting anak bisa sekolah di pesantren, itu kata masyarakat tanpa berfikir bagaimana dan kemana setelah menyelesaikan pendidikan. Tujuan utama agar anak mereka bisa mendapatkan agama sebagai mata pelajaran pokok (Haidar, 2001). Gambaran seperti ini berpengaruh pada desain manajemen yang diberlakukan di sebuah lembaga pendidikan, karena terkait subyek (peserta didik) yang dikelola oleh sebuah manajemen.

Keempat, keterbatasan sumber daya manusia sebagai pengelola perangkat pendidikan pesantren menjadikan akses jaringan dan komunikasi ke lembaga atau instansi luar menjadi kurang dinamis, proses informasi sebagai basis untuk melakukan *transformasi internal* menjadi terhambat. Meskipun kemunculan pendidikan pesantren di Indonesia tergolong lebih tua di banding model pendidikan lain pada permulaan abad 20 (Hasbullah, 1996), namun pemikiran kearah kelengkapan sistem manajemen belum tertata sejak awal. Karena *transfer* materi kala itu jauh lebih utama, ketimbang mengurus kelengkapan sistem administrasi.

Meskipun keberadaan aspek manajemen pendidikan pesantren terkendala oleh beberapa hal seperti diuraikan di muka, namun kenyataan para alumni pendidikan pesantren memiliki kualitas kompetensi yang tidak kalah jauh dibanding dengan pendidikan sekolah yang sederajat. Tokoh nasional semisal KH. Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, KH. Abdurrahman Wahid dan lainnya adalah sebagian dari profil alumni pendidikan pesantren yang kualitas personalnya tidak diragukan oleh semua kalangan.

Keikutsertaan para alumni pendidikan pesantren di berbagai even kegiatan baik lokal maupun nasional atau bahkan global, menjadi salah satu indikator yang menunjukkan mutu pendidikan. Patut menjadi bahan pertanyaan bagaimana sebenarnya sistem manajemen yang dijalankan di lingkungan pesantren. Sementara masyarakat masih menilai bahwa pesantren masih belum mampu menduduki peringkat yang relatif modern sama dengan pendidikan sekolah, karena dinilai kurang memperhatikan pendidikan yang berorientasi sains dan teknologi (Anis Masykhur, 2010).

Manajemen Pendidikan Pesantren

Pesantren secara terminologi diartikan sebagai “tempat belajar para santri”, biasanya dikaitkan dengan kata pondok yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Ada yang mengartikan dari kata arab *funduq* berarti asrama (Zamakhsari Dhofier, 1983). Dari pemaknaan podok pesantren tersebut secara luas dapat diartikan sebagai bangunan baik berupa rumah, asrama sebagai tempat tinggal para santri dalam waktu beberapa lama dengan tujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kedekatannya dengan guru (kyai) yang tinggal bersama dalam kesatuan lingkungan yang berada di tengah masyarakat menjadikan pesantren tidak pernah sepi dari kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya bisa mewarnai bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam *setting* sosial-budaya, bahkan dalam konteks proses pendidikan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dari kajian para peneliti pesantren, hampir tidak dapat meninggalkan tiga unsur utama. Ketiga unsur itu adalah model pendidikan atau biasa dikenal sebagai sistem pendidikan dan pembelajaran, struktur materi kajian atau kurikulum, dan

manajemen kepemimpinan yang diperankan oleh para pengasuh dalam melakukan pembinaan para santri.

Dari ketiga komponen berkembang menjadi beberapa model pesantren, ada pesantren tradisional, semi modern, dan pesantren modern. Masing-masing memiliki komunitas binaan (santri) serta pengaruh di masyarakat dalam mengembangkan misi dakwahnya. Kekuatan pengaruh menjadi salah satu alat ukur bahwa pesantren mendapatkan pengakuan dari para alumni, karena manfaat nyata (*benefit*) dari ilmu dan keterampilan yang telah mengantarkan diri dapat hidup di masyarakat. Dari sini, antara lembaga pesantren dan masyarakat binaan sebagai hasil *out put*-nya senantiasa menjalin ikatan sebagai media komunikasi sekaligus saluran promosi lembaga dalam melakukan rekrutmen calon santri.

Keberhasilan pola pembinaan melalui proses pendidikan dan pembelajaran, struktur materi ajar, dan manajemen kepemimpinan yang diberlakukan menjadi simbol masyarakat untuk memberikan identitas lembaga pesantren. Selanjutnya, kemampuan implementatif para santri dari ilmu yang didapat menjadi acuan masyarakat dalam memberi penilaian terhadap kualitas lembaga pesantren. Dari penilaian ini sesungguhnya kesinambungan hidup (*continuity of life*) pesantren di pertaruhkan. Jika masyarakat menilai bahwa pesantren dengan model dan cirikhasnya, berhasil memenuhi harapan mereka, maka pesantren itu dipastikan akan mendapat *simpati* yang berpengaruh kuat terhadap mengalirnya jumlah calon santri yang akan belajar.

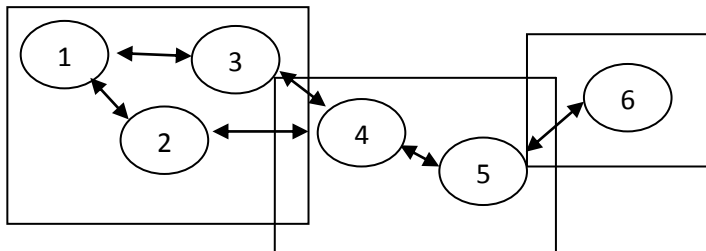
Pesantren dengan karakteristiknya yang telah berhasil membangun suatu *tradisi religius*, mampu menjadikan masyarakat berkembang dinamis sejalan dengan tuntutan dan perubahan. *Tradisi religius* menurut Wilfred C. Smith (2004), sebuah tradisi yang jika dicermati tidak hanya berlangsung di masyarakat pada situasi yang serba kemungkinan dan kebetulan, tetapi *inheren* dan niscaya dalam kehidupan dengan kekuatan sosialisasi sistem norma yang berasal dari pesantren.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen di pesantren lebih banyak memperhatikan: *pertama*, sistem perencanaan melihat pada apa yang sedang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi persoalan sehari-hari terkait dengan kehidupan beragama. Karena menurut mereka jika tradisi kegiatan beragama dapat diperankan oleh orang-orang pesantren, mereka akan memperoleh kepuasan spiritual. Secara keilmuan serta implementasinya tidak menimbulkan keraguan, apalagi menyangkut aspek hukum yang berkaitan dengan syariat.

Menurut teori perencanaan, model perencanaan seperti itu merupakan implementasi bentuk 'Sinoptik' yang menggambarkan bahwa obyek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan dengan satu tujuan (Husaini Usman, 2013). Obyek atau tujuan itu diuraikan menjadi bagian-bagian dengan memakai analisis sistem, sehingga sistem bisa menampakkan struktur yang ada.

Husaini Usman (2013) menjabarkan, bahwa dalam perencanaan sinoptik yang dimaksud memiliki langkah-langkah sebagai berikut; (1) pengenalan masalah, (2) mengestimasi ruang lingkup problem, (3) mengklasifikasi kemungkinan

penyelesaian, (4) menginvestigasi problem, (5) memprediksi alternatif, dan (6) mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian yang spesifik. Proses perencanaan sinoptik seperti itu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar: Proses Perencanaan Sinoptik (Tanner, 1981)

Dari gambar di atas dapat dipahami, bagian pertama menunjukkan perencanaan di pesantren merujuk pada kebutuhan masyarakat sekaligus mengenali ruang lingkup kebutuhan yang ada serta merumuskan kemungkinan alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan. Bagian kedua, menjelaskan persoalan yang menjadi kebutuhan dan alternatif pemecahan masalah, dan bagian ketiga, merupakan implementasi alternatif persoalan kebutuhan serta penilaian dan tindak lanjut yang perlu dirumuskan.

Kedua, perencanaan jangka panjang atau lebih dikenal dengan rencana *strategic*, belum familier atau tidak dikenal oleh kalangan pesantren. Rencana jangka panjang yang berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu untuk membentuk sikap dan keterampilan atau perilaku, dinilai sebagai bentuk sikap yang mendahului atau mendekte kodrat dan *irodatnya* Allah, itu menjadi pantangan yang ‘wajib’ dihindari oleh kalangan pesantren. Menuntut ilmu bagi santri, bukan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi jalan mencari ridla Allah agar terhindar dari keterbelakangan.

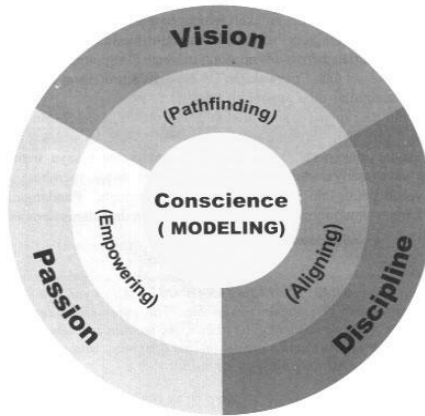
Alumni pesantren Mathali’ul Falah Kaje, Margoyoso, Pati, asuhan KH. Sahal Mafudh (almarhum), bisa menjadi salah satu contoh. Meskipun pendidikan tidak mengikuti kurikulum nasional dan tidak pernah mengikuti ujian akhir nasional, namun mereka tidak pernah menyoal besok jadi apa dan akan ke mana. Pada kenyataannya di masyarakat para alumni itu terpakai, kata pengangguran justru menjadi asing bagi mereka. Oleh Abd. A’la (2006), pendidikan pesantren seperti itu menurutnya lebih menekankan pada nilai-nilai kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan. Nilai-nilai dasar itu dibingkai dengan paradigma yang sangat menekankan kepada apresiasi terhadap segala tradisi yang baik sekaligus akomodatif terhadap bentuk-bentuk reformasi yang relevan serta dapat dipertanggung jawabkan.

Ketiga, Koordinasi yang dilakukan dalam manajemen pendidikan pesantren berprinsip bahwa seseorang untuk dapat meraih harapan tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain. Pola kerja sama antara sesama warga pesantren atau dengan masyarakat sekitar pesantren merupakan proses sosial yang memiliki makna ganda. Selain sebagai wahana memperdalam pemahaman konsep bermasyarakat sekaligus juga menjadi tempat praktikum para santri dalam mengamalkan ilmu yang didapat. Hal ini juga menjadi sarana untuk membentuk kemandirian santri.

Kegiatan koordinasi dilakukan oleh santri senior melalui sistem pendelegasian dengan tujuan untuk mengembangkan setruktur organisasi pesantren serta meningkatkan motivasi bawahan. Namun, diakui bahwa ketika bawahan menjalankan desentralisasi, pimpinan di tingkat atas akan kehilangan kontrol atas operasi kegiatan yang sudah terspesialisasikan di tingkat bawah, sehingga besar kemungkinan terjadi krisis kontrol (Husaini Usman, 2013). Keberhasilan manajemen seperti ini adalah kesinambungan kaderisasi dan kepemimpinan, yang selanjutnya akan dapat mengisi kebutuhan di masyarakat.

Keempat, kepemimpinan pesantren yang menggambarkan sikap keteladanan dari para pengasuh, menjadi kiblat dalam berperilaku santri. Kepemimpinan tanpa banyak memberikan intruksi serta tidak banyak memberikan orasi, namun santri merasa terbimbing oleh kekuatan spiritual, yang ada di lingkungan pesantren melalui interaksi edukatif. Dari proses adaptasi sosial, muncul keinginan kuat dari seorang santri untuk mengikuti jejak santri lain yang lebih senior yang dinilai lebih memahami sistem regulasi di pesantren, serta memahami perilaku pemimpin atau pengasuh karena kedekatan mereka dengan pengasuh. Dalam kondisi seperti itu sesungguhnya telah terjadi proses *transmisi* nilai-nilai tradisi pesantren dari santri senior ke santri junior, begitu selanjutnya kegiatan terus berjalan mengikuti irama perkembangan waktu.

Jika ditelaah melalui teori kepemimpinan, sesungguhnya para pemimpin pesantren telah mengembangkan empat fungsi kepemimpinan (*the 4roles of leadership*) yang dikemukakan oleh Stephen Covey (Syafii Antonio, 2007), bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat fungsi kepemimpinan yaitu sebagai perintis (*pathfinding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*), dan panutan (*modeling*). Berikut gambar fungsi kepemimpinan di pesantren.



Gambar: Fungsi Kepemimpinan Stephen Covey

Fungsi perintis (pathfinding) mengurai bagaimana upaya pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para santri, misi dan nilai-nilai yang mesti dianutnya serta yang berhubungan dengan strategi ke mana pesantren dikembangkan dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Fungsi ini sebenarnya telah dikembangkan oleh para pemimpin pesantren berkaitan dengan langkah-langkah mendidik dan mengajak santri ke jalan yang benar. Menanamkan kepada santri bagaimana membangun suatu tatanan sosial yang baik dan maju melalui pemahaman nilai-nilai kesetaraan universal, dan semangat toleransi dalam kehidupan yang serba majmuk.

Fungsi penyalaras (*aligning*), konsep ini menggambarkan bagaimana pemimpin menyalaras keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan pesantren agar semua mampu bekerja saling bersinergis. Dalam hal ini pemimpin benar-benar memahami bagian-bagian yang ada di pesantren. Selanjutnya, menyalaras bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengasuh pesantren mampu menyalaras berbagai strategi untuk membina santri agar siap menjadi kader yang pintar menyiarkan ajaran Islam. Di sisi lain harus membina komunikasi yang baik dengan masyarakat agar dakwah yang disampaikan dapat diterima para santri maupun oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemimpin pesantren yang harus juga memberikan pencerahan kepada masyarakat perihal ajaran Islam.

Sebagai penyalaras, pemimpin pesantren dituntut mampu meredam berbagai konflik sosial di masyarakat. Melalui pendekatan persuasif yang merujuk pada konsep Islam, pemimpin pesantren mampu membuat masyarakat sadar dan saling memahami betapa pentingnya hidup bersama, damai, saling menghormati dan menghargai antar beberapa golongan yang berbeda agama, suku, budaya, dan status sosial.

Fungsi pemberdayaan (*empowering*) di pesantren berhubungan dengan upaya pemimpin untuk mengembangkan lingkungan agar setiap orang dalam lembaga pendidikan pesantren mampu melakukan yang terbaik sesuai tujuan serta memiliki komitmen yang kuat (*committed*). Pemimpin memahami karakteristik dan sifat pekerjaan yang harus didelegasikan. Siapa mengerjakan apa, bagaimana tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki santri senior atau junior. Untuk apa mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Termasuk bagaimana cara melakukan kegiatan serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan, menjadi fokus kegiatan pemberdayaan, sehingga semua unsur manajemen bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan job masing-masing.

Program kerja yang diberlakukan di pesantren semua diarahkan pada pendidikan yang bermuara pemberdayaan santri. Kajian materi, pembinaan sikap dan perilaku serta penguatan keterampilan santri menjadi fokus program yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian. Oleh karenanya, identifikasi permasalahan yang datang dari masyarakat menjadi awal masuk (*entry point*) penyusunan kegiatan pemberdayaan. Kerja bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, merupakan salah satu bentuk pemberdayaan santri yang melibatkan masyarakat sekitar dan memberi manfaat positif bagi keberlangsungan kehidupan.

Fungsi panutan (*modeling*), dalam kepemimpinan menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan yang baik (*uswah hasanah*) bagi para santri dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab dari tutur kata, sikap, perilaku dan keputusan-keputusannya menjadi model dan pedoman bagi semua santri. Proses ini sesungguhnya menjadi dasar pembentukan moral dan karakter santri, sehingga santri tidak hanya pintar menyampaikan orasi pengetahuan namun juga memiliki kecerdasan moral yang kuat.

Kecerdasan moral merupakan kapasitas mental untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan universal ditetapkan terhadap nilai-nilai, tujuan, dan tindakan (Antonio, 2007). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa, kecerdasan moral adalah kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Dalam perilaku keseharian, sikap ini menjadi barometer seseorang untuk mengukur integritas kepribadian yang dikenal sebagai kejujuran. Meskipun terasa semakin langka, dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran masih sangat didambakan oleh masyarakat sebagai bagian indikator untuk membentuk karakter bangsa.

Keberhasilan Manajemen Pendidikan Pesantren

Di pesantren model kepemimpinan apapun namanya tidak ada kepastian kriteria, yang penting proses manajemen pendidikan bisa mengantarkan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan kemandirian. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di masyarakat menurut Mukti Ali (Ismail, 2002), memiliki karakteristik yang menjadi ciri khasnya seperti berikut: (1) adanya hubungan yang akrab antara santri dan kiai; (2) Tunduknya santri pada kiai; (3) Hidup hemat dan sederhana

benar-benar dilakukan; (4) Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara di kalangan santri; (5) Jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren; (6) Kehidupan berdisiplin sangat ditekankan dalam kehidupan pesantren; (7) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan adalah salah satu pendidikan yang diperoleh santri di pesantren; dan (8) Kehidupan agama yang baik dapat diperoleh santri di pesantren.

Untuk merealisasikan sikap dan perilaku seperti di atas, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menguasai konsep maupun teori manajemen, namun pengamalan norma ajaran secara nyata dalam kehidupan menjadi lebih diutamakan. Keberhasilan kepemimpinan ditunjukkan oleh perilaku dan aktivitas pimpinan dalam memberikan kontribusi melalui dua cara. *Pertama*, manajemen yang menjalankan tugas kepemimpinan mendukung strategi dan membangun budaya organisasi dengan keteladanan (*uswah khasanah*). *Kedua*, manajemen selalu membuat keputusan-keputusan dengan basis atau dasar *skill*, kepribadian, dan pengalaman (Jatmiko, RD., 2003). Faktor-faktor ini semua diambil untuk menentukan pendekatan implementasi strategi kepemimpinan yang akan dijalankan untuk pembentukan karakter santri.

Berbagai konsep yang membicarakan soal efektivitas kepemimpinan, sesungguhnya berpulang pada keberanian seseorang untuk bersedia mewujudkan pengetahuan tersebut ke dalam bentuk nyata (*actual performance*). Keberanian terbentuk dari konsekuensi tingkat kesadaran (*consciousness*) melalui proses memahami dan mengalami secara mendalam dengan identitas diri yang lebih tinggi, sebagai prasyarat bagi pengembangan kompetensi dalam memimpin orang lain (Antonio, 2007). Diakui oleh Antonio, bahwa untuk membuat sukses dalam memimpin diperlukan kemampuan memimpin diri sendiri (*self leadership*). Kepemimpinan ini telah diperankan oleh seorang kyai yang senantiasa menjaga integritas diri melalui ucapan, pikiran dan tindakan dalam membina santri.

Untuk mengetahui keberhasilan pendidikan pesantren, diperlukan fungsi penilaian dan pengendalian (*Evaluating and Controlling*). Dalam manajemen pendidikan, penilaian (*evaluating*) mempunyai kaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Sudjana (2004), merinci keterkaitan fungsi-fungsi manajemen dengan perencanaan. Menurutnya, perencanaan perlu disusun berdasarkan hasil penilaian atau sekurang-kurangnya didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan, permasalahan, dan sumber-sumber yang ada, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya dalam mencapai tujuan.

Di pesantren penilaian dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya disiplin dan moral serta untuk mengetahui cara-cara yang tepat dalam membina sikap dan perilaku santri, partisipasi kegiatan, dan hubungan kemanusiaan (interaksi sosial). Kriteria keberhasilan itu dilihat dari seberapa besar santri setelah menjadi alumni memberi manfaat bagi dirinya dan kehidupan masyarakat. Standar penilaian tersebut berdasar pada sebuah sumber ajaran Islam

bahwa, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan orang banyak (*keboirunnas anfa'uhum linnas*).

Keterukuran manfaat santri dapat dilihat dari pihak masyarakat mengakui keberadaan santri, sehingga berkemauan memanfaatkan ilmunya melalui berbagai macam kegiatan seperti mengisi pengajian di majlis taklim ataupun ceramah. Secara rinci keberhasilan pendidikan pesantren menurut Abuddin Nata (2003) dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti berikut: (1) Secara akademik, lulusan pendidikan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (2) Secara moral, lulusan pendidikan dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar; (3) Secara individual, lulusan pendidikan semakin meningkat ketakwaannya, dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya; (4) Secara sosial, lulusan pendidikan dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar; dan (5) Secara kultural, lulusan mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungannya.

Jika diurai menurut ranah pendidikan seperti disebutkan Abudin Nata (2003), dimensi kognitif-intelektual, afektif-emosional dan psikomotorik-praktis kultural santri alumni dapat terbina dan berkembang secara seimbang. Kesemuanya itu menjadi parameter atau ukuran-ukuran yang dapat dijadikan acuan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Proses penilaian yang sering dipadukan dengan pengendalian, sebenarnya merupakan proses menentukan apakah kegiatan pendidikan pesantren sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk dicapai. Menurut Hunger (2003), proses penilaian dan pengendalian sesungguhnya membandingkan hasil dengan yang diinginkan dan memberikan umpan balik bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari, oleh dan kembali untuk masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan pendidikan bukan ditentukan oleh standar nilai atau kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama, akan tetapi lebih berbentuk pada kompetensi sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan secara akademik sesungguhnya menjadi wujud tanggung jawab pesantren dalam membina karakter dan moral santri yang tidak terlepas dari ukuran penilaian hasil belajar berbentuk prestasi nilai. Hal ini dimaksudkan terbentuknya akhlak yang baik lebih diutamakan dari pada sekedar mendapat nilai yang tinggi. Walaupun seorang santri berhasil menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini merupakan bentuk jawaban bahwa untuk membina akhlak masyarakat diperlukan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi pula, agar secara metodologis santri bisa mengembangkan materi lebih variatif dan *applicable* sesuai kebutuhan.

Kompetensi sosial sesungguhnya merupakan bentuk akumulasi keberhasilan pendidikan pesantren yang diharapkan bisa dikembangkan sebagai

materi dakwah di masyarakat. Betapapun pintar dan tinggi ilmu yang dimiliki santri, namun tidak dibarengi dengan amal nyata serta moralitas yang baik, maka masyarakat tidak menghormatinya.

Hal tersebut merujuk pada pendapat Al Ghazali, bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan etika seperti kepatuhan, kemanusiaan, kesederhanaan, dan membenci terhadap perbuatan buruk (Abudin Nata, 2003). Moral dan akhlak tidak bersifat natural atau pembawaan, artinya ada sejak lahir, tetapi perlu diusahakan secara bertahap antara lain melalui pendidikan dan pembiasaan.

Jika ditabulasikan, keberhasilan manajemen pendidikan pesantren dapat dilihat dalam tabel berikut.

Keberhasilan Manajemen Pendidikan Pesantren

No	Fungsi-fungsi Manajemen	Penyusunan Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Dicapai
1	Perencanaan	Didasarkan pada kebutuhan masyarakat	Mengembangkan sikap dan keterampilan berbasis kemasyarakatan	Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sosial kemasyarakatan
2	Koordinasi	Kerjasama atas dasar peran partisipatif warga pesantren dengan anggota masyarakat	1. Mengembangkan kerjasama yang saling memberikan manfaat antara pesantren dan masyarakat; 2. Mengembangkan keterampilan sosial kader para santri tentang hidup bermasyarakat	1. Terbentuknya interaksi sosial atas dasar saling memberikan manfaat antara warga pesantren dan masyarakat; 2. Keterampilan sosial santri dalam kehidupan bermasyarakat menjadi lebih meningkat

3	Kepemimpinan	Lebih banyak menunjukkan sikap keteladanan yang baik (<i>uswah khasanah</i>) dalam berbicara dan bertindak melalui fungsi sebagai: perintis (<i>pathfinding</i>), penyalaras (<i>aligning</i>), pemberdaya (<i>empowering</i>), dan panutan (<i>modeling</i>)	Mewariskan (<i>transmission</i>) nilai-nilai tradisi pesantren, agar santri memiliki dan mengembangkan sikap kemandirian, kesederhanaan, keikhlasan, dan bertanggung jawab	Terbentuknya kader pemimpin yang siap menjadi teladan masyarakat (<i>uswah khasanah</i>) melalui pengembangan sikap kemandirian, kesederhanaan, keikhlasan, dan bertanggung jawab
4	Pengawasan dan Penilaian	Didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan, permasalahan, dan sumber-sumber yang ada, untuk mengetahui efektivitas hasil yang dapat dicapai	Untuk mengetahui tinggi rendahnya disiplin dan moral serta untuk mengetahui cara-cara yang tepat dalam membina sikap dan perilaku santri, partisipasi kegiatan, dan hubungan kemanusiaan (interaksi sosial)	Berkembangnya tingkat efektivitas kemampuan santri dalam memberi manfaat bagi kehidupan orang banyak (<i>kehoirunnasi anfa'uhum linnasi</i>)

Hasil adaptasi dari berbagai sumber

Beberapa Faktor yang Berpengaruh

Manajemen pendidikan pesantren bisa saja dimasukkan dalam kategori penyelenggaraan pendidikan efektif. Lembaga pendidikan dikatakan efektif, apabila memiliki keberhasilan dilihat dari aspek sejauh mana kemampuan mencapai tujuan, menyelenggarakan proses pembelajaran, kesinambungan organisasi, dan kemampuan merespon lingkungan (Suparlan, 2008). Selain itu, keempat

komponen tersebut memang merupakan unsur-unsur pembentuk lembaga pendidikan efektif, sehingga mengantarkan santri dapat mencapai hasil maksimal.

Keberhasilan pendidikan pesantren tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: *pertama*, aspek materi pembelajaran, ketika pesantren mengadopsi sistem sekolah, pesantren sepertinya belum mampu sepenuhnya meletakkan sistem itu di bawah visi-misi pendidikan pesantren yang selama ini diikutinya. Hal ini berdampak pada pesantren akan terkooptasi ke dalam dunia yang penuh dengan pragmatisme (meminjam istilah Abd. A'la, 2006). Akibatnya, tujuan yang esensial pendidikan madrasah menjadi memudar dari waktu ke waktu. Di sisi lain pesantren sendiri belum mampu melakukan proses integrasi antar disiplin keilmuan secara utuh.

Dikotomi ilmu umum dan ilmu agama misalnya, pembelajarannya dibiarkan berjalan saling terpisah (*sparated approach*) tanpa bisa menghasilkan pemahaman ilmu yang benar-benar 'baru' yang bermanfaat untuk umat. Ironisnya, ilmu-ilmu yang datang dari luar pesantren dibiarkan masuk dan menguasai, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan pesantren.

Kedua, secara metodologis pendidikan pesantren selama ini belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pembelajaran klasikal dan non klasikal masih belum jelas perbedaan metodologinya. Pendekatan monolog (*searah*) masih relatif banyak dijumpai dalam pendidikan di pesantren. Akibatnya, pembentukan aspek kognitif, afektif, dan kognitif atau psikomotor belum bisa menjadi bagian yang menyatu dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran.

Akibat dari keterbatasan tersebut menjadikan pesantren tidak mampu mengakses nilai-nilai tradisi serta potensi yang dimiliki. Pesantren yang menjadi gudangnya keilmuan Islam klasik menjadi tidak maksimal dalam mensosialisasikan manfaatnya dalam kehidupan nyata, sehingga kebermaknaannya tidak bisa diserap oleh masyarakat secara penuh.

Ketiga, meskipun diakui bahwa, alumni pesantren telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan masyarakat (*human development*), namun dari sisi manajerial masih menunjukkan tampilan yang monoton, dikelola seadanya dengan menekankan pada pembinaan individual berbasis pendekatan kharismatik. Program kerja orientasi ke depan menjadi tidak jelas, karena terbebani oleh persoalan-persoalan bersifat praktis keseharian. Hal tersebut karena belum terumuskannya visi pesantren secara nyata, akibatnya kegiatan yang muncul sering terjebak pada kebijakan-kebijakan yang bersifat sesaat.

Keempat, faktor pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat mulai tidak efektif. Hal tersebut akan mempengaruhi penampilan santri ketika sedang berada di lingkungan mereka. Keluarga dan masyarakat mulai terbawa oleh arus kehidupan yang lebih mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spiritual. Pembinaan dan pembiasaan akhlak tidak berjalan efektif akibat krisis keteladanan di rumah dan masyarakat.

Kondisi seperti itu bisa berpengaruh munculnya sikap mendua pembinaan moral santri, karena perbedaan perlakuan yang diterima di pesantren dan di rumah. Sesungguhnya akhlak bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup berakhlak sejak kecil. Menurut Zakiyah (1978), akhlak itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian, dan bukan terjadi sebaliknya.

Mempertimbangkan beberapa kelebihan tanpa mengabaikan faktor-faktor kendala pendidikan pesantren sebagaimana diuraikan di muka, dapat dirumuskan langkah-langkah antisipasi sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah, antara lain: *pertama*, dengan mempertahankan keberadaan pesantren melalui strategi dan pendekatan penyelamatan unsur pokok (esensi). Esensi dimaksudkan sebagai apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya sesuai awalnya. Esensi mengacu kepada aspek-aspek yang lebih permanen dan mantap dari sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah, parsial, atau fenomenal (Lorens Bagus, 2002).

Dalam konteks pesantren, esensi mengacu kepada sifat-sifat khas yang mesti dimiliki oleh lembaga pesantren dan disepakati sebagai suatu yang dipermanenkan, sebab jika unsur ini diubah berarti akan menghilangkan akar sejarah berdirinya pesantren, yang pada hakekatnya menjadi ruh perjuangan dalam mengembangkan pesantren. Dipihak lain, bisa merubah dan mengembangkan unsur aksidensi. Kata aksidensi dimaksudkan sebagai ciri sesuatu yang tidak hakiki, sementara, dan tidak melekat. Aksidensi sering dilawankan dengan esensi dan substansi. Dalam pengembangan pesantren dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang berubah dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan merupakan unsur tambahan sebagai pelengkap unsur esensial.

Pendidikan pesantren yang di dalamnya termasuk materi atau kurikulum, metodologi pembelajaran, serta unsur-unsur manajemen, bisa dikembangkan dan dirubah sesuai kebutuhan, dengan catatan langkah itu tidak keluar dari unsur-unsur esensial yang disepakati oleh para pendiri, sehingga kualitas *out put* dapat dipertahankan.

Kedua, diupayakan mengembangkan model-model pembelajaran yang dapat membantu pembinaan akhlak, membangun kecerdasan dan menumbuhkan kreativitas serta dapat mengembangkan demokratisasi yang santun. Cara ini sesungguhnya sudah dikembangkan oleh para pendahulu dalam mendidik santri, kelebihanannya pendekatan yang diambil didasarkan pada segala sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat dengan memadukan antara aspek teoritis dan praktis.

Ketiga, Agar terjadi kesinambungan pendidikan moral di pesantren, keluarga dan di masyarakat, maka perlu menetapkan pelaksanaan pendidikan agama di rumah maupun di masyarakat. Merujuk pada ketentuan agama bahwa, pendidikan akhlak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, melainkan yang lebih utama adalah orang tua dan masyarakat. Inti pendidikan agama adalah akhlak yang bertumpu pada keimanan kepada Tuhan dan keadilan sosial. Oleh karena itu,

perlu kerja sama yang sungguh-sungguh antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, agar ditemukan strategi yang sinergis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan pesantren dikenal memiliki pilar-pilar fungsi, seperti fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi dakwah. Semua fungsi tersebut menyatu dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pendidikan pesantren. Oleh karenanya, pesantren menjadi lembaga pendidikan alternatif oleh sebagian masyarakat yang menghendaki putra-putrinya mampu menguasai ilmu-ilmu untuk kepentingan *duniawi* dan *ukhrawi*. Keberhasilan pendidikan pesantren seperti itu mengedepankan sistem manajemen yang menekankan adanya saling memberi manfaat, kerjasama timbal balik antara warga pesantren dan masyarakat.

Perencanaan dan koordinasi dirumuskan atas dasar kompetensi sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan mengembangkan kerjasama dalam mengisi peran sosial menjadi ukuran keberhasilan pendidikan pesantren. Demikian juga kepemimpinan, dan pengawasan lebih banyak menunjukkan sikap keteladanan yang baik (*uswah khasanah*) dalam bertindak melalui peran sebagai perintis (*pathfinding*) kebutuhan dan kegiatan, penyelaras (*aligning*) unsur-unsur di pesantren, pemberdaya (*empowering*) potensi santri dan warga, serta panutan (*modeling*) dalam berperilaku.

Banyak hal yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan pesantren, baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal. Materi atau kurikulum berikut metodologinya yang belum menunjukkan integrasi keilmuan umum dan agama menjadikan pesantren kadang mengalami keterlambatan dalam mengakses segala hal yang baru, sehingga mengurangi kebermaknaan fungsi sosial pesantren di mata masyarakat. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dirasa sangat mengganggu dalam membentuk karakter dan moralitas santri, sehingga membutuhkan bentuk kesepahaman dalam mengendalikannya antara pesantren, orang tua, dan masyarakat.

Untuk menekan berkembangnya berbagai kendala seperti itu, ada baiknya diambil langkah-langkah antara lain dengan menyepakati unsur-unsur pesantren manakah yang tidak bisa diubah dari bentuk dasarnya (*esensial*), serta mana yang masih dapat diubah dan dikembangkan (*aksidensial*). Semua itu untuk menjaga kesinambungan kualitas *out put* pesantren. Selain itu, perlu ada komunikasi antar semua lembaga di masyarakat keluarga, masyarakat, dan pesantren dalam mewujudkan pranata sosial yang dapat menjaga dan mengendalikan perilaku santri.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia telah dikaruniai sekian banyak potensi, seperti daya pikir, daya cipta, bahasa dan komunikasi, yang tercakup dalam kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) atau kecerdasan agama (RQ). Potensi tersebut belum terbentuk, dan agama Islam mengatakan, bahwa semua masih dalam keadaan *fitrah* yang berarti suci. Ada yang mengartikan bahwa kesuciannya itu berarti dalam kondisi Islam, namun yang pasti anak belum mempunyai kesadaran beragama, tetapi telah memiliki potensi kejiwaan dan dasar-dasar kehidupan bertuhan.

Dalam diri anak terdapat dorongan alamiah yang tidak hanya sekedar untuk makan, minum, berpakaian, dan bersenang-senang, tetapi ada dorongan lain yang lebih mendasar, yaitu menemukan risalah ketuhanan. Jika diperdalam lagi, ada dorongan alamiah untuk mencari Tuhan, tegasnya kecenderungan untuk beragama. Baik potensi beragama maupun potensi lain merupakan potensi kemampuan (*inherent component of ability*) yang memiliki karakter berbeda-beda pada diri anak sehingga menjadikan keunikan (Conny R., 2002). Aktualisasi kemampuan terjadi karena ada interaksi dinamis antara keunikan individu dengan pengaruh lingkungan sebagai akibat berfungsinya otak anak. Jika terdapat keserasian proses pendidikan dengan karakter usia anak yang berujung pada berfungsinya otak anak (belahan otak kiri dan kanan), akan dapat diperoleh hasil pembelajaran yang optimal dalam menumbuhkan berbagai macam potensi.

Permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasan orang tua, guru, dan masyarakat dalam memahami potensi luar biasa yang dimiliki anak-anak pada usia dini (0-5 tahun), sehingga terjadi salah asuh yang mengakibatkan potensi anak tidak berkembang. Kesalahan dalam memberdayakan potensi anak berdampak sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan kehidupan anak untuk meraih prestasi di kemudian hari. Kegagalan dalam mempersiapkan pendidikan anak pada usia dini berarti kegagalan mengantarkan anak untuk mendapatkan berbagai peluang hidup, akibat terbatasnya potensi yang dapat tergali dari dalam dirinya sejak usia dini.

Faktor lain yang ikut menjadikan terhambatnya penyelenggaraan pendidikan usia dini adalah perhatian pemerintah, masyarakat dan instansi lain yang masih relatif rendah. Menurut data tahun 2001, dari 26,1 juta anak yang ada di Indonesia baru 7,1 juta anak (sekitar 28%) telah mendapatkan pendidikan. Demikian juga faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terhambatnya pendidikan anak usia dini. Rendahnya pendapatan dan naiknya harga kebutuhan pokok, mengharuskan kaum ibu ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan perhatian dan pendidikan terhadap anak menjadi berkurang bahkan terbelengkalai.

Respon Agama

Islam melihat pendidikan anak usia dini menjadi bagian kewajiban orang tua sebagai penanggung jawab untuk mempersiapkan anak agar di kemudian hari menjadi generasi yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*, (An-Nisa':9). Ayat ini dengan tegas mengingatkan agar tidak menjadikan anak-anak dalam kondisi lemah. Kata lemah ditafsirkan merujuk pada kesehatan jasmani, kecerdasan intelektual, sikap dan mental yang berkualitas rendah, sehingga mengkhawatirkan peningkatan kesejahteraan mereka dan pada akhirnya mempengaruhi keimanan.

Meskipun tidak secara jelas disebutkan, namun untuk menjadikan anak-anak agar tidak lemah membutuhkan bimbingan dan pendidikan yang sepadan dengan sifat dan karakter usia pertumbuhan. Jika faktor ini tidak diperhatikan, bisa jadi proses pendidikan tidak membawa hasil, bahkan keberadaan anak membawa petaka bagi keluarga. Padahal di ayat lain ada perintah tegas agar memelihara keluarga dari perbuatan yang terhindar api neraka (*At-Tahrim:6*). Secara metodologis, al-Qur'an melihat pentingnya rumusan strategi dalam membimbing dan mendidik anak melalui tahapan-tahapan yang sesuai karakter usia maupun tingkat pertumbuhan.

Mengikuti pandangan yang dikemukakan J. Piaget dalam Teori Perkembangan Kognitif (Syamsu Y, 2000), bahwa setiap tahapan usia anak memiliki spesifikasi gerak. Pada usia 0-2 tahun misalnya, yang dikenal dengan periode *Sensorimotor*, anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau obyek (benda). Formula gerak baru membentuk reflek-reflek sederhana, seperti menggenggam atau mengisap. Usia 2-6 tahun (*periode Praoperasional*), anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasi dunia lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan obyek, peristiwa, atau kegiatan tingkah laku yang tampak. Begitu seterusnya usia 6-11 tahun hingga 11 tahun ke atas menginjak usia dewasa dengan karakter perilaku khususnya.

Perlu dipikirkan adalah mempersiapkan anak melalui berbagai macam gerak dan bimbingan agar pada saatnya nanti anak siap menjadi orang beragama. Disinilah pentingnya merumuskan berbagai model pendidikan anak usia dini oleh orang tua dan lembaga pendidikan di luar keluarga dengan bernuansa agama. Tujuannya membangkitkan potensi anak agar sejauh mungkin berkembang secara optimal selaras dengan tata nilai yang ada (agama). Pembiasaan ucapan-ucapan yang bernada tauhid seperti disebutkan dalam QS. Ibrahim ayat (27) sebagai *qaul tsabit* (kata-kata yang teguh), berpengaruh besar dalam memperkuat fondasi keimanan, terjauhkan dari pengaruh kekafiran dan syirik.

Pola pendidikan seperti yang dilakukan Luqman dalam memberi nasehat kepada anaknya yang diurai dalam QS. Luqman ayat (12-19), tidak diartikan sebagai proses indoktrinasi yang memaksakan nilai-nilai keagamaan ke dalam diri anak, akan tetapi dijadikan strategi bagaimana menyusun pola didik, agar anak pada saatnya nanti memiliki kesiapan dan kesadaran diri (*self awareness*) dapat memenuhi anjuran. Dari ayat yang memuat kisah nasehat Luqman tersebut, setidaknya ada 8 sikap yang diharapkan dapat tertanam dalam diri anak antara lain: (1) menjadi anak yang pandai bersyukur kepada Allah Swt.; (2) tidak mempersekutukan Allah, karena hal itu sebuah kedhaliman besar; (3) berbuat baik kepada orang tua yang telah mengandung, mendidik, dan membesarkan; (4) mengikuti jalan hidup orang-orang yang berada di jalan Allah Swt.; (5) berbuat kebaikan meskipun relatif kecil; (6) mendirikan salat dan mengajak orang lain melakukan; (7) tidak menyepelekan manusia serta bersikap angkuh; dan (8) sederhana dalam hidup dan senantiasa bersikap rendah diri.

Uraian sikap yang diharapkan dapat dilakukan anak, membutuhkan strategi mampu membangkitkan semua bagian-bagian yang ada dalam diri manusia melalui sistem pendidikan bersifat menyeluruh (*holistic education*). Atas dasar itu memahami karakteristik anak menjadi sebuah keniscayaan, agar lebih mudah menggali berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Dalam hal membangkitkan potensi beragama memang ada kesulitan seperti diakui oleh Rumke (Arifin, 1976), mengingat agama memiliki sifat *idealistic abstract*, artinya terdapat pengertian berada dalam idea yang tidak boleh dan tidak dapat diwujudkan melalui gambar ataupun bentuk-bentuk alamiah lainnya. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan tersendiri agar secara bertahap keimanan pada anak tumbuh dan berkembang menjadi mantap.

Merancang Model Pembelajaran

Seberapa sulit pembelajaran pada anak usia dini, tetap harus dilakukan. Tugas utama pembelajaran adalah mengungkap seluruh potensi yang dimiliki anak, agar menjadi manusia seutuhnya. Dibutuhkan pendekatan atau model pembelajaran yang tidak saja menekankan satu aspek seperti menghafalkan informasi atau hanya menerima pengetahuan secara konvensional, tetapi model pembelajaran yang dapat merangsang terbentuknya struktur kognitif dan aspek motorik anak secara alamiah sebagaimana teori J. Peaget yang memperhatikan perkembangan kedua unsur tersebut menurut pertumbuhan usia anak.

Sasaran pembelajaran anak, utamanya mengembangkan potensi otak kiri dan kanan secara seimbang dan terkontrol. Belahan otak kiri memiliki ciri dan fungsi untuk berpikir logis, teratur, dan linier. Sedangkan belahan otak kanan terutama dikembangkan untuk mampu berpikir holistik, imajinatif dan kreatif. Jika dalam pembelajaran keduanya tidak mendapat porsi seimbang, misalnya memerankan hanya pada belahan otak kiri dengan banyak menghafal, sedangkan otak kanan yang sebenarnya lebih banyak membantu anak dalam bermain

terabaikan, maka menurut penelitian Clark, 1986 (Conny R., 2002) akan berdampak pada anak tumbuh dengan memiliki sikap cenderung bermusuhan (*hostile attitude*) sesama teman atau orang lain.

Oleh karenanya, perlu mempertimbangkan dengan cermat model-model pembelajaran yang akan diberlakukan sebelum mengikut sertakan anak dalam sebuah lembaga atau kelompok pendidikan. Mengingat rasa ketergantungan anak usia dini dalam membentuk karakternya hampir sepenuhnya tergantung dengan perilaku, sikap dan ucapan dari orang lain termasuk dari kedua orang tua. Proses internalisasi dan identifikasi secara tidak disadari akan berlangsung terus menerus sampai ada kemampuan melepas rasa ketergantungan diri dengan orang lain, yakni memasuki usia pubertas.

Untuk memperoleh hasil optimal dalam mengelola pendidikan anak usia dini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan: *pertama*, pendidikan berlangsung dengan pendekatan belajar melalui bermain (*learning through playing*). Dengan merancang pembelajaran yang dilakukan sambil bermain, berarti anak belajar sesuai dengan tuntutan taraf perkembangan. *Kedua*, desain pembelajaran dipersiapkan dengan memperhatikan peta perkembangan fungsi otak kiri dan kanan (*mind mapping*) secara proporsional. Perlakuan secara seimbang antara keduanya berpeluang besar menumbuhkan berbagai macam potensi kecerdasan. *Ketiga*, program pembelajaran dirancang untuk tumbuh dan berkembang potensi anak secara holistik meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. *Keempat*, mengedepankan pelaksanaan pembelajaran berbasis keteladanan (*uswah khasanah*), mengingat semua perilaku pembelajar (guru) hampir pasti menjadi tuntunan perilaku anak.

Selubungan dengan pembelajaran anak usia dini, Al-Ghazali sangat mendukung teknik pembelajaran dengan menggunakan lebih dari satu metode karena mempertimbangkan keanekaragaman anak seperti usia, tabiat anak, daya tangkap dan daya tolaknya, sejalan dengan situasi kepribadian. Proses pembelajaran mendapat perhatian serius dari Al-Ghazali yang berarti keberhasilan pendidikan anak usia dini menurutnya, harus dipersiapkan melalui program yang menggambarkan keseluruhan aspek anak dapat tergarap dengan baik.

Sebagai contoh lembaga pendidikan anak usia dini yang dikembangkan menurut prinsip-prinsip pendidikan menyeluruh (*holistic education*), saat ini sedang dikembangkan di Denpasar Bali. Sistem pendekatan yang diberlakukan Neo-Humanistik, berupaya mengembangkan potensi anak sepenuhnya meliputi potensi fisik, mental, dan spiritual secara sinergis. Beberapa aspek kepribadian manusia yang dikembangkan melalui berbagai metode secara spesifik dan profesional meliputi, badan jasmani, kesadaran sadar, kesadaran bawah sadar, kesadaran kreatif, kesadaran intuitif, dan kesadaran spiritual. Pendidikan dengan pendekatan Neo-Humanistik mendapat respon sangat positif dari masyarakat, mengingat bahasa pengantar dikemas secara menarik dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

Mengakhiri tulisan ini, untuk membantu memberikan inspirasi baru dalam program sosialisasi pendidikan anak usia dini, ada baiknya kita simak puisi karya Dorothy Law Nolte yang diterjemahkan oleh Jalaluddin Rahmat seperti berikut,

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan dirinya
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan

PENDIDIKAN ISLAM MENUJU *INSAN KAMIL*

Sekilas membaca judul di atas, seakan terbawa pada kesan kalimat berbau slogan atau promosi. Meskipun keabsahan sasaran pendidikan di dalam Islam untuk mencapai *Manusia Prima* secara konseptual tidaklah diragukan lagi. Hal ini karena didukung oleh banyak rujukan baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang melegitimasi kebenaran penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Permasalahannya, tidaklah sekedar dukungan dasar hukum tetapi bagaimana menterjemahkan *insan kamil* yang menjadi muara akhir dari penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang. Pada gilirannya kita dapat memberikan penilaian terhadap kekurangan maupun kelebihanannya.

Sebenarnya pendidikan Islam telah dikenal bersamaan Islam lahir seperti yang dikemukakan oleh Robert L. Gullick Jr. "Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar tidak dibantah lagi bahwa Muhammad sungguh telah melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam, suatu revolusi sejati yang memiliki tempo yang tidak tertandingi dan gairah yang menantang, hanya konsep pendidikan yang paling dangkallah yang berani menolak keabsahan meletakkan Muhammad di antara pendidik-pendidik besar sepanjang masa, karena seorang yang mengangkat perilaku manusia adalah seorang pangeran di antara para pendidik." (Jalaluddin Rahmat, 1989)

Kutipan di atas memberikan pemahaman, bahwa Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar yang komplit tentang sistem pendidikan, baik dilihat dari sisi beliau sebagai nabi, pemimpin militer, negarawan maupun sebagai pendidik. Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku adalah menjadi tujuan revolusi yang dibawa Nabi. Sehingga misi yang diembannya senantiasa tertuju pada kepentingan umat.

Modifikasi Pola Lama

Lembaga pendidikan Islam yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan modifikasi sistem pendidikan di lingkungan pesantren pola lama, yakni yang dikenal dengan sistem *halaqoh* (lingkaran) dalam bentuk pengajian *weton* dan *sorogan*.

Ciri pendidikan di atas berlaku pada saat tuntutan pendidikan (*out put*) belum sekompleks sekarang. Keinginan mengutamakan beribadat sebagai pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki merupakan tujuan utama seorang murid.

Penataan sistem pendidikan secara bertahap dibenahi seiring dengan tuntutan keinginan masyarakat untuk maju. Dari pendekatan menghabiskan materi ke pendekatan pencapaian tujuan yakni tercapainya perubahan pola pikir, sikap dan

perilaku, melalui program-program pengajaran yang dibakukan dalam bentuk kurikulum.

Insan Kamil

Perubahan yang terjadi sebagai akibat saling keterkaitan antara tuntutan perkembangan dan keinginan, sebenarnya untuk memperoleh kualitas *out put* pendidikan yang dikehendaki, yakni manusia pada tingkat sempurna (*insan kamil*). Dr. Muhammad Javad Assahlani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya (Jalaluddin Rahmat, 1989). Gambaran tentang manusia sempurna (*insan kamil*) adalah manusia yang sudah mencapai ketinggian iman dan ilmu (Al Mujadalah : 11).

Persoalannya sekarang apakah *kekamilan* dahulu dengan sekarang ini mengalami perubahan. Jawabannya bisa *ya* dan *tidak*. Dari segi muatan material jelas mengalami peningkatan. Sebagai jawaban bahwa suatu lembaga pendidikan adalah sebagai *agent development*. Dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan karena kemampuannya mengadaptasi kebutuhan lingkungan dan mengembangkannya kembali untuk kemajuan lingkungan. Hal inilah dikatakan secara material muatan *insan kamil* mengalami perubahan.

Pada sisi lain, konsep *insan kamil* tidaklah berubah dengan melihat dari terciptanya keseimbangan antara dimensi duniawiah dengan ukhrowiah, sehingga uraian di atas bersifat kondisional dan nilai *kekamilan* seseorang pun terkait pada kondisi tertentu.

Terlepas dari persoalan di atas, secara umum kita dapat memberikan acuan bahwa manusia "*kamil*" sebagai *out put* lembaga pendidikan Islam adalah yang mampu mengaplikasikan dirinya – pola pikir, sikap maupun perilakunya – secara positif terhadap segala bentuk tatanan Islam ke dalam perikehidupan yang sedang berlangsung.

Antara Harapan dan Kenyataan

Setiap lembaga pendidikan Islam senantiasa mengharapkan mutu lulusannya dapat meningkat, sehingga dapat berdaya guna bagi kehidupan masyarakat minimal sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Mampu menyampaikan *risalah Islamiyah* sesuai dengan era perkembangan yang ada. Namun bukan berarti memaksa ajaran Islam untuk sesuai dengan perkembangan. Sebab Islam tidak semata-mata sebagai ajaran yang menyesuaikan atau disesuaikan dengan paksa terhadap segala perubahan peradaban yang ada, tetapi Islam merupakan potensi referensial secara normatif bagi pembinaan manusia yang sholih dan sekaligus juga keukhrowiaan secara seimbang (KH.MA. Sahal Mahfudh, 1993).

Tuntutan keduniawian memberikan isyarat kepada dunia pendidikan untuk dapat melengkapi segala perabot sarana untuk memperoleh out put yang berkualitas, yang pada gilirannya mampu mempersiapkan peringkat "*insan kamil*."

Seharusnya pendidikan Islam menempati ranking pertama dalam segala hal. Hal ini karena adanya dukungan komunitas masyarakat yang berjumlah besar yang nota bene mempunyai kepedulian terhadap kepentingan dan kemajuan Islam, namun kenyataannya menunjukkan lain. Lembaga pendidikan non Islam banyak diserbu oleh siswa-siswa dari kalangan muslim, tetapi lembaga pendidikan Islam kurang diminati oleh orang-orang Islam sendiri, atau katakanlah keberadaannya belum mencapai yang diharapkan.

Hal ini menjadi pelajaran yang cukup besar kepada kita untuk mengembalikan citra maupun opini masyarakat kepada pentingnya pendidikan Islam untuk kaderisasi. Permasalahannya tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi dapat meluas pada hal-hal yang prinsip, yakni pembinaan akidah. Penyelamatan dapat segera dilakukan, bila tidak suatu saat kader-kader Islam justru dibekali dengan perilaku yang non Islami sehingga yang tercipta bukan *insan kamil* tetapi *insan dholim*.

Alternatif Pemecahan

Dunia sekarang berkembang sangat cepat. Proses transformasi sosial berjalan seolah kita tidak mampu mengujarnya bila hanya mengandalkan fasilitas seadanya.

Futurolog terkenal Alfin Tofler menggambarkan, bahwa saat ini merupakan gelombang ketiga yang ditandai dengan era informasi canggih. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain dapat secara cepat kita tangkap melalui pesawat TV melalui parabola. Proses pergeseran budaya berjalan sangat cepat sebagai dampak yang ditimbulkan.

Sebagai upaya untuk menangkal laju pembauran budaya tersebut adalah dengan mempersiapkan kader-kader melalui paket pendidikan Islam lengkap dengan segala sarana yang dibutuhkan.

Setidak-tidaknya memberikan bekal pengetahuan layak yang dapat dijadikan sebagai pelita penggerak ke arah peningkatan wawasan keilmuan sehingga diharapkan mampu mengemas proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi kemasan perilaku yang Islami. Sudah barang tentu upaya tersebut butuh waktu disamping melakukan peningkatan sistem manajemen yang diperlukan serta penyediaan tenaga dan dana yang memadai.

Pada intinya, pola pikir untuk mencapai target *insan kamil* melalui pendidikan Islam semua kembali kepada kita sebagai penyelenggara pendidikan dalam mengelola 3 M (*Man, Money, Material*) yang kita kemas sejajar dengan kebutuhan lingkungan. Dengan harapan dapat tercipta manusia yang mempunyai kemampuan menyeimbangkan kepentingan duniawiah dan ukhrowiah sehingga mampu memperoleh *Sa'adat al- Daraini*."

PERILAKU SOLITER DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Masih teringat permasalahan berkaitan hasil Ujian Nasional akhir tahun pelajaran 2004/2005 lalu, beberapa madrasah mengalami kekecewaan berat sehubungan dengan banyaknya siswa yang tidak lulus ujian. Pada jenjang Aliyah jurusan IPS mengalami nasib lebih buruk ketimbang jurusan lain (IPA/Bahasa). Meskipun kondisi seperti ini dialami juga pada sekolah umum (SMA), bahkan di Yogyakarta yang notabene kota pelajar terdapat 13 SMA yang persentase kelulusan muridnya nol persen (baca Suara Merdeka: Selasa 23 Agustus 2005 hal. 6), ketidakberhasilan ini cukup membebani terlebih pada Madrasah Aliyah yang siswanya mengalami kegagalan mencapai 50 % lebih. Dengan hasil tersebut, pengelola madrasah dituntut lebih giat lagi untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian tahun depan (2006), mengingat beban mata pelajaran di Madrasah lebih besar dibanding dengan Sekolah Umum, yang juga membutuhkan energi untuk dapat mengawal lulusannya memahami ilmu-ilmu keagamaan sebagai ciri khas kelembagaan yang harus tetap dipertahankan.

Hasil maksimal yang belum dapat dicapai, perlu ditelusuri melalui analisis komponen pembelajaran. Menurut pengamatan, ketidakberhasilan itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, Pelabelan sepihak oleh guru yang mengatakan bahwa siswa –utamanya pada jurusan IPS- memiliki kecenderungan malas belajar, tidak serius, nakal, dan banyak tingkah yang negatif, meskipun sebenarnya tidak semua berperilaku demikian; *kedua*, Guru dirasa belum menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter mata pelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai desain keinginan guru bukan berorientasi pada pemberdayaan potensi siswa yang mengacu pada karakter materi untuk mencapai keberhasilan kompetensi tertentu.

Permasalahan menjadi menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan keberadaan kita sebagai pendidik yang memiliki kepentingan menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dua alasan tersebut bukan saja menghambat belajar, tapi akan menghancurkan potensi dan prestasi belajar karena dampak yang ditimbulkan. Dampak yang muncul sebagai akibat dari alasan pertama, siswa akan berperilaku benar-benar tidak serius dalam belajar, dan cenderung melawan arus. Dari pihak guru berasumsi, meskipun pembelajaran dijalankan serius tidak akan membawa hasil memuaskan, sehingga proses pembelajaran dijalankan tidak secara maksimal.

Pada alasan kedua, pembelajaran akan tidak menghasilkan keterampilan bermakna. Jika dihubungkan dengan KBK, tidak mendukung pada kecakapan hidup (*life skill*), karena tidak membentuk kompetensi belajar, bahkan *standard model* -perilaku yang merupakan produk dari proses pembelajaran berdasarkan kajian pokok bahasan tertentu- belum terbangun. Jika hal ini terjadi, siswa hanya akan dihadapkan pada penumpukan pemahaman konsep-konsep kognitif, sementara

yang dipahami guru hal seperti itu dianggap sudah termasuk pada penguasaan keterampilan (*skill*).

Jika dikaji lebih lanjut, pokok permasalahan berada pada keterbatasan guru dalam hal: *pertama*, keterbatasan mencari informasi identitas potensi peserta didik baik secara individu maupun kelompok yang berakibat pada penyamarataan sikap mengambil keputusan dalam menentukan desain pembelajaran yang hanya berdasarkan informasi bukan merujuk pada data yang valid. *Kedua*, keterbatasan penguasaan guru baik terhadap metodologi maupun materi pembelajaran yang berakibat rendahnya penyerapan materi atau bahkan tidak ada sama sekali, karena tidak ditemukan konsep-konsep esensial dari mata pelajaran (karakter materi) yang dapat membentuk seperangkat kompetensi. Meskipun sebenarnya sudah ada forum guru yang setiap kali pertemuan membicarakan kegiatan pembelajaran mereka, namun yang menjadi bahasan terkadang masih terbatas pada bagaimana membuat keseragaman pola pembelajaran dan pengembangan materi, bukan bagaimana menumbuhkan keberanian untuk mendesain teknik pembelajaran yang unik mengacu pada karakter peserta didik dan esensi materi serta *setting* sosial budaya lingkungan yang pada kenyataannya berbeda satu lokasi dengan lainnya.

Keberanian untuk mengembangkan materi pembelajaran dan metodologi secara teknis sampai di tingkat contoh yang kongkrit dengan berbagai macam analogi yang belum pernah tergalinya sebelumnya oleh guru itu sendiri ataupun orang lain dengan maksud menemukan unggulan hasil pembelajaran merupakan perwujudan dari perilaku *soliter*. Meskipun terbatas masih sendirian dalam mengaplikasikan suatu teknik pembelajaran yang diketemukan tidak menjadi soal, asalkan mendukung pembentukan kompetensi unggulan. Dengan demikian untuk meraih keberhasilan dalam proses pembelajaran diperlukan perilaku soliter dengan tujuan untuk: (1) Meningkatkan semangat dalam menemukan kesesuaian metode, tujuan dan karakter materi pembelajaran sehingga diperoleh validitas hasil; (2) Meningkatkan peran peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga memperoleh kemudahan memahami dan mengembangkan materi secara maksimal; (3) Memudahkan terbentuknya kompetensi sesuai standar yang diinginkan berdasarkan pokok bahasan yang dikaji.

Memanfaatkan Potensi Karakter Berpikir Otak

Pembelajaran –asal kata belajar- terdapat dua rumusan utama: *pertama*, upaya memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. *Kedua*, proses memperoleh respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Jadi proses pembelajaran dapat diartikan sebagai tahapan upaya memperoleh perubahan perilaku baik kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi pada peserta didik yang bersifat positif.

Perubahan hasil belajar dalam pandangan teori-teori behavioristik: *Connectionism*, *Classical Conditioning*, *Operant Conditioning*, *Contiguous Conditioning*,

maupun *Social Learning Theory*, semuanya melihat hanya pada aspek perilaku jasmaniah semata. Belajar merupakan hasil refleksi jasmani terhadap stimulus yang ada dan tidak ada hubungannya dengan bakat ataupun kecerdasan bawaan. Berbeda dengan pandangan teori kognitif (*cognitive theory*), menurut teori ini belajar merupakan peristiwa mental bukan semata-mata perilaku behavioral. Melalui faktor bawaan (bakat dan kemampuan) akan memberikan peluang peserta didik melakukan respon terhadap stimulus, sehingga belajar tidak bersifat otomatis sebab tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan dan yang lainnya.

Kedua teori besar tersebut berupaya membangun landasan proses belajar dengan membuat keserasian konsep untuk mengantarkan hasil belajar mencapai optimal. Namun, dalam prakteknya harapan itu sulit dicapai, karena keduanya tidak memberikan resep bagaimana cara belajar dengan memanfaatkan kemampuan berpikir efektif. Otak sebagai sarana berpikir belum dimanfaatkan secara harmonis antara otak kiri dan otak kanan, akibatnya optimalisasi belajar menjadi terhambat. Otak kiri berpikir dengan cara urut, bagian per bagian, dan logis, sementara otak kanan melengkapinya dengan cara berpikir acak, holistik, dan kreatif (Lihat Agus Nggermanto, 2003 dalam *Quantum Quotient Kecerdasan Quantum*).

Jika kedua bagian otak tersebut dimanfaatkan secara baik akan diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam kenyataannya, proses belajar sering hanya memanfaatkan separo kemampuan peserta didik, yaitu otak kiri yang menuntut berpikir urut dan logis saja, dengan lebih banyak mengkaji tentang apa (*what*) bukan bagaimana (*how*). Untuk pengembangan belajar perlu menggunakan separo kemampuan lainnya dari otak sebelah kanan yang membutuhkan keberanian berpikir secara acak, menyeluruh dan kreatif. Disinilah perlunya keberanian secara soliter dalam pembelajaran sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan beberapa kasus ataupun contoh-contoh kongkrit sesuai karakter disiplin ilmu, karena perumusan contoh-contoh kongkrit seperti itu secara metodologis belum dapat dibakukan.

Salah satu media untuk memahami atau membuka pola berfikir seperti itu dalam proses pembelajaran atau bahkan kegiatan di luar konteks pembelajaran adalah teori pemetaan pikiran (*mind mapping theory*). Alat ini merupakan salah satu teknik untuk mengembangkan pendekatan berpikir yang lebih kreatif dan inovatif, melalui kemampuannya membuka jalan ke seluruh otak yang mendorong munculnya gagasan-gagasan cemerlang (Lihat Tony Buzan dalam Hernowo 2005). Dengan alat tersebut juga membantu untuk mengait-ngaitkan informasi dengan dirinya, sehingga menjadikan diri kreatif dan menghasilkan mekanisme *brainstorming* yang efektif. Hasil akhir dari pemanfaatan teori *mind mapping* diharapkan adalah sebuah unggulan. Dikatakan unggulan apabila diperoleh keunikan yang lebih dari hasil penilaian proses pembelajaran, sehingga layak dihargai dan dirayakan bersama.

Perubahan Paradigma Pembelajaran

Perilaku *soliter* akan mengantarkan hasil belajar maksimal. Implementasinya membutuhkan pemahaman tentang perubahan strategi pembelajaran dari paradigma *teaching* menjadi *learning*, dengan merujuk pada indikator *learning how to know*, *learning how to do*, *learning how to be* dan *learning how to live together*. Jika indikator ini terpenuhi, maka akan dapat menjawab pertanyaan *how to becoming learner* (Andrias Harefa, 2000). Untuk keberhasilan pelaksanaan konsep ini perlu diciptakan iklim pembelajaran yang mengikuti perkembangan berpola: (1) dari belajar yang terfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik; (2) dari citra hubungan pendidik-peserta didik yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan; dan (3) dari citra hubungan antar komponen pendidikan yang terisolasi ke penampilan harmonisasi dalam tim kerja.

Tahapan tersebut menjadi pijakan awal strategi pembelajaran yang dirumuskan oleh pendidik sebelum secara aktif proses pembelajaran dilakukan. Menciptakan tampilan seperti itu tanpa ada kesiapan perencanaan yang diikuti dengan latihan dan pembiasaan terasa agak menyulitkan. Dibutuhkan apresiasi terhadap konsep-konsep pembelajaran dengan maksud akan dapat membantu dalam merumuskan teknik-teknik interaksi edukatif yang mampu menumbuhkan motivasi belajar, sehingga penguasaan materi dapat ditingkatkan. Kemampuan pendidik –sebagai wujud berperilaku *soliter*- ditantang untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, mempunyai daya tarik serta lebih demokratis yang berpeluang besar meningkatkan prestasi belajar.

Konsep pembelajaran paradigma *Quantum Teaching*, merupakan salah satu alternatif pendekatan menuju terwujudnya peningkatan kualitas hasil belajar. Secara teknis strategi model pembelajaran *Quantum Teaching* meliputi: (1) Segalanya berbicara, segalanya bertujuan, peran pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan; (2) Membawa dunia mereka ke dunia kita dan mengantarkan dunia kita ke dunia mereka; (3) Menggunakan kerangka pembelajaran yang dikenal sebagai TANDUR, yaitu Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan (Lihat Bobbi DePorter, 2005).

Jika desain pembelajaran telah ditemukan sesuai dengan karakter materi pembelajaran dan pada kenyataannya dapat menaikkan prestasi belajar, itu berarti perilaku *soliter* pendidik yang senantiasa melakukan pengembaraan untuk menemukan teknik-teknik baru dalam proses pembelajaran menjadi sebuah keharusan agar kompetensi belajar dapat terwujud dengan kualitas hasil sesuai yang diharapkan.

Pada akhirnya, untuk memenuhi harapan seperti itu pendidik perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) menguasai karakter disiplin ilmu; (2) memahami pola berpikir peserta didik; (3) menguasai pendekatan dan metode pembelajaran *partisipatory*; (4) menguasai teknik-teknik pengembangan materi; dan (5) menguasai teknik-teknik uji pembelajaran. Jika persyaratan ini terpenuhi diikuti kemauan kuat mengujicobakan, beban berat menghadapi Ujian Nasional 2006 dapat berkurang.

PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mendengar istilah pesantren, pemahaman masyarakat awam tertuju pada sekelompok orang yang berpakaian sangat sederhana dengan mengenakan sarung, mengenakan peci, lekat dengan atribut nilai-nilai tradisional. Lingkungan agak kurang rapi menjadi kesan bagi orang-orang yang berada di luar kehidupan pesantren. Gambaran kehidupan pesantren seperti itu tidak terlalu salah, namun bukan berarti pesantren tidak mengenal hidup tertib dan lingkungan sehat. Keinginan kuat untuk menjadi kader-kader ulama atau da'i yang mampu menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam mengalahkan berbagai kegiatan dan kepentingan di luar kajian ilmu-ilmu keagamaan, sehingga diperoleh kesan pesantren hanya mementingkan kehidupan yang bernuansa akhirat dan kurang menaruh perhatian terhadap kepentingan duniawi.

Pesantren merupakan cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia, dibangun atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan keagamaan, yang prosesnya diawali dari sebuah pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kyai. Itu sebabnya orientasi pengembangan pesantren mengacu pada sendi-sendi dasar kehidupan yang berkembang di masyarakat. Penyusunan program mulai dari kurikulum dan kegiatan tambahan lainnya dipilih dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, sehingga antara pesantren dengan masyarakat menjadi komunitas kelompok sosial yang memiliki hubungan fungsional. Masyarakat butuh produk hukum-hukum keagamaan hasil kajian pesantren sebagai pedoman dalam kegiatan keseharian, sebaliknya pesantren butuh masyarakat sebagai wahana kajian dan pembelajaran untuk melatih kedewasaan para santri sebagai bekal memasuki kehidupan riil dimasyarakat.

Memasuki perkembangan era globalisasi pesantren dihadapkan pada beberapa perubahan sosial-masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perkembangan ini, pesantren harus mampu memberikan respon yang positif. Disamping tetap mengembangkan cirikhasnya, lewat diskursus intelektual dengan standarisasi kitab kuning atau khazanah intelektual lainnya, pesantren juga mempunyai agenda membentuk perilaku santri agar mampu berperan dalam percaturan global. Disatu sisi pesantren memposisikan diri sebagai bengkel moral-spiritual dan melembagakan dinamika pemikiran Islam, dan di sisi lain ia juga dituntut untuk memberikan kontribusi yang strategis bagi proses membangun masyarakat.

Permasalahannya adalah, bagaimana proses membangun masyarakat itu dapat diperankan pesantren melalui beberapa ranah kehidupan yang di dalamnya muncul pemberdayaan. Respon pesantren terhadap permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai hasil adaptasi dengan arus modernisasi, sehingga menjadi potensi besar dalam membawa perubahan sosial. Hal ini mengingat pesantren itu sendiri menurut Martin van Bruinessen memiliki potensi penting bagi terwujudnya proses pembentukan masyarakat sipil (*civil society*)

sebagai pilar demokratisasi di Indonesia. Menurutnya, walaupun pesantren identik dengan tradisional, namun komunitas pesantren dapat menerima arus modernisasi, sehingga pesantren memiliki kekuatan yang diperhitungkan, berwibawa dan dipercaya masyarakat, meskipun bukan merupakan ujung tombak satu-satunya. Oleh karena itu, dalam kondisi sosial yang mengedepankan wacana kemodernan, pesantren yang tetap konsisten dengan ciri tradisionalitasnya mempunyai ruang garapan yang cukup luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya kepada kaum marjinal dan terpinggirkan.

Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren secara terminologi diartikan sebagai “tempat belajar para santri”, biasanya dikaitkan dengan kata pondok yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Ada yang mengartikan dari kata arab *funduk* berarti asrama. Dari pemaknaan podok pesantren tersebut secara luas dapat diartikan sebagai bangunan baik berupa rumah, asrama sebagai tempat tinggal para santri dalam waktu beberapa lama dengan tujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kedekatannya dengan guru (kyai) yang tinggal bersama dalam kesatuan lingkungan yang berada di tengah masyarakat menjadikan pesantren tidak pernah sepi dari kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya bisa mewarnai bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial-budaya, bahkan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dimaknai sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia. Menurut Loekman Soetrisno, paling tidak memiliki tiga sasaran, yaitu: (1) menitikberatkan pada peningkatan kualitas keterampilan, (2) memperkuat mental ideologis, dan (3) meningkatnya budaya baru. Meningkatnya keterampilan serta kuatnya ideologi namun tidak disertai pembaharuan sikap dan pola pikir yang melahirkan budaya baru, menurut Soetrisno belum akan memiliki makna. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil, jika dimasyarakat tumbuh dan berkembang proses perubahan struktur sosial. Perubahan tersebut dicirikan dengan naiknya kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk mewujudkan harapan seperti itu, pesantren harus mampu mencermati kebutuhan masyarakat, agar pesantren dapat merumuskan program kemitraan dengan melibatkan masyarakat secara efektif, sehingga memperoleh hasil sesuai harapan.

Keterlibatan pesantren seperti itu memiliki arti penting dalam proses pendidikan sosial ke arah peningkatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lingkungan pesantren justru mengharapkan keterlibatan itu, agar makna kehadirannya dalam masyarakat lebih terasa lagi. Kondisi ini dapat kita simak keberadaan pesantren, baik yang tinggal di daerah pertanian pedesaan, nelayan, perkotaan maupun lainnya, nampak jelas interaksi pesantren dengan masyarakatnya sangat kompleks. Relasi sosial yang lebih luas dari peran kyai dan santrinya

mengharuskan penerapan wawasan global serta menuntut pesantren lebih aktif agar tidak tertinggal dari tuntutan perkembangan dalam mendampingi masyarakat.

Dalam program pemberdayaan masyarakat diklasifikasikan dalam dua bagian. *Pertama*, program masyarakat yang tumbuh dan dikembangkan dari inisiatif pihak pesantren sendiri. *Kedua*, pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas kerja sama dengan pihak luar. Target dari dua macam program pemberdayaan itu agar terjadi perubahan baik ditingkat individu maupun kelompok. Perubahan individu dimaksudkan akan mempengaruhi tatanan sosial (kelompok atau organisasi). Artinya, individu diubah tidak semata-mata agar menguntungkan individu itu sendiri melainkan untuk tujuan yang lebih besar, seperti keuntungan kelompok masyarakat. Sebab, bila individu yang diubah mereka akan memengaruhi hasrat untuk berubah dalam kesatuan masyarakat yang lebih luas. Demikian juga, bila kelompok sosial yang menjadi target, diasumsikan perubahan suasana akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai, sikap dan perilaku individu akan diubah melalui perubahan struktur sosial atau melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berfikir dan bertindak.

Dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pendekatan partisipasi, swadaya dan membangun demokratisasi, yang pada akhirnya membentuk penguatan masyarakat sipil yang berwawasan luas yang dikenal sebagai masyarakat madani (*civil society*). Perkembangan selanjutnya kegiatan seperti itu akan menemukan bentuk motivasinya dalam membangun pola kerja sama secara lebih intensif. Tidak mengherankan jika para kyai atau pimpinan pesantren selain menguasai ilmu-ilmu agama, juga senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan umum.

Berbagai upaya peningkatan peran pesantren, pendekatan serta materi kegiatan kemasyarakatannya semakin disesuaikan dengan perkembangan dan permasalahan yang muncul. Pesantren Maslakul Huda Kajen, Margoyoso, Pati misalnya, membentuk kelompok-kelompok tani di desa sekitar untuk dilatih cara menanam kacang yang baik bekerja sama dengan PT. Garuda Food dengan bagi hasil yang saling menguntungkan. Pesantren Pabelan, Muntilan, Magelang memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin sekitar pondok pesantren. Demikian halnya pesantren Gontor, Ponorogo, melalui kemampuan mereka mengumpulkan zakat, kemudian menyalurkan kepada masyarakat miskin di desa sekitar pesantren untuk meningkatkan perekonomian.

Salah satu ciri pemberdayaan dengan pendekatan partisipasi dan swadaya, kegiatan tidak semata mengejar pertumbuhan tetapi merujuk pada pendayagunaan keterampilan sumber daya manusia dan material yang ada serta mengoptimalkan pelibatan peran serta semua anggota kelompok dalam seluruh proses kegiatan pengembangan masyarakat, sehingga akan terbentuk sikap kemandirian sebagai salah satu ciri dari masyarakat madani

Agenda selanjutnya membangun proses demokratisasi yang berlangsung di masyarakat, dapat tercermin dalam bentuk partisipasi sebagai tema utama dalam

setiap kegiatan. Upaya penciptaan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah mereka, mampu merumuskan tujuan pengembangan mereka sendiri, menjadi pelaksana, melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kegiatan mereka. Dalam menyikapi persoalan dibangun sikap agar dapat memikirkan bagaimana agar segenap proses pengambilan keputusan benar-benar berada di tangan masyarakat. Dalam hal ini pesantren berperan sebagai fasilitator yang memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pengetahuan dan cakrawala pemikiran masyarakat, sehingga mampu memenuhi tuntutan zaman dalam rangka pemecahan persoalan kemasyarakatan.

Seberapa jauh masyarakat dapat mengembangkan sikap demokratisasi akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan pesantren di masyarakat, dengan mengembangkan fungsi-fungsi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi tersebut meliputi: (1) demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*); (2) demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain (*as respect for dignity of person*); (3) demokrasi sebagai persamaan (*equality*); dan (4) demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*) dengan kelompok lain.

Tidak adanya batasan formal yang mengikat dalam pendidikan di pesantren baik umur peserta didik, maupun unsur waktu, menjadikan pesantren sebagai salah satu alternatif lembaga yang memiliki komitmen tinggi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai “Universitas Rakyat” (*folk’s university*), yang berlangsung seumur hidup dengan minim jaringan birokrasi yang formalistik. Target keberhasilan lebih pada penguasaan ilmu bukan sebatas selemba ijazah sebagai simbol kelulusan akhir pendidikan dari peserta didik. Penguasaan keilmuan teruji langsung oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan pendampingan yang pernah dilaksanakan selama pendidikan di pesantren. Itu sebabnya, pesantren dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan teknologi, riset ilmiah, bengkel kerja, pusat kebudayaan, laboratorium untuk eksperimen-eksperimen baru, pengajian agama, dan lain-lain.

Faktor-Faktor Kendala

Keunggulan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat telah diterima hampir semua kalangan, karena kemadiriannya dalam mengelola berbagai kebutuhan untuk kepentingan santri tidak bergantung kepada pihak lain. Namun dalam perjalanan pengembangan pesantren, banyak beberapa kendala yang dapat datang sewaktu-waktu antara lain: *pertama*, kesinambungan kepemimpinan pesantren. Maju mundurnya suatu pesantren tergantung pada kyai pengasuh dan pengganti selanjutnya, karena pola penggantian pengasuh berlangsung secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab alami, misalnya meninggalnya seorang kyai pengasuh pesantren.

Kedua, kemampuan kyai pengasuh sangat mempengaruhi perkembangan pesantren. Proses penggantian kepemimpinan yang hanya menjadi hak mereka

yang memiliki jalur keturunan (keluarga) tanpa melihat latar belakang budaya, potensi keilmuan, pendidikan maupun wawasan akan menjadikan pesantren mengalami ketertinggalan, mengingat kepemimpinan masih bersifat sentralistik.

Ketiga, Karakteristik para santri, keragaman santri akan berpengaruh pada pola pembelajaran dan target respon mereka terhadap perubahan sosial sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi, seperti perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya santri mengharuskan penyesuaian materi kajian yang berdampak pada akselerasi pembentukan kedewasaan mentalitas para santri. Berbeda jika santri terdiri dari mahasiswa, kematangan pola pikir akan memperlancar tingkat perubahan sikap dan perilaku yang pada akhirnya mampu melakukan adaptasi dengan masyarakat.

Keempat, perkembangan sistem pendidikan di tanah air, termasuk kebijakan pemerintah dalam menyikapi perkembangan pendidikan nasional, seperti keharusan menggunakan ijazah formal dalam seleksi penerimaan peserta didik di jenjang lanjutan. Sementara formalisasi hasil lulusan pendidikan di pesantren tidak diwujudkan dalam bentuk ijazah, namun kualitas potensi santri itu sendiri yang menjadi acuan.

Melihat beberapa kendala yang ada, untuk mempertahankan kelestarian program pemberdayaan masyarakat agar keberadaan pesantren memiliki jaringan kemitraan dengan masyarakat, maka pesantren perlu melakukan terobosan antara lain melaksanakan program pendidikan dan latihan kepemimpinan sebagai ajang kaderisasi untuk menghindari krisis kepemimpinan. Penekanan materi dalam pelatihan selain dimasukkan materi manajemen dan administrasi, perlu juga dimasukkan cara-cara yang efektif untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan dengan paradigam baru. Kajian materi agama dengan pendekatan kontekstualisasi lintas disiplin ilmu guna memperluas wawasan santri, sehingga peluang penemuan hal-hal baru terus dapat ditumbuh-kembangkan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar kepesantrenan.

BAB VII

GENDER DAN KONSEP KELUARGA BAHAGIA

GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kesadaran kaum perempuan untuk menunjukkan peran dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bukti memiliki tugas dan tanggung jawab setara dengan kaum laki-laki semakin menarik untuk diperbincangkan, khususnya oleh perempuan. Salah satu alasan yang mendasari adalah berkembangnya keanekaragaman pemenuhan kebutuhan keluarga, yang tidak saja cukup ditopang oleh laki-laki. Kondisi seperti ini membangkitkan kesadaran bahwa perempuan memiliki peluang untuk ikut berperan menghidupi keluarga, meringankan beban laki-laki (suami). Akibatnya terjadi perubahan budaya (*cultural changes*) dan orientasi kehidupan (*life orientation*) kaum perempuan. Semula terbatas mengurus kegiatan bersifat domestik seperti merawat anak, menyediakan makan dan minum, mencuci pakaian, dan membersihkan halaman rumah. Setelah ada peluang perempuan ikut serta dalam peran publik, seperti keterlibatan dalam sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya. Aksi tersebut menjadi pertanda ada dorongan kuat meningkatnya peran perempuan sebagai wujud tuntutan kesetaraan gender.

Sejarah panjang telah banyak mengungkap bahwa perempuan mengalami keterlemparan peran (*passing out*) dari pergumulan kehidupan sosial, seakan tidak ada tempat layak buat berkarya, semua hanya buat kaum laki-laki yang dipahami lebih *absah* berkarya di luar rumah (ranah publik). Keberhasilan peran laki-laki sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada keterlibatan peran yang besar dari kaum perempuan, meskipun hanya terbatas dari lingkungan rumah tempat tinggal (ranah domestik).

Rendahnya kontekstualisasi pemahaman teks-teks agama dengan tuntutan dunia baru, menjadi salah satu alasan untuk melakukan pembenaran terhadap marjinalisasi peran perempuan yang telah tumbuh dan berkembang menjadi tradisi budaya yang sangat merugikan bagi pengembangan potensi perempuan. Akibatnya pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam, lebih-lebih dalam bentuk praktik keberagamaan dianggap ikut bertanggung jawab terhadap penderitaan, subordinasi dan inferioritas (ketertindasan) hak-hak asasi kaum perempuan.

Perlu dicari jawabannya bagaimana menumbuhkan kesadaran peran yang berujung pada terciptanya kesetaraan gender, termasuk memberikan sosialisasi bagaimana peran agama dalam menjelaskan upaya meningkatkan peran perempuan. Sosialisasi dilakukan tidak saja kepada kaum perempuan tetapi juga kepada kaum laki-laki. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya pemahaman laki-laki dari aspek keagamaan mempengaruhi laki-laki dalam memosisikan perempuan tidak terbatas berperan sebagai ibu rumah tangga yang senantiasa tunduk kepada kebijakan laki-laki. Keduanya menempatkan pada hubungan fungsional (*causality*) yang saling melengkapi (A. Karim, 2005).

Kajian Agama

Kata gender yang berasal dari "gender" dapat diartikan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Jika dikaitkan dengan kata kesetaraan menjadi kesetaraan gender, diartikan suatu keadaan di mana laki-laki dan perempuan saling memahami adanya perbedaan kelamin tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi melainkan untuk memosisikan sikap yang saling melengkapi (*complementer*), sehingga tidak ada sikap marginalisasi ataupun rasa superior diantara keduanya. Sebaliknya, perbedaan karakteristik menjadi sebuah kebutuhan untuk membangun keharmonisan keluarga.

Agama (Islam) mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran; 36), baik dalam hal fisik, dan sifat. Struktur fisik perempuan yang memiliki alat-alat reproduksi (melahirkan, menyusui, dan menstruasi), sifat-sifat kelemahan, kelembutan, kecantikan, emosional, dan keibuan semuanya tidak dimiliki oleh laki-laki yang mempunyai kekuatan, keteguhan, dan keperkasaan yang berbeda dengan perempuan. Pada sisi lain agama (al-Qur'an) juga mengisyaratkan adanya perbedaan dalam beberapa persoalan, misalnya hak waris, disebutkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan (QS. An-Nisa'; 11). Dalam masalah kesaksian, laki-laki memiliki nilai dua kali lipat ketimbang kesaksian perempuan (QS. Al-Baqarah; 282). Proses penyelesaian akhir jika terjadi konflik rumah tangga seperti istri tidak taat (*nusyuz*) atau meninggalkan rumah tanpa izin, kewenangan dominan diberikan kepada pihak suami untuk memberi tindakan dalam tiga tahap, pemberian nasehat atau teguran, pisah tidur, dan memukul dengan nuansa mendidik (QS. An-Nisa'; 34). Demikian juga dalam masalah perceraian, laki-laki memiliki hak *talak* mutlak yang tidak bisa dimiliki oleh perempuan, seperti diuraikan dalam Surat Al-Baqarah ayat (226-231).

Selain perbedaan, al-Qur'an juga memberikan kesamaan norma diantara laki-laki dan perempuan, seperti peluang berprestasi dalam menjalankan syariat (QS. An-Nahl; 97), penghargaan dari Allah bagi yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan (QS. Al-Mujadilah; 11), serta peluang menjadi pimpinan dan seterusnya. Adanya beberapa perbedaan (*distinctions*) antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk diarahkan pada pembedaan (*discrimination*). Kenyataan yang demikian merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Penjelasan Al-Qur'an merupakan pengungkapan yang menggambarkan realitas sebenarnya, sehingga tidak dipahami al-Qur'an dengan nyata telah melegitimasi diskriminasi laki-laki dan perempuan.

Tuntutan perubahan dan kondisi sosio kultural kadang mempengaruhi pola berfikir seseorang dalam menafsirkan teks al-Qur'an, sehingga terjadi perbedaan hasil penafsiran yang membawa dampak tersendiri bagi perilaku masyarakat. Penafsiran al-Qur'an ayat 34 Surat *al-Nisa'* misalnya, bahwa *kaum laki-laki bertanggungjawab atas kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara*

diri ketika suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memelihara mereka. Beberapa mufasir menjelaskan kata bertanggungjawab (*qonwamuna*) pada ayat tersebut adalah kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, atau laki-laki lebih superior ketimbang perempuan. Dalam hal ini Imam Al-Nawawi (Hamdani Anwar, 2004), menguraikan kelebihan posisi laki-laki atas perempuan karena laki-laki memiliki kesempurnaan, matang dalam perencanaan, kemampuan penilaian yang lebih tepat dan rasional, kekuatan yang lebih baik untuk berbuat. Oleh karena itu, laki-laki diberi tugas istimewa dari pada perempuan sebagai nabi, imam, wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, menegakkan syiar, kewajiban berjihad, salat jum'at, dan lain sebagainya.

Senada dengan Al-Nawawi, Al-Thabari menafsirkan kata *qonwamuna*, bahwa laki-laki bertanggungjawab atas perempuan dalam hal pendidikan, pembimbingan, pembinaan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ruhani maupun jasmani, *ukhrawi* maupun *duniawi*. Demikian juga Imam Zamakhsari menjelaskan bahwa kaum laki-laki mempunyai kewajiban untuk *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap perempuan dan laki-laki, seperti yang dilakukan penguasa kepada rakyat.

Mufasir lain tidak sependapat dengan penjelasan tersebut, Fazlur Rahman misalnya (Hamdani Anwar, 2004), menjelaskan bahwa laki-laki bertanggungjawab atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain sebab laki-laki memberi nafkah dari sebagian hartanya. Keterangan ini dikaitkan dengan *fungsi*, artinya tanggungjawab itu dikaitkan dengan fungsi memberi nafkah. Jika istri di bidang ekonomi memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan stabilitas dalam berkeluarga maka hal ini akan mengurangi sifat keunggulan laki-laki. Demikian juga Aminah Wadud Muhsin yang mendukung pendapat Fazlur Rahman dengan alasan yang relatif sama, dengan tambahan jika laki-laki tidak memiliki kriteria seperti yang ditetapkan al-Qur'an, maka tidak berhak menyandang keunggulan tersebut.

Pendapat agak berbeda dari Ali Asghar Engineer, menurutnya kata *qonwamuna* disebutkan sebagai pengakuan atas realitas keadaan kaum perempuan saat turunnya wahyu yang memiliki posisi rendah. Perempuan saat itu hanya difungsikan dalam pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki pada pekerjaan publik yang hasilnya untuk kepentingan keluarga. Menurut Asghar kata *qonwamuna* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif. Andai kata keunggulan laki-laki dimaksudkan berlaku untuk kapan dan di mana saja dan dalam kondisi apa saja, maka pernyataannya menggunakan istilah yang normatif, sehingga keunggulan laki-laki akan berlaku selamanya, namun karena kenyataannya tidak mempergunakan istilah normatif berarti keunggulan laki-laki itu bersifat fungsional.

Dapat dimengerti bahwa munculnya penafsiran yang bias gender seperti diuraikan di muka menurut Nasaruddin (2001) disebabkan karena beberapa hal, antara lain *pertama*, belum jelasnya perbedaan antara sex dan gender dalam

mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. *Kedua*, pengaruh kisah-kisah *israiliyat* yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. *Ketiga*, metode penafsiran yang selama ini digunakan, masih banyak mengacu kepada pendekatan tekstual bukan kontekstual, sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaidah oleh *jumhur* ulama bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumuman *lafadz*, bukan kekhususan sebab. *Keempat*, kemungkinan lainnya, pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang berbasis gender, sehingga al-Qur'an seolah-olah hanya berpihak pada laki-laki yang mendukung budaya patriarki.

Kajian Para Analis Gender

Ada banyak kerangka kerja (model) untuk mengkaji permasalahan gender, antara lain yang disampaikan oleh Sara Longwe, seorang konsultan gender dan pembangunan berkebangsaan Zambia ini menawarkan konsep mengenai pemberdayaan perempuan. Menurutnya, pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan peran perempuan untuk mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki, dan berpartisipasi secara setara di dalam pembangunan guna mencapai kontrol terhadap pemanfaatan faktor-faktor produksi (Formasi, 1988).

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai upaya mendorong perempuan dapat mengontrol kehidupannya, dapat menentukan agenda kegiatannya, dapat mengembangkan keterampilannya secara optimal dan mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri (Saparinah Sadli, 2000).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual. Selain merupakan proses, pemberdayaan perempuan juga merupakan hasil, yakni perempuan menjadi manusia yang mempunyai kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupannya sendiri. Menurut Longwe, kesetaraan (*equality*) tidak hanya terbatas pada sektor-sektor yang konvensional dalam masyarakat, yakni kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Persoalannya sistem analisis ini memiliki kelemahan, karena hanya memfokuskan pada bidang-bidang kehidupan sosial dari pada peran kesetaraan perempuan dalam setiap proses pemberdayaan.

Longwe menawarkan lima level kesetaraan (*equality*) sebagai dasar kriteria untuk menilai tingkat pemberdayaan perempuan dalam setiap bidang kehidupan yang sebenarnya dapat diurai lebih jauh dengan melihat aspek kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan. Kelima level tersebut adalah: (1) Kontrol, Acuan kriteria kontrol menggunakan ada tidaknya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan atas pemanfaatan faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat terhadap fasilitas keluarga. (2) Partisipasi, diartikan sebagai keterlibatan perempuan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan

keluarga. (3) Penyadaran, merupakan pemahaman terhadap perbedaan peran sex dan peran gender. Peran gender bersifat kebudayaan dan dapat diubah. Sedangkan peran sex bersifat kodrat. Oleh karenanya perlakuan peran gender harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang tidak ada dominasi diantara keduanya. (4) Akses, dimaksudkan sebagai peluang memiliki dan memanfaatkan faktor-faktor produksi dan fasilitas lain di lingkungan keluarga haruslah setara antara perempuan dan laki-laki, sehingga menjamin adanya kesetaraan dalam menggunakan kesempatan. (5) Kesejahteraan, indikator kesejahteraan adalah tingkat terpenuhinya kebutuhan material perempuan dalam hal *supply* makanan, pendapatan dan pelayanan kesehatan relatif sama dengan yang berlaku untuk laki-laki, sehingga terjadi kesetaraan antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai seorang muslim sudah pasti tidak ingin larut dalam pemaknaan dan pengembangan gender yang tidak berdasar dari sumber-sumber islami. Juga, tidak ingin terpasung dalam pemahaman teks-teks agama yang tertutup, tidak memberikan ruang untuk pengembangan pemberdayaan perempuan. Solusi terbaik adalah melakukan kajian oleh tokoh agama (Islam) bersama para pakar untuk melahirkan desain pengembangan gender secara islami. Kajian dilakukan secara obyektif proporsional antara peran laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan kajian yang tidak bias gender. Selanjutnya keberhasilan sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan dalam mewujudkan kesetaraan gender diantara laki-laki dan perempuan (suami-istri). Atas dasar ini, sukses kesetaraan gender akan dapat mudah dicapai.

KONSEP KELUARGA SAKINAH

Ada kecenderungan yang berbeda dalam membangun keluarga sakinah oleh beberapa kelompok masyarakat. Sebagian memahami bahwa, dengan memenuhi semua kebutuhan materi anggota keluarga akan mampu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan. Karenanya, kelompok masyarakat yang berfaham seperti ini setiap harinya disibukkan dengan kegiatan, bagaimana bisa mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya agar dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga, sehingga dengan mudah mencipta kepuasan dengan harapan akan berakhir dengan ketentraman di lingkungan keluarga.

Berbeda dengan kelompok lainnya yang meyakini bahwa, keluarga sakinah berarti upaya meningkatkan kualitas spiritual. Anggota keluarga diajak memperbanyak melakukan amalan-amalan yang bersifat spiritual seperti puasa, berdzikir, membaca do'a-do'a ataupun lainnya dengan harapan tingginya tata-laku spiritual akan memberikan ketenangan tersendiri bagi semua anggota keluarga yang pada akhirnya tercipta kepuasan dan ketentraman.

Setelah dihadapkan pada kenyataan di masyarakat, pola pandang pertama tidak dapat menjamin bahwa kecukupan materi membuat keluarga menjadi semakin tenang dan tentram. Banyak kasus menunjukkan, limpahan harta benda tidak dijadikan sebagai media membuat ketenangan yang dibingkai dengan rasa syukur kepada Dzat yang memberi, melainkan dijadikan sebagai simbol status sosial yang tak memiliki batas kepuasan, sehingga menjadi pemicu munculnya keretakan keluarga dan berakhir dengan perceraian. Sebaliknya pada pemahaman kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengusir salah seorang Sahabat yang sedang berdzikir di masjid untuk segera bekerja, sementara istri dan anaknya menunggu di rumah dalam keadaan kelaparan.

Sudah tentu Khalifah Umar sedang tidak dalam keadaan benci kepada orang berdzikir, tetapi beliau memosisikan persoalan dari dua pola pandang membangun keluarga sakinah secara proporsional antara kegiatan yang harus segera dilakukan yakni mencari nafkah untuk kebutuhan materi dan kegiatan spiritual untuk kepentingan do'a dan bersyukur. Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai keluarga sakinah, *pertama* ada keinginan kuat menciptakan ketenangan dan ketentraman, segala kepemilikan dan tatalaku anggota keluarga menjadi alat untuk menuju ketenangan. *Kedua*, ada komunikasi yang menunjukkan saling kasih sayang di antara semua anggota keluarga. *Ketiga*, senantiasa melakukan refleksi diri sebagai kontrol sikap dan perilaku pada hari-hari berikutnya. Uraian itu merupakan isyarat al-Qur'an Surat Arrum ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Pra Syarat Keluarga Sakinah

Ayah dan ibu menjadi sumber panutan tata laku semua anggota keluarga memang benar adanya, termasuk kemampuan memberikan pendidikan kepada anak dan semua anggota keluarga lain yang tinggal bersama. Tetapi keterbatasan hubungan interaksi antara anggota keluarga sehubungan dengan kegiatan keseharian yang tidak selalu bersama, mengharuskan ada upaya pengawasan agar anak tidak masuk dalam perangkat kelompok yang tidak bermoral baik. Pengawasan anak di lingkungan pergaulan baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat merupakan tugas yang tidak dapat diabaikan. Anak dengan perilaku baik menjadi penopang terbentuknya keluarga sakinah, disamping ayah dan ibu layak menjadi sumber ketauladanan, sebagaimana rumusan pra syarat menjadikan keluarga sakinah sesuai Hadits Nabi: *"Empat macam kebahagiaan akan dinikmati seseorang, manakala isterinya shalihah, anak-anaknya abrar (baik), lingkungannya atau pergaulannya baik dan manakala rizkinya tersedia di tempat."*

Dari Hadits tersebut terdapat empat pra syarat untuk menjadi keluarga sakinah: *pertama*, suami isteri yang shaleh dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan masyarakatnya. Pada diri terdapat perbuatan yang dapat menjadi contoh tauladan (*uswatun hasanah*). *Kedua*, anak-anaknya *abrar* (baik) dalam pengertian berkualitas, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, serta produktif dan kreatif, sehingga kelak dapat hidup berdikari. *Ketiga*, pergaulan baik dalam pengertian pergaulan anak-anak dan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan dan bertetangga yang baik dan supel tanpa mengorbankan prinsip hidupnya. *Keempat*, rizkinya berkecukupan dapat membiayai kehidupan keluarga, baik untuk sandang, pangan dan papan, maupun untuk biaya pendidikan dan ibadahnya.

Pada akhirnya, terjawab bahwa terpenuhinya kebutuhan materi tidak jaminan membuat ketenangan keluarga, bimbingan spiritual oleh orang tua serta ketauladanan berperilaku menjadi kata kunci untuk membentuk keluarga sakinah.

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Dalam banyak hal perempuan belum dilibatkan secara maksimal, karena pengaruh pemahaman subordinatif terhadap status perempuan, sehingga memasung kreativitas yang sesungguhnya memiliki potensi besar dalam ikut serta mengembangkan masyarakat (*social development*). Permasalahan yang sering muncul adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku pengembang dalam mewujudkan bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan partisipatif. Berbagai kegiatan masih banyak bersifat datang dari pihak pengembang (*top-down*) bukan membangun atas dasar kemauan dan kesadaran dari masyarakat (*bottom-up*).

Jika melihat potensi, partisipasi perempuan seharusnya mendapat tempat yang signifikan dalam membangun masyarakat. Mengingat kebutuhan masyarakat seperti kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, belum semua dapat terpenuhi secara optimal meskipun pemerintah telah membuat kebijakan yang demokratis. Melalui partisipasi aktif, perempuan sesungguhnya dapat mengekspresikan kepeduliannya maupun melakukan kontrol sosial, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi untuk mengisi dan mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Yang pasti, partisipasi menjadi alternatif untuk mendesentralisasi model-model pembangunan, yaitu pembangunan rakyat dengan partisipasi aktif dari pihak mereka (Fernandes, 1993). Artinya, rakyat ikut terlibat dalam pengalaman-pengalaman tertentu melalui proses partisipasi untuk mencoba model-model pembangunan alternatif tersebut.

Di sisi lain, pemerintah memerlukan adanya *check and balances* dari warga termasuk perempuan, untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerja yang optimal. Warga yang makin sadar dan dewasa dapat memahami kompleksitas berbagai isu pembangunan khususnya masalah sosial di lingkungan mereka, sehingga relatif mudah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Besar kemungkinan, partisipasi perempuan dapat memperkokoh solidaritas sosial dan memberi manfaat dapat memperkecil jurang pemisah antara berbagai kelompok di masyarakat, seperti kelompok kaya dan miskin, sehingga memperkecil gerakan-gerakan separatis dari kelompok yang kecewa maupun pengaruh dari luar yang dapat merusak solidaritas sosial. Partisipasi warga termasuk perempuan sebenarnya membawa serta prinsip hak asasi manusia, untuk mendapatkan kesempatan melakukan ekspresi diri dalam membangun lingkungan daerah (Thamrin, 2002). Pada akhirnya mampu mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang maju (*civil society*) untuk menciptakan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Masyarakat tidak lagi memandang partisipasi sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi layanan dasar yang harus diterima sebagai bagian integral untuk kepentingan menata kehidupan mereka. Fenomena jumlah

penduduk perempuan yang lebih besar dari pada laki-laki (BPS, 2013), apa bila diberdayakan dengan baik, maka kaum perempuan akan memiliki arti yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat.

Partisipasi menjadi peluang untuk melakukan perubahan status keluarga, apalagi dilakukan melalui investasi pendidikan non formal yang dapat memberikan peluang tambahan penghasilan seperti meningkatkan keterampilan. Keberadaan pendidikan nonformal lahir sebagai alternatif keterbatasan sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah, seperti kurangnya relevansi materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya fleksibilitas, dan pembiayaan maupun kebutuhan sarana-prasarana yang relatif besar (Sudjana, 2004).

Penyelenggaraan pendidikan, semisal pendidikan keterampilan melalui pendidikan non formal dipandang memiliki beberapa keunggulan dengan alasan biaya relatif lebih murah karena program pendidikan dilakukan dalam waktu relatif singkat untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu. Selain itu memiliki tingkat relevansi yang tinggi, karena program pendidikan non formal sering memberikan hasil yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan program pendidikan formal.

Keunggulan pendidikan non formal seperti diuraikan di atas belum sepenuhnya menjadi program unggulan, sehingga keberadaannya menjadi tuntutan untuk membantu warga meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup. Kajian ini merupakan jawaban untuk mengungkap permasalahan seberapa besar partisipasi perempuan melalui kegiatan pendidikan non formal. Keberadaan pendidikan non formal yang berorientasi pada peningkatan keterampilan kerja guna menambah penghasilan, menjadi sangat penting dikaji sebagai pintu masuk (*entry point*) dalam melihat kebermaknaan aktivitas perempuan pada banyak aspek dalam kehidupan.

Pendidikan Non Formal

Lingkup kegiatan pendidikan non formal memiliki rumusan, tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang berbeda dengan pendidikan formal. Namun terdapat kesamaan terutama pada tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan yang berkeinginan mengembangkan pemahaman, kesadaran, sikap dan keterampilan peserta didik untuk memiliki peluang kerja yang dapat mendatangkan penghasilan sebagai sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarga.

Pendidikan non formal lahir sebagai alternatif keterbatasan sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah (formal), seperti kurangnya relevansi materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya fleksibilitas, dan pembiayaan maupun kebutuhan sarana-prasarana yang relatif besar (Sudjana, 2004). Menurut Sudjana (2004), penyelenggaraan pendidikan, semisal pelatihan keterampilan atau kursus melalui pendidikan non formal, dipandang memiliki beberapa keunggulan antara lain: *pertama*, biaya relatif lebih murah karena program pendidikan dilakukan dalam waktu relatif singkat untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu.

Kedua, memiliki tingkat relevansi yang tinggi, karena beberapa alasan (1) program diselenggarakan atas dasar kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat dan atau untuk memenuhi kebutuhan lembaga tempat peserta didik bekerja; (2) pengorganisasian program pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman belajar dari peserta didik, nara sumber teknis dan sumber-sumber belajar lainnya yang ada di lingkungan setempat; (3) adanya kecocokan antara pendidikan dan dunia kerja, sehingga program pendidikan non formal memberikan hasil baik yang relatif lebih cepat kepada peserta didik dan lulusannya dibandingkan dengan program pendidikan formal.

Keunggulan *ketiga*, pendidikan non formal memiliki program yang fleksibel yang ditandai oleh: (1) adanya program yang beragam dan menjadi tanggung jawab berbagai pihak baik pemerintah, perorangan, ataupun swasta; (2) pengendalian dan pengawasan dilakukan secara lebih sederhana; (3) otonomi dikembangkan pada tingkat pelaksana program dan daerah sehingga dapat mendorong perkembangan program yang beragam sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kondisi tertentu; (4) perubahan atau pengembangan program disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan.

Dalam pengembangan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan non formal dapat dilaksanakan oleh masyarakat, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang dikembangkan oleh kelompok belajar yang dibentuk atas dasar keinginan dan kebutuhan warga untuk mewujudkan tujuan. Salah satunya mampu menguasai keterampilan yang memungkinkan dapat menjadi pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Kelompok belajar selanjutnya diformalkan kelembagaannya dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial bersama Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional.

Karena sifatnya yang belum sepenuhnya independen pengelolaan lembaga mulai dari penetapan pengurus, perencanaan program kerja, pelaksanaan program, dan evaluasi keberhasilan dilakukan oleh anggota melalui musyawarah dengan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Dinas Sosial dan atau pihak lain yang berkompeten, seperti instruktur pendidikan atau pelatihan.

Keterlibatan perempuan dalam PKBM seperti terjadi di Kecamatan Wedarijaksa Pati, yang berpenduduk 58.294 jiwa, dengan komposisi perempuan berjumlah 29.672 jiwa lebih besar dari penduduk laki-laki yang berjumlah 28.622 jiwa (BPS, 2013). Karena jumlah perempuan yang lebih besar dari pada laki-laki, sehingga memungkinkan untuk memberdayakan guna mengurangi beban usia ketergantungan. Pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sangat membantu dalam membuka peluang usaha yang menghasilkan.

Penguasaan keterampilan oleh perempuan dari PKBM menjadi modal awal untuk mengembangkan ke lingkungan yang lebih luas sesuai karakteristik lingkungan tempat tinggal. Sudah tentu, pengembangan keterampilan dilakukan melalui kegiatan pendidikan di masyarakat, tidak melalui kelas atau sekolah formal.

Partisipasi Perempuan

Davis (1977), memberikan pengertian: "*Participation is defined as mental and emotional involvement of person in group situations that encourage to contribute to group goals and share responsibility for them*". Berdasarkan pengertian tersebut, ada tiga pengertian pokok dalam konsep partisipasi, yaitu: (1) keterlibatan mental emosional, (2) adanya kontribusi, dan (3) tanggung jawab. Dalam implementasi, partisipasi dapat berbentuk: memberikan sumbangan berupa sumber daya, yaitu tenaga dan benda yang merupakan bentuk dari kontribusi yang disalurkan. Keterlibatan dalam berbagai usaha penataan dan koordinasi, menjadi wujud keikutsertaan aspek mental dan pola pikir, serta terlibat langsung dalam penyusunan program dan pelaksanaannya yang merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab yang diterima.

Tujuan partisipasi kelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan seperti dirumuskan Mikkelsen (2003), antara lain: (1) agar anggota dapat mengembangkan rencana mereka sendiri, dapat berupa rencana dasar yang menunjukkan struktur kegiatan, atau dokumen naratif, atau sebuah laporan, yang kesemuanya dihasilkan oleh para peserta sendiri melalui proses pendampingan; (2) untuk menciptakan dialog secara seimbang di kalangan para pengambil kebijakan guna memperoleh informasi yang diperlukan melalui komunikasi yang sesuai.

Kajian terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan non formal bisa dipahami dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang dikelompokkan ke dalam tiga bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (*learning activities*), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (*business activities*) dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (*community development activities*).

Partisipasi di bidang pembelajaran (*learning activities*), perempuan mengambil peran sebagai pendamping kelompok. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Wedarijaksa Pati (2012), dalam kegiatan pembelajaran mereka aktif membantu untuk melakukan Kejar Paket dan Keaksaraan Fungsional dengan tujuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat anggota kelompok binaan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, meningkatkan akses masyarakat anggota kelompok binaan terhadap pendidikan dasar, sehingga masyarakat terbebas dari ketertinggalan akibat tidak dapat membaca.

Di bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (*business activities*), perempuan terlibat kegiatan peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Tujuan kegiatan ini, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat mitra, terutama yang berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain, mengadakan pelatihan tentang keterampilan produksi, penanganan pasca panen, pengobatan hasil pertanian/perikanan dan peternakan, pemanfaatan pekarangan, diversifikasi tanaman, pemasaran hasil pertanian/perikanan/peternakan, ketersediaan pangan bagi rumah tangga dan lainnya. Bentuk lainnya, mengadakan pembinaan pertanian sesuai dengan jenis pertanian yang menjadi andalan di daerah kelompok anggota binaan.

Sedangkan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (*community development activities*), peran perempuan diarahkan pada pengadaan dan pemeliharaan sanitasi, penyediaan, distribusi dan pengelolaan air bersih, perbaikan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan pekarangan dan penghijauan. Tujuan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mitra tentang perumahan dan pemukiman sehat, terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat, menciptakan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat bebas dari polusi, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Keberhasilan Pendidikan Non Formal

Berdasarkan kajian teoritis dengan melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan non formal membutuhkan partisipasi perempuan melalui beberapa peran dan kegiatan. *Pertama*, perempuan mampu menunjukkan sikap kontrol kehidupannya (Longwe, 1998). Hal ini diperlihatkan dengan keterlibatannya dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan, meskipun kegiatan ini memberi pengaruh terhadap pengaturan waktu untuk membagi peran guna kepentingan keluarga, pendidikan dan kapan untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, perempuan dapat mengembangkan keterampilan secara optimal sebagai dampak pilihan tindakan yang diambil. Jenis pilihan tindakan berupa pendidikan dan keterampilan, memberikan dampak yang positif terhadap maksimalisasi pengembangan bakat dan potensi.

Ketiga, perempuan mampu menumbuhkan kepercayaan melalui kemampuan diri sebagai hasil pilihan kegiatan yang telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan ekonomi keluarga. Kemampuan memberdayakan potensi lewat pendidikan keterampilan memberikan penilaian yang kuat terhadap kelompok serta masyarakat sekitar bahwa mereka memiliki sumbangan yang berarti bagi perkembangan keluarga setara dengan kaum laki-laki.

Efektivitas partisipasi perempuan dalam mengembangkan pendidikan non formal dapat dilihat: *pertama*, terdapat ruang bagi perempuan untuk memberikan partisipasinya dalam berbagai bentuk kegiatan yang relevan dengan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Kedua, terdapat lembaga atau badan pelaksana kegiatan yang memberikan peluang untuk mengembangkan kegiatan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan dalam setiap implementasi program. *Ketiga*, ada wadah atau lembaga tempat berhimpun yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memberikan partisipasi menurut potensi serta kreativitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Antonio, M. S, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Cetakan III, Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007.
- Ali Fauzi, Ihsan. 1991. *Pemikiran Islam Indonesia Dekade 1980 an*. Jakarta : Prisma, Maret 1991.
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 1999.
- Anton De Grauwe, 2005. *Improving the Quality of Education through School-Based Management: Learning from International Experiences*. Hamburg: International Institute for Education.
- Alaena, Badrun,. NU, *Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Cetakan I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000.
- Aristanto, Eko, *Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. XII th. 2001, Malang : Lembaga Penelitian Universitas Merdeka, 2001.
- Ambary, Muarif, Hasan,. *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu., 2001
- Budairi, Said. *Nabdlatul Ulama, Dari Berbagai Sudut Pandang (Bunga Rampai)*. Jakarta : Lakpesdam, 1994.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Brinessen, van, Martin, *Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Pasca Khittah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an*, dalam Ellyassa K.H. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, LKIS, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Covey, S.R., 1996. Three Roles of Leader in the New Paradigm dalam Hesselbein, F., Goldsmith, M., dan Beckhard, R. (eds). *The Leader Of The Future New Visions, Strategies, and Practices for the Next Era*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2002 .
- Covey, Stephen R., Three Roles of the Leader in the New Paradigm dalam *The Drucker Foundation The Leader of The Future*, (eds.) Frances Hesselbein dkk., San Francisco: Jossey-Bas Publishers, 1996.
- Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill, 1963
- Daradjat, Zakiah, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES, 1983.
- Davis, K.. *Human Behavior At Work, Organizational Behavior*. New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1977.

- Departemen Agama, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta : LP3ES, 1983.
- Daulay, Haidar, Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001.
- Ecip, S Sinansari. *NU Dalam Tantangan (Kumpulan Artikel)*. Jakarta : Al Kautsar, 1989.
- Fernandes, W., dan Tandon, R. (Ed.). *Participatory Reseach and Evaluation*. Penyunting: F.X. Baskara, dkk., *Riset Partisipatoris-Riset Pembebasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., 1993.
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1970.
- House, Peter W. dan Roger D. Shull, *Effective Policy Analysis*, dalam *Handbook Of Public Administration*, James L. Perry (ed.), California: Jossey-Bass Inc., Publishers, 1989.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hunger, J. David, & Thomas L. Wheelen. *Strategic Management*, diterjemhkan oleh: Julianto Agung, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- Ismail, SM., *Pengembangan Pesantren “Tradisional” Sebuah Hipotesis mengantisipasi perubahan Sosial, dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ismail,SM, *Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani* (Ed), dalam *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Jatmiko, RD, *Manajemen Strategik*. Malang: UMM Press, 2003.
- Karim, Abdul, *Perubahan Partisipasi Politik Tokoh Agama (Analisis Aspek Pendidikan Politik pada Masyarakat Pesantren di Kabupaten Pati)*, Jurnal Litbang Kabupaten Pati, Media Informasi Penelitian Pengembangan dan Iptek, Vol. VIII. No. 3, Desember 2012.
- Ki Supriyoko, (2006). *Kesetaraan Pendidikan Negeri dengan Swasta*. <http://www.Pih.Rah.Com/cetak/1002/14 teropong/index.htm>
- Longwe, *Pelatihan Analisis Sosial Gender*. Dalam Laporan Pelaksanaan Pelatihan. Jakarta : Forum Kerja Sama Pengembangan Koperasi (Formasi), 1998.
- Mas’ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren, Perbelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Masykhur, Anis, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren, Mengusung Sistem Pesantren sebagai Sistem Pendidikan Mandiri*, Jakarta: Barnea Pustaka, 2010.

- Muthohar, Ahmad, Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Arus Reformasi, dalam Ismail, SM dan Abdul Mukti (eds), *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- Muluk, M.R. Khairul, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan, Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Cetakan I, Ygyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muktamar NU ke 32, 2010. *Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Maudhu'iyah*, tanggal 22-29 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang Makasar.
- Muktamar NU ke 31, *Masail Diniyah Al-Maudhu'iyah Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail*, tanggal 29 Nopember-01 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah, 2004.
- Mikkelsen, Britha, *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*, Penerjemah: Matheos Nalle, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Mahfudh, Sahal. 1992. *Dakwah dan Permasalahannya*. Semarang : Suara Merdeka, 22 Mei 1992.
- _____, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional 14-16 Oktober 1990, pernah disampaikan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1990.
- _____, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Muchsin, M., *Kebangkitan Islam di Tengah Pergeseran Nilai*. Semarang :_Majalah Theologia Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang; Juli 1991.
- Nata, Abudin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ng., Al-Zastrouw, *Reformasi Pemikiran*. Yogyakarta : LKPSM, 1998.
- , *Konsepsi Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Lakpesdam, 1994.
- , *Laporan Diskusi Teknis Pengembangan Sistem dan Kebijakan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bappenas, 1990/1991.
- , *Konsepsi Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lakpesdam, 1994.
- Rowley, Chris, Keith Jackson, *Human Resources Management: The Key Concepts*, diterjemahkan Elviyola Pawan dalam, *Manajemen Sumber Daya Manusia: The Key Concepts*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta : Kanisius, 1997.

- Hisyam, Muhamad, *Metodologi Penelitian Agama*, Materi Diklat Tenaga Fungsional Peneliti, Jakarta: LIPI, Tidak diterbitkan, 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*, Bandung : Mizan, 1991.
- _____, Jalaluddin. *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan, 1989.
- Sudjana, H.D, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Falah Production, 2004.
- Suryadi, Ace. *Proyeksi Tenaga Kerja Keluaran Pendidikan*. Laporan Diskusi Teknis Pengembangan Sistem dan Kebijakan Sumberdaya Manusia. Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia dan Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia, BAPPENAS, 1991.
- Saragih, Sabastian. *Membedah Perut LSM*. Jakarta : Puspa Swara, 1993.
- Suparlan, *Beberapa Temuan Hasil Penelitian Tentang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)*, diperoleh dari: <http://www.suparlan.com/>, 2007.
- _____, *Membangun Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Siagian, Sondang P., *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Smith, Wilfred C. *Memburu Makna Agama*, diterjemahkan Landung Simatupang, Bandung: Mizan, 2004.
- Thamrin dan Sawedi Muhammad, 2002. *Babak Baru Hubungan Negara Dengan Warga : Nilai Strategis Partisipasi Warga Menuju Local Good Governance (Perbandingan Beberapa Negara)*, Makalah, Dibawakan dalam Workshop Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal, Jakarta: Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI).
- Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Edisi 4. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Wilfred C. Smith, *The Meaning and End of Religion*, diterjemahkan Landung Simatupang, *Memburu Makna Agama*, Bandung: Mizan, 2004.
- Widodo, Joko, M.S., *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia, 2007.

Biodata Penulis



Abdul Karim Lahir di Pati, anak seorang petani yang sekaligus sebagai guru ngaji di kampung, ayah Mansur dan Ibu Siti Khafsa merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara. Menikah dengan Faizatul dikaruniai empat orang anak: Muhammad Zaim, Aliyatul Fikriyah, Mabrurrotul Mustafidah, dan Azimatus Sa'diyah.

Pendidikan dimulai dari Madrasah Wajib Belajar (MWB) setingkat MI atau SD lulus tahun 1974, melanjutkan ke Madrasah Diniyah- Tsanawiyah-Aliyah lulus 1982, sambil memperdalam ilmu-ilmu agama di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Pati. S1 ditempuh di IKIP Negeri Malang sambil memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, mengambil S2 di UNNES Semarang dan S3 di UNINUS Bandung.

Setelah lulus S1 mengajar sebagai guru MAN 1 Pati dari tahun 1987 – 1996, guru SMA 1 Juwana tahun 1996-2001, selain mengajar di SMA sejak 1989 menjadi dosen luar biasa di STAIN Kudus. Lulus S2 tahun 2002 kemudian mutasi penuh sebagai dosen tetap di STAIN Kudus hingga sekarang. Aktif mengajar di jenjang S1 dan jenjang S2, di STAIN Kudus, dan pernah di IPMAFA Margoyoso serta di Program Pascasarjana INSURI Ponorogo Jawa Timur.

Tulisan yang dipublikasikan: Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Otonomi Pendidikan, Telaah dari Perspektif Wawasan Kebangsaan (Jurnal ADDIN STAIN Kudus, Edisi Juli-Desember, 2003); Memformat Program Unggulan Melalui Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Keberagamaan (Jurnal ADDIN STAIN Kudus, Edisi Januari-Juni 2005); Perilaku Salat dan Etos Kerja (Jurnal Empirik STAIN Kudus Edisi Januari-Juni, 2005); Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Jurnal Empirik STAIN Kudus, Edisi Januari-Juni 2006); Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam (Jurnal LITBANG Kabupaten Pati Vol.II No. 5 Desember 2006); Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Kemampuan Kognisi (Jurnal Edukasia Tarbiyah STAIN Kudus, Edisi Januari-Juni 2007); Demokratisasi Dalam Sistem Pendidikan (Analisis Proses Pembelajaran Dalam Kontek Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah (Jurnal Edukasia Tarbiyah STAIN Kudus, Edisi Januari-Juli, 2008); Efektivitas Partisipasi Perempuan Pada Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati (Jurnal Inferensi IAIN Salatiga, Terakreditasi, Juni 2017).

Buku: Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, STAIN Kudus 2007; Konsep 99 Kecerdasan Tarbiyah Manusia Dalam Al-Qur'an (Editor), Penerbit: Sahabat

2011; Humanistic Education And Democratization Of Islamic Education For Civil Society (Editor), Penerbit: Sahabat 2011. Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup, Penerbit: Pustaka Ifada 2012. Aswaja Nahdliyah Konsepsi, Amaliyah dan Pengembangan, Penerbit: PCNU-Pati 2012. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Penerbit: Nora Media Enterprise 2015.

Kontak Person : 08122849289

Email : akarim_4alp@yahoo.com

Memiliki modal ilmu leadership dan management saja nampaknya belum cukup untuk membuat seseorang sukses dalam memimpin. Peka terhadap perubahan sosial adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan sukses. Buku yang ada dihadapan para pembaca ini adalah contoh bagaimana kepekaan sosial itu dibangun dan kemudian direkonstruksi menjadi sebuah gagasan yang solutif bagi kehidupan bersama.

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
Ketua PWNU Jateng

Di tengah krisis multidimensi yang melanda negeri ini, kita perlu memahami dengan baik perihal keagamaan, kebangsaan dan pendidikan supaya kita menjadi bangsa yang agamis terdidik dan mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi sehingga tidak mudah dipengaruhi kelompok yang ingin memecah belah bangsa kita, untuk hal itu rasanya sangat tepat sekali dengan terbitnya buku ini. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama bagi generasi muda. Amin yarobbal ala min.

KH. M. Aniq Muhammadun
Rois Syuriyah PCNU Pati

Perubahan merupakan hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Ia telah ada, hadir, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Pilihannya adalah dipengaruhi oleh perubahan atau mempengaruhi perubahan. Buku karya Dr. H. Abdul Karim, M.Pd ini menawarkan perspektif kritis-konstruktif agar kita tidak terseret oleh arus perubahan. Paparan demi paparan di buku ini berisi pemikiran dan strategi dalam menghadapi perubahan. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh berbagai pihak--dari dunia pendidikan, sosial dan keagamaan--untuk memperkaya perspektif dalam dinamika perubahan yang ada.

Dr. Ngainun Naim
Dosen IAIN Tulungagung, Jawa Timur



Kataba Group
Jl. Lapangan Olah Raga Ds. Waturoyo
Margoyoso Pati
Rt: 01/04 Depan Masjid Baitul Izzah
Telp: 082276951949/082313222876 (WA)
E-mail: katabakreatif16@gmail.com
Fb. Kataba.

ISBN 978-602-50213-0-5

